



BPHN

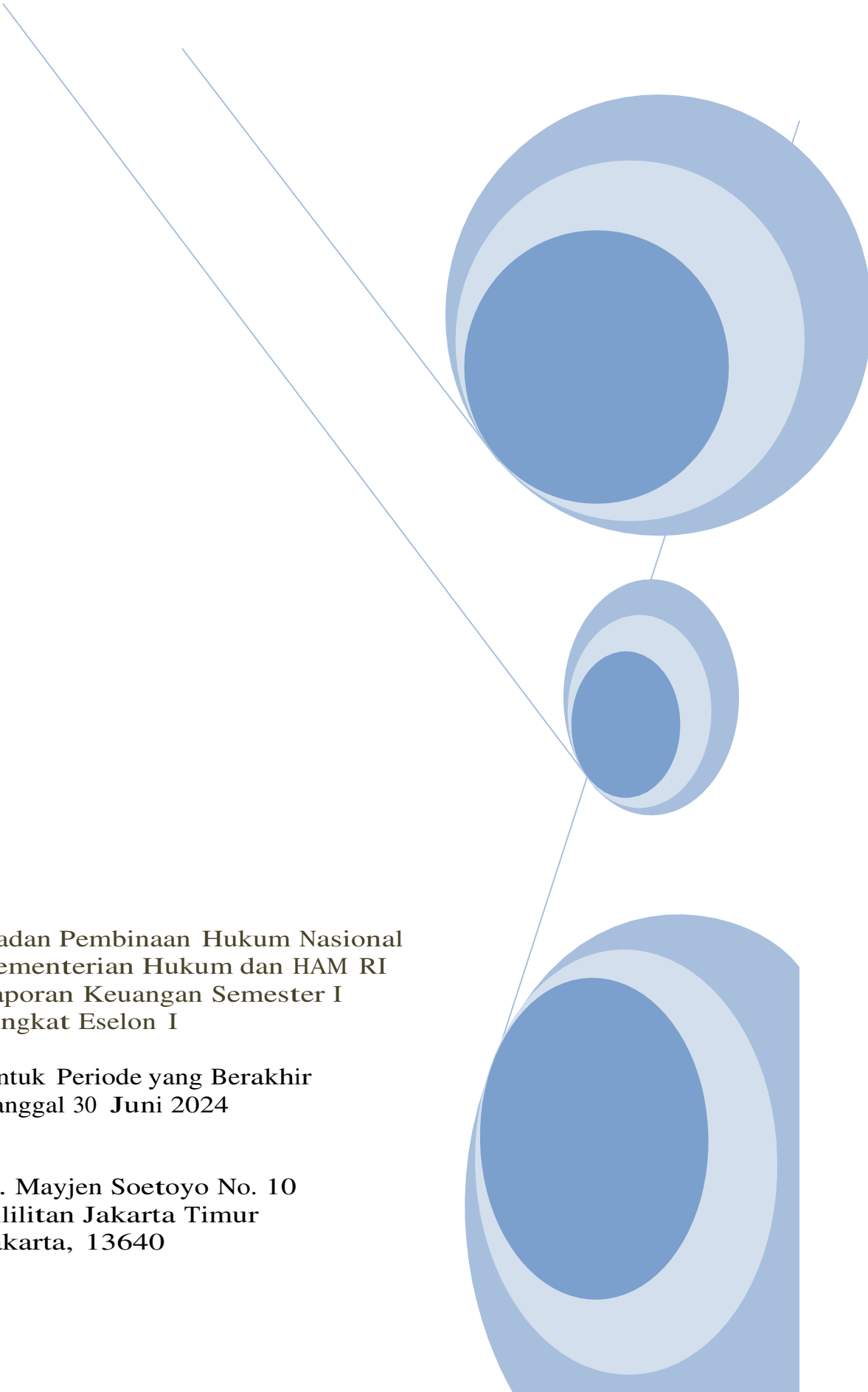
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



LAPORAN KEUANGAN BPHN ESELON I SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

JL. MAYJEND SOETOYO NO. 10 CILILITAN JAKARTA TIMUR



**Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan HAM RI
Laporan Keuangan Semester I
Tingkat Eselon I**

**Untuk Periode yang Berakhir
Tanggal 30 Juni 2024**

**Jl. Mayjen Soetoyo No. 10
Cililitan Jakarta Timur
Jakarta, 13640**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pembinaan Hukum Nasional. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).

Jakarta, 23 Juli 2024

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Disandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekadjahjana, S.H.,M.Hum
NIP. 19710501 199303 1 001



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	2
Pernyataan Tanggung Jawab	3
Ringkasan	4
I. Laporan Realisasi Anggaran	6
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	8
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	9
V. Catatan atas Laporan Keuangan	
A. Penjelasan Umum	10
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	25
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	49
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	63
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	73
F. Pengungkapan Penting Lainnya	80
VI. Lampiran dan Daftar	

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI tingkat Eselon I selaku UAPPA-EI yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 23 Juli 2024

Kepala,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H.,M.Hum

NIP.19710501 199303 1 001

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 30 Juni 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode sampai dengan 30 Juni 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada 30 Juni 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp246.795.043 atau mencapai 0 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0.

Realisasi Belanja Negara pada 30 Juni 2023 adalah sebesar Rp55.260.141.666 atau mencapai 47 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp116.989.153.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 30 Juni 2024. Nilai Aset per 30 Juni 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp397.409.126.808 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp1.468.465.219; Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0; Aset Tetap (neto) sebesar Rp395.870.690.529; dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp69.971.060.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp3.431.277.473 dan Rp393.977.849.335.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk

periode sampai dengan 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp27.547.806, sedangkan jumlah beban adalah sebesar Rp60.107.757.862 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai (Rp60.080.210.056). Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp187.646.313 dan Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar (Rp59.892.563.743).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp399.075.137.055 ditambah Defisit-LO sebesar (Rp59.892.563.743) kemudian ditambah/dikurangi dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan transaksi antar entitas senilai Rp54.795.276.023 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 30 Juni 2024 adalah senilai Rp393.977.849.335.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TA 2024		% thd Angg	TA 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	-	246.795.043	0	14.594.200
JUMLAH PENDAPATAN		-	246.795.043	0	14.594.200
BELANJA					
Belanja Operasi					
Belanja Pegawai	B.2	18.093.031.000	10.067.415.127	56	9.208.304.964
Belanja Barang	B.3	98.671.794.000	44.969.104.039	46	46.934.849.280
Belanja Modal	B.4	224.328.000	223.622.500	100	1.797.502.968
JUMLAH BELANJA		116.989.153.000	55.260.141.666	47	57.940.657.212

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
NERACA
PER 30 JUNI 2024 DAN 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1	1.239.570.000	0
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.2	112.765.478	0
Piutang Bukan Pajak	C.3	0	59.148.730
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	C.4	0	(295.744)
Persediaan	C.5	116.129.741	181.076.570
Jumlah Aset Lancar		1.468.465.219	239.929.556
ASET TETAP			
Tanah	C.6	356.165.357.000	356.165.357.000
Peralatan dan Mesin	C.7	25.791.465.257	26.605.556.857
Gedung dan Bangunan	C.8	62.954.462.581	62.954.462.581
Aset Tetap Lainnya	C.9	1.171.558.942	1.123.767.442
AKUMULASI PENYUSUTAN	C.10	(50.212.153.251)	(47.938.133.273)
Aset Tetap yang Belum Diregister	C.11	0	0
Jumlah Aset Tetap		395.870.690.529	398.911.010.607
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.12	4.254.296.560	4.234.323.600
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.13	0	589.375.493
Aset Lain-Lain	C.14	731.141.600	430.984.260
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	C.15	(4.915.467.100)	(4.615.309.760)
Jumlah Aset Lainnya		69.971.060	639.373.593
JUMLAH ASET		397.409.126.808	399.790.313.756
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.16	1.699.078.942	687.628.955
Utang yang Belum Ditagihkan	C.17	487.827.887	0
Pendapatan Diterima di Muka	C.18	0	27.547.806
Uang Muka dari KPPN	C.19	1.239.570.000	0
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.20	4.800.644	0
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		3.431.277.473	715.176.761
JUMLAH KEWAJIBAN		3.431.277.473	715.176.761
EKUITAS			
Ekuitas	C.21	393.977.849.335	399.075.137.055
JUMLAH EKUITAS		393.977.849.335	399.075.137.055
JUMLAH EKUITAS		393.977.849.335	399.075.137.055
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		397.409.126.808	399.790.313.816

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	27.547.806	9.358.395
JUMLAH PENDAPATAN		27.547.806	9.358.395
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	11.219.962.835	10.267.024.492
Beban Persediaan	D.3	240.445.993	198.007.057
Beban Barang dan Jasa	D.4	35.018.614.922	36.937.200.645
Beban Pemeliharaan	D.5	1.726.708.168	1.828.494.749
Beban Perjalanan Dinas	D.6	8.876.422.610	10.706.081.607
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	3.025.899.078	2.956.525.650
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.8	(295.744)	0
JUMLAH BEBAN		60.107.757.862	62.893.334.200
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(60.080.210.056)	(62.883.975.805)
KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.9		
Surplus Pelepasan Aset Non Lancar		115.487.000	0
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar		115.487.000	0
Beb Defisit Selisih Kurs		0	0
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		72.159.313	14.594.200
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		72.159.313	14.594.200
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
SURPLUS /DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		187.646.313	14.594.200
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(59.892.563.743)	(62.869.381.605)
POS LUAR BIASA	D.10		
Pendapatan PNB		0	0
Beban Perjalanan Dinas		0	0
Beban Persediaan		0	0
SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA		0	0
SURPLUS/DEFISIT LO		(59.892.563.743)	(62.869.381.605)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR
30 JUNI 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
EKUITAS AWAL	E.1	399.075.137.055	400.237.667.014
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(59.892.563.743)	(62.869.381.605)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI	E.3	0	0
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	E.4.1	0	0
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	E.4.2	0	0
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI	E.4.3	0	0
SELISIH REVALUASI ASET TETAP	E.4.4	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	E.4.5	0	0
LAIN-LAIN	E.5	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.6	54.795.276.023	57.479.635.336
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	E.7	(5.097.287.720)	(5.389.746.269)
EKUITAS AKHIR	E.8	393.977.849.335	394.847.920.745

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pembinaan Hukum Nasional

*Dasar Hukum
Entitas dan
Rencana
Strategis*

RENCANA STRATEGIS BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 41 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, BPHN mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, BPHN menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran di Bidang Pembinaan Hukum Nasional
2. Pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum, Perencanaan Hukum, Penyuluhan dan Bantuan Hukum, serta Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum
3. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan pelaksanaan Analisis dan Evaluasi Hukum, Perencanaan Hukum, Penyuluhan dan Bantuan Hukum, serta Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum
4. Pelaksanaan administrasi BPHN
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya selama kurun waktu 2020-2024, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai 8 (delapan) sasaran strategis yang menjadi arah bagi pencapaian kinerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yakni:

1. Terpenuhinya peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan;
2. Mengoptimalkan peran dalam penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM;

3. Memastikan pelayanan publik di bidang hukum sesuai dengan asas penyelenggaraan pelayanan publik;
4. Memastikan penegakan hukum yang mampu menjadi pendorong inovasi dan kreatifitas dalam pertumbuhan ekonomi nasional;
5. Ikut berperan serta dalam menjaga stabilitas keamanan dan kedaulatan NKRI;
6. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat;
7. Meningkatkan kompetensi strategis SDM di bidang hukum dan HAM;
8. Membangun budaya kerja yang berorientasi kinerja organisasi yang berintegritas, efektif, dan efisien.

Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian Hukum dan HAM mempunyai potensi yang dapat menjadi pendorong untuk memberikan kepastian, keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Sejalan dengan potensi tersebut, Kementerian Hukum dan HAM juga mempunyai permasalahan yang harus dicermati sehingga tidak mengganggu upaya kementerian dalam menjamin manfaat program di bidang Hukum dan HAM yang dirasakan oleh masyarakat. Potensi dan permasalahan tersebut dikelompokkan dalam 5 (lima) bidang, yaitu Pembentukan dan Penataan Regulasi; Pelayanan Publik di Bidang Hukum; Penegakan Hukum; Peningkatan Kesadaran Hukum dan Pemajuan HAM; dan tata kelola pemerintahan.

Dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya BPHN memiliki 5 (lima) unit Eselon II, yaitu:

1. Sekretarian Badan;
2. Pusat Perencanaan Hukum Nasional
3. Pusat Penyuluhan dan Bantuan Hukum;
4. Pusat Dokumentasi dan Jaringan Informasi Hukum Nasional;
5. Pusat Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional.



A. Visi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

“Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia yang Andal, Profesional, Inovatif, dan Berintegritas dalam Pelayanan Kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk Mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

B. Misi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia:

Kementerian Hukum dan HAM memiliki misi sebagai tindak lanjut atas visi yang telah ditetapkan oleh Presiden, adapun misi Kementerian Hukum dan HAM dalam menunjang visi Presiden dijabarkan dalam 7 (tujuh) hal yaitu:

1. Membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas dan melindungi kepentingan nasional;
2. Menyelenggarakan pelayanan publik di bidang hukum yang berkualitas;
3. Mendukung penegakan hukum di bidang kekayaan intelektual, keimigrasian, administrasi hukum umum dan masyarakatan yang bebas dari korupsi, bermartabat dan terpercaya;

4. Melaksanakan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia yang berkelanjutan;
5. Melaksanakan peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
6. Ikut serta menjaga stabilitas keamanan melalui peran keimigrasian dan pemasyarakatan; dan
7. Melaksanakan tata laksana pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi dan kelembagaan.

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan 30 Juni 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional periode 30 Juni 2024 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Badan Pembinaan Hukum Nasional yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah entitas akuntansi di lingkup Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah 34 entitas. Rincian entitas tersebut tersaji sebagai berikut:

Rekapitulasi Jumlah Entitas UAPPA-E1

NO	KODE Es. I	KODE WILAYAH	KODE SATKER	ENTITAS	JUMLAH/JENIS KEWENANGAN		JUMLAH SATKER
					KP	KD	
1	10	0199	409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	1	-	1
2	10	0100	408727	KANWIL DKI JAKARTA	-	1	1
3	10	0200	408737	KANWIL JAWA BARAT	-	1	1
4	10	0300	408749	KANWIL JAWA TENGAH	-	1	1
5	10	0400	409187	KANWIL DI YOGYAKARTA	-	1	1
6	10	0500	408759	KANWIL JAWA TIMUR	-	1	1
7	10	0600	408789	KANWIL ACEH	-	1	1
8	10	0700	408769	KANWIL SUMATERA UTARA	-	1	1
9	10	0800	408799	KANWIL SUMATERA BARAT	-	1	1
10	10	0900	408809	KANWIL RIAU	-	1	1
11	10	1000	409166	KANWIL JAMBI	-	1	1
12	10	1100	408819	KANWIL SUMATERA SELATAN	-	1	1
13	10	1200	408829	KANWIL LAMPUNG	-	1	1

NO	KODE Es. I	KODE WILAYAH	KODE SATKER	ENTITAS	JUMLAH/JENIS KEWENANGAN		JUMLAH SATKER
					KP	KD	
14	10	1300	408839	KANWIL KALIMANTAN BARAT	-	1	1
15	10	1400	409197	KANWIL KALIMANTAN TENGAH	-	1	1
16	10	1500	408848	KANWIL KALIMANTAN SELATAN	-	1	1
17	10	1600	408859	KANWIL KALIMANTAN TIMUR	-	1	1
18	10	1700	408869	KANWIL SULAWESI UTARA	-	1	1
19	10	1800	409217	KANWIL SULAWESI TENGAH	-	1	1
20	10	1900	408779	KANWIL SULAWESI SELATAN	-	1	1
21	10	2000	409207	KANWIL SULAWESI TENGGARA	-	1	1
22	10	2100	408899	KANWIL MALUKU	-	1	1
23	10	2200	408879	KANWIL BALI	-	1	1
24	10	2300	409227	KANWIL NUSA TENGGARA BARAT	-	1	1
25	10	2400	408889	KANWIL NUSA TENGGARA TIMUR	-	1	1
26	10	2500	408909	KANWIL PAPUA	-	1	1
27	10	2600	409177	KANWIL BENGKULU	-	1	1
28	10	2800	649029	KANWIL MALUKU UTARA	-	1	1
29	10	2900	648996	KANWIL BANTEN	-	1	1
30	10	3000	649008	KANWIL BANGKA BELITUNG	-	1	1
31	10	3100	649017	KANWIL GORONTALO	-	1	1
32	10	3200	667789	KANWIL KEPULAUAN RIAU	-	1	1
33	10	3300	667779	KANWIL PAPUA BARAT	-	1	1
34	10	3400	667799	KANWIL SULAWESI BARAT	-	1	1
JUMLAH					1	33	34

Basis

Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

Badan Pembinaan Hukum Nasional menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas adalah

basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

*Dasar
Pengukuran*

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pembinaan Hukum Nasional dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

*Kebijakan
Akuntansi*

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan 30 Juni 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-15/PB/PB.6/2024 tanggal 02 Juli 2024 perihal Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Semester I Tahun 2024. Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan

Pembinaan Hukum Nasional dengan menggunakan standar akuntansi dan peraturan-peraturan yang berlaku dari Kementerian Keuangan. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah sebagai berikut:

Pendapatan-LRA

(1) Pendapatan-LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau

telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata

ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD

*Penyusutan
Aset Tetap*

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(7) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas

bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(8) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal. Adapun beberapa proses revisi DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai berikut :

1. Blokir Automatic Adjustment, Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional melakukan pergeseran anggaran antar program sebesar Rp1.180.751.000 sesuai dengan Surat Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Anggaran Nomor S-34/AG/AG.5/2024 tanggal 30 Januari 2024 perihal Pengesahan Revisi Anggaran Badan Pembinaan Hukum Nasional Blokir Automatic Adjustment TA 2023 Kemenkumham dan Nota Dinas Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.1-PR.01.04-17 Perihal Penyampaian Hasil Revisi Antar Program dan Automatic Adjustment;
2. Penyesuaian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS dan Penyelesaian Pagu Minus Belanja Pegawai Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2024 (Penambahan Anggaran Belanja Pegawai) sebesar Rp688.378.000 sesuai dengan Surat Kepala Badan Pembinaan Nasional Nomor PHN-KU.01.02-03 perihal Penyampaian Data Dukung Revisi DIPA Anggaran Belanja Pegawai TA 2024.

Perubahan anggaran tersebut berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja adalah sebagai berikut:

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendapatan		
Pendapatan dari Pengelolaan BMN (Pemanfaatan dan Pemindahtanganan) serta Pendapatan dari Penjualan	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan	0,00	0,00
Belanja		
Belanja Pegawai	17.404.653.000	18.093.031.000
Belanja Barang	98.671.794.000	98.671.794.000
Belanja Bantuan Sosial	0	0
Belanja Modal	224.328.000	224.328.000
Jumlah Belanja	116.300.775.000	116.989.153.000

Sedangkan apabila dilihat dari Kegiatan Badan Pembinaan Hukum Nasional maka perubahannya adalah sebagai berikut:

KEGIATAN	2024	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN SETELAH REVISI
Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	1.502.291.000	1.293.206.000
Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	1.987.390.000	1.633.219.000
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	3.259.505.000	2.642.010.000
Perencanaan Hukum Nasional	1.988.945.000	1.988.945.000
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	33.383.636.000	35.252.765.000
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	4.506.629.000	4.506.629.000
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	69.672.379.000	69.672.379.000
Total Belanja	116.300.775.000	116.989.153.000

Realisasi
Pendapatan.
Rp246.795.043

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp246.795.043 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan. Pada Semester 1 Tahun Anggaran 2024 belum terdapat realisasi pendapatan dari pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan. Hal ini dikarenakan pendapatan sewa tanah, gedung dan bangunan yang bersifat rutin pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional adalah berupa pendapatan sewa kantin yang dibayarkan setiap 2 tahun sekali. Pendapatan atas sewa kantin BPHN disetorkan pada tahun 2022 untuk jangka waktu 2 tahun yang berlaku mulai tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan 30 September 2024 sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Atas Sebagian Tanah Atau Bangunan Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN1-UM.03.06-32 Tanggal 01 Oktober 2022 sebesar Rp24.990.000, sehingga pendapatan sewa kantin BPHN baru akan terealisasi pada Triwulan IV tahun anggaran 2024.

Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut:

Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Periode 30 Juni 2024

Uraian	2024		
	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	-	115.487.000,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	-	53,00	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	-	84.227.636,71	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	-	47.080.353,29	0,00
Jumlah	-	246.795.043	0,00

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar 1.591,05 persen dibandingkan TA 2023. Hal ini disebabkan meningkatnya penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu yang disebabkan adanya pengembalian belanja barang karena adanya temuan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2023 pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah Bengkulu serta temuan Inspektorat Jenderal pada 3 Kantor wilayah dan pengembalian belanja bantuan hukum dikarenakan adanya duplikasi pencairan dana bantuan hukum tahun 2023.

Perbandingan Realisasi Pendapatan

30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI T.A. 2024	REALISASI T.A. 2023	NAIK (TURUN) %
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	-	-	0,00
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	115.487.000	-	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	53,00	-	0,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	84.227.636,71	14.594.200	477,13
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	47.080.353,29	-	0,00
Jumlah	246.795.043	14.594.200	1.591,05

Rincian Jenis Pendapatan berdasarkan

Satuan Kerja/ Wilayah

URAIAN	SATUAN KERJA	REALISASI T.A. 2024
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	BPHN	Rp 115.487.000,00
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu		Rp 53,00
		Rp 74.588.376,71
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	Kantor Wilayah Jawa Timur	Rp 4.000.000,00
	Kantor Wilayah Lampung	Rp 3.389.260,00
	Kantor Wilayah Bengkulu	Rp 290.000,00
	Kantor Wilayah Papua Barat	Rp 1.960.000,00
Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	BPHN	Rp 47.080.353,29
Jumlah		Rp 246.795.043

Rincian Realisasi Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) sebesar Rp246.795.403 adalah sebagai berikut :

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp237.155.783 berupa:

- Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa Lelang 1 paket Eks sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 178/07.04/2024-01 tanggal 6 Mei 2024 berupa 1 (satu) paket Eks Kendaraan Dinas Kondisi rusak Berat yaitu mobil Mitsubishi FE 349 Tahun 2004 NOPOL B 7196 MQ dan Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2006 Nopol B 2640 SQ sebesar Rp115.487.000 sesuai NTPN BC71D2G4VPKREJFV tanggal 08 Mei 2024;
- Pembulatan belanja pegawai sebesar Rp53 sesuai dengan SPM Nomor 00015T tanggal 9 Januari 2024;
- Pengembalian kelebihan/selisih pembayaran iuran BPJS Kesehatan terkait pengadaan outsourcing Tahun 2023 sebesar Rp12.068.375 sesuai NTPN 9D5EA55DF96JNTN9 tanggal 28 Maret 2024;
- Pengembalian kelebihan pembayaran kendaraan operasional sewa kendaraan dinas TA 2023 pada

kantor BPHN sebesar Rp62.520.000 seuai NTPN 7F3E561QV3UJHP6K tanggal 15 Mei 2024;

- Pengembalian kelebihan bayar pekerjaan konstruksi renovasi lt. 2 Gd Annex, ruang kerja pimpinan Gd. SJDI dan ruang kerja pimpinan Gd. Induk kantor BPHN sebesar Rp47.080.355 sesuai NTPN 2A2DE6U8EUGJ5AUI tanggal 03 Mei 2024;

2. Pada Kantor Wilayah Jawa Timur sebesar Rp4.000.000 berupa pengembalian Pengembalian duplikasi anggaran bantuan hukum TA. 2023 a.n BUSEN dan Mukhammad yang merupakan hasil audit Inspektorat Jenderal kementerian Hukum dan HAM atas pemeriksaan terhadap dokumen pencairan anggaran bantuan hukum tahun anggaran 2023 sesuai surat Nomor ITJ-PW.03.04-30 tanggal 8 Maret 2024 sesuai NTPN 735c48VVEMELAGI dan 7BDC355DF98R29E6 tanggal 03 April 2024;
3. Pada Kantor Wilayah Lampung sebesar Rp3.389.260 berupa pengembalian kelebihan belanja transport hasil temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2023 sesuai NTPN 74ADE0NA04DDHURS tanggal 19 April 2024 dan 2B26A55DF9BRE3NT tanggal 03 Mei 2024;
4. Pada Kantor Wilayah Bengkulu sebesar Rp290.000 berupa Pengembalian Biaya Transport Luar Kota ke Arga makmur Tahun 2022 a.n. CIK Yang karena adanya hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai NTPN 08AD07QLUP0JRSKL tanggal 23 April 2024;
5. Pada Kantor Wilayah Papua Barat sebesar Rp1.960.000 berupa Pengembalian duplikasi anggaran bantuan hukum TA. 2023 a.n Gilber Lorenza Putra Jewahan yang merupakan hasil audit Inspektorat Jenderal kementerian Hukum dan HAM atas pemeriksaan terhadap dokumen pencairan anggaran bantuan hukum tahun anggaran 2023 sesuai surat Nomor ITJ-PW.03.04-30 tanggal 8 Maret 2024 sesuai NTPN 8D28F7NAPADKJTFF tanggal 22 Mei 2024.

B.2. BELANJA

Realisasi Belanja pada 30 Juni 2024 adalah sebesar Rp55.260.141.666 atau 47,24% dari anggaran belanja sebesar Rp116.989.153.000. Realisasi belanja Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai Eselon I terdiri 34 Satuan Kerja yaitu BPHN selaku satuan kerja sebesar 48,00% dan 33 Kantor Wilayah mencapai realisasi sebesar 46,80%. Pada 30 Juni 2024 realisasi DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional masih belum mencapai target realisasi anggaran triwulan II khususnya pada belanja barang sebesar 45,58 persen dimana target realisasi belanja barang sesuai dengan Per-5/PB/2024 sampai dengan triwulan II sebesar 50 persen, hal ini disebabkan karena :

1. Rendahnya permohonan Bantuan hukum yang masuk sampai dengan 30 Juni 2024 pada Kantor wilayah Jawa Tengah dimana Jawa Tengah mempunyai anggaran besar nomor 2 namun realisasinya masih sangat rendah;
2. Masih adanya anggaran yang belum terealisasi yaitu anggaran belanja pengiriman surat dinas pos pusat (521114) dimana anggaran tersebut baru dapat terealisasi di akhir tahun karena digunakan untuk pengiriman kalender BPHN dan perjalanan dinas biasa luar negeri (524211) yang akan terealisasi pada bulan Juli 2024.

Rincian anggaran dan realisasi belanja pada 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

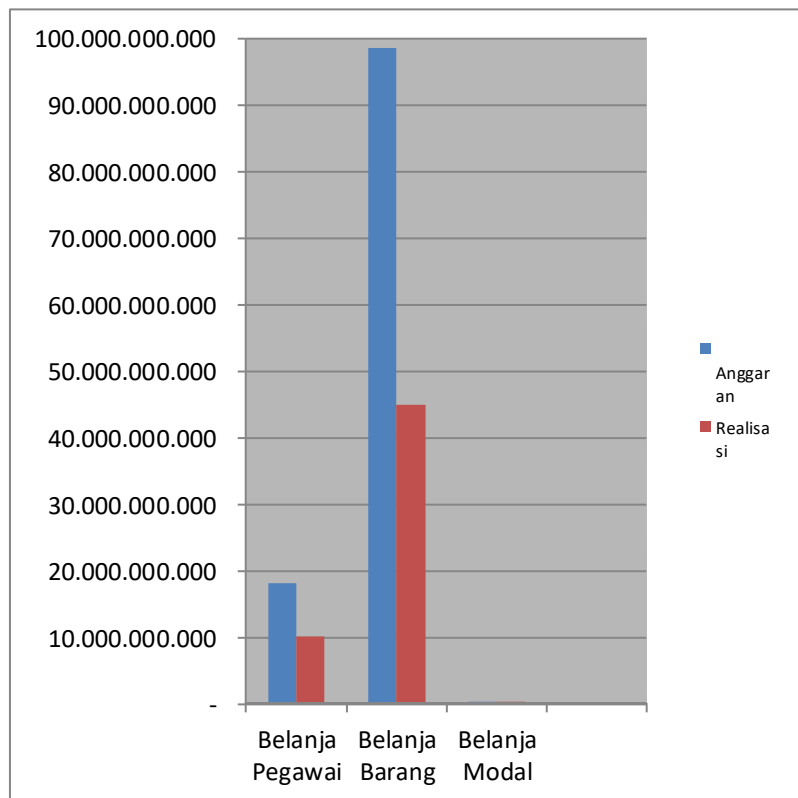
*Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja
Periode 30 Juni 2024*

URAIAN	2024		%
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	18.093.031.000	10.067.421.301	55,64
Belanja Barang	98.671.794.000	44.969.879.039	45,58
Belanja Modal	224.328.000	223.622.500	99,69
Total Belanja Kotor	116.989.153.000	55.260.922.840	47,24
Pengembalian Belanja	-	(781.174)	0
Total Belanja	116.989.153.000	55.260.141.666	47,24

Pada 30 Juni 2024 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp781.174 dengan rincian sebagai berikut :

1. Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan sebesar Rp6.174 berupa pengembalian Belanja Pembulatan Gaji dan Tunjangan melalui potongan SPM;
2. Kantor Wilayah Lampung sebesar Rp775.000 berupa transport perjalanan dinas sesuai NTPN 642B75229OSUIJIK tanggal 28 Maret 2024.

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat dalam grafik berikut ini:



Sedangkan realisasi belanja berdasarkan program untuk 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

*Rincian Belanja Berdasarkan Program
Periode 30 Juni 2024*

PROGRAM	2024	
	ANGGARAN	REALISASI
Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	1.293.206.000	280.664.232
Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	1.633.219.000	322.435.630
Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	2.642.010.000	1.711.019.524
Perencanaan Hukum Nasional	1.988.945.000	438.362.772
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPHN	35.252.765.000	17.794.532.170
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	4.506.629.000	1.661.132.794
Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	69.672.379.000	33.051.994.544
Total Belanja	116.989.153.000	55.260.141.666

Dibandingkan dengan 30 Juni 2024, Realisasi Belanja periode 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 4.63% hal ini disebabkan karena pada salah satu satuan kerja Kanwil Jawa Tengah masih rendahnya realisasi permohonan Bantuan hukum yang masuk sampai dengan 30 Juni 2024 dimana Jawa Tengah mempunyai anggaran besar nomor 2 dalam DIPA BPHN namun realisasinya masih sangat rendah, serta menurunnya anggaran belanja modal pada tahun 2024.

*Perbandingan Realisasi Belanja
30 Juni 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Pegawai	10.067.415.127	9.208.304.964	9,33
Belanja Barang	44.969.104.039	46.934.849.280	(4,19)
Belanja Modal	223.622.500	1.797.502.968	(87,56)
Belanja Bantuan Sosial	-	-	-
Jumlah	55.260.141.666	57.940.657.212	(4,63)

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp10.067.415.127 dan Rp9.208.304.964. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Rincian Anggaran dan realisasi belanja pegawai disajikan pada tabel berikut:

*Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai
Periode 30 Juni 2024*

URAIAN	Anggaran	Realisasi	% Real Angg
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	17.416.107.000	9.809.568.625	56,32
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	184.588.000	64.983.676	35,20
Belanja Lembur PNS	455.280.000	190.114.000	41,76
Belanja Lembur PPPK	37.056.000	2.755.000	7,43
Jumlah Belanja Kotor	18.093.031.000	10.067.421.301	55,64
Pengembalian Belanja Pegawai	-	(6.174)	-
Jumlah Belanja	18.093.031.000	10.067.415.127	55,64

Pada Semester I Tahun 2024 pada kantor BPHN selaku satuan kerja terdapat pengembalian belanja pegawai sebesar Rp6.174 berupa pengembalian Belanja Pembulatan Gaji dan Tunjangan PNS sebesar Rp6.174 melalui potongan SPM; Realisasi belanja pegawai pada kantor BPHN periode 30 Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,28 % dibandingkan realisasi belanja pada periode sebelumnya. Hal ini dikarenakan dikarenakan adanya Kenaikan Besaran Gaji PNS sebesar 8 persen dari besaran gaji sebelumnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2024 tentang Perubahan kesembilan belas atas

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebanyak 4 Pegawai.

Perbandingan Belanja Pegawai

30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	9.809.568.625	9.137.792.102	7,35
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	64.983.676	0	-
Belanja Lembur PNS	190.114.000	72.610.000	161,83
Belanja Lembur PPPK	2.755.000	-	-
Jumlah Belanja Kotor	10.067.421.301	9.210.402.102	9,30
Pegawai	(6.174)	(2.097.138)	(99,71)
Jumlah Belanja	10.067.415.127	9.208.304.964	9,33

Belanja Barang
Rp44.969.104.039

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp44.969.104.039 dan Rp46.934.849.280. Rincian Realisasi Anggaran dan Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 tersaji dalam table berikut:

Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang

Periode 30 Juni 2024

URAIAN	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
Belanja Barang Operasional	4.610.606.000	2.261.522.854	49,05
Belanja Barang Non Operasional	8.311.386.000	3.238.099.241	38,96
Belanja Barang Persediaan	457.557.000	214.757.926	46,94
Belanja Jasa	62.325.109.000	28.934.877.789	46,43
Belanja Pemeliharaan	3.413.279.090	1.633.608.406	47,86
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	19.383.857.000	8.687.012.823	44,82
Belanja Perjalanan Luar Negeri	170.000.000	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	98.671.794.090	44.969.879.039	45,58
Pengembalian Belanja	-	(775.000)	-
Jumlah Belanja	98.671.794.090	44.969.104.039	45,57

Pada Tahun 2024 terdapat pengembalian belanja barang di Kantor Wilayah Lampung sebesar Rp775.000 berupa transport perjalanan dinas sesuai NTPN 642B75229OSUIJIK tanggal 28 Maret 2024.

Berdasarkan data realisasi periode 30 Juni 2024 masih terdapat anggaran yang belum terealisasi atau 0 persen.

Berikut rincian anggaran yang belum dapat direalisasikan:

1. Belanja Barang Operasional berupa belanja pengiriman surat dinas pos pusat belum terealisasinya anggaran belanja tersebut dikarenakan akan direalisasikan pada akhir bulan Desember 2024 untuk pengiriman kalender BPHN.
2. Belanja perjalanan luar negeri, yang akan terealisasi pada bulan Juli 2024.

Realisasi Belanja Barang periode 30 Juni TA. 2024 mengalami penurunan sebesar 4,19% dari TA 2023 hal ini dikarenakan karena masih terdapat .

*Perbandingan Belanja Barang
30 Juni 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Barang Operasional	2.261.522.854	1.637.427.251	38,11
Belanja Barang Non Operasional	3.238.099.241	2.283.953.511	41,78
Belanja Barang Persediaan	214.757.926	193.566.986	10,95
Belanja Jasa	28.934.877.789	31.343.928.077	(7,69)
Belanja Pemeliharaan	1.633.608.406	1.767.625.613	(7,58)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	8.687.012.823	9.734.990.750	(10,77)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	44.969.879.039	46.961.492.188	(4,24)
Pengembalian Belanja	(775.000)	(26.642.908)	(97,09)
Jumlah Belanja	44.969.104.039	46.934.849.280	(4,19)

Dalam DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat Program Prioritas Nasional (PN) yaitu Bantuan Hukum (Bankum) dan Kegiatan Akreditasi Lembaga dimana pelaksanaan kegiatan Bantuan Hukum terdapat di Kantor

Wilayah, Badan Pembinaan Hukum Nasional hanya sebatas memonitor sejauh mana anggaran tersebut terealisasi sesuai rencana. Realisasi Bantuan Hukum periode 30 Juni 2024 sebesar Rp26.042.277.000 atau 46,20% dari anggaran Bantuan Hukum sebesar Rp56.365.320.000 dan realisasi Kegiatan Akreditasi Lembaga sebesar Rp1.352.010.667 atau 48,29% dari anggaran sebesar Rp2.800.000.000 (rincian terlampir).

Belanja Modal
Rp223.622.500

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp223.625.000 dan Rp1.797.502.968. Realisasi belanja modal BPHN sebagai eselon I terdiri 34 Satuan Kerja yaitu BPHN selaku satuan kerja dan 33 Kantor Wilayah telah mencapai realisasi sebesar 99,69%. Dimana sebagian besar realisasi belanja modal ada di Kantor Wilayah sebesar Rp203.649.600 dan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja sebesar Rp19.972.900. Pada Tahun 2024 Badan Pembinaan Hukum Nasional hanya menganggarkan Belanja Modal lainnya untuk pembelian ebook digital. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Rincian Realisasi Belanja Modal Periode 30 Juni 2024

Akun	URAIAN	Anggaran	Realisasi	% Real Angg.
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	0	0,00%
533121	Belanja penambahan Nilai gedung dan Bangunan	0	0	0,00%
536111	Belanja Modal Lainnya	224.328.000	223.622.500	99,69%
Jumlah Belanja Bruto		224.328.000	223.622.500	99,69%
Pengembalian		0	0	0,00%
Jumlah Belanja Netto		224.328.000	223.622.500	99,69%

Realisasi Belanja Modal periode 30 Juni 2024 sebesar Rp223.622.500 terdapat pada Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja dan Kantor Wilayah. Realisasi Belanja Modal ini mempengaruhi penambahan aset pada Neraca Badan Pembinaan Hukum Nasional. Rincian Realisasi Belanja Modal masing-masing Satuan Kerja adalah sebagai berikut :

1. Kantor Wilayah DKI Jakarta sebesar Rp.3.935.000 berupa pembelian Buku Lainnya sesuai SP2D nomor 241391301004484 tanggal 27 Februari 2024;
2. Kantor Wilayah Jawa Barat sebesar Rp7.500.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 240221305000533 tanggal 28 maret 2024;
3. Kantor Wilayah Jawa Tengah sebesar Rp19.982.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 240261301008187 tanggal 28 Juni 2024;
4. Kantor Wilayah Jawa Timur sebesar Rp9.986.400 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 241351305000437 tanggal 20 Mei 2024;
5. Kantor Wilayah Sumatera Utara sebesar Rp17.140.500 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 240041302003046 tanggal 20 Mei 2024;
6. Kantor Wilayah Sumatera Barat sebesar Rp4.000.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 240101303001314 tanggal 25 Maret 2024 sebesar Rp880.000 dan Sp2D Nomor 240101303002113 tanggal 30 April 2024 sebesar Rp3.120.000;
7. Kantor Wilayah Riau sebesar Rp6.600.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 240081303007190 tanggal 28 Mei 2024;
8. Kantor Wilayah Lampung sebesar Rp9.920.000 berupa pembelian Buku Lainnya sesuai SP2D nomor 240171303001672 tanggal 26 Maret 2024;
9. Kantor Wilayah Kalimantan Barat sebesar Rp5.970.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 240421301005126 tanggal 27 Maret 2024;
10. Kantor Wilayah Jambi sebesar Rp9.000.000 berupa pembelian Buku Lainnya sesuai SP2D nomor

240121301007658 tanggal 26 Juni 2024;

11. Kantor Wilayah Kalimantan Selatan sebesar Rp14.980.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 240451302002228 tanggal 26 Maret 2024;
12. Kantor Wilayah Sulawesi Utara sebesar Rp6.000.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 240491701000092 tanggal 28 Februari 2024;
13. Kantor Wilayah Nusa Tenggara Barat sebesar Rp11.500.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 240381302008420 tanggal 22 Mei 2024;
14. Kantor Wilayah Bengkulu sebesar Rp26.000.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 240161302000631 tanggal 23 Februari 2024;
15. Kantor Wilayah Yogyakarta sebesar Rp15.000.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 240301303002398 tanggal 29 Februari 2024;
16. Kantor Wilayah Maluku Utara sebesar Rp10.669.000 berupa pembelian Buku Lainnya sesuai SP2D nomor 240621302003265 tanggal 28 Maret 2024 sebesar Rp5.192.500 dan SP2D nomor 240621302007393 tanggal 21 Juni 2024 sebesar Rp5.476.500 ;
17. Kantor Wilayah Banten sebesar Rp2.000.000 berupa pembelian Buku sesuai SP2D nomor 240501301004874 tanggal 27 Maret 2024;
18. Kantor Wilayah Gorontalo sebesar Rp4.474.700 berupa pembelian Buku sesuai SP2D nomor 240201301004499 tanggal 28 Maret 2024;
19. Kantor Wilayah Kepulauan Riau sebesar Rp8.992.000 berupa pembelian Monografi sesuai SP2D nomor 240091303001952 tanggal 26 Maret 2024;
20. Kantor Wilayah Papua Barat sebesar Rp10.000.000 berupa pembelian Buku Lainnya sesuai SP2D nomor 240651302001467 tanggal 29 Februari 2024;
21. Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja sebesar Rp19.972.900 berupa pembelian Buku Digital sesuai SP2D Nomor 241391303008216 tanggal 28 Maret 2024.

Realisasi Belanja Modal pada periode 30 Juni 2024 mengalami penurunan sebesar 87,56% dibandingkan TA 2023 disebabkan karena pada tahun 2024 DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional hanya terdapat anggaran Belanja Modal Lainnya.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal
30 Juni 2024 dan 2023*

URAIAN	REALISASI T.A 2024	REALISASI T.A 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Tanah	0	0	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1.394.106.782	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	0	246.201.096	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0,00
Belanja Modal Lainnya	223.622.500	157.195.090	42,26
Jumlah Belanja Kotor	223.622.500	1.797.502.968	(87,56)
Pengembalian	-	-	-
Jumlah Belanja	223.622.500	1.797.502.968	(87,56)

B.5.1 Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah periode 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja modal tanah pada Badan Pembinaan Hukum Nasional.

B.5.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp1.394.106.782. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin mengalami penurunan sebesar 100 persen bila dibandingkan dengan 30 Juni 2023 dikarenakan pada Tahun 2024 tidak terdapat anggaran belanja modal peralatan dan mesin.

Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA. 2023	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	0	1.394.106.782	(100,00)
Jumlah Belanja Kotor	0	1.394.106.782	(100,00)
Pengembalian	0	0	-
Jumlah Belanja	0	1.394.106.782	(100,00)

B.5.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Belanja modal gedung dan bangunan mengalami penurunan sebesar 100 persen dikarenakan pada tahun anggaran 2024 tidak terdapat anggaran belanja modal gedung dan bangunan.

Perbandingan Realisasi Belanja Gedung dan Bangunan

30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN JENIS BELANJA	REALISASI TA. 2024	REALISASI TA. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	0	246.201.096	100,00
Jumlah Belanja Kotor	0	246.201.096	100,00
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	0	246.201.096	100,00

B.5.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tidak terdapat alokasi anggaran belanja modal jalan, irigasi dan jaringan pada TA 2024.

B.5.5 Belanja Modal Lainnya

Realisasi Belanja Modal Lainnya 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp223.622.500 dan Rp157.195.090. Realisasi Belanja Modal Lainnya periode 30 Juni 2024 sebesar Rp223.622.500 berupa pembelian buku lainnya dan koleksi perpustakaan (monografi) serta buku digital (e book) di Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional

selaku satuan kerja sebesar Rp19.972.900 dan Kantor Wilayah sebesar Rp203.649.600 dengan rincian sebagai berikut :

*Rincian Pembelian Buku dan Koleksi Perpustakaan
periode 30 Juni 2024*

No	NAMA SATKER	NAMA BARANG	AKUN	ANGGARAN	REALISASI	NO. SP2D	TANGGAL SP2D
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	Buku Lainnya	536111	4.000.000	3.935.000	241391301004484	27-02-2024
2	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	Buku Digital	536111	20.000.000	19.972.900	241391303008216	28-03-2024
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	Monografi	536111	7.500.000	7.500.000	240221305000533	28-03-2024
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	Monografi	536111	20.000.000	19.982.000	240261301008187	28-06-2024
5	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	Monografi	536111	15.000.000	15.000.000	240301303002398	29-02-2024
6	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	Monografi	536111	10.000.000	9.986.400	241351305000437	20-05-2024
7	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	Monografi	536111	17.189.000	17.140.500	240041302003046	20-05-2024
8	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	Monografi	536111	880.000	880.000	240101303001314	25-03-2024
9	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	Monografi	536111	3.120.000	3.120.000	240101303002113	30-04-2024
10	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	Monografi	536111	6.600.000	6.600.000	240081303007190	28-05-2024
11	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	Buku	536111	9.000.000	9.000.000	240121301007658	26-06-2024
12	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	Monografi	536111	10.000.000	9.920.000	240171303001672	26-03-2024
13	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	Monografi	536111	5.970.000	5.970.000	240421301005126	27-03-2024
14	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	Monografi	536111	15.000.000	14.980.000	240451302002228	26-03-2024
15	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO	Monografi	536111	6.000.000	6.000.000	240491701000002	28-02-2024
16	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	Monografi	536111	11.500.000	11.500.000	240381302008420	22-05-2024
17	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	Monografi	536111	26.000.000	26.000.000	240161302000631	23-02-2024
18	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU	Buku	536111	400.000	-	Belum Terealisasi	
19	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	Buku Lainnya	536111	10.669.000	5.192.500	240621302003265	28-03-2024
20	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	Buku Lainnya	536111		5.476.500	240621302007393	21-06-2024
21	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	Buku	536111	2.000.000	2.000.000	240201301004499	28-03-2024
22	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	Buku	536111	4.500.000	4.474.700	240501301004874	27-03-2024
23	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	Monografi	536111	9.000.000	8.992.000	240091303001952	26-03-2024
24	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	Monografi	536111	10.000.000	10.000.000	240651302001467	29-02-2024
JUMLAH BELANJA				224.328.000	223.622.500		

Realisasi belanja modal lainnya periode 30 Juni 2024 mengalami kenaikan sebesar 42,26% dibandingkan 30 Juni 2023. Hal ini dikarenakan belanja modal lainnya sudah terelisasi pada semester 1.

*Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya
30 Juni 2024 dan 31 Desember 2022*

URAIAN JENIS BELANJA	TA. 2024	TA. 2023	Naik (Turun) %
Belanja Modal Lainnya	223.622.500	157.195.090	42,26
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	0	0	0,00
Jumlah Belanja Kotor	223.622.500	157.195.090	42,26
Pengembalian Belanja Modal	0	0	0,00
Jumlah Belanja	223.622.500	157.195.090	42,26

Realisasi belanja modal lainnya akan mempengaruhi penambahan aset tetap lainnya pada Neraca sehingga akan mempengaruhi kenaikan/penurunan pada Neraca.

Belanja Bantuan Sosial Rp0

B.6 Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional tidak terdapat anggaran belanja bantuan sosial dikarenakan bukan entitas yang bertugas memberikan bantuan sosial.

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp1.239.570.000

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.239.570.000 dan Rp0 yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa UP/TUP yang belum dipertanggungjawabkan atau belum disetorkan ke Kas Negara per tanggal neraca. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran (Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor wilayah) adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran Laporan Keuangan ini.

Kas di Bendahara
Penerimaan Rp0

C.2 Kas di Bendahara Penerimaan

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar masing-masing Rp0 dan Rp0. Kas di Bendahara Penerimaan meliputi saldo uang tunai dan saldo rekening di bank yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan berupa Penerimaan Negara Bukan Pajak. Tidak terdapat Bendahara Penerimaan di Badan Pembinaan Hukum Nasional dan satuan kerja di wilayah.

Kas Lainnya dan
Setara Kas
Rp112.765.478

C.3 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp112.765.478 dan Rp0. Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas pada bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, kas lainnya dan setara kas. Setara kas yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Kas lainnya dan setara Kas terdapat pada Kantor Wilayah dan Badan pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja. Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas sebagai berikut :

No	NAMA SATKER	AKUN	BILAI	KETERANGAN
1	KANWIL ACEH	111821	6.660.000	Kas Bank atas Perjudian SPM LS akan dilakukan penarikan di Bulan Juli 2024
2	KANWIL BENGKULU	111821	29.322.904	Perjudian yang belum dibayarkan
3	KANWIL GORONTALO	111821	1.360.000	Saldo untuk pembayaran transport dalam kegiatan di bulan Juni, transaksi pembayaran dilakukan dengan sistem CMS, proses transaksi pembayaran/ uang masuk direkening penerima dilakukan pada tanggal 28 Juni 2024, akan tetapi uang masuk/diterima di rekening penerima/peserta pada tanggal 1 Juli 2024.
4	KANWIL JAWA TIMUR	111821	646.500	Potongan pajak bulan Juni yg disetor bulan Juli
5	KANWIL RIAU	111821	6.330.000	LS Bendahara belum dilakukan pembayaran
6	KANWIL SULAWESI SELATAN	111821	3.614.144	Pajak belanja yang belum disetorkan
7	KANWIL SULAWESI UTARA	111821	540.000	utang pajak narasum (belum disetor di bulan Juli)
8	KANWIL SUMATERA BARAT	111821	800.000	Sisa SPM LS Perjalanan dinas yang belum disetor ke Kas Negara
9	KANWIL SUMATERA SELATAN	111821	5.655.000	SPM LS Honor yang penarikannya baru dilakukan di awal Juli 2024 untuk didistribusikan ke penerima honor
10	KANWIL LAMPUNG	111821	57.836.930	LS Bendahara yang belum ditransfer sampai dengan akhir Juni, dan ditransfer tanggal 2 Juli 2024
JUMLAH BELANJA			112.765.478	

C.4 Piutang PNBP

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp59.148.730. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya. Piutang PNBP pada 31 Desember 2023 sebesar Rp59.148.730 adalah hasil tindak lanjut atas temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari :

1. Koreksi Beban atas kelebihan/selisih pembayaran iuran BPJS Kesehatan terkait pengadaan Outsourcing tahun 2023 dan telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN 9D5EA55DF96JNTN9 tanggal 28 Maret 2024 sebesar Rp12.068.375;
2. Koreksi atas kelebihan pekerjaan konstruksi renovasi Lantai 2 Gedung Annex, Ruang Kerja Pimpinan Gedung SJDI serta Ruang Kerja Pimpinan Gedung Induk, Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional dan telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN 2A2DE6U8EUGJ5AUI tanggal 2 Mei 2024 sebesar Rp47.080.355.

Atas Piutang PNBP tersebut telah dilakukan penjurnalan balik sehingga saldo Piutang PNBP pada 30 Juni 2024 bernilai Rp0

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp0

C.5 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0. dan Rp0.

Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

BagianLancar TPA
Rp0

C.6 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Penjualan Angsuran

Saldo Bagian Lancar Tagihan TuntutanPenjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-

masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Bagian Lancar TPA merupakan Tagihan TPA yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih –
Piutang Lancar
(Rp295.744)*

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Lancar

Nilai Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Lancar per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing adalah sebesar (Rp295.744) dan Rp0.

Penyisihan piutang tak tertagih – piutang lancar adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang lancar yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada 30 Juni 2024 adalah penyisihan atas piutang PNBPN pada 31 Desember 2023 sebesar (Rp295.744) yang merupakan hasil tindak lanjut atas temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023.

1. Penyisihan Piutang lainnya atas Koreksi Beban atas temuan Pengembalian Belanja Barang yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp60.342;
2. Penyisihan Piutang lainnya atas Koreksi Aset atas kelebihan pembayaran Belanja Modal yang tidak sesuai ketentuan Penyisihan Piutang lainnya atas koreksi aset atas kelebihan pembayaran belanja modal yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp235.402.

Penyisihan piutang PNBPN tersebut telah dilakukan penjurnalan balik sehingga saldo Penyisihan Piutang Tidak tertagih-Piutang Bukan Pajak pada 30 Juni 2024 bernilai Rp0.

*Belanja Dibayar di
Muka Rp0*

C.8 Beban Dibayar di Muka

Saldo Beban Dibayar di Muka per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Beban dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya.

Pendapatan yang Masih Harus Diterima Rp0

C.9 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang Masih Harus Diterima per tanggal 30 Juni 2023 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan namun belum diterima tagihannya. Pada 30 Juni 2024 tidak terdapat saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima.

Persediaan Rp116.129.741

C.10 Persediaan

Nilai Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing adalah sebesar Rp116.129.741 dan Rp181.076.570. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Rincian Persediaan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Rincian Persediaan 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	30 Juni 2024	31 Desember 2023
Barang Konsumsi	116.129.741	181.076.570
Bahan untuk Pemeliharaan	-	-
Suku Cadang	-	-
Bahan Baku	-	-
Persediaan Lainnya	-	-
Jumlah	116.129.741	181.076.570

Semua jenis persediaan pada tanggal pelaporan berada dalam kondisi baik sesuai dengan Berita Acara Pelaksanaan Hasil Opname Fisik Barang Persediaan Nomor PHN.I-PB.04.03-03 tanggal 3 Juli 2024.

Tagihan TP/TGR Rp0.

C.11 Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Tuntutan Perbendaharaan adalah

tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya.

Tagihan Penjualan
Angsuran
Rp0

C.12 Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Penyisihan Piutang
Tak Tertagih -
Piutang Non Lancar
Rp0

C.13 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Non Lancar

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Non Lancar per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Penyisihan Piutang tak Tertagih–Piutang Non Lancar merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dan Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tanah
Rp356.165.357.000

C.14 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki Badan Pembinaan Hukum Nasional per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp356.165.357.000 dan Rp356.165.357.000.

Mutasi Aset Tetap Tanah adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp	356.165.357.000
Mutasi tambah:		
Koreksi barang berlebih hasil inventarisasi	Rp	-
Koreksi kesalahan input IP	Rp	-
Reklasifikasi	Rp	-
Mutasi kurang:	Rp	-
Revaluasi Aset	Rp	-
Penghapusan	Rp	-
Saldo per 30 Juni 2024	Rp	356.165.357.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	Rp	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	Rp	356.165.357.000

Tanah seluas 11.348 m² terletak di Jl Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur sesuai Sertifikat nomor 6938773 Tahun 1986 dan Nomor 09040402400106 tanggal 06 Desember 2019.

Peralatan dan Mesin
Rp25.791.465.257

C.15 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan aset tetap berupa peralatan dan mesin per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp25.791.465.257 dan Rp26.605.556.857. Mutasi nilai peralatan dan mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	Rp 26.605.556.857
Mutasi tambah:	
Pembelian	Rp -
Transfer Masuk	Rp -
Perolehan Hasil tindak Lanjut Normalisasi	Rp -
Penggunaan Kembali BMN yang dihentikan	Rp -
Mutasi kurang:	Rp -
Penghentian Aset	Rp (731.141.600)
Transfer Keluar	Rp (82.950.000)
Saldo per 30 Juni 2024	Rp 25.791.465.257
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	Rp (22.505.090.017)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	Rp 3.286.375.240

Mutasi kurang pada Peralatan dan mesin sebesar Rp814.091.600 berupa :

1. Penghentian Aset Dari Penggunaan sebesar Rp731.141.600 adalah berupa;
 - a. Penghentian Aset Dari Penggunaan Sedan senilai Rp404.107.340 sesuai dengan Berita Acara Nomor PHN.1-PB.05.05-03 Tanggal 31 Mei 2024;
 - b. Penghentian Aset dari Penggunaan Mini Bus senilai Rp 327.034.260 sesuai dengan Berita Acara Nomor PHN.1-PB.05.05-03 Tanggal 31 Mei 2024.
2. Transfer keluar ke kantor wilayah sebesar Rp82.950.000 yang terdiri dari :
 - a. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta berupa Laptop sebesar Rp13.825.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-10 tanggal 29 Februari 2024;

- b. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah berupa Laptop sebesar Rp13.825.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-11 tanggal 29 Februari 2024;
- c. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Barat berupa Laptop sebesar Rp13.825.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-12 tanggal 29 Februari 2024;
- d. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau berupa Laptop sebesar Rp13.825.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-13 tanggal 29 Februari 2024;
- e. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Timur berupa Laptop sebesar Rp13.825.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-14 tanggal 29 Februari 2024;
- f. Transfer Keluar ke Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan berupa Laptop sebesar Rp13.825.000 sesuai BAST Peralatan dan Mesin (Laptop) Nomor PHN.1-PB.03.01-15 tanggal 29 Februari 2024;

Gedung dan Bangunan
Rp62.954.462.581

C.16 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp62.954.462.581 dan Rp62.954.462.581. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	62.954.462.581
Mutasi tambah:	
Pengembangan Nilai Aset	-
Pengembangan Melalui KDP	-
Koreksi Nilai Tim Penertiban Aset	-
Mutasi kurang:	
Koreksi Pencatatan Nilai	-
Saldo per 30 Juni 2024	62.954.462.581
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	(27.707.063.234)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	35.247.399.347

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp0

C.17 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi, dan Jaringan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	-
Mutasi tambah :	
Pembelian	-
Mutasi kurang:	-
Koreksi Pencatatan	-
Koreksi Pencatatan Nilai/Kuantitas	-
Saldo per 30 Juni 2024	-
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	-

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya Rp1.171.558.942

C.18 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.171.558.942 dan Rp1.123.767.442. Mutasi

transaksi terhadap Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	1.123.767.442
Mutasi tambah:	
Pembelian	203.649.600
Reklasifikasi Masuk	12.669.000
Mutasi kurang:	
Transfer keluar	(155.858.100)
Reklasifikasi Keluar	(12.669.000)
Saldo per 30 Juni 2024	1.171.558.942
Akumulasi Penyusutan s.d. 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	1.171.558.942

Mutasi tambah aset tetap lainnya sebesar Rp216.318.600 berupa :

1. Pembelian buku perpustakaan (monografi) dan buku lainnya pada Kantor Wilayah sebesar Rp203.649.600;
2. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp12.669.000.

Mutasi Kurang aset tetap lainnya sebesar Rp168.527.100 berupa :

1. Transfer keluar sebesar Rp155.858.100 berupa buku perpustakaan di Kantor Wilayah dari Divisi Pelayanan Hukum ke Divisi Administrasi;
2. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp12.669.000.

Rincian Aset Tetap lainnya pada masing-masing satuan kerja adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tetap Lainnya

Periode 30 Juni 2024

No	Satker	Nilai
1	BPHN (Pusat)	1.123.767.442
2	Kanwil Jawa Tengah	19.982.000
3	Kanwil Sumatera Utara	17.140.500
4	Kanwil Maluku Utara	10.669.000
J U M L A H		1.171.558.942

Rincian pembelian buku perpustakaan

(monografi dan buku Lainnya)

Periode 30 Juni 2024

No	NAMA SATKER	NAMA BARANG	AKUN	ANGGARAN	REALISASI	NO. SP2D	TANGGAL SP2D
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	Buku Lainnya	536111	4.000.000	3.935.000	241391301004484	27-02-2024
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	Monografi	536111	7.500.000	7.500.000	240221305000533	28-03-2024
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	Monografi	536111	20.000.000	19.982.000	240261301008187	28-06-2024
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	Monografi	536111	15.000.000	15.000.000	240301303002398	29-02-2024
5	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	Monografi	536111	10.000.000	9.986.400	241351305000437	20-05-2024
6	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI MEDAN	Monografi	536111	17.189.000	17.140.500	240041302003046	20-05-2024
7	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	Monografi	536111	880.000	880.000	240101303001314	25-03-2024
8	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	Monografi	536111	3.120.000	3.120.000	240101303002113	30-04-2024
9	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	Monografi	536111	6.600.000	6.600.000	240081303007190	28-05-2024
10	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	Buku	536111	9.000.000	9.000.000	240121301007658	26-06-2024
11	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	Monografi	536111	10.000.000	9.920.000	240171303001672	26-03-2024
12	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	Monografi	536111	5.970.000	5.970.000	240421301005126	27-03-2024
13	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	Monografi	536111	15.000.000	14.980.000	240451302002228	26-03-2024
14	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO	Monografi	536111	6.000.000	6.000.000	240491701000092	28-02-2024
15	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	Monografi	536111	11.500.000	11.500.000	240381302008420	22-05-2024
16	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	Monografi	536111	26.000.000	26.000.000	240161302000631	23-02-2024
17	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	Buku Lainnya	536111	10.669.000	5.192.500	240621302003265	28-03-2024
18	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU UTARA	Buku Lainnya	536111		5.476.500	240621302007393	21-06-2024
19	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	Buku	536111	2.000.000	2.000.000	240201301004499	28-03-2024
20	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	Buku	536111	4.500.000	4.474.700	240501301004874	27-03-2024
21	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU	Monografi	536111	9.000.000	8.992.000	240091303001952	26-03-2024
22	KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	Monografi	536111	10.000.000	10.000.000	240651302001467	29-02-2024
JUMLAH BELANJA				203.928.000	203.649.600		

Rincian Transfer Keluar

Periode 30 Juni 2024

No	Satker Pengirim	Jenis Barang	Satker Penerima	Jumlah
1	Kanwil DKI Jakarta (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kanwil DKI Jakarta (Divisi Administrasi)	3.935.000
2	Kanwil Jawa Barat (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kanwil Jawa Barat (Divisi Administrasi)	7.500.000
3	Kanwil Jawa Timur (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kanwil Jawa Timur (Divisi Administrasi)	9.986.400
5	Kanwil Sumatera Barat (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kanwil Sumatera Barat (Divisi Administrasi)	4.000.000
6	Kanwil Riau (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kanwil Riau (Divisi Administrasi)	6.600.000
7	Kanwil Lampung (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kanwil Lampung (Divisi Administrasi)	9.920.000
8	Kanwil Kalimantan Barat (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kanwil Kalimantan Barat (Divisi Administrasi)	5.970.000
9	Kanwil Kalimantan Selatan (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kanwil Kalimantan Selatan (Divisi Administrasi)	14.980.000
10	Kanwil Sulawesi Utara (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kanwil Sulawesi Utara (Divisi Administrasi)	6.000.000
13	Kanwil Jambi (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kanwil Jambi (Divisi Administrasi)	9.000.000
14	Kanwil Bengkulu (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kanwil Bengkulu (Divisi Administrasi)	26.000.000
15	Kanwil Yogyakarta (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kanwil Yogyakarta (Divisi Administrasi)	15.000.000
16	Kanwil Nusa Tenggara Barat (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kanwil Nusa Tenggara Barat (Divisi Administrasi)	11.500.000
17	Kanwil Banten (Divisi Pelayanan Hukum)	Buku Lainnya	Kanwil Banten (Divisi Administrasi)	2.000.000
17	Kanwil Gorontalo (Divisi Pelayanan Hukum)	Buku Lainnya	Kanwil Gorontalo (Divisi Administrasi)	4.474.700
18	Kanwil Papua Barat (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kanwil Papua Barat (Divisi Administrasi)	10.000.000
18	Kanwil Kepulauan Riau (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kanwil Kepulauan Riau (Divisi Administrasi)	8.992.000
J U M L A H				155.858.100

Konstruksi Dalam
Pengerjaan Rp0

C.19 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca. Tidak terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan pada Tahun Anggaran 2024.

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
(Rp50.212.153.251)

C.20 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp50.212.153.251) dan (Rp47.938.133.273).

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Berikut disajikan rangkuman Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 30 Juni 2024.

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

No	Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akm. Penyusutan	Nilai Buku
1	Peralatan dan Mesin	25.791.465.257	22.505.090.017	3.286.375.240
2	Gedung dan Bangunan	62.954.462.581	27.707.063.234	38.447.809.867
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	-	-	-
4	Aset Tetap Lainnya	1.171.558.942	-	1.171.558.942
Akumulasi Penyusutan		89.917.486.780	50.212.153.251	42.905.744.049

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap disajikan pada lampiran.

Aset Tetap yang
belum Diregister Rp0

C.21 Aset Tetap yang Belum Diregister

Saldo Aset Tetap yang Belum Diregister per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Aset Tak Berwujud
Rp4.254.296.560

C.22 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp4.254.296.560

dan Rp4.234.323.660. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada Badan Pembinaan Hukum Nasional berupa *software* yang digunakan untuk menunjang operasional kantor. Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan per 31 Desember 2023	4.234.323.660
Mutasi tambah:	
Pembelian	19.972.900
Mutasi kurang:	-
Koreksi	-
Saldo per 30 Juni 2024	4.254.296.560
Akumulasi Amortisasi s.d. 30 Juni 2024	(4.184.325.500)
Nilai Buku per 30 Juni 2024	69.971.060

Rincian Aset Tak Berwujud per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Aset Tak Berwujud periode 30 Juni 2024

Uraian	Nilai Perolehan
Software Komputer :	
- Software Komputer Aplikasi Absensi BPHN	25.300.000
- Aplikasi Integrasi Website BPHN	382.297.500
- Website BPHN	2.058.528.000
- Aplikasi Akses Penyuluhan dan Bantuan Hukum (Sidbankum)	1.483.830.000
- Aplikasi Absensi Berbasis Web	19.140.000
- Aplikasi JDIHN	215.230.000
Aset tak berwujud lainnya (e Book JDIHN)	69.971.060
Jumlah	4.254.296.560

Aset Lain-lain
Rp731.141.600

C.23 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp731.141.600 dan Rp430.984.260. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional Badan Pembinaan Hukum Nasional serta dalam proses penghapusan dari BMN.

Adapun Mutasi Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023	430.984.260
Mutasi tambah:	
Penghentian Aset dari Penggunaan	731.141.600
Mutasi kurang:	
Pencatatan barang yang akan dihapuskan	(430.984.260)
Transaksi Normalisasi (BMN yang dihentikan)	-
Saldo per 30 Juni 2024	731.141.600
Akumulasi Penyusutan 30 Juni 2024	-
Nilai Buku per 30 Juni 2024	731.141.600

Mutasi tambah sebesar Rp731.141.600 adalah berupa penghentian Aset dari penggunaan dengan cara merekam aset yang sudah dihentikan penggunaannya secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi di masa yang akan datang sesuai dengan Berita Acara Penghentian BMN dari Penggunaan Nomor PHN.1-PB.05.05-03 tanggal 31 Mei 2024, yang terdiri dari:

1. Penghentian Aset Dari Penggunaan Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah) sebesar Rp327.034.260;
2. Penghentian Aset Dari Penggunaan Sedan sebesar Rp404.107.340.

Mutasi kurang sebesar Rp430.984.260 adalah berupa berupa Pencatatan barang yang akan dihapuskan , yang terdiri dari :

1. Pencatatan Barang Yang Akan Dihapuskan Sepeda Motor sebesar Rp19.500.000 sesuai dengan Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN.1-PB.03.01-29 tanggal 11 Mei 2024;
2. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang) sebesar Rp124.922.000 sesuai dengan Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN.1-PB.03.01-29 tanggal 11 Mei 2024;
3. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Sepeda Motor sebesar Rp48.882.000 sesuai dengan Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN.1-PB.03.01-29 tanggal 11 Mei 2024;
4. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Sepeda Motor sebesar Rp19.500.000 sesuai Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN.1-PB.03.01-29 tanggal 11 Mei 2024;

5. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Sepeda Motor sebesar Rp19.500.000 sesuai Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN.1-PB.03.01-29 tanggal 11 Mei 2024;
6. Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)sebesar Rp198.680.260 sesuai Berita Acara Penggunaan BMN Kembali Nomor PHN.1-PB.03.01-29 tanggal 11 Mei 2024.

Rincian Aset Lain-lain terdapat pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja dan tersaji dalam tabel berikut :

Rincian Aset Lain-Lain

Periode 30 Juni 2024

KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
3.02.01.01.001	Sedan	Unit	2	404.107.340
3.02.01.02.003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Ke Bawah)	Unit	2	327.034.260
TOTAL			2	731.141.600

C.24 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Lainnya
(Rp4.915.467.100)*

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp4.915.467.100) dan (Rp4.615.309.760). Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 30 Juni 2024 adalah sebagai berikut:

Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
Software	4.184.325.500	(4.184.325.500)	0
Jumlah	4.184.325.500	(4.184.325.500)	0
Aset Lain-lain	731.141.600	(731.141.600)	0
Jumlah	4.915.467.100	(4.915.467.100)	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Uang Muka dari KPPN
Rp1.239.570.00

C.25 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.239.570.000 dan Rp0. Uang Muka dari KPPN merupakan Uang Persediaan (UP) atau Tambahan Uang Persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang muka dari KPPN terdapat pada Kantor Wilayah dan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja. Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran (Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor wilayah) adalah sebagaimana terlampir dalam lampiran Laporan Keuangan ini.

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp1.699.078.942

C.26 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.699.078.942 dan Rp687.628.955. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan akan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan). Pada periode 30 Juni 2024 terdapat saldo Utang Kepada pihak ketiga sebesar Rp1.699.078942 yang dikarenakan adanya belanja-belanja yang sudah direkam pada aplikasi SAKTI Modul Komitmen, tetapi belum terbit SP2Dnya. Utang kepada Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023 pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp687.628.955 telah dibayarkan pada bulan Januari dan Februari Tahun Anggaran 2024. Berikut rincinan pembayaran Utang Pihak Ketiga Tahun Anggaran 2023:

NO	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Pengajuan BAST RPATA untuk SPM pembayaran Desember 2023 yang akan dilanjutkan pembayaran/ SP2D di 2024	589.375.493	Dibayarkan pada tanggal 8 Januari 2024 sesuai SP2D nomor 249991304001179, 249991304001181,249991304001180,249991304001140,249991303002562,249991303002559,249991303002563,249991303002543,249991303002561 dan 249991303002564
2	Utang atas tagihan Listrik Bulan Desember 2023 dengan nomor ID 547100163555	59.552.282	Dibayarkan pada tanggal 18 Januari 2024 sesuai dengan SP2D Nomor 241391303000316
3	Utang atas tagihan Listrik Bulan Desember 2023 dengan nomor ID 547100717100 dan ID 547102931079	37.728.322	
4	Utang atas tagihan telepon Bulan Desember 2023	972.858	Dibayarkan pada tanggal 2 Februari 2024 sesuai SP2D nomor 2413913303001196
Jumlah Total		687.628.955	

Utang Pihak Ketiga terdapat pada Kantor Wilayah dan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja. Berikut rincian Utang Pihak Ketiga pada masing-masing satuan kerja :

Rincian Utang kepada Pihak Ketiga

Periode 30 Juni 2024

NO	Satker	Jumlah	Keterangan
1	BPHN	2.362.202	Pembayaran Belanja Pegawai Untuk Kekurangan Gaji ke-13 Tahun 2024 sebanyak 6 Pegawai/14 Jiwa.
		15.150.518	Pembayaran Belanja Pegawai Untuk Gaji Induk PPPK Bulan Juli 2024 sebanyak 4 PPPK/8 Jiwa
		1.135.034.988	Pembayaran Belanja Pegawai Untuk Gaji Induk Bulan Juli 2024 sebanyak 227 Pegawai/565 Jiwa.
		15.300.000	Pembayaran Belanja Barang sesuai SK Nomor PHN.1-45.KP.08.01 Tahun 2024 tanggal 01 Maret 2024. Honor PPNPN Bulan Juni Tahun 2024 untuk 3 Pegawai. Kantor BPHN TA. 2024
2	Kantor Wilayah Aceh	94.660.000	- Kas Bank atas Perjadiin SPM LS akan dilakukan penarikan di Bulan Juli 2024 - SPM pembayaran OBH di akhir bulan Juni dan SP2Dnya diawal Bulan Juli
3	Kanwil Bengkulu	29.322.904	Honor pokja kegiatan yang belum dibayarkan
4	Kanwil Gorontalo	1.360.000	Terdapat Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 30 Juni 2024 dengan nilai Rp. 1.360.000,- Saldo kas lainnya tersebut merupakan Saldo untuk pembayaran transport dalam kegiatan di bulan Juni, transaksi pembayarandilakukan dengan system CMS, proses transaksi pembayaran/uang masuk di rekening penerima dilakukan pada tanggal 28 Juni 2024, akan tetapi uang masuk/diterima di rekening penerima/peserta pada tanggal 1 Juli 2024.
5	Kanwil Lampung	57.836.930	Perjalanan Dinas sudah keluar SP2D di bulan Juni 2024, namun baru dibayarkan bendahara di Bulan Juli 2024
6	Kanwil Riau	6.330.000	Terdapat Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya pada Tahun Anggaran berjalan sebesar Rp 6.330.000 yang merupakan saldo LS Bendahara untuk Pembayaran Perjalanan Dinas dengan tanggal SP2D 26 Juni 2024. Per 30 Juni 2024 saldo dimaksud belum dibayarkan kepada pelaksana Perjalanan Dinas. Saldo LS bendahara tersebut berada pada Kas Bank yang akan dibayarkan kepada pelaksana melalui CMS.
7	Kanwil Sumatera Barat	800.000	LS Bendahara berupa perjalanan dinas yang belum dibayarkan.
8	Kanwil Sumatera Selatan	5.655.000	LS Honor Tim Pokja Bankum periode April dan Mei 2024, yang diajukan di bulan juni 2024 tp di distribusikan ke penerima honor pada bulan Juli 2024
9	Kanwil Jawa Tengah	62.200.000	spm bankum diajukan di bulan juni, sp2d nya di bulan juli
10	Kanwil Nusa Tenggara Barat	200.000	Ls pembayaran dana obh non litigasi
11	Kanwil Papua	27.000.000	Perjalanan Dinas yg belum Sp2d
12	Kanwil Papua Barat	67.000.000	Tagihan Bankum. SP2D di Bulan Juli 2024
13	Kanwil Sumatera Selatan	92.031.400	SPM LS OBH dan SPM GU yang diajukan diakhir Juni 2024 SP2d keluar di awal Juli 2024
14	Kanwil Sumatera Utara	86.835.000	Belanja barang berupa pembayaran pelaksanaan bantuan hukum oleh OBH. Input SPM di Bulan Juni 2024, namun SP2D di bulan Juli 2024
Jumlah		1.699.078.942	

Utang kepada pihak ketiga periode 30 Juni 2024 akan terbit SP2D pada bulan Juli 2024.

Utang Yang Belum
Ditagihkan
Rp487.827.887

C.27 Utang Yang Belum Ditagihkan

Saldo Utang Yang Belum Ditagihkan per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp487.827.887 dan Rp0. Utang Yang belum Ditagihkan terdapat pada kantor wilayah dan Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja. Berikut rincian Utang Yang Belum Ditagihkan per satuan kerja:

NO	Satker	Jumlah	Keterangan
1	Kanwil Bangka Belitung	10.987.700	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya merupakan utang akrual saat pencatatan kwintansi Bulan Juni 2024 tapi belum dipertanggungjawabkan.
2	Kanwil Bengkulu	28.568.000	Belanja perjalanan dinas yang belum dibayarkan karena masih proses penerbitan SP2d
3	Kanwil Jawa Timur	188.800.000	belanja barang berupa jasa konsultan yang sudah dilakukan penginputan BAST namun masih dalam proses penerbitan SP2D.
4	BPHN	259.472.187	Kuitansi yang sudah dicatat pada modul komitmen namun belum terbit SPP
Jumlah Belanja		487.827.887	

Pendapatan
Diterima di Muka
Rp0

C.28 Pendapatan Diterima di Muka

Nilai Pendapatan Diterima di Muka per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp27.547.806. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara, namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNBPN. Pada periode 30 Juni 2024 nilai pendapatan diterima dimuka Rp0, dikarenakan sudah dilakukan jurnal balik atas pendapatan sewa kantin tahun 2023 dan akan dilakukan pencatatan kembali pada semester II tahun 2024.

*Utang
pendek
Rp4.800.644*

*Jangka
lainnya*

C.29 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.800.644 dan Rp0, Utang jangka pendek lainnya merupakan utang pajak yang belum disetorkan ke Kas negara. Utang Jangka Pendek Lainnya terdapat pada :

1. Kantor Wilayah Jawa Timur sebesar Rp646.500;
2. Kantor Wilayah Sulawesi Selatan sebesar Rp3.614.144;
3. Kantor Wilayah Sulawesi Utara sebesar Rp540.000.

*Beban yang Masih
harus Dibayar Rp0*

C.30 Beban yang Masih Harus Dibayar

Beban yang Masih Harus Dibayar per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0, merupakan kewajiban pemerintah kepada pihak ketiga yang pada tanggal pelaporan keuangan belum diterima tagihannya, dengan rincian sebagai berikut.

*Ekuitas
Rp393.977.849.335*

C.31 Ekuitas

Ekuitas per 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp393.977.849.335 dan Rp399.075.137.055. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNB
Rp27.547.806

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp27.547.806 dan Rp9.358.395. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Perbandingan Jumlah Pendapatan 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	% Naik (TURUN)
Pendapatan PNB Lainnya	27.547.806	9.358.395	194,36

Rincian Pendapatan periode 30 Juni 2024

URAIAN	TH 2024
Pendapatan PNB Lainnya	
- Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	27.547.806
- Pendapatan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan	-
- Pendapatan Anggaran Lain-lain	-
Jumlah	27.547.806

Pendapatan LO sebesar Rp27.547.806 pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan pendapatan bukan pajak berupa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp27.547.806 yang merupakan jurnal balik penyesuaian atas Pendapatan Sewa Kantin BPHN tahun 2023, untuk jangka waktu 2 tahun yang berlaku mulai 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 September 2025 sesuai dengan Surat Perjanjian Sewa Atas Sebagian Tanah Atau Bangunan Pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN1-PB.03.01-34 Tanggal 12 September 2023 sebesar Rp31.514.000.

Beban Pegawai
Rp11.219.962.835

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada periode 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp11.219.962.835 dan Rp10.267.024.492. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Perbandingan Jumlah Beban Pegawai

30 Juni 2024 dan 2023

JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Pegawai	11.219.962.835	10.267.024.492	9,28

Rincian Beban Pegawai

Periode 30 Juni 2024

URAIAN JENIS BEBAN	30 JUNI 2024
Beban Gaji Pokok PNS	7.683.030.400
Beban Pembulatan Gaji PNS	112.749
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	511.424.230
Beban Tunj Anak PNS	135.651.038
Beban Tunj. Struktural PNS	240.780.000
Beban Tunj. Fungsional PNS	1.162.284.000
Beban Tunj. PPh PNS	151.850.104
Beban Tunj. Beras PNS	364.707.120
Beban Uang Makan PNS	605.395.000
Beban Tunjangan Umum PNS	91.725.000
Beban Gaji Pokok PPPK	60.624.000
Beban Pembulatan Gaji PPPK	834
Beban Tunj. Suami/Istri PPPK	2.858.800
Beban Tunj Anak PPPK	571.760
Beban Tunj. Fungsional PPPK	8.800.000
Beban Tunj. Beras PPPK	2.896.800
Beban Uang Makan PPPK	4.382.000
Beban Uang Lembur	190.114.000
Beban Uang Lembur PPPK	2.755.000
Jumlah	11.219.962.835

Terdapat perbedaan antara Beban pegawai pada Laporan Operasional dan Belanja pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran sebesar Rp1.152.547.708, perbedaan tersebut disebabkan karena SPP Belanja Pegawai berupa Gaji Induk

Bulan Juli 2024 yang sudah diinput di aplikasi SAKTI pada bulan juni sehingga menimbulkan utang kepada pihak ketiga yang juga menambah beban pegawai pada Laporan Operasional. Berikut rincian perbedaan antara Beban pegawai dan belanja pegawai periode Juni 2024 adalah sebagai berikut :

BELANJA PEGAWAI (LRA)	BEBAN PEGAWAI (LO)	SELISIH	KETERANGAN
10.067.415.127	11.219.962.835	-2.362.202	Pembayaran Belanja Pegawai Untuk Kekurangan Gaji ke-13 Tahun 2024 sebanyak 6 Pegawai/14 Jiwa.
		-15.150.518	Pembayaran Belanja Pegawai Untuk Gaji Induk PPPK Bulan Juli 2024 sebanyak 4 PPPK/8 Jiwa
		-1.135.034.988	Pembayaran Belanja Pegawai Untuk Gaji Induk Bulan Juli 2024 sebanyak 227 Pegawai/565 Jiwa.
		-15.300.000	Pembayaran Belanja Barang sesuai SK Nomor PHN.1-45.KP.08.01 Tahun 2024 tanggal 01 Maret 2024. Honor PPNP Bulan Juni Tahun 2024 untuk 3 Pegawai. Kantor BPHN TA. 2024
	Total	1.152.547.708	

D.3 Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp240.445.993*

Jumlah Beban Persediaan pada 30 Juni 2024 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp240.445.993 dan Rp198.007.057. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Beban persediaan terdapat pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja sebesar Rp198.007.057. Rincian Beban Persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Rincian Beban Persediaan

Periode 30 Juni 2024

NO	URAIAN JENIS BEBAN	NAMA SATKER	TH 2024
1	Beban Persediaan Konsumsi	BPHN	240.445.993
Jumlah Beban Persediaan			240.445.993

*Perbandingan Jumlah Beban Persediaan
30 Juni 2023 dan 2023*

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Persediaan Konsumsi	240.445.993	198.007.057	21,43
Beban Persediaan Bahan Baku	-	0	0
Beban Persediaan Lainnya	-	0	0
Jumlah	240.445.993	198.007.057	21,43

*Beban Barang dan
Jasa
Rp35.018.614.922*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp35.018.614.922 dan Rp36.937.200.645. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas, serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Rincian Beban Barang dan Jasa
30 Juni 2024 dan 2023*

URAIAN	TH 2024	TH 2023	% Naik (TURUN)
Beban Barang dan Jasa	35.018.614.922	36.937.200.645	(5,19)

Rincian Beban Barang dan Jasa

Periode 30 Juni 2024

URAIAN	TH 2024
Beban Keperluan Perkantoran	2.215.202.254
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Surat	-
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	41.100.000
Beban Barang Operasional Lainnya	34.372.600
Beban Bahan	2.667.706.489
Beban Honor Output Kegiatan	340.314.000
Beban Barang Non Operasional Lainnya	286.520.252
Beban Langganan Listrik	487.436.864
Beban Langganan Telepon	4.681.579
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	112.237.425
Beban Jasa Konsultan	26.686.965.200
Beban Sewa	1.476.174.000
Beban Jasa Profesi	273.872.259
Beban Jasa Lainnya	392.032.000
Jumlah	35.018.614.922

Pada periode 30 Juni 2024 nilai beban pengiriman surat dinas pos pusat adalah Rp0, hal ini disebabkan karena belum adanya realisasi belanja pengiriman surat dinas pos pusat, belanja tersebut akan direalisasikan pada akhir bulan Desember 2024 untuk pengiriman kalender BPHN.

Beban Pemeliharaan
Rp1.726.708.168

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.726.708.168 dan Rp1.828.494.749. Beban pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal. Rincian beban pemeliharaan untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Jumlah Beban Pemeliharaan

30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	% Naik (TURUN)
Beban Pemeliharaan	1.726.708.168	1.828.494.749	(5,57)

Rincian Beban Pemeliharaan

Periode 30 Juni 2024

URAIAN	TH 2024
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	993.326.040
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	663.181.328
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	70.200.800
Jumlah	1.726.708.168

Beban Perjalanan Dinas
Rp8.876.422.610

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp8.876.422.610 dan Rp10.706.081.607 dan. Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan. Jumlah Beban perjalanan Dinas untuk 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Jumlah Beban Perjalanan Dinas

30 Juni 2024 dan 2023

JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Beban Perjalanan Dinas	8.876.422.610	10.706.081.607	(17,09)

Rincian Beban Perjalanan Dinas

Periode 30 Juni 2024

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024
Beban Perjalanan Dinas Biasa	7.111.059.855
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	859.150.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	239.262.000
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	557.661.868
Belanja Perjalanan Biasa - Luar Negeri	109.288.887
Jumlah	8.876.422.610

*Beban Barang untuk
Diserahkan kepada
Masyarakat Rp0*

D.7 Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat periode 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat merupakan beban pemerintah dalam bentuk barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk mencapai tujuan entitas.

*Beban Bantuan
Sosial Rp0*

D.8 Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial periode 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0 dikarenakan Badan Pembinaan Hukum Nasional bukan merupakan instansi pengelola ataupun penyalur Bantuan Sosial. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, yang sifatnya tidak terus-menerus dan selektif.

*Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp3.025.899.078*

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp3.025.899.078 dan Rp2.956.525.650. Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi
30 Juni 2024 dan 2023*

URAIAN	TH 2024	TH 2023	% Naik (TURUN)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3.025.899.078	2.956.525.650	2,35

*Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi
Periode 30 Juni 2024*

URAIAN BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	TH 2024
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	942.184.847
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2.083.714.231
Jumlah Penyusutan	3.025.899.078
Beban Amortisasi Software	-
Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud Lainnya	-
Jumlah Amortisasi	-
Beban Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	-
Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-
Jumlah	3.025.899.078

*Beban Penyisihan
Piutang Tak tertagih
(Rp295.744)*

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar (Rp295.744) dan Rp0. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

*Perbandingan Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
30 Juni 2024 dan 2023*

URAIAN JENIS BEBAN	TH 2024	TH 2023	% Naik (TURUN)
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(295.744)	-	0,00

D.11 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Pos Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Perbandingan Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional 30 Juni 2024 dan 2023

URAIAN	TH 2024	TH 2023	NAIK (TURUN) %
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	187.646.313	14.594.200	1185,76

Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Periode 30 Juni 2024

URAIAN	TH 2024
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	115.487.000
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya *)	72.159.313
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya *)	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional	187.646.313

Rincian Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional periode 30 Juni 2024 sebesar Rp 187.646.313 terdiri dari :

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp115.487.000 berupa Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa Lelang 1 paket Eks sesuai dengan Risalah Lelang Nomor 178/07.04/2024-01 tanggal 6 Mei 2024 berupa 1 (satu) paket Eks Kendaraan Dinas Kondisi rusak Berat yaitu mobil Mitsubishi FE 349 Tahun 2004 NOPOL B 7196 MQ dan Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2006 Nopol B 2640 SQ sebesar Rp115.487.000 sesuai NTPN BC71D2G4VPKREJFV tanggal 08 Mei 2024;

2. Pengembalian kelebihan pembayaran kendaraan operasional sewa kendaraan dinas TA 2023 pada kantor BPHN sebesar Rp62.520.000 sesuai NTPN 7F3E561QV3UJHP6K tanggal 15 Mei 2024;
3. Pada Kantor Wilayah Jawa Timur sebesar Rp4.000.000 berupa pengembalian Pengembalian duplikasi anggaran bantuan hukum TA. 2023 a.n BUSEN dan Mukhammad yang merupakan hasil audit Inspektorat Jenderal kementerian Hukum dan HAM atas pemeriksaan terhadap dokumen pencairan anggaran bantuan hukum tahun anggaran 2023 sesuai surat Nomor ITJ-PW.03.04-30 tanggal 8 Maret 2024 sesuai NTPN 735c48VVEMELAGI dan 7BDC355DF98R29E6 tanggal 03 April 2024;
4. Pada Kantor Wilayah Lampung sebesar Rp3.389.260 berupa pengembalian kelebihan belanja transport hasil temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2023 sesuai NTPN 74ADE0NA04DDHURS tanggal 19 April 2024 dan 2B26A55DF9BRE3NT tanggal 03 Mei 2024;
5. Pada Kantor Wilayah Bengkulu sebesar Rp290.000 berupa Pengembalian Biaya Transport Luar Kota ke Arga makmur Tahun 2022 a.n. CIK Yang karena adanya hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai NTPN 08AD07QLUP0JRSLK tanggal 23 April 2024;
6. Pada Kantor Wilayah Papua Barat sebesar Rp1.960.000 berupa Pengembalian duplikasi anggaran bantuan hukum TA. 2023 a.n Gilber Lorenza Putra Jewahan yang merupakan hasil audit Inspektorat Jenderal kementerian Hukum dan HAM atas pemeriksaan terhadap dokumen pencairan anggaran bantuan hukum tahun anggaran 2023 sesuai surat Nomor ITJ-PW.03.04-30 tanggal 8 Maret 2024 sesuai NTPN 8D28F7NAPADKJTFF tanggal 22 Mei 2024.

**) Pendapatan/Beban Penyesuaian Nilai Persediaan timbul karena kebijakan penilaian persediaan menggunakan metode Harga Perolehan Terakhir. Akun ini tidak akan muncul ketika penilaian persediaan menggunakan metode First In First Out (FIFO) mulai tahun 2017*

Pos-Pos Luar Biasa Rp0 **D.12 POS-POS LUAR BIASA**
Pos Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Tidak terdapat nilai Pos Luar Biasa baik untuk 30 Juni 2024 dan 2023.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal Rp399.075.137.055 **E.1 Ekuitas Awal**
Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 01 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp399.075.137.055 dan Rp400.237.667.014.

Defisit (Rp59.892.563.743) **E.2 Defisit LO**
Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah defisit sebesar (Rp59.892.563.743) dan (Rp62.869.381.605). Surplus (Defisit) LO merupakan penjumlahan selisih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa.

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Rp0 **E.3.1 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar**
Transaksi Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 sebesar Rp0.

Penyesuaian Nilai Aset Rp0 **E.3.2 Penyesuaian Nilai Aset**
Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan terakhir.

Koreksi Persediaan Rp0 **E.3.3 Koreksi Nilai Persediaan**
Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian

persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Atas Reklasifikasi Rp0

E.3.4 Koreksi Atas Reklasifikasi

Koreksi Atas Reklasifikasi mencerminkan koreksi atas nilai reklasifikasi aset yang diakibatkan karena kesalahan dalam pencatatan aset yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi kurang atas reklasifikasi untuk 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Selisih Revaluasi Aset Tetap Rp0

E.3.5 Selisih Revaluasi Aset Tetap

Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp0 dan Rp0.

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi (Rp0)

E.3.6 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini terjadi karena adanya kesalahan dalam proses penginputan transaksi pembelian buku tanpa rincian pada modul aset sehingga harus dilakukan koreksi perubahan nilai berkurang kemudian diinput kembali pada menu perolehan lainnya. Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi periode 30 Juni 2024 terdapat pada kantor wilayah:

Rincian Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

Periode 30 Juni 2024

Jenis Aset Tetap	Nilai Koreksi
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	-
Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi	-
Jumlah	-

Koreksi Lain-lain Rp0

E.3.7 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir pada 30 Juni 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp0 dan Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara,

antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang. Koreksi lain-lain terdiri dari:

Rincian Koreksi Lain-Lain 30 Juni 2024

Jenis Beban	Jumlah Koreksi
Koreksi Lainnya	-
Jumlah	-

Transaksi Antar Entitas
Rp54.795.276.023

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 30 Juni 202 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp54.795.276.023 dan Rp57.479.635.336. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Periode 30 Juni 2024

Transaksi Antar Entitas	Nilai
Diterima dari Entitas Lain	(246.795.043)
Ditagihkan ke Entitas Lain	55.260.141.666
Transfer Keluar	(218.070.600)
Transfer Masuk	-
Pengesahan Hibah Langsung	-
Jumlah	54.795.276.023

Rincian Transaksi Antar Entitas terdiri dari:

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 30 Juni 2024, DDEL sebesar (Rp246.795.043) dengan rincian sebagai berikut :

1. Badan Pembinaan Hukum Nasional sebesar Rp237.155.783 berupa:
 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin berupa Lelang 1 paket Eks sesuai dengan Risalah Lelang Nomor

178/07.04/2024-01 tanggal 6 Mei 2024 berupa 1 (satu) paket Eks Kendaraan Dinas Kondisi rusak Berat yaitu mobil Mitsubishi FE 349 Tahun 2004 NOPOL B 7196 MQ dan Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2006 Nopol B 2640 SQ sebesar Rp115.487.000 sesuai NTPN BC71D2G4VPKREJFV tanggal 08 Mei 2024;

- Pembulatan belanja pegawai sebesar Rp53 sesuai dengan SPM Nomor 00015T tanggal 9 Januari 2024;
 - Pengembalian kelebihan/selisih pembayaran iuran BPJS Kesehatan terkait pengadaan outsourcing Tahun 2023 sebesar Rp12.068.375 sesuai NTPN 9D5EA55DF96JNTN9 tanggal 28 Maret 2024;
 - Pengembalian kelebihan pembayaran kendaraan operasional sewa kendaraan dinas TA 2023 pada kantor BPHN sebesar Rp62.520.000 sesuai NTPN 7F3E561QV3UJHP6K tanggal 15 Mei 2024;
 - Pengembalian kelebihan bayar pekerjaan konstruksi renovasi lt. 2 Gd Annex, ruang kerja pimpinan Gd. SJDI dan ruang kerja pimpinan Gd. Induk kantor BPHN sebesar Rp47.080.355 sesuai NTPN 2A2DE6U8EUGJ5AUI tanggal 03 Mei 2024;
2. Pada Kantor Wilayah Jawa Timur sebesar Rp4.000.000 berupa pengembalian Pengembalian duplikasi anggaran bantuan hukum TA. 2023 a.n BUSEN dan Mukhammad yang merupakan hasil audit Inspektorat Jenderal kementerian Hukum dan HAM atas pemeriksaan terhadap dokumen pencairan anggaran bantuan hukum tahun anggaran 2023 sesuai surat Nomor ITJ-PW.03.04-30 tanggal 8 Maret 2024 sesuai NTPN 735c48VVEMELAGI dan 7BDC355DF98R29E6 tanggal 03 April 2024;
3. Pada Kantor Wilayah Lampung sebesar Rp3.389.260 berupa pengembalian kelebihan belanja transport hasil temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM tahun anggaran 2023 sesuai NTPN 74ADE0NA04DDHURS tanggal 19 April 2024 dan 2B26A55DF9BRE3NT tanggal 03 Mei 2024;

4. Pada Kantor Wilayah Bengkulu sebesar Rp290.000 berupa Pengembalian Biaya Transport Luar Kota ke Arga makmur Tahun 2022 a.n. CIK Yang karena adanya hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai NTPN 08AD07QLUP0JRSKL tanggal 23 April 2024;
5. Pada Kantor Wilayah Papua Barat sebesar Rp1.960.000 berupa Pengembalian duplikasi anggaran bantuan hukum TA. 2023 a.n Gilber Lorenza Putra Jewahan yang merupakan hasil audit Inspektorat Jenderal kementerian Hukum dan HAM atas pemeriksaan terhadap dokumen pencairan anggaran bantuan hukum tahun anggaran 2023 sesuai surat Nomor ITJ-PW.03.04-30 tanggal 8 Maret 2024 sesuai NTPN 8D28F7NAPADKJTFF tanggal 22 Mei 2024.

Sedangkan Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp55.260.141.666 berupa transaksi realisasi belanja pada DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional dan Kantor Wilayah.

Rincian Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Periode 30 Juni 2024

Akun	Uraian	Transaksi belanja
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp 9.809.568.625
5111	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	Rp (6.174)
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	Rp 64.983.676
5111	Pengembalian Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	Rp -
5122	Belanja Lembur	Rp 192.869.000
5211	Belanja Barang Operasional	Rp 2.261.522.854
5212	Belanja Barang Non Operasional	Rp 3.238.099.241
5212	Pengembalian Belanja Barang Non Operasional	Rp -
5218	Belanja Barang Persediaan	Rp 214.757.926
5218	Pengembalian Belanja Persediaan	Rp -
5221	Belanja Jasa	Rp 28.934.877.789
5221	Pengembalian Belanja Jasa	Rp -
5231	Belanja Pemeliharaan	Rp 1.633.608.406
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp 8.687.012.823
5241	Pengembalian Belanja Perjalanan Dalam Negeri	Rp (775.000)
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri	Rp -
5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp -
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp -
5361	Belanja Modal Lainnya	Rp 223.622.500
Jumlah Total		Rp 55.260.141.666

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN.

Transfer Masuk sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp0. Tidak terdapat transfer Masuk pada DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 30 Juni 2024 sebesar Rp218.070.600 berupa buku hukum (monografi) dari Divisi Pelayanan Hukum (DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional) kepada Divisi Administrasi (DIPA Sekretariat Jenderal) sebesar Rp155.858.100 dan Laptop dari Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku satuan kerja ke Kantor Wilayah Divisi Administrasi sebesar Rp62.212.500 (termasuk akumulasi penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp41.725.674) dengan rincian sebagai berikut:

Rincian Transfer Keluar
Periode 30 Juni 2024

No	Satker Pengirim	Jenis Barang	Satker Penerima	Jumlah
1	Kenwil DKI Jakarta (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kenwil DKI Jakarta (Divisi Administrasi)	3.935.000
2	Kenwil Jawa Barat (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kenwil Jawa Barat (Divisi Administrasi)	7.500.000
3	Kenwil Jawa Timur (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kenwil Jawa Timur (Divisi Administrasi)	9.986.400
4	Kenwil Sumatera Barat (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kenwil Sumatera Barat (Divisi Administrasi)	4.000.000
5	Kenwil Riau (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kenwil Riau (Divisi Administrasi)	6.600.000
6	Kenwil Lampung (Divisi Pelayanan Hukum)	Buku Lainnya	Kenwil Lampung (Divisi Administrasi)	9.920.000
7	Kenwil Kalimantan Barat (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kenwil Kalimantan Barat (Divisi Administrasi)	5.970.000
8	Kenwil Kalimantan Selatan (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kenwil Kalimantan Selatan (Divisi Administrasi)	14.980.000
9	Kenwil Sulawesi Utara (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kenwil Sulawesi Utara (Divisi Administrasi)	6.000.000
10	Kenwil Jambi (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kenwil Jambi (Divisi Administrasi)	9.000.000
11	Kenwil Bengkulu (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kenwil Bengkulu (Divisi Administrasi)	26.000.000
12	Kenwil Yogyakarta (Divisi Pelayanan Hukum)	Buku Lainnya	Kenwil Yogyakarta (Divisi Administrasi)	15.000.000
13	Kenwil Nusa Tenggara Barat (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kenwil Nusa Tenggara Barat (Divisi Administrasi)	11.500.000
14	Kenwil Banten (Divisi Pelayanan Hukum)	Buku Lainnya	Kenwil Banten (Divisi Administrasi)	2.000.000
15	Kenwil Gorontalo (Divisi Pelayanan Hukum)	Buku Lainnya	Kenwil Gorontalo (Divisi Administrasi)	4.474.700
16	Kenwil Papua Barat (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kenwil Papua Barat (Divisi Administrasi)	10.000.000
17	Kenwil Kepulauan Riau (Divisi Pelayanan Hukum)	Monografi	Kenwil Kepulauan Riau (Divisi Administrasi)	8.992.000
18	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Peralatan dan Mesin (Laptop)	Kenwil Sulawesi Selatan (Divisi Administrasi)	13.825.000
19	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Kenwil Sulawesi Selatan (Divisi Administrasi)	(3.456.250)
20	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Peralatan dan Mesin (Laptop)	Kenwil Kalimantan Barat (Divisi Administrasi)	13.825.000
21	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Kenwil Kalimantan Barat (Divisi Administrasi)	(3.456.250)
22	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Peralatan dan Mesin (Laptop)	Kenwil Kalimantan Timur (Divisi Administrasi)	13.825.000
23	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Kenwil Kalimantan Timur (Divisi Administrasi)	(3.456.250)
24	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Peralatan dan Mesin (Laptop)	Kenwil Yogyakarta (Divisi Administrasi)	13.825.000
25	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Kenwil Yogyakarta (Divisi Administrasi)	(3.456.250)
26	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Peralatan dan Mesin (Laptop)	Kenwil Sulawesi Tengah (Divisi Administrasi)	13.825.000
27	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Kenwil Sulawesi Tengah (Divisi Administrasi)	(3.456.250)
28	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Peralatan dan Mesin (Laptop)	Kenwil Kepulauan Riau (Divisi Administrasi)	13.825.000
29	Badan Pembinaan Hukum Nasional	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Kenwil Kepulauan Riau (Divisi Administrasi)	(3.456.250)
J U M L A H				218.070.600

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung KL dalam bentuk kas, barang maupun jasa sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Tidak terdapat Hibah langsung pada DIPA Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Ekuitas Akhir
Rp393.977.849.335

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai ekuitas pada tanggal 30 Juni 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp393.977.849.335 dan Rp394.847.920.745.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 KEJADIAN-KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

F.2 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Pada tanggal 02 Januari 2024 telah dilakukan jurnal balik atas jurnal atas pengakuan pendapatan diterima dimuka atas sewa kantin pada akhir tahun 2023 sebesar Rp27.547.806 (memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
2. Pada tanggal 08 Januari 2024 telah dilakukan pembayaran atas pengajuan BAST RPATA untuk SPM Pembayaran 2023 sebesar Rp589.375.493 sesuai SP2D Nomor 249991304001179,249991304001181, 249991304001180, 249991304001140, 249991303002562, 249991303002559, 249991303002563, 249991303002543, 249991303002561 dan 249991303002564 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
3. Pada Tanggal 8 Januari 2024 telah dilakukan Jurnal Balik atas Koreksi beban atas Kelebihan Pembayaran Outsourcing dan telah disetorkan ke kas negara pada

- 2024 sebesar Rp12.068.375 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
4. Pada Tanggal 8 Januari 2024 telah dilakukan Jurnal Balik atas Koreksi atas kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi renovasi lantai 2 gedung annex, ruang kerja pimpinan dan SDJI sebesar Rp47.080.355 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
 5. Pada Tanggal 8 Januari 2024 telah dilakukan Jurnal Balik penyisihan piutang tidak tertagih sebesar Rp295.744. Jurnal balik penyisihan piutang tidak tertagih terdiri dari Penyisihan Piutang lainnya atas kelebihan pembayaran belanja barang sebesar Rp60.342 dan Penyisihan Piutang lainnya atas koreksi aset terkait kelebihan pembayaran belanja modal yang tidak sesuai ketentuan sebesar Rp235.402;
 6. Pada tanggal 18 Januari 2024 telah dilakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga berupa tagihan listrik kantor BPHN dengan no ID 547100163555 sebesar Rp59.552.282 sesuai SP2D nomor 241391303000316 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
 7. Pada tanggal 18 Januari 2023 telah dilakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga berupa tagihan listrik kantor BPHN dengan no ID 547100717100 dan ID 547102931079 sebesar Rp37.728.322 sesuai SP2D nomor 241391303000316 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);
 8. Pada tanggal 02 Februari 2024 telah dilakukan pembayaran utang kepada pihak ketiga berupa tagihan telepon kantor BPHN sebesar Rp972.858 sesuai SP2D nomor 2413913303001196 (sudah dilakukan jurnal balik dan memo penyesuaian disajikan pada lampiran Laporan Keuangan ini);

9. Pada Kantor Wilayah Jawa Barat terdapat transaksi resiprokal terkait belanja bantuan hukum antara Kantor Wilayah Jawa Barat dan Universitas Singaperbangsa Karawang (UNSIKA) sebesar Rp61.740.000 namun dalam pencatatan resiprokal masih terdapat selisih sebesar Rp55.566.000 hal ini disebabkan karena pihak UNSIKA hanya bisa mencatat senilai 10% dari total menjadi senilai Rp6.174.000 yang merupakan pendapatan disahkan sehubungan dana kerjasama dengan PKBH;
10. Sampai dengan penyusunan Laporan Keuangan Semester I masih terdapat Kantor Wilayah yang belum dapat melakukan tutup buku modul GLP yaitu Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tenggara DIPA BPHN. Hal ini disebabkan karena adanya permasalahan pada aplikasi SAKTI modul persediaan yang belum bisa tutup terkait adanya pergantian operator yang belum didaftarkan ke KPPN. Pihak Kanwil telah melakukan koordinasi dengan KPPN setempat dan diarahkan untuk menambahkan kewenangan modul persediaan melalui pemutakhiran user operator SAKTI. Saat ini pemutakhiran user operator SAKTI modul persediaan telah diajukan ke KPPN. Tutup buku Semester I Tahun 2024 akan dilakukan ketika pemutakhiran user operator SAKTI modul persediaan telah berhasil diproses oleh KPPN;
11. Terdapat belanja modal pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional dan 21 Kantor Wilayah sebesar Rp 223.622.500, belanja modal tersebut berupa belanja modal lainnya sebesar Rp223.622.500. Belanja modal yang terealisasi mempengaruhi penambahan aset tetap lainnya sebesar Rp47.791.500 dan aset tidak berwujud sebesar Rp19.972.900 sehingga penambahan aset pada Neraca sebesar Rp67.764.400. Dengan demikian terdapat selisih antara belanja modal dalam LRA dengan kenaikan jumlah aset pada neraca sebesar Rp155.858.100 yang disebabkan karena adanya transfer Keluar pada 21 Kantor

Wilayah berupa Monografi dan buku lainnya dari Divisi Pelayanan Hukum ke Divisi Administrasi.

F.3 TINDAK LANJUT TEMUAN

1. Pada Kantor Wilayah Jawa timur Terdapat temuan audit Inspektorat Jenderal atas Laporan Keuangan TA.2023 berupa indikasi duplikasi pencairan anggaran bantuin hukum yang disampaikan oleh organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) sebesar Rp4.000.000. Atas temuan tersebut telah dilakukan pengembalian kepada negara pada 3 April 2024 dengan nomor NTB: 318893377073, NTPN: 7BDC355DF98R29E6 dan nomor NTB: 000078124416, NTPN : E735C48VVEMELAGI;
2. Pada Kantor Wilayah Bengkulu Komponen belanja perjalanan dinas luar kota terdiri atas uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, dan uang representative untuk pejabat yang harus dipertanggungjawabkan Hasil pemeriksaan dokumen dan konfirmasi dan wawancara menunjukkan bahwa terdapat bukti biaya transportasi dan biaya penginapan yang dipertanggungjawabkan pelaksana lebih besar dari pada bukti yang valid, dengan temuan berupa Belanja biaya perjalanan dinas biasa berupa Transport Luar Kota Terdapat temuan BPK terkait perjalanan dinas biasa Tahun Anggaran 2022 (TAYL). Sejumlah Rp. 290.000,- (dua ratus Sembilan puluh ribu rupiah);
3. Pada Kantor Wilayah Lampung terdapat temuan Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia atas Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan Tahun Anggaran 2023 smapai dengan Februari 2024. Temuan tersebut berupa pembayaran perjalanan dinas biasa pejabat dan pegawai (524111) yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai sebesarRp3.389.260 dan telah disetorkan ke Negara sesuai NTPN 74ADE0NA04DDHURS tanggal 19 April 2024 sebesar Rp1.209.140 dan NTPN 2B26A55DF9BRE3NT tanggal 03 Mei 2024;

4. Pada Kantor Wilayah Papua Barat terdapat temuan Inspektorat Jenderal kementerian Hukum dan Hak Asasi Manuasia atas pemeriksaan terhadap dokumen pencairan anggaran bantuan hukum tahun anggaran 2023. Temuan tersebut berupa duplikasi anggaran bantuan hukum TA. 2023 a.n Gilber Lorenza Putra Jewahan sesuai surat Nomor ITJ-PW.03.04-30 tanggal 8 Maret 2024, atas temuan tersebut telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN 8D28F7NAPADKJTFF tanggal 22 Mei 2024;
5. Pada Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional terdapat temuan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pemeriksaan Laporan Keuangan tahun anggaran 2023 dengan rincian sebagai berikut:
- Kelebihan/selisih pembayaran iuran BPJS Kesehatan terkait pengadaan Outsourcing tahun 2023 dan telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN 9D5EA55DF96JNTN9 tanggal 28 Maret 2024 sebesar Rp12.068.375;
 - Kelebihan pekerjaan konstruksi renovasi Lantai 2 Gedung Annex, Ruang Kerja Pimpinan Gedung SJDI serta Ruang Kerja Pimpinan Gedung Induk, Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional dan telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN 2A2DE6U8EUGJ5AUI tanggal 2 Mei 2024 sebesar Rp47.080.355;
 - Kelebihan pembayaran kendaraan operasional sewa dan telah disetorkan ke kas negara sesuai NTPN 7F3E561QV3UJHP6K tanggal 15 Mei 2024 sebesar Rp62.520.000.



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



LAMPIRAN

LAMPIRAN



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



LAMPIRAN

MONSAKTI



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



LAMPIRAN KEUANGAN

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 25/07/24 8:12 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	11,156,816,000	11,911,736,000	6,828,083,200	0	6,828,083,200	57.32	5,083,652,800
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	177,000	178,000	107,231	6,174	101,057	56.77	76,943
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	750,000,000	791,868,000	453,652,470	0	453,652,470	57.29	338,215,530
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	198,000,000	210,837,000	120,475,902	0	120,475,902	57.14	90,361,098
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	934,000,000	368,140,000	211,775,000	0	211,775,000	57.53	156,365,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	911,000,000	1,793,884,000	1,037,016,000	0	1,037,016,000	57.81	756,868,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	77,900,000	171,476,000	147,646,742	0	147,646,742	86.1	23,829,258
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	603,000,000	565,818,000	324,007,080	0	324,007,080	57.26	241,810,920
511129	Belanja Uang Makan PNS	2,064,480,000	1,459,980,000	605,395,000	0	605,395,000	41.47	854,585,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	254,000,000	142,190,000	81,410,000	0	81,410,000	57.25	60,780,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	16,949,373,000	17,416,107,000	9,809,568,625	6,174	9,809,562,451	56.32	7,606,544,549
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	122,000,000	48,499,200	0	48,499,200	39.75	73,500,800
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	8,000	588	0	588	7.35	7,412
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	6,000,000	2,287,040	0	2,287,040	38.12	3,712,960
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	1,500,000	457,408	0	457,408	30.49	1,042,592
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	17,600,000	7,040,000	0	7,040,000	40	10,560,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	5,800,000	2,317,440	0	2,317,440	39.96	3,482,560
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	31,680,000	4,382,000	0	4,382,000	13.83	27,298,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	184,588,000	64,983,676	0	64,983,676	35.2	119,604,324
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	455,280,000	455,280,000	190,114,000	0	190,114,000	41.76	265,166,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	37,056,000	2,755,000	0	2,755,000	7.43	34,301,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	455,280,000	492,336,000	192,869,000	0	192,869,000	39.17	299,467,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	17,404,653,000	18,093,031,000	10,067,421,301	6,174	10,067,415,127	55.64	8025615873
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,461,910,000	4,464,342,000	2,199,902,254	0	2,199,902,254	49.28	2,264,439,746
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,300,000	9,300,000	0	0	0	0	9,300,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	80,256,000	81,744,000	27,248,000	0	27,248,000	33.33	54,496,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	30,500,000	55,220,000	34,372,600	0	34,372,600	62.25	20,847,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	4,581,966,000	4,610,606,000	2,261,522,854	0	2,261,522,854	49.05	2,349,083,146
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	5,245,921,000	5,875,492,000	2,629,702,989	0	2,629,702,989	44.76	3,245,789,011

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 25/07/24 8:12 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,252,950,000	1,339,228,000	325,876,000	0	325,876,000	24.33	1,013,352,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,039,180,000	1,096,666,000	282,520,252	0	282,520,252	25.76	814,145,748
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	7,538,051,000	8,311,386,000	3,238,099,241	0	3,238,099,241	38.96	5,073,286,759
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	405,456,000	357,557,000	154,722,300	0	154,722,300	43.27	202,834,700
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	100,000,000	100,000,000	60,035,626	0	60,035,626	60.04	39,964,374
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	505,456,000	457,557,000	214,757,926	0	214,757,926	46.94	242,799,074
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,716,000,000	1,716,000,000	584,717,468	0	584,717,468	34.07	1,131,282,532
522112	Belanja Langganan Telepon	60,000,000	60,000,000	5,654,437	0	5,654,437	9.42	54,345,563
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	448,300,000	448,300,000	112,237,425	0	112,237,425	25.04	336,062,575
522131	Belanja Jasa Konsultansi	56,365,320,000	56,365,320,000	26,090,190,200	0	26,090,190,200	46.29	30,275,129,800
522141	Belanja Sewa	1,327,924,000	1,530,316,000	1,476,174,000	0	1,476,174,000	96.46	54,142,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,207,200,000	1,166,300,000	273,872,259	0	273,872,259	23.48	892,427,741
522191	Belanja Jasa Lainnya	331,844,000	1,038,873,000	392,032,000	0	392,032,000	37.74	646,841,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	61,456,588,000	62,325,109,000	28,934,877,789	0	28,934,877,789	46.43	33,390,231,211
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,807,209,000	1,807,209,000	942,865,040	0	942,865,040	52.17	864,343,960
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	41,100,000	35,000,000	27,862,038	0	27,862,038	79.61	7,137,962
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,520,804,000	1,571,070,000	662,881,328	0	662,881,328	42.19	908,188,672
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	3,369,113,000	3,413,279,000	1,633,608,406	0	1,633,608,406	47.86	1,779,670,594
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,401,254,000	13,444,831,000	7,055,118,955	775,000	7,054,343,955	52.47	6,390,487,045
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,374,395,000	2,174,941,000	843,520,000	0	843,520,000	38.78	1,331,421,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,648,664,000	1,547,181,000	239,262,000	0	239,262,000	15.46	1,307,919,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,626,307,000	2,216,904,000	549,111,868	0	549,111,868	24.77	1,667,792,132
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	21,050,620,000	19,383,857,000	8,687,012,823	775,000	8,686,237,823	44.81	10,697,619,177
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	170,000,000	170,000,000	0	0	0	0	170,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	170,000,000	170,000,000	0	0	0	0	170,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	98,671,794,000	98,671,794,000	44,969,879,039	775,000	44,969,104,039	45.57	53702689961
53	BELANJA MODAL							
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	224,328,000	224,328,000	223,622,500	0	223,622,500	99.69	705,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	224,328,000	224,328,000	223,622,500	0	223,622,500	99.69	705,500

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 25/07/24 8:12 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	224,328,000	224,328,000	223,622,500	0	223,622,500	99.69	705500
	JUMLAH BELANJA	116,300,775,000	116,989,153,000	55,260,922,840	781,174	55,260,141,666	47.24	61,729,011,334

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 25/07/24 8:10 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
51	BELANJA PEGAWAI							
5111	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	11,156,816,000	11,911,736,000	6,828,083,200	0	6,828,083,200	57.32	5,083,652,800
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	177,000	178,000	107,231	6,174	101,057	56.77	76,943
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	750,000,000	791,868,000	453,652,470	0	453,652,470	57.29	338,215,530
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	198,000,000	210,837,000	120,475,902	0	120,475,902	57.14	90,361,098
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	934,000,000	368,140,000	211,775,000	0	211,775,000	57.53	156,365,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	911,000,000	1,793,884,000	1,037,016,000	0	1,037,016,000	57.81	756,868,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	77,900,000	171,476,000	147,646,742	0	147,646,742	86.1	23,829,258
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	603,000,000	565,818,000	324,007,080	0	324,007,080	57.26	241,810,920
511129	Belanja Uang Makan PNS	2,064,480,000	1,459,980,000	605,395,000	0	605,395,000	41.47	854,585,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	254,000,000	142,190,000	81,410,000	0	81,410,000	57.25	60,780,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5111	16,949,373,000	17,416,107,000	9,809,568,625	6,174	9,809,562,451	56.32	7,606,544,549
5116	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK							
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	122,000,000	48,499,200	0	48,499,200	39.75	73,500,800
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	8,000	588	0	588	7.35	7,412
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	6,000,000	2,287,040	0	2,287,040	38.12	3,712,960
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	1,500,000	457,408	0	457,408	30.49	1,042,592
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	17,600,000	7,040,000	0	7,040,000	40	10,560,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	5,800,000	2,317,440	0	2,317,440	39.96	3,482,560
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	31,680,000	4,382,000	0	4,382,000	13.83	27,298,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5116	0	184,588,000	64,983,676	0	64,983,676	35.2	119,604,324
5122	Belanja Lembur							
512211	Belanja Uang Lembur	455,280,000	455,280,000	190,114,000	0	190,114,000	41.76	265,166,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	37,056,000	2,755,000	0	2,755,000	7.43	34,301,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5122	455,280,000	492,336,000	192,869,000	0	192,869,000	39.17	299,467,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 51	17,404,653,000	18,093,031,000	10,067,421,301	6,174	10,067,415,127	55.64	8025615873
52	BELANJA BARANG							
5211	Belanja Barang Operasional							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,461,910,000	4,464,342,000	2,199,902,254	0	2,199,902,254	49.28	2,264,439,746
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,300,000	9,300,000	0	0	0	0	9,300,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	80,256,000	81,744,000	27,248,000	0	27,248,000	33.33	54,496,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	30,500,000	55,220,000	34,372,600	0	34,372,600	62.25	20,847,400
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5211	4,581,966,000	4,610,606,000	2,261,522,854	0	2,261,522,854	49.05	2,349,083,146
5212	Belanja Barang Non Operasional							
521211	Belanja Bahan	5,245,921,000	5,875,492,000	2,629,702,989	0	2,629,702,989	44.76	3,245,789,011

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 25/07/24 8:10 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,252,950,000	1,339,228,000	325,876,000	0	325,876,000	24.33	1,013,352,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,039,180,000	1,096,666,000	282,520,252	0	282,520,252	25.76	814,145,748
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5212	7,538,051,000	8,311,386,000	3,238,099,241	0	3,238,099,241	38.96	5,073,286,759
5218	Belanja Barang Persediaan							
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	405,456,000	357,557,000	154,722,300	0	154,722,300	43.27	202,834,700
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	100,000,000	100,000,000	60,035,626	0	60,035,626	60.04	39,964,374
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5218	505,456,000	457,557,000	214,757,926	0	214,757,926	46.94	242,799,074
5221	Belanja Jasa							
522111	Belanja Langganan Listrik	1,716,000,000	1,716,000,000	584,717,468	0	584,717,468	34.07	1,131,282,532
522112	Belanja Langganan Telepon	60,000,000	60,000,000	5,654,437	0	5,654,437	9.42	54,345,563
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	448,300,000	448,300,000	112,237,425	0	112,237,425	25.04	336,062,575
522131	Belanja Jasa Konsultansi	56,365,320,000	56,365,320,000	26,090,190,200	0	26,090,190,200	46.29	30,275,129,800
522141	Belanja Sewa	1,327,924,000	1,530,316,000	1,476,174,000	0	1,476,174,000	96.46	54,142,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,207,200,000	1,166,300,000	273,872,259	0	273,872,259	23.48	892,427,741
522191	Belanja Jasa Lainnya	331,844,000	1,038,873,000	392,032,000	0	392,032,000	37.74	646,841,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5221	61,456,588,000	62,325,109,000	28,934,877,789	0	28,934,877,789	46.43	33,390,231,211
5231	Belanja Pemeliharaan							
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,807,209,000	1,807,209,000	942,865,040	0	942,865,040	52.17	864,343,960
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan	41,100,000	35,000,000	27,862,038	0	27,862,038	79.61	7,137,962
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,520,804,000	1,571,070,000	662,881,328	0	662,881,328	42.19	908,188,672
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5231	3,369,113,000	3,413,279,000	1,633,608,406	0	1,633,608,406	47.86	1,779,670,594
5241	Belanja Perjalanan Dalam Negeri							
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,401,254,000	13,444,831,000	7,055,118,955	775,000	7,054,343,955	52.47	6,390,487,045
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,374,395,000	2,174,941,000	843,520,000	0	843,520,000	38.78	1,331,421,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,648,664,000	1,547,181,000	239,262,000	0	239,262,000	15.46	1,307,919,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,626,307,000	2,216,904,000	549,111,868	0	549,111,868	24.77	1,667,792,132
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5241	21,050,620,000	19,383,857,000	8,687,012,823	775,000	8,686,237,823	44.81	10,697,619,177
5242	Belanja Perjalanan Luar Negeri							
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	170,000,000	170,000,000	0	0	0	0	170,000,000
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5242	170,000,000	170,000,000	0	0	0	0	170,000,000
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 52	98,671,794,000	98,671,794,000	44,969,879,039	775,000	44,969,104,039	45.57	53702689961
53	BELANJA MODAL							
5361	Belanja Modal Lainnya							
536111	Belanja Modal Lainnya	224,328,000	224,328,000	223,622,500	0	223,622,500	99.69	705,500
	JUMLAH SUB KELOMPOK BELANJA 5361	224,328,000	224,328,000	223,622,500	0	223,622,500	99.69	705,500

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT JENIS BELANJA / AKUN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.2
Tanggal : 25/07/24 8:10 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_akun_es1_poc

AKUN	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				JUMLAH S/D BULAN INI	PENGEMBALIAN S/D BULAN INI	JUMLAH NETTO S/D BULAN INI		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH KELOMPOK BELANJA 53	224,328,000	224,328,000	223,622,500	0	223,622,500	99.69	705500
	JUMLAH BELANJA	116,300,775,000	116,989,153,000	55,260,922,840	781,174	55,260,141,666	47.24	61,729,011,334

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / JENIS BELANJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.E1.3
Tanggal : 25/07/24 8:10 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_akun_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
null	null							
51	BELANJA PEGAWAI	17,404,653,000	18,093,031,000	10,067,421,301	6,174	10,067,415,127	55.64	8,025,615,873
52	BELANJA BARANG	98,671,794,000	98,671,794,000	44,969,879,039	775,000	44,969,104,039	45.57	53,702,689,961
53	BELANJA MODAL	224,328,000	224,328,000	223,622,500	0	223,622,500	99.69	705,500
	JUMLAH BELANJA WILAYAH null	116,300,775,000	116,989,153,000	55,260,922,840	781,174	55,260,141,666	47.24	61,729,011,334
	JUMLAH BELANJA	116,300,775,000	116,989,153,000	55,260,922,840	781,174	55,260,141,666	47.24	61,729,011,334

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 25/07/24 8:10 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
0100	DKI JAKARTA							
408727	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAKARTA RAYA	4,512,406,000	4,512,406,000	1,525,044,700	0	1,525,044,700	33.8	2,987,361,300
409288	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	42,121,767,000	42,810,145,000	20,547,020,502	6,174	20,547,014,328	48	22,263,130,672
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0100	46,634,173,000	47,322,551,000	22,072,065,202	6,174	22,072,059,028	46.64	25,250,491,972
0200	JAWA BARAT							
408737	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDUNG	5,356,447,000	5,356,447,000	2,390,632,000	0	2,390,632,000	44.63	2,965,815,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0200	5,356,447,000	5,356,447,000	2,390,632,000	0	2,390,632,000	44.63	2,965,815,000
0300	JAWA TENGAH							
408749	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH	5,907,158,000	5,907,158,000	1,276,388,987	0	1,276,388,987	21.61	4,630,769,013
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0300	5,907,158,000	5,907,158,000	1,276,388,987	0	1,276,388,987	21.61	4,630,769,013
0400	DI YOGYAKARTA							
409187	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM YOGYAKARTA	2,616,373,000	2,616,373,000	1,325,459,006	0	1,325,459,006	50.66	1,290,913,994
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0400	2,616,373,000	2,616,373,000	1,325,459,006	0	1,325,459,006	50.66	1,290,913,994
0500	JAWA TIMUR							
408759	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	6,987,374,000	6,987,374,000	3,499,196,965	0	3,499,196,965	50.08	3,488,177,035
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0500	6,987,374,000	6,987,374,000	3,499,196,965	0	3,499,196,965	50.08	3,488,177,035
0600	NANGGROE ACEH DARUSSALAM							
408789	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANDA ACEH	2,772,137,000	2,772,137,000	1,014,730,500	0	1,014,730,500	36.6	1,757,406,500
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0600	2,772,137,000	2,772,137,000	1,014,730,500	0	1,014,730,500	36.6	1,757,406,500
0700	SUMATERA UTARA							
408769	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SUMATERA UTARA DI	4,013,953,000	4,013,953,000	2,015,730,900	0	2,015,730,900	50.22	1,998,222,100
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0700	4,013,953,000	4,013,953,000	2,015,730,900	0	2,015,730,900	50.22	1,998,222,100
0800	SUMATERA BARAT							
408799	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PADANG	1,586,886,000	1,586,886,000	765,320,300	0	765,320,300	48.23	821,565,700
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0800	1,586,886,000	1,586,886,000	765,320,300	0	765,320,300	48.23	821,565,700
0900	RIAU							
408809	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PEKANBARU	1,825,834,000	1,825,834,000	977,539,495	0	977,539,495	53.54	848,294,505
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 0900	1,825,834,000	1,825,834,000	977,539,495	0	977,539,495	53.54	848,294,505
1000	JAMBI							
409166	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAMBI	2,031,106,000	2,031,106,000	1,112,972,341	0	1,112,972,341	54.8	918,133,659
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1000	2,031,106,000	2,031,106,000	1,112,972,341	0	1,112,972,341	54.8	918,133,659
1100	SUMATERA SELATAN							
408819	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALEMBANG	1,678,055,000	1,678,055,000	721,643,300	0	721,643,300	43	956,411,700
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1100	1,678,055,000	1,678,055,000	721,643,300	0	721,643,300	43	956,411,700
1200	LAMPUNG							
408829	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	2,321,742,000	2,321,742,000	953,456,696	775,000	952,681,696	41.03	1,369,060,304

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 25/07/24 8:10 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1200	2,321,742,000	2,321,742,000	953,456,696	775,000	952,681,696	41.07	1,369,060,304
1300	KALIMANTAN BARAT							
408839	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PONTIANAK	942,364,000	942,364,000	543,106,511	0	543,106,511	57.63	399,257,489
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1300	942,364,000	942,364,000	543,106,511	0	543,106,511	57.63	399,257,489
1400	KALIMANTAN TENGAH							
409197	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALANGKARAYA	1,255,807,000	1,255,807,000	679,872,948	0	679,872,948	54.14	575,934,052
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1400	1,255,807,000	1,255,807,000	679,872,948	0	679,872,948	54.14	575,934,052
1500	KALIMANTAN SELATAN							
408848	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BANJARMASIN	1,151,624,000	1,151,624,000	591,748,401	0	591,748,401	51.38	559,875,599
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1500	1,151,624,000	1,151,624,000	591,748,401	0	591,748,401	51.38	559,875,599
1600	KALIMANTAN TIMUR							
408859	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SAMARINDA	2,120,550,000	2,120,550,000	1,151,581,106	0	1,151,581,106	54.31	968,968,894
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1600	2,120,550,000	2,120,550,000	1,151,581,106	0	1,151,581,106	54.31	968,968,894
1700	SULAWESI UTARA							
408869	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MANADO	1,236,856,000	1,236,856,000	622,106,739	0	622,106,739	50.3	614,749,261
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1700	1,236,856,000	1,236,856,000	622,106,739	0	622,106,739	50.3	614,749,261
1800	SULAWESI TENGAH							
409217	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PALU	1,985,141,000	1,985,141,000	1,030,766,150	0	1,030,766,150	51.92	954,374,850
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1800	1,985,141,000	1,985,141,000	1,030,766,150	0	1,030,766,150	51.92	954,374,850
1900	SULAWESI SELATAN							
408779	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM UJUNG PANDANG	3,440,273,000	3,440,273,000	1,856,976,000	0	1,856,976,000	53.98	1,583,297,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 1900	3,440,273,000	3,440,273,000	1,856,976,000	0	1,856,976,000	53.98	1,583,297,000
2000	SULAWESI TENGGARA							
409207	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KENDARI	1,991,412,000	1,991,412,000	996,890,277	0	996,890,277	50.06	994,521,723
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2000	1,991,412,000	1,991,412,000	996,890,277	0	996,890,277	50.06	994,521,723
2100	MALUKU							
408899	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM AMBON	1,064,413,000	1,064,413,000	483,789,434	0	483,789,434	45.45	580,623,566
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2100	1,064,413,000	1,064,413,000	483,789,434	0	483,789,434	45.45	580,623,566
2200	BALI							
408879	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM DENPASAR	1,177,820,000	1,177,820,000	655,378,000	0	655,378,000	55.64	522,442,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2200	1,177,820,000	1,177,820,000	655,378,000	0	655,378,000	55.64	522,442,000
2300	NUSA TENGGARA BARAT							
409227	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM	2,233,134,000	2,233,134,000	1,281,353,300	0	1,281,353,300	57.38	951,780,700
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2300	2,233,134,000	2,233,134,000	1,281,353,300	0	1,281,353,300	57.38	951,780,700
2400	NUSA TENGGARA TIMUR							
408889	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KUPANG	1,880,424,000	1,880,424,000	869,219,300	0	869,219,300	46.22	1,011,204,700

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.E1.2
Tanggal : 25/07/24 8:10 AM
Halaman : 3
Prg ID : lap_lra_bel_org_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5+6	8=5/4	9=4-7
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2400	1,880,424,000	1,880,424,000	869,219,300	0	869,219,300	46.22	1,011,204,700
2500 408909	PAPUA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAYAPURA	955,110,000	955,110,000	490,683,000	0	490,683,000	51.37	464,427,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2500	955,110,000	955,110,000	490,683,000	0	490,683,000	51.37	464,427,000
2600 409177	BENKULU KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENKULU	1,755,684,000	1,755,684,000	883,961,004	0	883,961,004	50.35	871,722,996
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2600	1,755,684,000	1,755,684,000	883,961,004	0	883,961,004	50.35	871,722,996
2800 649029	MALUKU UTARA KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI MALUKU	1,386,578,000	1,386,578,000	770,614,300	0	770,614,300	55.58	615,963,700
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2800	1,386,578,000	1,386,578,000	770,614,300	0	770,614,300	55.58	615,963,700
2900 648996	BANTEN KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANTEN	2,395,966,000	2,395,966,000	1,192,823,792	0	1,192,823,792	49.78	1,203,142,208
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 2900	2,395,966,000	2,395,966,000	1,192,823,792	0	1,192,823,792	49.78	1,203,142,208
3000 649008	BANGKA BELITUNG KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI BANGKA	1,181,665,000	1,181,665,000	696,281,700	0	696,281,700	58.92	485,383,300
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3000	1,181,665,000	1,181,665,000	696,281,700	0	696,281,700	58.92	485,383,300
3100 649017	GORONTALO KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PROPINSI GORONTALO	1,311,847,000	1,311,847,000	795,538,460	0	795,538,460	60.64	516,308,540
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3100	1,311,847,000	1,311,847,000	795,538,460	0	795,538,460	60.64	516,308,540
3200 667789	KEPULAUAN RIAU KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN	1,146,343,000	1,146,343,000	574,249,065	0	574,249,065	50.09	572,093,935
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3200	1,146,343,000	1,146,343,000	574,249,065	0	574,249,065	50.09	572,093,935
3300 667779	PAPUA BARAT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA	819,389,000	819,389,000	335,671,000	0	335,671,000	40.97	483,718,000
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3300	819,389,000	819,389,000	335,671,000	0	335,671,000	40.97	483,718,000
3400 667799	SULAWESI BARAT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SULAWESI	1,137,137,000	1,137,137,000	633,176,661	0	633,176,661	55.68	503,960,339
	JUMLAH BELANJA WILAYAH 3400	1,137,137,000	1,137,137,000	633,176,661	0	633,176,661	55.68	503,960,339
	JUMLAH BELANJA	116,300,775,000	116,989,153,000	55,260,922,840	781,174	55,260,141,666	47.24	61,729,011,334

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ESELON I : 10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 25/07/24 8:11 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_sd_jb_akun_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
51	BELANJA PEGAWAI							
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	11,156,816,000	11,911,736,000	6,828,083,200	0	6,828,083,200	57.32	5,083,652,800
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	177,000	178,000	107,231	6,174	101,057	56.77	76,943
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	750,000,000	791,868,000	453,652,470	0	453,652,470	57.29	338,215,530
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	198,000,000	210,837,000	120,475,902	0	120,475,902	57.14	90,361,098
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	934,000,000	368,140,000	211,775,000	0	211,775,000	57.53	156,365,000
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	911,000,000	1,793,884,000	1,037,016,000	0	1,037,016,000	57.81	756,868,000
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	77,900,000	171,476,000	147,646,742	0	147,646,742	86.1	23,829,258
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	603,000,000	565,818,000	324,007,080	0	324,007,080	57.26	241,810,920
511129	Belanja Uang Makan PNS	2,064,480,000	1,459,980,000	605,395,000	0	605,395,000	41.47	854,585,000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	254,000,000	142,190,000	81,410,000	0	81,410,000	57.25	60,780,000
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	0	122,000,000	48,499,200	0	48,499,200	39.75	73,500,800
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	0	8,000	588	0	588	7.35	7,412
511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	0	6,000,000	2,287,040	0	2,287,040	38.12	3,712,960
511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	0	1,500,000	457,408	0	457,408	30.49	1,042,592
511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	0	17,600,000	7,040,000	0	7,040,000	40	10,560,000
511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	0	5,800,000	2,317,440	0	2,317,440	39.96	3,482,560
511628	Belanja Uang Makan PPPK	0	31,680,000	4,382,000	0	4,382,000	13.83	27,298,000
512211	Belanja Uang Lembur	455,280,000	455,280,000	190,114,000	0	190,114,000	41.76	265,166,000
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	0	37,056,000	2,755,000	0	2,755,000	7.43	34,301,000
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	17,404,653,000	18,093,031,000	10,067,421,301	6,174	10,067,415,127	55.64	8,025,603,525
52	BELANJA BARANG							
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	4,461,910,000	4,464,342,000	2,199,902,254	0	2,199,902,254	49.28	2,264,439,746
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	9,300,000	9,300,000	0	0	0	0	9,300,000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	80,256,000	81,744,000	27,248,000	0	27,248,000	33.33	54,496,000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	30,500,000	55,220,000	34,372,600	0	34,372,600	62.25	20,847,400
521211	Belanja Bahan	5,245,921,000	5,875,492,000	2,629,702,989	0	2,629,702,989	44.76	3,245,789,011
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	1,252,950,000	1,339,228,000	325,876,000	0	325,876,000	24.33	1,013,352,000
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1,039,180,000	1,096,666,000	282,520,252	0	282,520,252	25.76	814,145,748
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	405,456,000	357,557,000	154,722,300	0	154,722,300	43.27	202,834,700
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	100,000,000	100,000,000	60,035,626	0	60,035,626	60.04	39,964,374
522111	Belanja Langganan Listrik	1,716,000,000	1,716,000,000	584,717,468	0	584,717,468	34.07	1,131,282,532
522112	Belanja Langganan Telepon	60,000,000	60,000,000	5,654,437	0	5,654,437	9.42	54,345,563
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	448,300,000	448,300,000	112,237,425	0	112,237,425	25.04	336,062,575
522131	Belanja Jasa Konsultansi	56,365,320,000	56,365,320,000	26,090,190,200	0	26,090,190,200	46.29	30,275,129,800
522141	Belanja Sewa	1,327,924,000	1,530,316,000	1,476,174,000	0	1,476,174,000	96.46	54,142,000
522151	Belanja Jasa Profesi	1,207,200,000	1,166,300,000	273,872,259	0	273,872,259	23.48	892,427,741
522191	Belanja Jasa Lainnya	331,844,000	1,038,873,000	392,032,000	0	392,032,000	37.74	646,841,000
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1,807,209,000	1,807,209,000	942,865,040	0	942,865,040	52.17	864,343,960

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / JENIS BELANJA / AKUN
S.D BULAN JUNI 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ESELON I : 10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 25/07/24 8:11 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_bel_sd_jb_akun_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	41,100,000	35,000,000	27,862,038	0	27,862,038	79.61	7,137,962
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	1,520,804,000	1,571,070,000	662,881,328	0	662,881,328	42.19	908,188,672
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	14,401,254,000	13,444,831,000	7,055,118,955	775,000	7,054,343,955	52.47	6,390,487,045
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,374,395,000	2,174,941,000	843,520,000	0	843,520,000	38.78	1,331,421,000
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1,648,664,000	1,547,181,000	239,262,000	0	239,262,000	15.46	1,307,919,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	2,626,307,000	2,216,904,000	549,111,868	0	549,111,868	24.77	1,667,792,132
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	170,000,000	170,000,000	0	0	0	0	170,000,000
	JUMLAH BELANJA BARANG	98,671,794,000	98,671,794,000	44,969,879,039	775,000	44,969,104,039	45.58	53,701,139,961
53	BELANJA MODAL							
536111	Belanja Modal Lainnya	224,328,000	224,328,000	223,622,500	0	223,622,500	99.69	705,500
	JUMLAH BELANJA MODAL	224,328,000	224,328,000	223,622,500	0	223,622,500	99.69	705,500
	JUMLAH RUPIAH MURNI	116,300,775,000	116,989,153,000	55,260,922,840	781,174	55,260,141,666	47.24	61,727,448,986
	TOTAL	116,300,775,000	116,989,153,000	55,260,922,840	781,174	55,260,141,666	47.24	61,727,448,986

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
TINGKAT ESELON I
MENURUT SUMBER DANA / PROGRAM / KEGIATAN
S.D BULAN JUNI 2024**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ESELON I : 10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kode Lap : LRA.B.S.1
Tanggal : 25/07/24 8:11 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_bel_prog_giat_es1_poc

KODE	URAIAN	ANGGARAN SEMULA	ANGGARAN SETELAH REVISI	REALISASI BELANJA			% REALISASI ANGGARAN	SISA ANGGARAN
				BELANJA	PENGEMBALIAN BELANJA	BELANJA NETTO		
1	2	3	4	5	6	7=5-6	8=5/4	9=4-7
01	RUPIAH MURNI							
BB	Program Pembentukan Regulasi							
1611	Analisis dan Evaluasi Hukum Nasional	1,987,390,000	1,633,219,000	322,435,630	0	322,435,630	19.74	1,310,783,370
1613	Perencanaan Hukum Nasional	1,988,945,000	1,988,945,000	438,362,772	0	438,362,772	22.04	1,550,582,228
5256	Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	4,506,629,000	4,506,629,000	1,661,907,794	775,000	1,661,132,794	36.86	2,845,496,206
	JUMLAH BELANJA PROGRAM BB	8,482,964,000	8,128,793,000	2,422,706,196	775,000	2,421,931,196	26.213	5,706,861,804
BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum							
1610	Pendokumentasian Data Hukum dan Peningkatan Integrasi Jaringan Informasi Hukum Nasional	1,502,291,000	1,293,206,000	280,664,232	0	280,664,232	21.7	1,012,541,768
1612	Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat dan Pelaksanaan Bantuan Hukum	3,259,505,000	2,642,010,000	1,711,019,524	0	1,711,019,524	64.76	930,990,476
4841	Penyelenggaraan Kesadaran dan Pemahaman Hukum di Wilayah	69,672,379,000	69,672,379,000	33,051,994,544	0	33,051,994,544	47.44	36,620,384,456
	JUMLAH BELANJA PROGRAM BF	74,434,175,000	73,607,595,000	35,043,678,300	0	35,043,678,300	44.633	38,563,916,700
WA	Program Dukungan Manajemen							
1614	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Bphn	33,383,636,000	35,252,765,000	17,794,538,344	6,174	17,794,532,170	50.48	17,458,232,830
	JUMLAH BELANJA PROGRAM WA	33,383,636,000	35,252,765,000	17,794,538,344	6,174	17,794,532,170	50.48	17,458,232,830
	JUMLAH BELANJA RUPIAH MURNI	116,300,775,000	116,989,153,000	55,260,922,840	781,174	55,260,141,666	37.574	61,729,011,334
	JUMLAH	116,300,775,000	116,989,153,000	55,260,922,840	781,174	55,260,141,666	37.57	61,729,011,334

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI 013
ESELON I : BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL 10

Tgl Data : 25/07/24 6:24 AM
Tgl Cetak : 25/07/24 8:09 AM
Halaman : 2
lap_lra_face_es1_new_poc

URAIAN	2024				2023			
	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9
a. Dana Perimbangan	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Dana Transfer Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Bagi Hasil	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Transfer Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
a. Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
b. Dana Insentif Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
c. Dana Keistimewaan DIY	0	0	0	0	0	0	0	0
d. Dana Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Hibah Kepada Daerah	0	0	0	0	0	0	0	0
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II)	116,989,153,000	55,260,141,666	(61,729,011,334)	47	120,441,620,000	57,940,657,212	62,500,962,788	48
C. PEMBIAYAAN	0	0	0	0	0	0	0	0

Keterangan :

FINAL

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kode Lap : LRA.P.E1.1
Tanggal : 25/07/24 8:11 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
42	PENDAPATAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK					
4251	Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	115,487,000	0	115,487,000	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4251	0	115,487,000	0	115,487,000	
4259	Pendapatan Lain-Lain					
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	53	0	53	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	84,227,635	0	84,227,635	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	47,080,355	0	47,080,355	0
	JUMLAH SUB KELOMPOK PENDAPATAN 4259	0	131,308,043	0	131,308,043	
	JUMLAH KELOMPOK PENDAPATAN 42	0	246,795,043	0	246,795,043	
	JUMLAH PENDAPATAN	0	246,795,043	0	246,795,043	

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 25/07/24 8:11 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
0100	DKI JAKARTA					
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	115,487,000	0	115,487,000	0
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	53	0	53	0
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	74,588,375	0	74,588,375	0
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	47,080,355	0	47,080,355	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0100) - DKI JAKARTA	0	237,155,783	0	237,155,783	0
0500	JAWA TIMUR					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	4,000,000	0	4,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0500) - JAWA TIMUR	0	4,000,000	0	4,000,000	0
1200	LAMPUNG					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	3,389,260	0	3,389,260	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1200) - LAMPUNG	0	3,389,260	0	3,389,260	0
2600	BENGKULU					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	290,000	0	290,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2600) - BENGKULU	0	290,000	0	290,000	0
3300	PAPUA BARAT					
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	1,960,000	0	1,960,000	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / AKUN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kode Lap : LRA.P.E.3
Tanggal : 25/07/24 8:11 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_org_akun_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN (3300) - PAPUA BARAT	0	1,960,000	0	1,960,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN	0	246,795,043	0	246,795,043	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 25/07/24 8:11 AM
Halaman : 1
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
0100 409288	DKI JAKARTA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	0	237,155,783	0	237,155,783	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0100) - DKI JAKARTA	0	237,155,783	0	237,155,783	0
0500 408759	JAWA TIMUR KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM SURABAYA	0	4,000,000	0	4,000,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (0500) - JAWA TIMUR	0	4,000,000	0	4,000,000	0
1200 408829	LAMPUNG KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM TANJUNG KARANG	0	3,389,260	0	3,389,260	0
	JUMLAH PENDAPATAN (1200) - LAMPUNG	0	3,389,260	0	3,389,260	0
2600 409177	BENGKULU KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU	0	290,000	0	290,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (2600) - BENGKULU	0	290,000	0	290,000	0
3300 667779	PAPUA BARAT KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	0	1,960,000	0	1,960,000	0
	JUMLAH PENDAPATAN (3300) - PAPUA BARAT	0	1,960,000	0	1,960,000	0

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
TINGKAT ESELON I
MENURUT WILAYAH / SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024
(dalam rupiah)**

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
ESELON I : 10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kode Lap : LRA.P.E1.2
Tanggal : 25/07/24 8:11 AM
Halaman : 2
Prg ID : lap_lra_pen_org_es1 --rekon17

KODE	URAIAN	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN			% REALISASI PENDAPATAN
			PENDAPATAN	PENGEMBALIAN PENDAPATAN	PENDAPATAN NETTO	
1	2	3	4	5	6=4-5	7=6/3
	JUMLAH PENDAPATAN	0	246,795,043	0	246,795,043	0

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 25/07/24 8:09 AM

Halaman : 1

lap_neraca_es1_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2024	2023	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	1,239,570,000	0	1,239,570,000	0.00
Kas Lainnya dan Setara Kas	112,765,478	0	112,765,478	0.00
Piutang Bukan Pajak	0	59,148,730	(59,148,730)	(100.00)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	0	(295,744)	295,744	(100.00)
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	0	58,852,986	(58,852,986)	(100.00)
Persediaan	116,129,741	181,076,570	(64,946,829)	(35.87)
JUMLAH ASET LANCAR	1,468,465,219	239,929,556	1,228,535,663	512.04
ASET TETAP				
Tanah	356,165,357,000	356,165,357,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	25,791,465,257	26,605,556,857	(814,091,600)	(3.06)
Gedung dan Bangunan	62,954,462,581	62,954,462,581	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	1,171,558,942	1,123,767,442	47,791,500	4.25
AKUMULASI PENYUSUTAN	(50,212,153,251)	(47,938,133,273)	(2,274,019,978)	4.74
JUMLAH ASET TETAP	395,870,690,529	398,911,010,607	(3,040,320,078)	(0.76)
ASET LAINNYA				
Aset Tak Berwujud	4,254,296,560	4,234,323,660	19,972,900	0.47
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	0	589,375,493	(589,375,493)	(100.00)
Aset Lain-lain	731,141,600	430,984,260	300,157,340	69.64
AKUMULASI PENYUSUTAN/AMORTISASI ASET LAINNYA	(4,915,467,100)	(4,615,309,760)	(300,157,340)	6.50
JUMLAH ASET LAINNYA	69,971,060	639,373,653	(569,402,593)	(89.06)
JUMLAH ASET	397,409,126,808	399,790,313,816	(2,381,187,008)	(0.60)
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	1,699,078,942	687,628,955	1,011,449,987	147.09
Utang Yang Belum Ditagihkan	487,827,887	0	487,827,887	0.00
Pendapatan Diterima Dimuka	0	27,547,806	(27,547,806)	(100.00)
Uang Muka dari KPPN	1,239,570,000	0	1,239,570,000	0.00
Utang Jangka Pendek Lainnya	4,800,644	0	4,800,644	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3,431,277,473	715,176,761	2,716,100,712	379.78
JUMLAH KEWAJIBAN	3,431,277,473	715,176,761	2,716,100,712	379.78
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	393,977,849,335	399,075,137,055	(5,097,287,720)	(1.28)
JUMLAH EKUITAS	393,977,849,335	399,075,137,055	(5,097,287,720)	(1.28)
JUMLAH EKUITAS	393,977,849,335	399,075,137,055	(5,097,287,720)	(1.28)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	397,409,126,808	399,790,313,816	(2,381,187,008)	(0.60)

NERACA
TINGKAT ESELON I
PER 30 JUNI 2024
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 25/07/24 8:09 AM

Halaman : 2

lap_neraca_es1_komparatif_poc

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN
TINGKAT ESELON I
PER 1 JANUARI 2024 (SALDO AWAL)
(DALAM RUPIAH)

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : 013
UNIT ORGANISASI : 10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl. Cetak 25/07/2024
lap_neraca_percobaan_sawal_akrua1_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	115212	Piutang Lainnya	59,148,730	0
0.0	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	295,744
0.0	117111	Barang Konsumsi	181,076,570	0
0.0	131111	Tanah	356,165,357,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	26,605,556,857	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	62,954,462,581	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,123,767,442	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	22,314,784,270
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	25,623,349,003
0.0	162151	Software	4,184,325,500	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	49,998,160	0
0.0	163139	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	589,375,493	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	430,984,260	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	430,984,260
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	4,184,325,500
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	98,253,462
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	589,375,493
0.0	219211	Pendapatan Sewa Diterima di Muka	0	27,547,806
0.0	391111	Ekuitas	0	399,075,137,055
JUMLAH			452,344,052,593	452,344,052,593

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 25/07/24 8:09 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	914,570,000	0
0.0	111613	Kas di Bendahara Pengeluaran TUP	325,000,000	0
0.0	111821	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	112,765,478	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	116,129,741	0
0.0	131111	Tanah	356,165,357,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	25,791,465,257	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	62,954,462,581	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	1,171,558,942	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	22,505,090,017
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	27,707,063,234
0.0	162151	Software	4,184,325,500	0
0.0	162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	69,971,060	0
0.0	166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	731,141,600	0
0.0	169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	0	731,141,600
0.0	169315	Akumulasi Amortisasi Software	0	4,184,325,500
0.0	212111	Beban pegawai yang masih harus dibayar	0	1,152,547,708
0.0	212112	Beban barang yang masih harus dibayar	0	438,566,400
0.0	212191	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	0	107,964,834
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	487,827,887
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	1,239,570,000
0.0	219961	Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor	0	4,800,644
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	55,260,141,666
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	246,795,043	0
0.0	313211	Transfer Keluar	218,070,600	0
0.0	391111	Ekuitas	0	399,075,137,055
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	115,487,000
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	27,547,806
3.0	425911	Penerimaan Kembali Beban Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	53
3.0	425912	Penerimaan Kembali Beban Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	72,159,260
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	7,683,030,400	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	112,749	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	511,424,230	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	135,651,038	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	240,780,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,162,284,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	151,850,104	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	364,707,120	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 25/07/24 8:09 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	605,395,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	91,725,000	0
3.0	511611	Beban Gaji Pokok PPPK	60,624,000	0
3.0	511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	834	0
3.0	511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,858,800	0
3.0	511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	571,760	0
3.0	511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	8,800,000	0
3.0	511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	2,896,800	0
3.0	511628	Beban Uang Makan PPPK	4,382,000	0
3.0	512211	Beban Uang Lembur	190,114,000	0
3.0	512212	Beban Uang Lembur PPPK	2,755,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	2,215,202,254	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	41,100,000	0
3.0	521119	Beban Barang Operasional Lainnya	34,372,600	0
3.0	521211	Beban Bahan	2,667,706,489	0
3.0	521213	Beban Honor Output Kegiatan	340,314,000	0
3.0	521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	286,520,252	0
3.0	522111	Beban Langganan Listrik	487,436,864	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	4,681,579	0
3.0	522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	112,237,425	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	26,686,965,200	0
3.0	522141	Beban Sewa	1,476,174,000	0
3.0	522151	Beban Jasa Profesi	273,872,259	0
3.0	522191	Beban Jasa Lainnya	392,032,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	993,326,040	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	663,181,328	0
3.0	524111	Beban Perjalanan Dinas Biasa	7,111,059,855	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	859,150,000	0
3.0	524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	239,262,000	0
3.0	524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	557,661,868	0
3.0	524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	109,288,887	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	942,184,847	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	2,083,714,231	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	240,445,993	0
3.0	593113	Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	70,200,800	0
3.0	594212	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	0	295,744
JUMLAH			513,109,666,408	513,109,666,408

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT ESELON I

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 25/07/24 8:09 AM

Halaman : 3

lap_neraca_percobaan_akrual_es1_poc

Keterangan :

FINAL

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 25/07/24 8:10 AM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	55,260,141,666
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	246,795,043	0
3.0	425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	0	115,487,000
3.0	425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	0	53
3.0	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	0	84,227,635
3.0	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	0	47,080,355
3.0	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	6,828,083,200	0
3.0	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	107,231	0
3.0	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	453,652,470	0
3.0	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	120,475,902	0
3.0	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	211,775,000	0
3.0	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1,037,016,000	0
3.0	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	147,646,742	0
3.0	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	324,007,080	0
3.0	511129	Belanja Uang Makan PNS	605,395,000	0
3.0	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	81,410,000	0
3.0	511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	48,499,200	0
3.0	511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	588	0
3.0	511621	Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	2,287,040	0
3.0	511622	Belanja Tunjangan Anak PPPK	457,408	0
3.0	511624	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7,040,000	0
3.0	511625	Belanja Tunjangan Beras PPPK	2,317,440	0
3.0	511628	Belanja Uang Makan PPPK	4,382,000	0
3.0	512211	Belanja Uang Lembur	190,114,000	0
3.0	512212	Belanja Uang Lembur PPPK	2,755,000	0
3.0	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	2,199,902,254	0
3.0	521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	27,248,000	0
3.0	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	34,372,600	0
3.0	521211	Belanja Bahan	2,629,702,989	0
3.0	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	325,876,000	0
3.0	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	282,520,252	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	154,722,300	0
3.0	521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya	60,035,626	0
3.0	522111	Belanja Langganan Listrik	584,717,468	0
3.0	522112	Belanja Langganan Telepon	5,654,437	0
3.0	522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	112,237,425	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	26,090,190,200	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)

TINGKAT ESELON I

PER 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 25/07/24 8:10 AM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_kas_es1_poc

KODE TRANS	KODE PERKIRAAN	NAMA PERKIRAAN	DEBIT	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	522141	Belanja Sewa	1,476,174,000	0
3.0	522151	Belanja Jasa Profesi	273,872,259	0
3.0	522191	Belanja Jasa Lainnya	392,032,000	0
3.0	523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	942,865,040	0
3.0	523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	27,862,038	0
3.0	523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	662,881,328	0
3.0	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7,055,118,955	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	843,520,000	0
3.0	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	239,262,000	0
3.0	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	549,111,868	0
3.0	536111	Belanja Modal Lainnya	223,622,500	0
3.1	511119	Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS	0	6,174
3.1	524111	Pengembalian Belanja Perjalanan Dinas Biasa	0	775,000
JUMLAH			55,507,717,883	55,507,717,883

Keterangan :

FINAL

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 25/07/24 8:08 AM

Halaman : 1

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	-
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	-
Pendapatan Cukai	0	0	0	-
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	-
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	-
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	-
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	-
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	-
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	-
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	27,547,806	9,358,395	18,189,411	-
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	27,547,806	9,358,395	18,189,411	-
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	-
Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	-
Jumlah Pendapatan	27,547,806	9,358,395	18,189,411	-
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	-
Beban Pegawai	11,219,962,835	10,267,024,492	952,938,343	-
Beban Persediaan	240,445,993	198,007,057	42,438,936	-
Beban Barang dan Jasa	35,018,614,922	36,937,200,645	(1,918,585,723)	-
Beban Pemeliharaan	1,726,708,168	1,828,494,749	(101,786,581)	-
Beban Perjalanan Dinas	8,876,422,610	10,706,081,607	(1,829,658,997)	-
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	-
Beban Bunga	0	0	0	-

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 25/07/24 8:08 AM

Halaman : 2

lap_lo_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	-
Beban Hibah	0	0	0	-
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	-
Beban Penyusutan dan Amortisasi	3,025,899,078	2,956,525,650	69,373,428	-
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(295,744)	0	(295,744)	-
Beban Transfer	0	0	0	-
Beban Lain-Lain	0	0	0	-
JUMLAH BEBAN	60,107,757,862	62,893,334,200	(2,785,576,338)	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(60,080,210,056)	(62,883,975,805)	2,803,765,749	-
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	115,487,000	0	115,487,000	-
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	115,487,000	0	115,487,000	-
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	-
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	72,159,313	14,594,200	57,565,113	-
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	72,159,313	14,594,200	57,565,113	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	-
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	187,646,313	14,594,200	173,052,113	-
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(59,892,563,743)	(62,869,381,605)	2,976,817,862	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
Beban Luar Biasa	0	0	0	-
POS LUAR BIASA	0	0	0	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(59,892,563,743)	(62,869,381,605)	2,976,817,862	-

Keterangan :

FINAL

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT ESELON I

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UNIT ORGANISASI : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 6:21 AM

Tgl Cetak : 25/07/24 8:09 AM

Halaman : 1

lap_lpe_es1_poc

URAIAN	2024	2023	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	399,075,137,055	400,237,667,014	(1,162,529,959)	(0.29)
SURPLUS/DEFISIT-LO	(59,892,563,743)	(62,869,381,605)	2,976,817,862	(4.73)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	0
PENYESUAIAN NILAI ASET	0	0	0	0
SELISIH REVALUASI ASET	0	0	0	0
KOREKSI NILAI ASET NON REVALUASI	0	0	0	0
LAIN-LAIN	0	0	0	0
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	54,795,276,023	57,479,635,336	(2,684,359,313)	(4.67)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(5,097,287,720)	(5,389,746,269)	292,458,549	(5.43)
EKUITAS AKHIR	393,977,849,335	394,847,920,745	(870,071,410)	(0.22)

Keterangan :

FINAL



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



LAMPIRAN
BARANG MILIK
NEGARA (BMN)

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA - TINGKAT ESELON I
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tanggal : 25/07/24 3:21 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_es1_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	181,076,570
131111	Tanah	356,165,357,000
132111	Peralatan dan Mesin	26,605,556,857
133111	Gedung dan Bangunan	62,954,462,581
135121	Aset Tetap Lainnya	1,123,767,442
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(22,314,784,270)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(25,623,349,003)
162151	Software	4,184,325,500
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	49,998,160
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	430,984,260
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(430,984,260)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(4,184,325,500)
J U M L A H		399,142,085,337

LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
 Tanggal : 25/07/24 3:17 PM
 Halaman : 1
 Kode Lap : lap_atb_kel_es1_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	Software	6	4,184,325,500	0	0	0	0	6	4,184,325,500
80101	ASET TAK BERWUJUD	6	4,184,325,500	0	0	0	0	6	4,184,325,500
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	519	49,998,160	202	19,972,900	0	0	721	69,971,060
80101	ASET TAK BERWUJUD	519	49,998,160	202	19,972,900	0	0	721	69,971,060
TOTAL			4,234,323,660		19,972,900		0		4,254,296,560

LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM

Tanggal : 25/07/24 3:17 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_atb_skel_es1_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
162151	Software	6	4,184,325,500	0	0	0	0	6	4,184,325,500
8010101	ASET TAK BERWUJUD	6	4,184,325,500	0	0	0	0	6	4,184,325,500
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	519	49,998,160	202	19,972,900	0	0	721	69,971,060
8010101	ASET TAK BERWUJUD	519	49,998,160	202	19,972,900	0	0	721	69,971,060
TOTAL			4,234,323,660		19,972,900		0		4,254,296,560

LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
BARANG BERSEJARAH
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAKPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM

Tanggal : 25/07/24 3:18 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_sejarah_es1_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024	MUTASI		SALDO PER 30 JUNI 2024
			BERTAMBAH	BERKURANG	
KODE	URAIAN	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS	KUANTITAS
1	2	3	4	5	6

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM

Tanggal : 25/07/24 3:15 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_kel_es1_po

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	309	126,584,000	0	0	0	0	309	126,584,000
30502	ALAT RUMAH TANGGA	201	106,231,000	0	0	0	0	201	106,231,000
30601	ALAT STUDIO	8	1,760,000	0	0	0	0	8	1,760,000
30602	ALAT KOMUNIKASI	90	17,867,000	0	0	0	0	90	17,867,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	10	726,000	0	0	0	0	10	726,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			126,584,000		0		0		126,584,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM

Tanggal : 25/07/24 3:15 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_skel_es1_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	309	126,584,000	0	0	0	0	309	126,584,000
3050201	MEUBELAIR	195	104,526,000	0	0	0	0	195	104,526,000
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	6	1,705,000	0	0	0	0	6	1,705,000
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	8	1,760,000	0	0	0	0	8	1,760,000
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	90	17,867,000	0	0	0	0	90	17,867,000
3060346	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	10	726,000	0	0	0	0	10	726,000
3090402	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	0	0	0	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0	0
3090402	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			126,584,000		0		0		126,584,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM

Tanggal : 25/07/24 3:16 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_ekstra_es1_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
132111	Peralatan dan Mesin	309	126,584,000	0	0	0	0	309	126,584,000
3050201003	Kursi Besi/Metal	112	49,812,000	0	0	0	0	112	49,812,000
3050201009	Meja Komputer	19	5,050,000	0	0	0	0	19	5,050,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	64	49,664,000	0	0	0	0	64	49,664,000
3050206019	Stabilisator	1	275,000	0	0	0	0	1	275,000
3050206071	Kabel	5	1,430,000	0	0	0	0	5	1,430,000
3060101085	Cable	8	1,760,000	0	0	0	0	8	1,760,000
3060201003	Pesawat Telephone	90	17,867,000	0	0	0	0	90	17,867,000
3060346005	Conecctor	10	726,000	0	0	0	0	10	726,000
3090402014	Recharging System	0	0	0	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0	0	0	0	0
3090402014	Recharging System	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			126,584,000		0		0		126,584,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:16 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_kel_es1_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	11,348	356,165,357,000
20101	TANAH PERSIL	11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	11,348	356,165,357,000
132111	Peralatan dan Mesin	4,037	26,732,140,857	0	0	10	814,091,600	4,027	25,918,049,257
30103	ALAT BANTU	19	2,335,666,500	0	0	0	0	19	2,335,666,500
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	29	5,297,865,190	0	0	4	731,141,600	25	4,566,723,590
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	5	3,241,700	0	0	0	0	5	3,241,700
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2	10,380,492	0	0	0	0	2	10,380,492
30303	ALAT UKUR	3	4,507,972	0	0	0	0	3	4,507,972
30501	ALAT KANTOR	928	2,450,558,045	0	0	0	0	928	2,450,558,045
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1,993	5,494,822,671	0	0	0	0	1,993	5,494,822,671
30601	ALAT STUDIO	141	2,581,340,592	0	0	0	0	141	2,581,340,592
30602	ALAT KOMUNIKASI	149	440,948,420	0	0	0	0	149	440,948,420
30603	PERALATAN PEMANCAR	22	16,649,160	0	0	0	0	22	16,649,160
30701	ALAT KEDOKTERAN	26	330,083,510	0	0	0	0	26	330,083,510
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1	26,125,000	0	0	0	0	1	26,125,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	1	2,195,000	0	0	0	0	1	2,195,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	454	6,465,408,956	0	0	6	82,950,000	448	6,382,458,956
31002	PERALATAN KOMPUTER	263	1,249,370,029	0	0	0	0	263	1,249,370,029
31901	PERALATAN OLAH RAGA	1	22,977,620	0	0	0	0	1	22,977,620
133111	Gedung dan Bangunan	18	62,954,462,581	0	0	0	0	18	62,954,462,581
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	18	62,954,462,581	0	0	0	0	18	62,954,462,581
40401	TUGU/TANDA BATAS	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	27,336	1,123,767,442	1,608	216,318,600	1,378	168,527,100	27,566	1,171,558,942
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	27,336	1,123,767,442	1,608	216,318,600	1,378	168,527,100	27,566	1,171,558,942
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	7	430,984,260	4	731,141,600	7	430,984,260	4	731,141,600
30103	ALAT BANTU	0	0	0	0	0	0	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	430,984,260	4	731,141,600	7	430,984,260	4	731,141,600
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			447,406,712,140		947,460,200		1,413,602,960		446,940,569,380

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM

Tanggal : 25/07/24 3:16 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_gab_skel_es1_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	11,348	356,165,357,000
2010104	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	11,348	356,165,357,000
132111	Peralatan dan Mesin	4,037	26,732,140,857	0	0	10	814,091,600	4,027	25,918,049,257
3010302	FEEDER	2	1,490,098,000	0	0	0	0	2	1,490,098,000
3010303	COMPRESSOR	1	3,210,000	0	0	0	0	1	3,210,000
3010304	ELECTRIC GENERATING SET	4	118,458,500	0	0	0	0	4	118,458,500
3010305	POMPA	12	723,900,000	0	0	0	0	12	723,900,000
3020101	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	8	2,232,522,700	0	0	2	404,107,340	6	1,828,415,360
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	14	2,745,212,490	0	0	2	327,034,260	12	2,418,178,230
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	6	88,992,500	0	0	0	0	6	88,992,500
3020105	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	1	231,137,500	0	0	0	0	1	231,137,500
3030103	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	5	3,241,700	0	0	0	0	5	3,241,700
3030205	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	1	5,506,969	0	0	0	0	1	5,506,969
3030212	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	1	4,873,523	0	0	0	0	1	4,873,523
3030301	ALAT UKUR UNIVERSAL	2	2,417,972	0	0	0	0	2	2,417,972
3030308	ALAT UKUR/PEMBANDING	1	2,090,000	0	0	0	0	1	2,090,000
3050101	MESIN KETIK	8	13,486,000	0	0	0	0	8	13,486,000
3050102	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	14	21,126,980	0	0	0	0	14	21,126,980
3050103	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	7	309,000,000	0	0	0	0	7	309,000,000
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	649	1,020,087,095	0	0	0	0	649	1,020,087,095
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	250	1,086,857,970	0	0	0	0	250	1,086,857,970
3050201	MEUBELAIR	1,298	2,012,073,495	0	0	0	0	1,298	2,012,073,495
3050202	ALAT PENGUKUR WAKTU	1	92,000	0	0	0	0	1	92,000
3050203	ALAT PEMBERSIH	7	22,540,500	0	0	0	0	7	22,540,500
3050204	ALAT PENDINGIN	153	1,917,715,551	0	0	0	0	153	1,917,715,551
3050205	ALAT DAPUR	1	6,462,500	0	0	0	0	1	6,462,500
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	533	1,535,938,625	0	0	0	0	533	1,535,938,625
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	43	215,199,088	0	0	0	0	43	215,199,088
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	94	2,304,651,504	0	0	0	0	94	2,304,651,504
3060104	PERALATAN CETAK	1	3,740,000	0	0	0	0	1	3,740,000
3060199	ALAT STUDIO LAINNYA	3	57,750,000	0	0	0	0	3	57,750,000
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	143	417,948,420	0	0	0	0	143	417,948,420
3060202	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	4	9,800,000	0	0	0	0	4	9,800,000
3060206	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	2	13,200,000	0	0	0	0	2	13,200,000
3060323	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	12	15,923,160	0	0	0	0	12	15,923,160
3060346	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	10	726,000	0	0	0	0	10	726,000
3070101	ALAT KEDOKTERAN UMUM	12	46,959,194	0	0	0	0	12	46,959,194

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:16 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_gab_skel_es1_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3070101	ALAT KEDOKTERAN UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0
3070110	ALAT KEDOKTERAN ANAK	0	0	0	0	0	0	0	0
3090402	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102	PERSONAL KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			447,406,712,140		947,460,200		1,413,602,960		446,940,569,380

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:16 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_gab_es1_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	11,348	356,165,357,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	11,348	356,165,357,000
132111	Peralatan dan Mesin	4,037	26,732,140,857	0	0	10	814,091,600	4,027	25,918,049,257
3010302001	Elevator /Lift	2	1,490,098,000	0	0	0	0	2	1,490,098,000
3010303003	Stationary Compressor	1	3,210,000	0	0	0	0	1	3,210,000
3010304002	Portable Generating Set	1	4,042,500	0	0	0	0	1	4,042,500
3010304003	Stationary Generating Set	3	114,416,000	0	0	0	0	3	114,416,000
3010305002	Portable Water Pump	5	126,665,000	0	0	0	0	5	126,665,000
3010305003	Stationary Water Pump	4	129,748,000	0	0	0	0	4	129,748,000
3010305005	Sumersible Pump	3	467,487,000	0	0	0	0	3	467,487,000
3020101001	Sedan	6	1,383,372,700	0	0	2	404,107,340	4	979,265,360
3020101002	Jeep	2	849,150,000	0	0	0	0	2	849,150,000
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	250,000,000	0	0	0	0	1	250,000,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	13	2,495,212,490	0	0	2	327,034,260	11	2,168,178,230
3020104001	Sepeda Motor	6	88,992,500	0	0	0	0	6	88,992,500
3020105999	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	1	231,137,500	0	0	0	0	1	231,137,500
3030103001	Battery Charge	3	1,921,700	0	0	0	0	3	1,921,700
3030103031	Tester Listrik/Telepon/Internet	2	1,320,000	0	0	0	0	2	1,320,000
3030205001	Tool Kit Set	1	5,506,969	0	0	0	0	1	5,506,969
3030212025	Mesin Pompa air PMK	1	4,873,523	0	0	0	0	1	4,873,523
3030301064	Memori Programmer	2	2,417,972	0	0	0	0	2	2,417,972
3030308012	Termometer Standar	1	2,090,000	0	0	0	0	1	2,090,000
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	6	9,546,000	0	0	0	0	6	9,546,000
3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	2	3,940,000	0	0	0	0	2	3,940,000
3050102002	Mesin Hitung Listrik	14	21,126,980	0	0	0	0	14	21,126,980
3050103007	Mesin Fotocopy Folio	5	234,200,000	0	0	0	0	5	234,200,000
3050103008	Mesin Fotocopy Double Folio	2	74,800,000	0	0	0	0	2	74,800,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	87	161,964,500	0	0	0	0	87	161,964,500
3050104002	Lemari Kayu	56	114,759,000	0	0	0	0	56	114,759,000
3050104003	Rak Besi	278	334,819,890	0	0	0	0	278	334,819,890
3050104004	Rak Kayu	57	88,344,984	0	0	0	0	57	88,344,984
3050104005	Filing Cabinet Besi	152	292,050,721	0	0	0	0	152	292,050,721
3050104007	Brandkas	8	4,775,000	0	0	0	0	8	4,775,000
3050104011	Rotary Filling	2	4,467,000	0	0	0	0	2	4,467,000
3050104016	Roll Opek	7	10,906,000	0	0	0	0	7	10,906,000
3050104020	Lemari Display	2	8,000,000	0	0	0	0	2	8,000,000
3050105001	Tabung Pemadam Api	90	66,102,500	0	0	0	0	90	66,102,500

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:16 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_gab_es1_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3050105002	Hydrant	3	23,372,000	0	0	0	0	3	23,372,000
3050105003	Sprinkler	1	1,156,000	0	0	0	0	1	1,156,000
3050105004	Fire Alarm	3	3,615,000	0	0	0	0	3	3,615,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	3	163,281,745	0	0	0	0	3	163,281,745
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	2	155,020,150	0	0	0	0	2	155,020,150
3050105009	Movitex Board	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105010	White Board	33	7,807,890	0	0	0	0	33	7,807,890
3050105013	Copy Board/Elektrik White Board	1	2,732,000	0	0	0	0	1	2,732,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	17	106,706,000	0	0	0	0	17	106,706,000
3050105017	Mesin Absensi	8	138,762,000	0	0	0	0	8	138,762,000
3050105024	Alat Pemotong Kertas	3	11,528,000	0	0	0	0	3	11,528,000
3050105025	Headmachine Besar	3	2,690,000	0	0	0	0	3	2,690,000
3050105031	Panel Pameran	4	3,887,000	0	0	0	0	4	3,887,000
3050105037	White Board Electronic	2	4,278,000	0	0	0	0	2	4,278,000
3050105038	Laser Pointer	11	11,440,000	0	0	0	0	11	11,440,000
3050105039	Display	2	9,900,000	0	0	0	0	2	9,900,000
3050105045	Penangkal Petir	1	6,931,000	0	0	0	0	1	6,931,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	15	161,709,500	0	0	0	0	15	161,709,500
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	23	43,300,000	0	0	0	0	23	43,300,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	18	126,925,935	0	0	0	0	18	126,925,935
3050105062	Bel	3	24,475,000	0	0	0	0	3	24,475,000
3050105095	Wastafel Portable	1	9,996,250	0	0	0	0	1	9,996,250
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	3	1,242,000	0	0	0	0	3	1,242,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	2	2,156,234	0	0	0	0	2	2,156,234
3050201002	Meja Kerja Kayu	230	229,130,781	0	0	0	0	230	229,130,781
3050201003	Kursi Besi/Metal	324	357,392,000	0	0	0	0	324	357,392,000
3050201004	Kursi Kayu	12	3,372,000	0	0	0	0	12	3,372,000
3050201005	Sice	31	381,625,416	0	0	0	0	31	381,625,416
3050201008	Meja Rapat	111	332,597,000	0	0	0	0	111	332,597,000
3050201009	Meja Komputer	78	18,233,000	0	0	0	0	78	18,233,000
3050201010	Tempat Tidur Besi	1	2,866,234	0	0	0	0	1	2,866,234
3050201013	Meja Telepon	44	5,038,000	0	0	0	0	44	5,038,000
3050201014	Meja Resepsionis	4	23,064,000	0	0	0	0	4	23,064,000
3050201016	Kasur/Spring Bed	8	38,385,000	0	0	0	0	8	38,385,000
3050201017	Sketsel	3	9,007,000	0	0	0	0	3	9,007,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	450	609,206,830	0	0	0	0	450	609,206,830
3050202003	Jam Elektronik	1	92,000	0	0	0	0	1	92,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM

Tanggal : 25/07/24 3:16 PM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_gab_es1_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	2,886,500	0	0	0	0	1	2,886,500
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	3	13,972,500	0	0	0	0	3	13,972,500
3050203004	Mesin Cuci	1	2,970,000	0	0	0	0	1	2,970,000
3050203005	Air Cleaner	1	2,299,000	0	0	0	0	1	2,299,000
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	1	412,500	0	0	0	0	1	412,500
3050204001	Lemari Es	17	83,064,910	0	0	0	0	17	83,064,910
3050204003	A.C. Window	8	234,610,000	0	0	0	0	8	234,610,000
3050204004	A.C. Split	126	1,598,786,641	0	0	0	0	126	1,598,786,641
3050204006	Kipas Angin	2	1,254,000	0	0	0	0	2	1,254,000
3050205019	Mixer	1	6,462,500	0	0	0	0	1	6,462,500
3050206002	Televisi	29	166,810,000	0	0	0	0	29	166,810,000
3050206007	Loudspeaker	18	76,250,500	0	0	0	0	18	76,250,500
3050206008	Sound System	6	334,180,200	0	0	0	0	6	334,180,200
3050206012	Wireless	3	12,498,000	0	0	0	0	3	12,498,000
3050206014	Microphone	12	29,480,000	0	0	0	0	12	29,480,000
3050206015	Microphone Table Stand	3	2,013,000	0	0	0	0	3	2,013,000
3050206016	Mic Conference	1	84,150,000	0	0	0	0	1	84,150,000
3050206017	Unit Power Supply	5	90,190,000	0	0	0	0	5	90,190,000
3050206019	Stabilisator	1	275,000	0	0	0	0	1	275,000
3050206020	Camera Video	2	99,327,860	0	0	0	0	2	99,327,860
3050206021	Tustel	1	3,076,250	0	0	0	0	1	3,076,250
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206030	Tiang Bendera	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206034	Tangga Aluminium	7	14,086,105	0	0	0	0	7	14,086,105
3050206036	Dispenser	33	92,144,534	0	0	0	0	33	92,144,534
3050206037	Mimbar/Podium	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206046	Handy Cam	4	70,398,500	0	0	0	0	4	70,398,500
3050206055	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1	666,232	0	0	0	0	1	666,232
3050206056	Karpet	2	59,605,000	0	0	0	0	2	59,605,000
3050206057	Vertikal Blind	51	72,705,184	0	0	0	0	51	72,705,184
3050206058	Gordyin/Kray	317	264,581,100	0	0	0	0	317	264,581,100
3050206059	Kabel Roll	10	7,700,000	0	0	0	0	10	7,700,000
3050206061	Keset Kaki	8	25,224,000	0	0	0	0	8	25,224,000
3050206068	DVD Player	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
3050206071	Kabel	8	3,459,500	0	0	0	0	8	3,459,500
3050206080	Bracket Standing Peralatan	10	25,117,660	0	0	0	0	10	25,117,660

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM

Tanggal : 25/07/24 3:16 PM

Halaman : 4

Kode Lap : lap_bmn_gab_es1_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3060101002	Audio Mixing Portable	1	5,802,500	0	0	0	0	1	5,802,500
3060101003	Audio Mixing Stationer	2	20,702,000	0	0	0	0	2	20,702,000
3060101017	Cassette Duplicator	3	34,824,000	0	0	0	0	3	34,824,000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	6	41,074,000	0	0	0	0	6	41,074,000
3060101039	Light Signal	1	3,500,000	0	0	0	0	1	3,500,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	61,821,288	0	0	0	0	5	61,821,288
3060101056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1	2,381,500	0	0	0	0	1	2,381,500
3060101060	Power Amplifier	2	11,000,000	0	0	0	0	2	11,000,000
3060101079	Microphone Cable	1	1,870,000	0	0	0	0	1	1,870,000
3060101085	Cable	8	1,760,000	0	0	0	0	8	1,760,000
3060101088	Voice Recorder	7	6,964,500	0	0	0	0	7	6,964,500
3060101091	Digital LED Running Text	6	23,499,300	0	0	0	0	6	23,499,300
3060102003	Camera Electronic	3	91,520,000	0	0	0	0	3	91,520,000
3060102012	Video Monitor	1	59,751,660	0	0	0	0	1	59,751,660
3060102013	Video Tape Recorder Portable	1	8,448,000	0	0	0	0	1	8,448,000
3060102016	Video Switcher	2	21,940,260	0	0	0	0	2	21,940,260
3060102020	Video Test Signal Generator	1	12,287,000	0	0	0	0	1	12,287,000
3060102034	Teleprompter	1	19,140,000	0	0	0	0	1	19,140,000
3060102045	Tripod Camera	19	58,388,958	0	0	0	0	19	58,388,958
3060102055	Lighting Stand Tripod	11	71,606,700	0	0	0	0	11	71,606,700
3060102056	Film Projector	5	146,646,000	0	0	0	0	5	146,646,000
3060102057	Slide Projector	1	3,190,000	0	0	0	0	1	3,190,000
3060102060	Camera Film	3	116,688,000	0	0	0	0	3	116,688,000
3060102061	Lensa Kamera	8	108,303,600	0	0	0	0	8	108,303,600
3060102099	Automatic Emergency Light	2	1,100,000	0	0	0	0	2	1,100,000
3060102107	Layar Film/Projector	1	16,400,000	0	0	0	0	1	16,400,000
3060102114	Standard True Signal/Master Rack	1	12,162,360	0	0	0	0	1	12,162,360
3060102118	Head Set	2	6,072,000	0	0	0	0	2	6,072,000
3060102128	Camera Digital	15	280,600,000	0	0	0	0	15	280,600,000
3060102129	Tas Kamera	1	2,400,200	0	0	0	0	1	2,400,200
3060102130	Lampu Blitz Kamera	2	8,231,500	0	0	0	0	2	8,231,500
3060102131	Lensa Filter	1	1,687,500	0	0	0	0	1	1,687,500
3060102135	LCD Monitor	7	1,204,207,689	0	0	0	0	7	1,204,207,689
3060102152	RF Cable	1	7,700,000	0	0	0	0	1	7,700,000
3060102165	Camera Conference	1	2,035,000	0	0	0	0	1	2,035,000
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	4	44,145,077	0	0	0	0	4	44,145,077
3060104045	Mesin Barcode	1	3,740,000	0	0	0	0	1	3,740,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:16 PM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_bmn_gab_es1_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3060199999	Alat Studio Lainnya	3	57,750,000	0	0	0	0	3	57,750,000
3060201001	Telephone (PABX)	2	241,354,500	0	0	0	0	2	241,354,500
3060201003	Pesawat Telephone	104	20,608,000	0	0	0	0	104	20,608,000
3060201006	Handy Talky (HT)	16	48,210,000	0	0	0	0	16	48,210,000
3060201010	Facsimile	11	35,178,000	0	0	0	0	11	35,178,000
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	10	72,597,920	0	0	0	0	10	72,597,920
3060202999	Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya	4	9,800,000	0	0	0	0	4	9,800,000
3060206002	Wireless Amplifier	2	13,200,000	0	0	0	0	2	13,200,000
3060323022	Change Over Switch	12	15,923,160	0	0	0	0	12	15,923,160
3060346005	Conecctor	10	726,000	0	0	0	0	10	726,000
3070101001	Sterilisator	1	9,900,000	0	0	0	0	1	9,900,000
3070101002	Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Umum)	0	0	0	0	0	0	0	0
3070101005	Tensimeter	2	12,866,234	0	0	0	0	2	12,866,234
3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1	658,000	0	0	0	0	1	658,000
3070101012	Metal Chatheeter	0	0	0	0	0	0	0	0
3070101018	Instrumen Cabinet	1	935,000	0	0	0	0	1	935,000
3070101022	Lemari Steriil	1	4,565,000	0	0	0	0	1	4,565,000
3070101026	Tabung O2	2	3,088,635	0	0	0	0	2	3,088,635
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	3	12,155,075	0	0	0	0	3	12,155,075
3070101127	Kursi Dorong	1	2,791,250	0	0	0	0	1	2,791,250
3070102002	Dental Unit	1	123,200,000	0	0	0	0	1	123,200,000
3070102019	Portable Dental Unit	1	14,107,500	0	0	0	0	1	14,107,500
3070102093	Tang Ektrasi (Dewasa,Anak)	2	3,713,000	0	0	0	0	2	3,713,000
3070102118	Bein	1	671,293	0	0	0	0	1	671,293
3070102999	Alat Kedokteran Gigi Lainnya	2	12,200,000	0	0	0	0	2	12,200,000
3070106096	Otoscope Halogen Lamp	2	2,811,234	0	0	0	0	2	2,811,234
3070110011	Neirbekken Stainless Steel	0	0	0	0	0	0	0	0
3070111003	Bed Pan For Adult 310 mm Complete	1	3,436,000	0	0	0	0	1	3,436,000
3070111999	Alat Kedokteran Poliklinik Lainnya	1	89,347,170	0	0	0	0	1	89,347,170
3070118011	Data Catridge	1	24,657,600	0	0	0	0	1	24,657,600
3070199999	Alat Kedokteran Lainnya	2	8,980,519	0	0	0	0	2	8,980,519
3080111021	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	1	26,125,000	0	0	0	0	1	26,125,000
3080804009	DC / AC Power Supply	1	2,195,000	0	0	0	0	1	2,195,000
3090402014	Recharging System	0	0	0	0	0	0	0	0
3090402031	Kamera Digital	0	0	0	0	0	0	0	0
3100101004	Internet	2	5,500,000	0	0	0	0	2	5,500,000
3100102001	P.C Unit	189	2,451,847,000	0	0	0	0	189	2,451,847,000

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:16 PM
Halaman : 7
Kode Lap : lap_bmn_gab_es1_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3050105009	Movitex Board	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201005	Sice	0	0	0	0	0	0	0	0
3050201009	Meja Komputer	0	0	0	0	0	0	0	0
3050204004	A.C. Split	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206002	Televisi	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206030	Tiang Bendera	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206037	Mimbar/Podium	0	0	0	0	0	0	0	0
3060201006	Handy Talky (HT)	0	0	0	0	0	0	0	0
3070101002	Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Umum)	0	0	0	0	0	0	0	0
3070101012	Metal Chatheeter	0	0	0	0	0	0	0	0
3070110011	Neirbekken Stainless Steel	0	0	0	0	0	0	0	0
3090402014	Recharging System	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102001	P.C Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102002	Lap Top	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102007	Net Book	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			447,406,712,140		947,460,200		1,413,602,960		446,940,569,380

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM

Tanggal : 25/07/24 3:14 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_kel_es1_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	11,348	356,165,357,000
20101	TANAH PERSIL	11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	11,348	356,165,357,000
132111	Peralatan dan Mesin	3,728	26,605,556,857	0	0	10	814,091,600	3,718	25,791,465,257
30103	ALAT BANTU	19	2,335,666,500	0	0	0	0	19	2,335,666,500
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	29	5,297,865,190	0	0	4	731,141,600	25	4,566,723,590
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	5	3,241,700	0	0	0	0	5	3,241,700
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	2	10,380,492	0	0	0	0	2	10,380,492
30303	ALAT UKUR	3	4,507,972	0	0	0	0	3	4,507,972
30501	ALAT KANTOR	928	2,450,558,045	0	0	0	0	928	2,450,558,045
30502	ALAT RUMAH TANGGA	1,792	5,388,591,671	0	0	0	0	1,792	5,388,591,671
30601	ALAT STUDIO	133	2,579,580,592	0	0	0	0	133	2,579,580,592
30602	ALAT KOMUNIKASI	59	423,081,420	0	0	0	0	59	423,081,420
30603	PERALATAN PEMANCAR	12	15,923,160	0	0	0	0	12	15,923,160
30701	ALAT KEDOKTERAN	26	330,083,510	0	0	0	0	26	330,083,510
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	1	26,125,000	0	0	0	0	1	26,125,000
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI &	1	2,195,000	0	0	0	0	1	2,195,000
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	454	6,465,408,956	0	0	6	82,950,000	448	6,382,458,956
31002	PERALATAN KOMPUTER	263	1,249,370,029	0	0	0	0	263	1,249,370,029
31901	PERALATAN OLAH RAGA	1	22,977,620	0	0	0	0	1	22,977,620
133111	Gedung dan Bangunan	18	62,954,462,581	0	0	0	0	18	62,954,462,581
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	18	62,954,462,581	0	0	0	0	18	62,954,462,581
40401	TUGU/TANDA BATAS	0	0	0	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	27,336	1,123,767,442	1,608	216,318,600	1,378	168,527,100	27,566	1,171,558,942
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	27,336	1,123,767,442	1,608	216,318,600	1,378	168,527,100	27,566	1,171,558,942
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi	7	430,984,260	4	731,141,600	7	430,984,260	4	731,141,600
30103	ALAT BANTU	0	0	0	0	0	0	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	7	430,984,260	4	731,141,600	7	430,984,260	4	731,141,600
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	0	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			447,280,128,140		947,460,200		1,413,602,960		446,813,985,380

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM

Tanggal : 25/07/24 3:14 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_intra_skel_es1_po

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	11,348	356,165,357,000
2010104	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	11,348	356,165,357,000
132111	Peralatan dan Mesin	3,728	26,605,556,857	0	0	10	814,091,600	3,718	25,791,465,257
3010302	FEEDER	2	1,490,098,000	0	0	0	0	2	1,490,098,000
3010303	COMPRESSOR	1	3,210,000	0	0	0	0	1	3,210,000
3010304	ELECTRIC GENERATING SET	4	118,458,500	0	0	0	0	4	118,458,500
3010305	POMPA	12	723,900,000	0	0	0	0	12	723,900,000
3020101	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	8	2,232,522,700	0	0	2	404,107,340	6	1,828,415,360
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	14	2,745,212,490	0	0	2	327,034,260	12	2,418,178,230
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	6	88,992,500	0	0	0	0	6	88,992,500
3020105	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	1	231,137,500	0	0	0	0	1	231,137,500
3030103	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	5	3,241,700	0	0	0	0	5	3,241,700
3030205	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	1	5,506,969	0	0	0	0	1	5,506,969
3030212	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	1	4,873,523	0	0	0	0	1	4,873,523
3030301	ALAT UKUR UNIVERSAL	2	2,417,972	0	0	0	0	2	2,417,972
3030308	ALAT UKUR/PEMBANDING	1	2,090,000	0	0	0	0	1	2,090,000
3050101	MESIN KETIK	8	13,486,000	0	0	0	0	8	13,486,000
3050102	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	14	21,126,980	0	0	0	0	14	21,126,980
3050103	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	7	309,000,000	0	0	0	0	7	309,000,000
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	649	1,020,087,095	0	0	0	0	649	1,020,087,095
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	250	1,086,857,970	0	0	0	0	250	1,086,857,970
3050201	MEUBELAIR	1,103	1,907,547,495	0	0	0	0	1,103	1,907,547,495
3050202	ALAT PENGUKUR WAKTU	1	92,000	0	0	0	0	1	92,000
3050203	ALAT PEMBERSIH	7	22,540,500	0	0	0	0	7	22,540,500
3050204	ALAT PENDINGIN	153	1,917,715,551	0	0	0	0	153	1,917,715,551
3050205	ALAT DAPUR	1	6,462,500	0	0	0	0	1	6,462,500
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	527	1,534,233,625	0	0	0	0	527	1,534,233,625
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	35	213,439,088	0	0	0	0	35	213,439,088
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	94	2,304,651,504	0	0	0	0	94	2,304,651,504
3060104	PERALATAN CETAK	1	3,740,000	0	0	0	0	1	3,740,000
3060199	ALAT STUDIO LAINNYA	3	57,750,000	0	0	0	0	3	57,750,000
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	53	400,081,420	0	0	0	0	53	400,081,420
3060202	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	4	9,800,000	0	0	0	0	4	9,800,000
3060206	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	2	13,200,000	0	0	0	0	2	13,200,000
3060323	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	12	15,923,160	0	0	0	0	12	15,923,160
3070101	ALAT KEDOKTERAN UMUM	12	46,959,194	0	0	0	0	12	46,959,194
3070102	ALAT KEDOKTERAN GIGI	7	153,891,793	0	0	0	0	7	153,891,793

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:14 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_intra_skel_es1_po

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3070110	ALAT KEDOKTERAN ANAK	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102	PERSONAL KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			447,280,128,140		947,460,200		1,413,602,960		446,813,985,380

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:15 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_intra_es1_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131111	Tanah	11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	11,348	356,165,357,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	11,348	356,165,357,000	0	0	0	0	11,348	356,165,357,000
132111	Peralatan dan Mesin	3,728	26,605,556,857	0	0	10	814,091,600	3,718	25,791,465,257
3010302001	Elevator /Lift	2	1,490,098,000	0	0	0	0	2	1,490,098,000
3010303003	Stationary Compressor	1	3,210,000	0	0	0	0	1	3,210,000
3010304002	Portable Generating Set	1	4,042,500	0	0	0	0	1	4,042,500
3010304003	Stationary Generating Set	3	114,416,000	0	0	0	0	3	114,416,000
3010305002	Portable Water Pump	5	126,665,000	0	0	0	0	5	126,665,000
3010305003	Stationary Water Pump	4	129,748,000	0	0	0	0	4	129,748,000
3010305005	Sumersible Pump	3	467,487,000	0	0	0	0	3	467,487,000
3020101001	Sedan	6	1,383,372,700	0	0	2	404,107,340	4	979,265,360
3020101002	Jeep	2	849,150,000	0	0	0	0	2	849,150,000
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	1	250,000,000	0	0	0	0	1	250,000,000
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	13	2,495,212,490	0	0	2	327,034,260	11	2,168,178,230
3020104001	Sepeda Motor	6	88,992,500	0	0	0	0	6	88,992,500
3020105999	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	1	231,137,500	0	0	0	0	1	231,137,500
3030103001	Battery Charge	3	1,921,700	0	0	0	0	3	1,921,700
3030103031	Tester Listrik/Telepon/Internet	2	1,320,000	0	0	0	0	2	1,320,000
3030205001	Tool Kit Set	1	5,506,969	0	0	0	0	1	5,506,969
3030212025	Mesin Pompa air PMK	1	4,873,523	0	0	0	0	1	4,873,523
3030301064	Memori Programmer	2	2,417,972	0	0	0	0	2	2,417,972
3030308012	Termometer Standar	1	2,090,000	0	0	0	0	1	2,090,000
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inchi)	6	9,546,000	0	0	0	0	6	9,546,000
3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	2	3,940,000	0	0	0	0	2	3,940,000
3050102002	Mesin Hitung Listrik	14	21,126,980	0	0	0	0	14	21,126,980
3050103007	Mesin Fotocopy Folio	5	234,200,000	0	0	0	0	5	234,200,000
3050103008	Mesin Fotocopy Double Folio	2	74,800,000	0	0	0	0	2	74,800,000
3050104001	Lemari Besi/Metal	87	161,964,500	0	0	0	0	87	161,964,500
3050104002	Lemari Kayu	56	114,759,000	0	0	0	0	56	114,759,000
3050104003	Rak Besi	278	334,819,890	0	0	0	0	278	334,819,890
3050104004	Rak Kayu	57	88,344,984	0	0	0	0	57	88,344,984
3050104005	Filing Cabinet Besi	152	292,050,721	0	0	0	0	152	292,050,721
3050104007	Brandkas	8	4,775,000	0	0	0	0	8	4,775,000
3050104011	Rotary Filling	2	4,467,000	0	0	0	0	2	4,467,000
3050104016	Roll Opek	7	10,906,000	0	0	0	0	7	10,906,000
3050104020	Lemari Display	2	8,000,000	0	0	0	0	2	8,000,000
3050105001	Tabung Pemadam Api	90	66,102,500	0	0	0	0	90	66,102,500

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:15 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_intra_es1_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3050105002	Hydrant	3	23,372,000	0	0	0	0	3	23,372,000
3050105003	Sprinkler	1	1,156,000	0	0	0	0	1	1,156,000
3050105004	Fire Alarm	3	3,615,000	0	0	0	0	3	3,615,000
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	3	163,281,745	0	0	0	0	3	163,281,745
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	2	155,020,150	0	0	0	0	2	155,020,150
3050105009	Movitex Board	0	0	0	0	0	0	0	0
3050105010	White Board	33	7,807,890	0	0	0	0	33	7,807,890
3050105013	Copy Board/Elektrik White Board	1	2,732,000	0	0	0	0	1	2,732,000
3050105015	Alat Penghancur Kertas	17	106,706,000	0	0	0	0	17	106,706,000
3050105017	Mesin Absensi	8	138,762,000	0	0	0	0	8	138,762,000
3050105024	Alat Pemotong Kertas	3	11,528,000	0	0	0	0	3	11,528,000
3050105025	Headmachine Besar	3	2,690,000	0	0	0	0	3	2,690,000
3050105031	Panel Pameran	4	3,887,000	0	0	0	0	4	3,887,000
3050105037	White Board Electronic	2	4,278,000	0	0	0	0	2	4,278,000
3050105038	Laser Pointer	11	11,440,000	0	0	0	0	11	11,440,000
3050105039	Display	2	9,900,000	0	0	0	0	2	9,900,000
3050105045	Penangkal Petir	1	6,931,000	0	0	0	0	1	6,931,000
3050105048	LCD Projector/Infocus	15	161,709,500	0	0	0	0	15	161,709,500
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	23	43,300,000	0	0	0	0	23	43,300,000
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	18	126,925,935	0	0	0	0	18	126,925,935
3050105062	Bel	3	24,475,000	0	0	0	0	3	24,475,000
3050105095	Wastafel Portable	1	9,996,250	0	0	0	0	1	9,996,250
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	3	1,242,000	0	0	0	0	3	1,242,000
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	2	2,156,234	0	0	0	0	2	2,156,234
3050201002	Meja Kerja Kayu	230	229,130,781	0	0	0	0	230	229,130,781
3050201003	Kursi Besi/Metal	212	307,580,000	0	0	0	0	212	307,580,000
3050201004	Kursi Kayu	12	3,372,000	0	0	0	0	12	3,372,000
3050201005	Sice	31	381,625,416	0	0	0	0	31	381,625,416
3050201008	Meja Rapat	111	332,597,000	0	0	0	0	111	332,597,000
3050201009	Meja Komputer	59	13,183,000	0	0	0	0	59	13,183,000
3050201010	Tempat Tidur Besi	1	2,866,234	0	0	0	0	1	2,866,234
3050201013	Meja Telepon	44	5,038,000	0	0	0	0	44	5,038,000
3050201014	Meja Resepsionis	4	23,064,000	0	0	0	0	4	23,064,000
3050201016	Kasur/Spring Bed	8	38,385,000	0	0	0	0	8	38,385,000
3050201017	Sketsel	3	9,007,000	0	0	0	0	3	9,007,000
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	386	559,542,830	0	0	0	0	386	559,542,830
3050202003	Jam Elektronik	1	92,000	0	0	0	0	1	92,000

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:15 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_intra_es1_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	2,886,500	0	0	0	0	1	2,886,500
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	3	13,972,500	0	0	0	0	3	13,972,500
3050203004	Mesin Cuci	1	2,970,000	0	0	0	0	1	2,970,000
3050203005	Air Cleaner	1	2,299,000	0	0	0	0	1	2,299,000
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	1	412,500	0	0	0	0	1	412,500
3050204001	Lemari Es	17	83,064,910	0	0	0	0	17	83,064,910
3050204003	A.C. Window	8	234,610,000	0	0	0	0	8	234,610,000
3050204004	A.C. Split	126	1,598,786,641	0	0	0	0	126	1,598,786,641
3050204006	Kipas Angin	2	1,254,000	0	0	0	0	2	1,254,000
3050205019	Mixer	1	6,462,500	0	0	0	0	1	6,462,500
3050206002	Televisi	29	166,810,000	0	0	0	0	29	166,810,000
3050206007	Loudspeaker	18	76,250,500	0	0	0	0	18	76,250,500
3050206008	Sound System	6	334,180,200	0	0	0	0	6	334,180,200
3050206012	Wireless	3	12,498,000	0	0	0	0	3	12,498,000
3050206014	Microphone	12	29,480,000	0	0	0	0	12	29,480,000
3050206015	Microphone Table Stand	3	2,013,000	0	0	0	0	3	2,013,000
3050206016	Mic Conference	1	84,150,000	0	0	0	0	1	84,150,000
3050206017	Unit Power Supply	5	90,190,000	0	0	0	0	5	90,190,000
3050206020	Camera Video	2	99,327,860	0	0	0	0	2	99,327,860
3050206021	Tustel	1	3,076,250	0	0	0	0	1	3,076,250
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206030	Tiang Bendera	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206034	Tangga Aluminium	7	14,086,105	0	0	0	0	7	14,086,105
3050206036	Dispenser	33	92,144,534	0	0	0	0	33	92,144,534
3050206037	Mimbar/Podium	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206046	Handy Cam	4	70,398,500	0	0	0	0	4	70,398,500
3050206055	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	1	666,232	0	0	0	0	1	666,232
3050206056	Karpet	2	59,605,000	0	0	0	0	2	59,605,000
3050206057	Vertikal Blind	51	72,705,184	0	0	0	0	51	72,705,184
3050206058	Gordyin/Kray	317	264,581,100	0	0	0	0	317	264,581,100
3050206059	Kabel Roll	10	7,700,000	0	0	0	0	10	7,700,000
3050206061	Keset Kaki	8	25,224,000	0	0	0	0	8	25,224,000
3050206068	DVD Player	1	2,000,000	0	0	0	0	1	2,000,000
3050206071	Kabel	3	2,029,500	0	0	0	0	3	2,029,500
3050206080	Bracket Standing Peralatan	10	25,117,660	0	0	0	0	10	25,117,660
3060101002	Audio Mixing Portable	1	5,802,500	0	0	0	0	1	5,802,500

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:15 PM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_intra_es1_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3060101003	Audio Mixing Stationer	2	20,702,000	0	0	0	0	2	20,702,000
3060101017	Cassette Duplicator	3	34,824,000	0	0	0	0	3	34,824,000
3060101036	Microphone/Wireless MIC	6	41,074,000	0	0	0	0	6	41,074,000
3060101039	Light Signal	1	3,500,000	0	0	0	0	1	3,500,000
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	5	61,821,288	0	0	0	0	5	61,821,288
3060101056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	1	2,381,500	0	0	0	0	1	2,381,500
3060101060	Power Amplifier	2	11,000,000	0	0	0	0	2	11,000,000
3060101079	Microphone Cable	1	1,870,000	0	0	0	0	1	1,870,000
3060101088	Voice Recorder	7	6,964,500	0	0	0	0	7	6,964,500
3060101091	Digital LED Running Text	6	23,499,300	0	0	0	0	6	23,499,300
3060102003	Camera Electronic	3	91,520,000	0	0	0	0	3	91,520,000
3060102012	Video Monitor	1	59,751,660	0	0	0	0	1	59,751,660
3060102013	Video Tape Recorder Portable	1	8,448,000	0	0	0	0	1	8,448,000
3060102016	Video Switcher	2	21,940,260	0	0	0	0	2	21,940,260
3060102020	Video Test Signal Generator	1	12,287,000	0	0	0	0	1	12,287,000
3060102034	Teleprompter	1	19,140,000	0	0	0	0	1	19,140,000
3060102045	Tripod Camera	19	58,388,958	0	0	0	0	19	58,388,958
3060102055	Lighting Stand Tripod	11	71,606,700	0	0	0	0	11	71,606,700
3060102056	Film Projector	5	146,646,000	0	0	0	0	5	146,646,000
3060102057	Slide Projector	1	3,190,000	0	0	0	0	1	3,190,000
3060102060	Camera Film	3	116,688,000	0	0	0	0	3	116,688,000
3060102061	Lensa Kamera	8	108,303,600	0	0	0	0	8	108,303,600
3060102099	Automatic Emergency Light	2	1,100,000	0	0	0	0	2	1,100,000
3060102107	Layar Film/Projector	1	16,400,000	0	0	0	0	1	16,400,000
3060102114	Standard True Signal/Master Rack	1	12,162,360	0	0	0	0	1	12,162,360
3060102118	Head Set	2	6,072,000	0	0	0	0	2	6,072,000
3060102128	Camera Digital	15	280,600,000	0	0	0	0	15	280,600,000
3060102129	Tas Kamera	1	2,400,200	0	0	0	0	1	2,400,200
3060102130	Lampu Blitz Kamera	2	8,231,500	0	0	0	0	2	8,231,500
3060102131	Lensa Filter	1	1,687,500	0	0	0	0	1	1,687,500
3060102135	LCD Monitor	7	1,204,207,689	0	0	0	0	7	1,204,207,689
3060102152	RF Cable	1	7,700,000	0	0	0	0	1	7,700,000
3060102165	Camera Conference	1	2,035,000	0	0	0	0	1	2,035,000
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	4	44,145,077	0	0	0	0	4	44,145,077
3060104045	Mesin Barcode	1	3,740,000	0	0	0	0	1	3,740,000
3060199999	Alat Studio Lainnya	3	57,750,000	0	0	0	0	3	57,750,000
3060201001	Telephone (PABX)	2	241,354,500	0	0	0	0	2	241,354,500

LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:15 PM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_bmn_intra_es1_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3060201003	Pesawat Telephone	14	2,741,000	0	0	0	0	14	2,741,000
3060201006	Handy Talky (HT)	16	48,210,000	0	0	0	0	16	48,210,000
3060201010	Facsimile	11	35,178,000	0	0	0	0	11	35,178,000
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	10	72,597,920	0	0	0	0	10	72,597,920
3060202999	Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya	4	9,800,000	0	0	0	0	4	9,800,000
3060206002	Wireless Amplifier	2	13,200,000	0	0	0	0	2	13,200,000
3060323022	Change Over Switch	12	15,923,160	0	0	0	0	12	15,923,160
3070101001	Sterilisator	1	9,900,000	0	0	0	0	1	9,900,000
3070101002	Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Umum)	0	0	0	0	0	0	0	0
3070101005	Tensimeter	2	12,866,234	0	0	0	0	2	12,866,234
3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	1	658,000	0	0	0	0	1	658,000
3070101012	Metal Chatheeter	0	0	0	0	0	0	0	0
3070101018	Instrumen Cabinet	1	935,000	0	0	0	0	1	935,000
3070101022	Lemari Steriil	1	4,565,000	0	0	0	0	1	4,565,000
3070101026	Tabung O2	2	3,088,635	0	0	0	0	2	3,088,635
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	3	12,155,075	0	0	0	0	3	12,155,075
3070101127	Kursi Dorong	1	2,791,250	0	0	0	0	1	2,791,250
3070102002	Dental Unit	1	123,200,000	0	0	0	0	1	123,200,000
3070102019	Portable Dental Unit	1	14,107,500	0	0	0	0	1	14,107,500
3070102093	Tang Ektrasi (Dewasa,Anak)	2	3,713,000	0	0	0	0	2	3,713,000
3070102118	Bein	1	671,293	0	0	0	0	1	671,293
3070102999	Alat Kedokteran Gigi Lainnya	2	12,200,000	0	0	0	0	2	12,200,000
3070106096	Otoscope Halogen Lamp	2	2,811,234	0	0	0	0	2	2,811,234
3070110011	Neirbekken Stainless Steel	0	0	0	0	0	0	0	0
3070111003	Bed Pan For Adult 310 mm Complete	1	3,436,000	0	0	0	0	1	3,436,000
3070111999	Alat Kedokteran Poliklinik Lainnya	1	89,347,170	0	0	0	0	1	89,347,170
3070118011	Data Catridge	1	24,657,600	0	0	0	0	1	24,657,600
3070199999	Alat Kedokteran Lainnya	2	8,980,519	0	0	0	0	2	8,980,519
3080111021	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	1	26,125,000	0	0	0	0	1	26,125,000
3080804009	DC / AC Power Supply	1	2,195,000	0	0	0	0	1	2,195,000
3090402031	Kamera Digital	0	0	0	0	0	0	0	0
3100101004	Internet	2	5,500,000	0	0	0	0	2	5,500,000
3100102001	P.C Unit	189	2,451,847,000	0	0	0	0	189	2,451,847,000
3100102002	Lap Top	115	1,981,893,498	0	0	6	82,950,000	109	1,898,943,498
3100102003	Note Book	17	309,832,000	0	0	0	0	17	309,832,000
3100102007	Net Book	118	1,567,210,000	0	0	0	0	118	1,567,210,000
3100102009	Tablet PC	11	87,779,458	0	0	0	0	11	87,779,458

**LAPORAN BARANG PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
INTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:15 PM
Halaman : 7
Kode Lap : lap_bmn_intra_es1_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO PER 1 JANUARI 2024		MUTASI				SALDO PER 30 JUNI 2024	
				BERTAMBAH		BERKURANG			
KODE	URAIAN	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3050201009	Meja Komputer	0	0	0	0	0	0	0	0
3050204004	A.C. Split	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206002	Televisi	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206030	Tiang Bendera	0	0	0	0	0	0	0	0
3050206037	Mimbar/Podium	0	0	0	0	0	0	0	0
3060201006	Handy Talky (HT)	0	0	0	0	0	0	0	0
3070101002	Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Umum)	0	0	0	0	0	0	0	0
3070101012	Metal Chatheeter	0	0	0	0	0	0	0	0
3070110011	Neirbekken Stainless Steel	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102001	P.C Unit	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102002	Lap Top	0	0	0	0	0	0	0	0
3100102007	Net Book	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0	0	0	0	0	0	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			447,280,128,140		947,460,200		1,413,602,960		446,813,985,380

**LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
KONTRUKSI DALAM Pengerjaan
RINCIAN PER SUB-SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:18 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_kdp_es1_poc

AKUN NERACA/ SUB-SUB KELOMPOK BARANG		JUMLAH S.D 1 JANUARI 2024	MUTASI TAMBAH	MUTASI KURANG	SALDO PER 30 JUNI 2024	KETERANGAN
KODE	URAIAN	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7
136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	0	0	0	0	
7010101002	Peralatan dan Mesin Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
7010101003	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	0	0	0	0	
TOTAL		0	0	0	0	

**LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013
UAPPB-E1 : 10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:20 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_kel_es1_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
162151	Software		6	4,184,325,500	(4,184,325,500)	0	(4,184,325,500)	0
80101	ASET TAK BERWUJUD		6	4,184,325,500	(4,184,325,500)	0	(4,184,325,500)	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya		721	69,971,060	0	0	0	69,971,060
80101	ASET TAK BERWUJUD		721	69,971,060	0	0	0	69,971,060
JUMLAH			727	4,254,296,560	(4,184,325,500)	0	(4,184,325,500)	69,971,060

LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

UAPB : 013
UAPPB-E1 : 10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM

Tanggal : 25/07/24 3:20 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_amor_skel_es1_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
162151	Software		6	4,184,325,500	(4,184,325,500)	0	(4,184,325,500)	0
8010101	ASET TAK BERWUJUD		6	4,184,325,500	(4,184,325,500)	0	(4,184,325,500)	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya		721	69,971,060	0	0	0	69,971,060
8010101	ASET TAK BERWUJUD		721	69,971,060	0	0	0	69,971,060
JUMLAH			727	4,254,296,560	(4,184,325,500)	0	(4,184,325,500)	69,971,060

**LAPORAN AMORTISASI BARANG PEMBANTU PENGGUNA ESELON I
ASET TAK BERWUJUD
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPB : 013
UAPPB-E1 : 10

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:21 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_amor_es1_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SAT	SALDO 30 JUNI 2024					
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	SALDO AWAL AKUMULASI AMORTISASI	MUTASI AMORTISASI	TOTAL AKUMULASI AMORTISASI	NILAI BUKU
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	9=5-8
162151	Software		6	4,184,325,500	(4,184,325,500)	0	(4,184,325,500)	0
8010101001	Software Komputer		6	4,184,325,500	(4,184,325,500)	0	(4,184,325,500)	0
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya		721	69,971,060	0	0	0	69,971,060
8010101050	Buku Digital		721	69,971,060	0	0	0	69,971,060
JUMLAH			727	4,254,296,560	(4,184,325,500)	0	(4,184,325,500)	69,971,060

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM

Tanggal : 25/07/24 3:20 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_kel_es1_poc

UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2024				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
			SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7=5+6	8=4-7
132111	Peralatan dan Mesin	126,584,000	(121,530,200)	(5,017,500)	(126,547,700)	36,300
30502	ALAT RUMAH TANGGA	106,231,000	(101,249,800)	(4,981,200)	(106,231,000)	0
30601	ALAT STUDIO	1,760,000	(1,760,000)	0	(1,760,000)	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	17,867,000	(17,867,000)	0	(17,867,000)	0
30603	PERALATAN PEMANCAR	726,000	(653,400)	(36,300)	(689,700)	36,300
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0
JUMLAH		126,584,000	(121,530,200)	(5,017,500)	(126,547,700)	36,300

LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - TINGKAT ESELON I
EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM

Tanggal : 25/07/24 3:20 PM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_susut_ekstra_skel_es1_poc

UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2024				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
			SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7=5+6	8=4-7
132111	Peralatan dan Mesin	126,584,000	(121,530,200)	(5,017,500)	(126,547,700)	36,300
3050201	MEUBELAIR	104,526,000	(99,544,800)	(4,981,200)	(104,526,000)	0
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	1,705,000	(1,705,000)	0	(1,705,000)	0
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	1,760,000	(1,760,000)	0	(1,760,000)	0
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	17,867,000	(17,867,000)	0	(17,867,000)	0
3060346	PERALATAN PERLENGKAPAN RADIO	726,000	(653,400)	(36,300)	(689,700)	36,300
3090402	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	0	0	0	0
3090402	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	0	0	0	0	0
JUMLAH		126,584,000	(121,530,200)	(5,017,500)	(126,547,700)	36,300

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:19 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_kel_es1_poc

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2024				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
			SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7=5+6	8=4-7
131111	Tanah	356,165,357,000	0	0	0	356,165,357,000
20101	TANAH PERSIL	356,165,357,000	0	0	0	356,165,357,000
132111	Peralatan dan Mesin	25,791,465,257	(22,314,784,270)	(190,305,747)	(22,505,090,017)	3,286,375,240
30103	ALAT BANTU	2,335,666,500	(2,322,068,286)	(13,598,214)	(2,335,666,500)	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	4,566,723,590	(4,361,704,475)	633,923,743	(3,727,780,732)	838,942,858
30301	ALAT BENGKEL BERMESIN	3,241,700	(2,953,445)	(96,085)	(3,049,530)	192,170
30302	ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	10,380,492	(10,380,492)	0	(10,380,492)	0
30303	ALAT UKUR	4,507,972	(4,507,972)	0	(4,507,972)	0
30501	ALAT KANTOR	2,450,558,045	(2,208,167,552)	(44,373,738)	(2,252,541,290)	198,016,755
30502	ALAT RUMAH TANGGA	5,388,591,671	(4,495,907,916)	(200,897,805)	(4,696,805,721)	691,785,950
30601	ALAT STUDIO	2,579,580,592	(2,263,448,219)	(63,187,754)	(2,326,635,973)	252,944,619
30602	ALAT KOMUNIKASI	423,081,420	(407,958,420)	(4,821,000)	(412,779,420)	10,302,000
30603	PERALATAN PEMANCAR	15,923,160	(15,923,160)	0	(15,923,160)	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	330,083,510	(308,047,638)	(4,576,946)	(312,624,584)	17,458,926
30801	UNIT ALAT LABORATORIUM	26,125,000	(9,796,875)	(1,632,813)	(11,429,688)	14,695,312
30808	ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI & INSTRUMENTASI	2,195,000	(2,195,000)	0	(2,195,000)	0
30904	ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	6,382,458,956	(4,800,419,956)	(437,785,625)	(5,238,205,581)	1,144,253,375
31002	PERALATAN KOMPUTER	1,249,370,029	(1,078,327,244)	(53,259,510)	(1,131,586,754)	117,783,275
31901	PERALATAN OLAH RAGA	22,977,620	(22,977,620)	0	(22,977,620)	0
133111	Gedung dan Bangunan	62,954,462,581	(25,623,349,003)	(2,083,714,231)	(27,707,063,234)	35,247,399,347
40101	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	62,954,462,581	(25,623,349,003)	(2,083,714,231)	(27,707,063,234)	35,247,399,347
40401	TUGU/TANDA BATAS	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	1,171,558,942	0	0	0	1,171,558,942
60101	BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	1,171,558,942	0	0	0	1,171,558,942
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	731,141,600	(430,984,260)	(300,157,340)	(731,141,600)	0
30103	ALAT BANTU	0	0	0	0	0
30201	ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	731,141,600	(430,984,260)	(300,157,340)	(731,141,600)	0
30501	ALAT KANTOR	0	0	0	0	0
30502	ALAT RUMAH TANGGA	0	0	0	0	0
30602	ALAT KOMUNIKASI	0	0	0	0	0
30701	ALAT KEDOKTERAN	0	0	0	0	0
31001	KOMPUTER UNIT	0	0	0	0	0
31002	PERALATAN KOMPUTER	0	0	0	0	0
JUMLAH		446,813,985,380	(48,369,117,533)	(2,574,177,318)	(50,943,294,851)	395,870,690,529

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:19 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_skel_es1_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2024				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
			SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7=5+6	8=4-7
131111	Tanah	356,165,357,000	0	0	0	356,165,357,000
2010104	TANAH UNTUK BANGUNAN TEMPAT KERJA	356,165,357,000	0	0	0	356,165,357,000
132111	Peralatan dan Mesin	25,791,465,257	(22,314,784,270)	(190,305,747)	(22,505,090,017)	3,286,375,240
3010302	FEEDER	1,490,098,000	(1,490,098,000)	0	(1,490,098,000)	0
3010303	COMPRESSOR	3,210,000	(3,210,000)	0	(3,210,000)	0
3010304	ELECTRIC GENERATING SET	118,458,500	(118,458,500)	0	(118,458,500)	0
3010305	POMPA	723,900,000	(710,301,786)	(13,598,214)	(723,900,000)	0
3020101	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	1,828,415,360	(1,908,361,985)	368,089,483	(1,540,272,502)	288,142,858
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	2,418,178,230	(2,133,212,490)	265,834,260	(1,867,378,230)	550,800,000
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	88,992,500	(88,992,500)	0	(88,992,500)	0
3020105	KENDARAAN BERMOTOR KHUSUS	231,137,500	(231,137,500)	0	(231,137,500)	0
3030103	PERKAKAS BENGKEL LISTRIK	3,241,700	(2,953,445)	(96,085)	(3,049,530)	192,170
3030205	PERKAKAS STANDARD (STANDARD TOOLS)	5,506,969	(5,506,969)	0	(5,506,969)	0
3030212	PERALATAN BENGKEL KHUSUS PELADAM	4,873,523	(4,873,523)	0	(4,873,523)	0
3030301	ALAT UKUR UNIVERSAL	2,417,972	(2,417,972)	0	(2,417,972)	0
3030308	ALAT UKUR/PEMBANDING	2,090,000	(2,090,000)	0	(2,090,000)	0
3050101	MESIN KETIK	13,486,000	(13,486,000)	0	(13,486,000)	0
3050102	MESIN HITUNG/MESIN JUMLAH	21,126,980	(21,126,980)	0	(21,126,980)	0
3050103	ALAT REPRODUKSI (PENGGANDAAN)	309,000,000	(309,000,000)	0	(309,000,000)	0
3050104	ALAT PENYIMPAN PERLENGKAPAN KANTOR	1,020,087,095	(1,011,222,297)	(2,958,798)	(1,014,181,095)	5,906,000
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	1,086,857,970	(853,332,275)	(41,414,940)	(894,747,215)	192,110,755
3050201	MEUBELAIR	1,907,547,495	(1,671,072,051)	(54,164,824)	(1,725,236,875)	182,310,620
3050202	ALAT PENGUKUR WAKTU	92,000	(92,000)	0	(92,000)	0
3050203	ALAT PEMBERSIH	22,540,500	(17,940,900)	(689,900)	(18,630,800)	3,909,700
3050204	ALAT PENDINGIN	1,917,715,551	(1,526,660,311)	(91,856,230)	(1,618,516,541)	299,199,010
3050205	ALAT DAPUR	6,462,500	(6,462,500)	0	(6,462,500)	0
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	1,534,233,625	(1,273,680,154)	(54,186,851)	(1,327,867,005)	206,366,620
3060101	PERALATAN STUDIO AUDIO	213,439,088	(181,294,338)	(6,428,950)	(187,723,288)	25,715,800
3060102	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM	2,304,651,504	(2,049,538,881)	(50,983,804)	(2,100,522,685)	204,128,819
3060104	PERALATAN CETAK	3,740,000	(3,740,000)	0	(3,740,000)	0
3060199	ALAT STUDIO LAINNYA	57,750,000	(28,875,000)	(5,775,000)	(34,650,000)	23,100,000
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	400,081,420	(384,958,420)	(4,821,000)	(389,779,420)	10,302,000
3060202	ALAT KOMUNIKASI RADIO SSB	9,800,000	(9,800,000)	0	(9,800,000)	0
3060206	ALAT KOMUNIKASI SOSIAL	13,200,000	(13,200,000)	0	(13,200,000)	0
3060323	PROGRAM INPUT EQUIPMENT	15,923,160	(15,923,160)	0	(15,923,160)	0
3070101	ALAT KEDOKTERAN UMUM	46,959,194	(44,650,994)	(1,154,100)	(45,805,094)	1,154,100
3070102	ALAT KEDOKTERAN GIGI	153,891,793	(139,708,793)	(2,630,750)	(142,339,543)	11,552,250

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:19 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_skel_es1_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2024				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
			SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7=5+6	8=4-7
3070106	ALAT KEDOKTERAN THT	2,811,234	(2,811,234)	0	(2,811,234)	0
3070110	ALAT KEDOKTERAN ANAK	0	0	0	0	0
3070111	ALAT KEDOKTERAN POLIKLINIK	92,783,170	(92,783,170)	0	(92,783,170)	0
3070118	ALAT KEDOKTERAN RADIOTERAPY	24,657,600	(24,657,600)	0	(24,657,600)	0
3070199	ALAT KEDOKTERAN LAINNYA	8,980,519	(3,435,847)	(792,096)	(4,227,943)	4,752,576
3080111	ALAT LABORATORIUM UMUM	26,125,000	(9,796,875)	(1,632,813)	(11,429,688)	14,695,312
3080804	ALAT LABORATORIUM LISTRIK DAN MEKANIK	2,195,000	(2,195,000)	0	(2,195,000)	0
3090402	ALAT DALMAS/ALAT DAKHURA	0	0	0	0	0
3100101	KOMPUTER JARINGAN	5,500,000	(5,500,000)	0	(5,500,000)	0
3100102	PERSONAL KOMPUTER	6,376,958,956	(4,794,919,956)	(437,785,625)	(5,232,705,581)	1,144,253,375
3100202	PERALATAN MINI KOMPUTER	226,878,000	(216,997,002)	(9,880,998)	(226,878,000)	0
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	650,189,150	(489,419,650)	(43,247,750)	(532,667,400)	117,521,750
3100204	PERALATAN JARINGAN	372,302,879	(371,910,592)	(130,762)	(372,041,354)	261,525
3190106	PERALATAN OLAH RAGA LAINNYA	22,977,620	(22,977,620)	0	(22,977,620)	0
133111	Gedung dan Bangunan	62,954,462,581	(25,623,349,003)	(2,083,714,231)	(27,707,063,234)	35,247,399,347
4010101	BANGUNAN GEDUNG KANTOR	59,966,118,647	(24,601,232,087)	(2,002,360,180)	(26,603,592,267)	33,362,526,380
4010102	BANGUNAN GUDANG	154,108,000	(80,136,160)	(6,164,320)	(86,300,480)	67,807,520
4010106	BANGUNAN KESEHATAN	481,163,934	(233,172,096)	(20,665,987)	(253,838,083)	227,325,851
4010108	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT IBADAH	1,422,910,000	(376,009,114)	(28,923,778)	(404,932,892)	1,017,977,108
4010113	BANGUNAN GEDUNG UNTUK POS JAGA	82,559,000	(17,035,980)	(1,310,460)	(18,346,440)	64,212,560
4010114	BANGUNAN GEDUNG GARASI/POOL	383,440,000	(74,398,806)	(5,722,986)	(80,121,792)	303,318,208
4010130	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA LAINNYA	464,163,000	(241,364,760)	(18,566,520)	(259,931,280)	204,231,720
4040104	PAGAR	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	1,171,558,942	0	0	0	1,171,558,942
6010101	BUKU	1,171,558,942	0	0	0	1,171,558,942
6010199	TERCETAK LAINNYA	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	731,141,600	(430,984,260)	(300,157,340)	(731,141,600)	0
3010305	POMPA	0	0	0	0	0
3020101	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERORANGAN	404,107,340	0	(404,107,340)	(404,107,340)	0
3020102	KENDARAAN BERMOTOR PENUMPANG	327,034,260	(323,602,260)	(3,432,000)	(327,034,260)	0
3020104	KENDARAAN BERMOTOR BERODA DUA	0	(107,382,000)	107,382,000	0	0
3050105	ALAT KANTOR LAINNYA	0	0	0	0	0
3050201	MEUBELAIR	0	0	0	0	0
3050204	ALAT PENDINGIN	0	0	0	0	0
3050206	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE)	0	0	0	0	0
3060201	ALAT KOMUNIKASI TELEPHONE	0	0	0	0	0
3070101	ALAT KEDOKTERAN UMUM	0	0	0	0	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM

Tanggal : 25/07/24 3:19 PM

Halaman : 3

Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_skel_es1_poc

AKUN NERACA/SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2024				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
			SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7=5+6	8=4-7
3070110	ALAT KEDOKTERAN ANAK	0	0	0	0	0
3100102	PERSONAL KOMPUTER	0	0	0	0	0
3100203	PERALATAN PERSONAL KOMPUTER	0	0	0	0	0
JUMLAH		446,813,985,380	(48,369,117,533)	(2,574,177,318)	(50,943,294,851)	395,870,690,529

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:19 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_es1_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2024				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
			SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7=5+6	8=4-7
131111	Tanah	356,165,357,000	0	0	0	356,165,357,000
2010104001	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	356,165,357,000	0	0	0	356,165,357,000
132111	Peralatan dan Mesin	25,791,465,257	(22,314,784,270)	(190,305,747)	(22,505,090,017)	3,286,375,240
3010302001	Elevator /Lift	1,490,098,000	(1,490,098,000)	0	(1,490,098,000)	0
3010303003	Stationary Compressor	3,210,000	(3,210,000)	0	(3,210,000)	0
3010304002	Portable Generating Set	4,042,500	(4,042,500)	0	(4,042,500)	0
3010304003	Stationary Generating Set	114,416,000	(114,416,000)	0	(114,416,000)	0
3010305002	Portable Water Pump	126,665,000	(126,665,000)	0	(126,665,000)	0
3010305003	Stationary Water Pump	129,748,000	(129,748,000)	0	(129,748,000)	0
3010305005	Sumersible Pump	467,487,000	(453,888,786)	(13,598,214)	(467,487,000)	0
3020101001	Sedan	979,265,360	(1,383,372,700)	404,107,340	(979,265,360)	0
3020101002	Jeep	849,150,000	(524,989,285)	(36,017,857)	(561,007,142)	288,142,858
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	250,000,000	(250,000,000)	0	(250,000,000)	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	2,168,178,230	(1,883,212,490)	265,834,260	(1,617,378,230)	550,800,000
3020104001	Sepeda Motor	88,992,500	(88,992,500)	0	(88,992,500)	0
3020105999	Kendaraan Bermotor Khusus Lainnya	231,137,500	(231,137,500)	0	(231,137,500)	0
3030103001	Battery Charge	1,921,700	(1,633,445)	(96,085)	(1,729,530)	192,170
3030103031	Tester Listrik/Telepon/Internet	1,320,000	(1,320,000)	0	(1,320,000)	0
3030205001	Tool Kit Set	5,506,969	(5,506,969)	0	(5,506,969)	0
3030212025	Mesin Pompa air PMK	4,873,523	(4,873,523)	0	(4,873,523)	0
3030301064	Memori Programmer	2,417,972	(2,417,972)	0	(2,417,972)	0
3030308012	Termometer Standar	2,090,000	(2,090,000)	0	(2,090,000)	0
3050101003	Mesin Ketik Manual Langewagon (18-27 Inci)	9,546,000	(9,546,000)	0	(9,546,000)	0
3050101008	Mesin Ketik Elektronik/Selektrik	3,940,000	(3,940,000)	0	(3,940,000)	0
3050102002	Mesin Hitung Listrik	21,126,980	(21,126,980)	0	(21,126,980)	0
3050103007	Mesin Fotocopy Folio	234,200,000	(234,200,000)	0	(234,200,000)	0
3050103008	Mesin Fotocopy Double Folio	74,800,000	(74,800,000)	0	(74,800,000)	0
3050104001	Lemari Besi/Metal	161,964,500	(156,519,500)	(1,089,000)	(157,608,500)	4,356,000
3050104002	Lemari Kayu	114,759,000	(111,659,000)	(1,550,000)	(113,209,000)	1,550,000
3050104003	Rak Besi	334,819,890	(334,644,890)	(175,000)	(334,819,890)	0
3050104004	Rak Kayu	88,344,984	(88,200,186)	(144,798)	(88,344,984)	0
3050104005	Filing Cabinet Besi	292,050,721	(292,050,721)	0	(292,050,721)	0
3050104007	Brandkas	4,775,000	(4,775,000)	0	(4,775,000)	0
3050104011	Rotary Filling	4,467,000	(4,467,000)	0	(4,467,000)	0
3050104016	Roll Opek	10,906,000	(10,906,000)	0	(10,906,000)	0
3050104020	Lemari Display	8,000,000	(8,000,000)	0	(8,000,000)	0
3050105001	Tabung Pemadam Api	66,102,500	(66,102,500)	0	(66,102,500)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:19 PM
Halaman : 2
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_es1_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2024				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
			SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7=5+6	8=4-7
3050105002	Hydrant	23,372,000	(23,372,000)	0	(23,372,000)	0
3050105003	Sprinkler	1,156,000	(1,156,000)	0	(1,156,000)	0
3050105004	Fire Alarm	3,615,000	(3,615,000)	0	(3,615,000)	0
3050105007	CCTV - Camera Control Television System	163,281,745	(132,734,745)	(6,109,400)	(138,844,145)	24,437,600
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	155,020,150	(43,429,630)	(13,948,815)	(57,378,445)	97,641,705
3050105009	Movitex Board	0	0	0	0	0
3050105010	White Board	7,807,890	(7,807,890)	0	(7,807,890)	0
3050105013	Copy Board/Elektrik White Board	2,732,000	(2,732,000)	0	(2,732,000)	0
3050105015	Alat Penghancur Kertas	106,706,000	(97,344,200)	(3,420,600)	(100,764,800)	5,941,200
3050105017	Mesin Absensi	138,762,000	(125,727,000)	(4,345,000)	(130,072,000)	8,690,000
3050105024	Alat Pemetong Kertas	11,528,000	(10,754,500)	(773,500)	(11,528,000)	0
3050105025	Headmachine Besar	2,690,000	(2,690,000)	0	(2,690,000)	0
3050105031	Panel Pameran	3,887,000	(3,887,000)	0	(3,887,000)	0
3050105037	White Board Electronic	4,278,000	(4,278,000)	0	(4,278,000)	0
3050105038	Laser Pointer	11,440,000	(11,440,000)	0	(11,440,000)	0
3050105039	Display	9,900,000	(9,900,000)	0	(9,900,000)	0
3050105045	Penangkal Petir	6,931,000	(6,931,000)	0	(6,931,000)	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	161,709,500	(99,460,500)	(10,333,000)	(109,793,500)	51,916,000
3050105052	Alat Perekam Suara (Voice Pen)	43,300,000	(43,300,000)	0	(43,300,000)	0
3050105058	Focusing Screen/Layar LCD Projector	126,925,935	(126,925,935)	0	(126,925,935)	0
3050105062	Bel	24,475,000	(21,505,000)	(1,485,000)	(22,990,000)	1,485,000
3050105095	Wastafel Portable	9,996,250	(6,997,375)	(999,625)	(7,997,000)	1,999,250
3050105999	Perkakas Kantor Lainnya	1,242,000	(1,242,000)	0	(1,242,000)	0
3050201001	Meja Kerja Besi/Metal	2,156,234	(2,156,234)	0	(2,156,234)	0
3050201002	Meja Kerja Kayu	229,130,781	(208,192,333)	(3,897,028)	(212,089,361)	17,041,420
3050201003	Kursi Besi/Metal	307,580,000	(191,640,000)	(30,065,000)	(221,705,000)	85,875,000
3050201004	Kursi Kayu	3,372,000	(3,372,000)	0	(3,372,000)	0
3050201005	Sice	381,625,416	(329,907,420)	(10,626,996)	(340,534,416)	41,091,000
3050201008	Meja Rapat	332,597,000	(329,297,000)	(660,000)	(329,957,000)	2,640,000
3050201009	Meja Komputer	13,183,000	(13,183,000)	0	(13,183,000)	0
3050201010	Tempat Tidur Besi	2,866,234	(2,866,234)	0	(2,866,234)	0
3050201013	Meja Telepon	5,038,000	(5,038,000)	0	(5,038,000)	0
3050201014	Meja Resepsionis	23,064,000	(23,064,000)	0	(23,064,000)	0
3050201016	Kasur/Spring Bed	38,385,000	(31,510,000)	(1,375,000)	(32,885,000)	5,500,000
3050201017	Sketsel	9,007,000	(9,007,000)	0	(9,007,000)	0
3050201020	Kursi Fiber Glas/Plastik	559,542,830	(521,838,830)	(7,540,800)	(529,379,630)	30,163,200
3050202003	Jam Elektronik	92,000	(92,000)	0	(92,000)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:19 PM
Halaman : 3
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_es1_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2024				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
			SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7=5+6	8=4-7
3050203001	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2,886,500	(2,886,500)	0	(2,886,500)	0
3050203003	Mesin Pemotong Rumput	13,972,500	(10,292,500)	(460,000)	(10,752,500)	3,220,000
3050203004	Mesin Cuci	2,970,000	(2,970,000)	0	(2,970,000)	0
3050203005	Air Cleaner	2,299,000	(1,379,400)	(229,900)	(1,609,300)	689,700
3050203999	Alat Pembersih Lainnya	412,500	(412,500)	0	(412,500)	0
3050204001	Lemari Es	83,064,910	(42,032,163)	(5,508,169)	(47,540,332)	35,524,578
3050204003	A.C. Window	234,610,000	(234,610,000)	0	(234,610,000)	0
3050204004	A.C. Split	1,598,786,641	(1,248,764,148)	(86,348,061)	(1,335,112,209)	263,674,432
3050204006	Kipas Angin	1,254,000	(1,254,000)	0	(1,254,000)	0
3050205019	Mixer	6,462,500	(6,462,500)	0	(6,462,500)	0
3050206002	Televisi	166,810,000	(117,663,000)	(10,469,000)	(128,132,000)	38,678,000
3050206007	Loudspeaker	76,250,500	(55,609,750)	(5,433,750)	(61,043,500)	15,207,000
3050206008	Sound System	334,180,200	(242,680,200)	(18,300,000)	(260,980,200)	73,200,000
3050206012	Wireless	12,498,000	(12,498,000)	0	(12,498,000)	0
3050206014	Microphone	29,480,000	(20,768,000)	(1,742,400)	(22,510,400)	6,969,600
3050206015	Microphone Table Stand	2,013,000	(2,013,000)	0	(2,013,000)	0
3050206016	Mic Conference	84,150,000	(84,150,000)	0	(84,150,000)	0
3050206017	Unit Power Supply	90,190,000	(90,190,000)	0	(90,190,000)	0
3050206020	Camera Video	99,327,860	(93,936,860)	(1,797,000)	(95,733,860)	3,594,000
3050206021	Tustel	3,076,250	(3,076,250)	0	(3,076,250)	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	0	0	0	0	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	0	0	0	0	0
3050206030	Tiang Bendera	0	0	0	0	0
3050206034	Tangga Aluminium	14,086,105	(11,789,874)	(765,410)	(12,555,284)	1,530,821
3050206036	Dispenser	92,144,534	(54,074,324)	(5,257,830)	(59,332,154)	32,812,380
3050206037	Mimbar/Podium	0	0	0	0	0
3050206046	Handy Cam	70,398,500	(70,398,500)	0	(70,398,500)	0
3050206055	Heater (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use))	666,232	(666,232)	0	(666,232)	0
3050206056	Karpet	59,605,000	(34,816,500)	(4,957,700)	(39,774,200)	19,830,800
3050206057	Vertikal Blind	72,705,184	(72,705,184)	0	(72,705,184)	0
3050206058	Gordyin/Kray	264,581,100	(246,915,100)	(4,416,501)	(251,331,601)	13,249,499
3050206059	Kabel Roll	7,700,000	(7,700,000)	0	(7,700,000)	0
3050206061	Keset Kaki	25,224,000	(25,224,000)	0	(25,224,000)	0
3050206068	DVD Player	2,000,000	(2,000,000)	0	(2,000,000)	0
3050206071	Kabel	2,029,500	(2,029,500)	0	(2,029,500)	0
3050206080	Bracket Standing Peralatan	25,117,660	(22,775,880)	(1,047,260)	(23,823,140)	1,294,520
3060101002	Audio Mixing Portable	5,802,500	(2,901,250)	(580,250)	(3,481,500)	2,321,000

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:19 PM
Halaman : 4
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_es1_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2024				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
			SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7=5+6	8=4-7
3060101003	Audio Mixing Stationer	20,702,000	(10,351,000)	(2,070,200)	(12,421,200)	8,280,800
3060101017	Cassette Duplicator	34,824,000	(34,824,000)	0	(34,824,000)	0
3060101036	Microphone/Wireless MIC	41,074,000	(23,831,500)	(3,448,500)	(27,280,000)	13,794,000
3060101039	Light Signal	3,500,000	(3,500,000)	0	(3,500,000)	0
3060101048	Uninterruptible Power Supply (UPS)	61,821,288	(60,171,288)	(330,000)	(60,501,288)	1,320,000
3060101056	Battery Charger (Peralatan Studio Audio)	2,381,500	(2,381,500)	0	(2,381,500)	0
3060101060	Power Amplifier	11,000,000	(11,000,000)	0	(11,000,000)	0
3060101079	Microphone Cable	1,870,000	(1,870,000)	0	(1,870,000)	0
3060101088	Voice Recorder	6,964,500	(6,964,500)	0	(6,964,500)	0
3060101091	Digital LED Running Text	23,499,300	(23,499,300)	0	(23,499,300)	0
3060102003	Camera Electronic	91,520,000	(91,520,000)	0	(91,520,000)	0
3060102012	Video Monitor	59,751,660	(59,751,660)	0	(59,751,660)	0
3060102013	Video Tape Recorder Portable	8,448,000	(4,224,000)	(844,800)	(5,068,800)	3,379,200
3060102016	Video Switcher	21,940,260	(17,568,310)	(874,390)	(18,442,700)	3,497,560
3060102020	Video Test Signal Generator	12,287,000	(12,287,000)	0	(12,287,000)	0
3060102034	Teleprompter	19,140,000	(9,570,000)	(1,914,000)	(11,484,000)	7,656,000
3060102045	Tripod Camera	58,388,958	(44,557,188)	(2,749,836)	(47,307,024)	11,081,934
3060102055	Lighting Stand Tripod	71,606,700	(39,845,850)	(6,352,170)	(46,198,020)	25,408,680
3060102056	Film Projector	146,646,000	(146,646,000)	0	(146,646,000)	0
3060102057	Slide Projector	3,190,000	(3,190,000)	0	(3,190,000)	0
3060102060	Camera Film	116,688,000	(58,344,000)	(11,668,800)	(70,012,800)	46,675,200
3060102061	Lensa Kamera	108,303,600	(87,942,600)	(4,974,200)	(92,916,800)	15,386,800
3060102099	Automatic Emergency Light	1,100,000	(1,100,000)	0	(1,100,000)	0
3060102107	Layar Film/Projector	16,400,000	(16,400,000)	0	(16,400,000)	0
3060102114	Standard True Signal/Master Rack	12,162,360	(12,162,360)	0	(12,162,360)	0
3060102118	Head Set	6,072,000	(3,036,000)	(607,200)	(3,643,200)	2,428,800
3060102128	Camera Digital	280,600,000	(218,328,000)	(13,296,000)	(231,624,000)	48,976,000
3060102129	Tas Kamera	2,400,200	(2,400,200)	0	(2,400,200)	0
3060102130	Lampu Blitz Kamera	8,231,500	(8,231,500)	0	(8,231,500)	0
3060102131	Lensa Filter	1,687,500	(1,687,500)	0	(1,687,500)	0
3060102135	LCD Monitor	1,204,207,689	(1,192,635,689)	(2,314,400)	(1,194,950,089)	9,257,600
3060102152	RF Cable	7,700,000	(3,850,000)	(770,000)	(4,620,000)	3,080,000
3060102165	Camera Conference	2,035,000	(1,017,500)	(203,500)	(1,221,000)	814,000
3060102999	Peralatan Studio Video Dan Film Lainnya	44,145,077	(13,243,524)	(4,414,508)	(17,658,032)	26,487,045
3060104045	Mesin Barcode	3,740,000	(3,740,000)	0	(3,740,000)	0
3060199999	Alat Studio Lainnya	57,750,000	(28,875,000)	(5,775,000)	(34,650,000)	23,100,000
3060201001	Telephone (PABX)	241,354,500	(241,354,500)	0	(241,354,500)	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:19 PM
Halaman : 5
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_es1_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2024				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
			SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7=5+6	8=4-7
3060201003	Pesawat Telephone	2,741,000	(2,741,000)	0	(2,741,000)	0
3060201006	Handy Talky (HT)	48,210,000	(33,087,000)	(4,821,000)	(37,908,000)	10,302,000
3060201010	Facsimile	35,178,000	(35,178,000)	0	(35,178,000)	0
3060201999	Alat Komunikasi Telephone Lainnya	72,597,920	(72,597,920)	0	(72,597,920)	0
3060202999	Alat Komunikasi Radio Ssb Lainnya	9,800,000	(9,800,000)	0	(9,800,000)	0
3060206002	Wireless Amplifier	13,200,000	(13,200,000)	0	(13,200,000)	0
3060323022	Change Over Switch	15,923,160	(15,923,160)	0	(15,923,160)	0
3070101001	Sterilisator	9,900,000	(9,900,000)	0	(9,900,000)	0
3070101002	Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Umum)	0	0	0	0	0
3070101005	Tensimeter	12,866,234	(12,866,234)	0	(12,866,234)	0
3070101009	Timbangan Badan (Alat Kedokteran Umum)	658,000	(658,000)	0	(658,000)	0
3070101012	Metal Chatheeter	0	0	0	0	0
3070101018	Instrumen Cabinet	935,000	(935,000)	0	(935,000)	0
3070101022	Lemari Steril	4,565,000	(4,565,000)	0	(4,565,000)	0
3070101026	Tabung O2	3,088,635	(3,088,635)	0	(3,088,635)	0
3070101049	Clinical Thermometer (Alat Kedokteran Umum)	12,155,075	(9,846,875)	(1,154,100)	(11,000,975)	1,154,100
3070101127	Kursi Dorong	2,791,250	(2,791,250)	0	(2,791,250)	0
3070102002	Dental Unit	123,200,000	(123,200,000)	0	(123,200,000)	0
3070102019	Portable Dental Unit	14,107,500	(8,464,500)	(1,410,750)	(9,875,250)	4,232,250
3070102093	Tang Ektrasi (Dewasa,Anak)	3,713,000	(3,713,000)	0	(3,713,000)	0
3070102118	Bein	671,293	(671,293)	0	(671,293)	0
3070102999	Alat Kedokteran Gigi Lainnya	12,200,000	(3,660,000)	(1,220,000)	(4,880,000)	7,320,000
3070106096	Otoscope Halogen Lamp	2,811,234	(2,811,234)	0	(2,811,234)	0
3070110011	Neirbekken Stainless Steel	0	0	0	0	0
3070111003	Bed Pan For Adult 310 mm Complete	3,436,000	(3,436,000)	0	(3,436,000)	0
3070111999	Alat Kedokteran Poliklinik Lainnya	89,347,170	(89,347,170)	0	(89,347,170)	0
3070118011	Data Catridge	24,657,600	(24,657,600)	0	(24,657,600)	0
3070199999	Alat Kedokteran Lainnya	8,980,519	(3,435,847)	(792,096)	(4,227,943)	4,752,576
3080111021	Autoclave (Alat Laboratorium Umum)	26,125,000	(9,796,875)	(1,632,813)	(11,429,688)	14,695,312
3080804009	DC / AC Power Supply	2,195,000	(2,195,000)	0	(2,195,000)	0
3090402031	Kamera Digital	0	0	0	0	0
3100101004	Internet	5,500,000	(5,500,000)	0	(5,500,000)	0
3100102001	P.C Unit	2,451,847,000	(2,014,592,000)	(129,437,500)	(2,144,029,500)	307,817,500
3100102002	Lap Top	1,898,943,498	(898,627,873)	(165,529,750)	(1,064,157,623)	834,785,875
3100102003	Note Book	309,832,000	(286,282,000)	(23,550,000)	(309,832,000)	0
3100102007	Net Book	1,567,210,000	(1,459,366,250)	(107,843,750)	(1,567,210,000)	0
3100102009	Tablet PC	87,779,458	(78,629,458)	(7,500,000)	(86,129,458)	1,650,000

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:19 PM
Halaman : 6
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_es1_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2024				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
			SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7=5+6	8=4-7
3100102999	Personal Komputer Lainnya	61,347,000	(57,422,375)	(3,924,625)	(61,347,000)	0
3100202010	Scanner (Peralatan Mini Komputer)	202,707,500	(194,476,252)	(8,231,248)	(202,707,500)	0
3100202014	Keyboard (Peralatan Mini Komputer)	24,170,500	(22,520,750)	(1,649,750)	(24,170,500)	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	435,984,500	(339,482,000)	(31,283,750)	(370,765,750)	65,218,750
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	122,421,650	(61,421,650)	(10,875,000)	(72,296,650)	50,125,000
3100203017	External/ Portable Hardisk	91,783,000	(88,516,000)	(1,089,000)	(89,605,000)	2,178,000
3100204001	Server	147,300,000	(147,300,000)	0	(147,300,000)	0
3100204002	Router	118,198,719	(118,198,719)	0	(118,198,719)	0
3100204004	Modem	5,666,100	(5,273,813)	(130,762)	(5,404,575)	261,525
3100204030	Network Cable Tester	8,580,000	(8,580,000)	0	(8,580,000)	0
3100204999	Peralatan Jaringan Lainnya	92,558,060	(92,558,060)	0	(92,558,060)	0
3190106003	Sepeda Olah Raga	22,977,620	(22,977,620)	0	(22,977,620)	0
133111	Gedung dan Bangunan	62,954,462,581	(25,623,349,003)	(2,083,714,231)	(27,707,063,234)	35,247,399,347
4010101001	Bangunan Gedung Kantor Permanen	59,966,118,647	(24,601,232,087)	(2,002,360,180)	(26,603,592,267)	33,362,526,380
4010102001	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	154,108,000	(80,136,160)	(6,164,320)	(86,300,480)	67,807,520
4010106010	Bangunan Klinik/Puskesmas	481,163,934	(233,172,096)	(20,665,987)	(253,838,083)	227,325,851
4010108001	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1,422,910,000	(376,009,114)	(28,923,778)	(404,932,892)	1,017,977,108
4010113001	Gedung Pos Jaga Permanen	82,559,000	(17,035,980)	(1,310,460)	(18,346,440)	64,212,560
4010114001	Gedung Garasi/Pool Permanen	383,440,000	(74,398,806)	(5,722,986)	(80,121,792)	303,318,208
4010130001	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen	464,163,000	(241,364,760)	(18,566,520)	(259,931,280)	204,231,720
4040104001	Pagar Permanen	0	0	0	0	0
135121	Aset Tetap Lainnya	1,171,558,942	0	0	0	1,171,558,942
6010101001	Monografi	1,171,558,942	0	0	0	1,171,558,942
6010101003	Buku	0	0	0	0	0
6010101999	Buku Lainnya	0	0	0	0	0
6010199999	Bahan Perpustakaan Tercetak Lainnya	0	0	0	0	0
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	731,141,600	(430,984,260)	(300,157,340)	(731,141,600)	0
3010305005	Sumersible Pump	0	0	0	0	0
3020101001	Sedan	404,107,340	0	(404,107,340)	(404,107,340)	0
3020102002	Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang)	0	(124,922,000)	124,922,000	0	0
3020102003	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	327,034,260	(198,680,260)	(128,354,000)	(327,034,260)	0
3020104001	Sepeda Motor	0	(107,382,000)	107,382,000	0	0
3050105008	Papan Visual/Papan Nama	0	0	0	0	0
3050105009	Movitex Board	0	0	0	0	0
3050105048	LCD Projector/Infocus	0	0	0	0	0
3050201003	Kursi Besi/Metal	0	0	0	0	0
3050201005	Sice	0	0	0	0	0

**LAPORAN PENYUSUTAN BARANG KUASA PENGGUNA - ESELON I
INTRAKOMPTABEL**

**RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 JUNI 2024**

UAPA : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPA-Es1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl Data : 25/07/24 12:22 PM
Tanggal : 25/07/24 3:19 PM
Halaman : 7
Kode Lap : lap_bmn_susut_intra_es1_poc

AKUN NERACA/SUB-SUB KELOMPOK BARANG		SALDO 30 JUNI 2024				
KODE	URAIAN	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN			NILAI BUKU
			SALDO AWAL	MUTASI PENYUSUTAN	TOTAL	
1	2	4	5	6	7=5+6	8=4-7
3050201009	Meja Komputer	0	0	0	0	0
3050204004	A.C. Split	0	0	0	0	0
3050206002	Televisi	0	0	0	0	0
3050206026	Lambang Garuda Pancasila	0	0	0	0	0
3050206027	Gambar Presiden/Wakil Presiden	0	0	0	0	0
3050206030	Tiang Bendera	0	0	0	0	0
3050206037	Mimbar/Podium	0	0	0	0	0
3060201006	Handy Talky (HT)	0	0	0	0	0
3070101002	Minor Surgical Set (Alat Kedokteran Umum)	0	0	0	0	0
3070101012	Metal Chatheeter	0	0	0	0	0
3070110011	Neirbekken Stainless Steel	0	0	0	0	0
3100102001	P.C Unit	0	0	0	0	0
3100102002	Lap Top	0	0	0	0	0
3100102007	Net Book	0	0	0	0	0
3100203003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	0	0	0	0	0
3100203004	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	0	0	0	0	0
JUMLAH		446,813,985,380	(48,369,117,533)	(2,574,177,318)	(50,943,294,851)	395,870,690,529

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 30 JUNI 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

UAPB : 013 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
UAPPB-E1 : 10 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Tgl.Data : 25/07/24 12:22 PM
Tgl.Cetak : 25/07/24 3:21 PM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_es1_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	2
117111	Barang Konsumsi	116,129,741
131111	Tanah	356,165,357,000
132111	Peralatan dan Mesin	25,791,465,257
133111	Gedung dan Bangunan	62,954,462,581
135121	Aset Tetap Lainnya	1,171,558,942
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(22,505,090,017)
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(27,707,063,234)
162151	Software	4,184,325,500
162191	Aset Tak Berwujud Lainnya	69,971,060
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	731,141,600
169122	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam	(731,141,600)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(4,184,325,500)
J U M L A H		396,056,791,330



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



LAMPIRAN
SURAT HASIL
REKONSILIASI
(SHR)



**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 408789
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,772,137,000	2,772,137,000	0
2	Belanja	1,014,730,500	1,014,730,500	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	15,000,000	15,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	15,000,000	15,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 408879
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,177,820,000	1,177,820,000	0
2	Belanja	655,378,000	655,378,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	20,000,000	20,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	20,000,000	20,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 649008
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,181,665,000	1,181,665,000	0
2	Belanja	696,281,700	696,281,700	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	30,000,000	30,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	30,000,000	30,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 648996
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,395,966,000	2,395,966,000	0
2	Belanja	1,192,823,792	1,192,823,792	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	20,000,000	20,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	20,000,000	20,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 409177
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,755,684,000	1,755,684,000	0
2	Belanja	883,961,004	883,961,004	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	290,000	290,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	36,000,000	36,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	36,000,000	36,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 409187
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,616,373,000	2,616,373,000	0
2	Belanja	1,325,459,006	1,325,459,006	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	42,000,000	42,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	42,000,000	42,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 17-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 408727
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	4,512,406,000	4,512,406,000	0
2	Belanja	1,525,044,700	1,525,044,700	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	39,000,000	39,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	39,000,000	39,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 14-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 649017
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,311,847,000	1,311,847,000	0
2	Belanja	795,538,460	795,538,460	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	30,000,000	30,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	30,000,000	30,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 409166
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,031,106,000	2,031,106,000	0
2	Belanja	1,112,972,341	1,112,972,341	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	5,000,000	5,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	5,000,000	5,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 17-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 408737
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,356,447,000	5,356,447,000	0
2	Belanja	2,390,632,000	2,390,632,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	25,200,000	25,200,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	25,200,000	25,200,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 408749
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	5,907,158,000	5,907,158,000	0
2	Belanja	1,276,388,987	1,276,388,987	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	19,800,000	19,800,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	19,800,000	19,800,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 17-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 408759
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	6,987,374,000	6,987,374,000	0
2	Belanja	3,499,196,965	3,499,196,965	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	4,000,000	4,000,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	20,040,000	20,040,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	20,040,000	20,040,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 408839
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	942,364,000	942,364,000	0
2	Belanja	543,106,511	543,106,511	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	21,000,000	21,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	21,000,000	21,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 17-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 408848
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,151,624,000	1,151,624,000	0
2	Belanja	591,748,401	591,748,401	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	15,000,000	15,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	15,000,000	15,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 17-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 409197
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,255,807,000	1,255,807,000	0
2	Belanja	679,872,948	679,872,948	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	15,000,000	15,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	15,000,000	15,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 408859
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,120,550,000	2,120,550,000	0
2	Belanja	1,151,581,106	1,151,581,106	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	20,000,000	20,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	20,000,000	20,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 16-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 667789
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,146,343,000	1,146,343,000	0
2	Belanja	574,249,065	574,249,065	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	19,000,000	19,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	19,000,000	19,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 408829
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,321,742,000	2,321,742,000	0
2	Belanja	953,456,696	953,456,696	0
3	Pengembalian Belanja	-775,000	-775,000	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	3,389,260	3,389,260	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	4,500,000	4,500,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	4,500,000	4,500,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 17-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 649029
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,386,578,000	1,386,578,000	0
2	Belanja	770,614,300	770,614,300	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 17-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 408899
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,064,413,000	1,064,413,000	0
2	Belanja	483,789,434	483,789,434	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	5,830,000	5,830,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	5,830,000	5,830,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 16-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 409227
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,233,134,000	2,233,134,000	0
2	Belanja	1,281,353,300	1,281,353,300	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	10,200,000	10,200,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	10,200,000	10,200,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 408889
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,880,424,000	1,880,424,000	0
2	Belanja	869,219,300	869,219,300	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	15,000,000	15,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	15,000,000	15,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 19-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 667779
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	819,389,000	819,389,000	0
2	Belanja	335,671,000	335,671,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	1,960,000	1,960,000	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	15,000,000	15,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	15,000,000	15,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 19-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 408909
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	955,110,000	955,110,000	0
2	Belanja	490,683,000	490,683,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	8,000,000	8,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	8,000,000	8,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 408809
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,825,834,000	1,825,834,000	0
2	Belanja	977,539,495	977,539,495	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	15,000,000	15,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	15,000,000	15,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 16-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 667799
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,137,137,000	1,137,137,000	0
2	Belanja	633,176,661	633,176,661	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	17,000,000	17,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	17,000,000	17,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 408779
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	3,440,273,000	3,440,273,000	0
2	Belanja	1,856,976,000	1,856,976,000	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	20,000,000	20,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	20,000,000	20,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 409217
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,985,141,000	1,985,141,000	0
2	Belanja	1,030,766,150	1,030,766,150	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	0	0	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 13-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 408869
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,236,856,000	1,236,856,000	0
2	Belanja	622,106,739	622,106,739	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	20,000,000	20,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	20,000,000	20,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 408799
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,586,886,000	1,586,886,000	0
2	Belanja	765,320,300	765,320,300	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	45,000,000	45,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	45,000,000	45,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 19-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 408819
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	1,678,055,000	1,678,055,000	0
2	Belanja	721,643,300	721,643,300	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	12,000,000	12,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	12,000,000	12,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 408769
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	4,013,953,000	4,013,953,000	0
2	Belanja	2,015,730,900	2,015,730,900	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	30,000,000	30,000,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	30,000,000	30,000,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JUL-24





**HASIL REKONSILIASI SAKTI - SPAN
PADA SATKER 409227
SAMPAI DENGAN PERIODE 2024-06**

No	Jenis Rekon	Nilai SPAN	Nilai SAKTI	Selisih
1	Pagu Belanja	2,233,134,000	2,233,134,000	0
2	Belanja	1,281,353,300	1,281,353,300	0
3	Pengembalian Belanja	0	0	0
4	Estimasi Pendapatan	0	0	0
5	Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
6	Pengembalian Pendapatan Bukan Pajak	0	0	0
7	Pengembalian Pajak	0	0	0
8	Mutasi Uang Persediaan	10,200,000	10,200,000	0
9	Kas di Bendahara Pengeluaran	10,200,000	10,200,000	0
10	Kas pada Badan Layanan Umum	0	0	0
11	Kas Lainnya di K/L dari Hibah	0	0	0
12	Pengesahan Hibah Langsung Barang/Jasa/Surat Berharga	0	0	0

Diterbitkan secara otomatis pada tanggal 18-JUL-24





BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



LAMPIRAN

BERITA ACARA

REKONSILIASI



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI

BERITA ACARA REKONSILIASI

Nomor: SEK.3-KU.04.02-138

Pada hari ini Rabu tanggal 17 bulan Mei tahun 2024 telah diselenggarakan Rekonsiliasi Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 antara Badan Pembinaan Hukum Nasional sebagai UAPPA-E1 dengan Sekretariat Jenderal sebagai UAPA.

Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2024 menggunakan Basis Akrual. Laporan Keuangan terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Dalam penyusunan Laporan Keuangan berbasis akrual, akun-akun dalam suatu Laporan Keuangan saling terhubung dengan akun pada Laporan Keuangan lainnya. Keterhubungan antar akun tersebut dapat digunakan untuk mendeteksi kemungkinan salah saji pada Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Berdasarkan analisis atas hubungan antar Laporan dan perhitungan akrual atas akun-akun pada Laporan Operasional, Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca didapatkan uraian sebagai berikut :

ANALISA DATA ANTAR AKUN LAPORAN KEUANGAN

1 Kas di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN		30 Juni 2024
	Uraian	
Kas di Bendahara Pengeluaran		1.239.570.000,00
Uang Muka dari KPPN		1.239.570.000,00
Selisih		-
Penjelasan :		

2 Aset = Kewajiban + Ekuitas		30 Juni 2024
	Uraian	
Aset Tahun Berjalan		397.409.126.808,00
Kewajiban Tahun Berjalan		3.431.277.473,00
Ekuitas Tahun Berjalan		393.977.849.335,00
Selisih		-
Penjelasan :		

3 Saldo Akun Ditagihkan ke Entitas Lain (LPE) = Total Belanja Netto pada LRA		30 Juni 2024
	Uraian	
Ditagihkan ke Entitas Lain		55.260.141.666,00
Total Belanja Netto pada LRA		55.260.141.666,00
Selisih		-
Penjelasan :		

4 Saldo akun Diterima dari Entitas Lain (LPE) = total Pendapatan Netto pada LRA		30 Juni 2024
	Uraian	
Diterima dari Entitas Lain		246.795.043,00
total Pendapatan Netto pada LRA		246.795.043,00
Selisih		-
Penjelasan :		

5 Angka surplus/defisit pada LO = angka surplus/defisit pada LPE	
	30 Juni 2024
Uraian	
surplus/defisit pada LO	59.892.563.743,00
surplus/defisit pada LPE	59.892.563.743,00
Selisih	-
Penjelasan :	

6 Angka ekuitas awal pada LPE tahun berjalan = angka ekuitas akhir pada LPE dan Neraca TA sebelumnya	
	30 Juni 2024
Uraian	
ekuitas awal pada LPE tahun berjalan	399.075.137.055,00
ekuitas akhir pada LPE dan Neraca TA sebelumnya	399.075.137.055,00
Selisih	-
Penjelasan :	

7 Angka ekuitas akhir pada LPE = angka ekuitas pada Neraca tahun berjalan	
	30 Juni 2024
Uraian	
ekuitas akhir pada LPE	393.977.849.335,00
ekuitas pada Neraca tahun berjalan	393.977.849.335,00
Selisih	-
Penjelasan :	

Jakarta, 17 Mei 2024

Operator Sakti GLP



(Rizky Awallyah)

NIP. 19830228 200901 2 004

Operator GLP Aset & Persediaan



(Nurmansyah)

NIP. 19830824 200604 1 001

Mengetahui,

Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya
Badan Pembinaan Hukum Nasional



(Tuyono)
NIP. 19700615 199703 1 001

Kepala Bagian Akuntansi dan Pelaporan
Sekretariat Jenderal



(Anna Ernita)
NIP. 19770402 200212 2 001

Kolom Verifikasi	Nama	Paraf
1. Pembina Tingkat unit eselon I	Putra Arum R	
2. Pembina Tingkat Kementerian	Annisa Esti	
3. Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Elisa Ingrid A	



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



***LAMPIRAN
CATATAN HASIL
REVIU (CHR)***



REVIU LAPORAN KEUANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

REVIU LAPORAN KEUANGAN
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024

Catatan Hasil Reviu (CHR)

**Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Inspektorat Jenderal**

**CATATAN HASIL REVIU
LAPORAN KEUANGAN BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
(selaku UAPPA-E1)
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 30 JUNI 2024**

Kementerian Hukum dan HAM RI Inspektorat Jenderal		Disusun oleh/Tanggal	AT/ 17-07-2024
		Direviu oleh/Tanggal	KT/ 18-07-2024
		Disetujui oleh/Tanggal	PT/ 19-07-2024
UAPA	<input checked="" type="checkbox"/>	Kementerian Hukum dan HAM	
UAPPA-E1	<input checked="" type="checkbox"/>	Badan Pembinaan Hukum Nasional	
UAPPA-W	<input type="checkbox"/>	-	
UAKPA	<input type="checkbox"/>	-	
URAIAN CATATAN HASIL REVIU			INDEKS KKR
PENYELENGGARAAN AKUNTANSI			
-			KKR-HR
PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN			
1. LRA			
<p>a. Pada LRA Pendapatan terdapat Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp131.307.990,00. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan pihak BPHN, terdapat kesalahan penyetoran pendapatan atau kesalahan penggunaan akun atas penyetoran pengembalian belanja modal dari hasil temuan BPK senilai Rp Rp47.080.353,29, yang seharusnya dicatat pada akun Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu. Sehingga, nilai akun Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu seharusnya adalah sebesar Rp84.227.636,71,00 dan akun Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu adalah sebesar Rp47.080.353,29, namun telah dilakukan koreksi sesuai dengan Memo Penyesuaian No. 008 tanggal 30 Juni 2024.</p> <p>b. Realisasi Belanja pada Semester I TA. 2024 adalah sebesar Rp55.260.141.666 atau 47,24% dari total anggaran sebesar Rp116.989.153.000 dengan rincian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Pegawai sebesar Rp10.067.415.127 dengan persentase realisasi sebesar 55,64%. 2) Belanja Barang sebesar Rp44.969.104.039 dengan persentase realisasi sebesar 45,57%. 3) Belanja Modal sebesar Rp223.622.500 dengan persentase realisasi sebesar 99,69%. <p>Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor: PER-5/PB/2022, target Realisasi Belanja pada Triwulan II Tahun Anggaran 2024 yaitu Belanja Pegawai sebesar 50%, Belanja Barang sebesar 50% dan Belanja Modal sebesar 40%. Sehingga belanja barang tidak sesuai dengan target. Telah dijelaskan di CaLK.</p> <p>c. Terdapat anggaran belanja yang belum direalisasikan (0%) per 30 Juni 2024, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat sebesar Rp9.300.000,00; 2) Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri sebesar Rp170.000.000,00. 			KKR-LRA

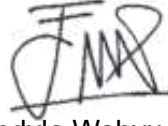
Telah dijelaskan di CaLK.	
2. LO	
-	KKR-LO
3. LPE	
-	KKR-LPE
4. NERACA	
Terdapat Aset Gedung Bangunan berupa Masjid/Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Kode Barang: 4010108001 NUP 1) yang berlokasi jauh dari lokasi kantor BPHN (di daerah Tangerang) yang terbangun di atas Tanah tercatat kepemilikan UAKPB Sekretariat Jenderal. UAKPB BPHN sudah tidak menganggarkan anggaran pemeliharaan terhadap Aset Gedung Bangunan berupa Masjid/Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen tersebut sejak selesai dibangun dan berencana akan menyerahkan Bangunan Masjid tersebut, nilai manfaat, dan status aset kepada UAKPB Sekretariat Jenderal. UAKPB BPHN telah melakukan pembahasan dengan Biro Umum Sekretariat Jenderal dan ditindaklanjuti dengan surat kepada Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Cq. Kepala Biro Umum dengan Nomor PHN.1-PB.02.04-01 tanggal 09 Oktober 2023 hal Tindak Lanjut atas Hasil Reviu Inspektorat Jenderal, namun sampai dengan saat ini belum terdapat tindak lanjut penyelesaian dari Biro Umum Sekretariat Jenderal.	KKR-NRC
5. MONITORING SAKTI	
Terdapat <i>to do list</i> diantaranya: a. Transaksi resiprokal antara Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat dengan Universitas Singaperbangsa Karawang atas pencatatan belanja terkait Bantuan Hukum senilai Rp61.740.000,00 yang belum dicatat sebagai penerimaan oleh Universitas Singaperbangsa Karawang selaku penerima dana bantuan hukum. Berdasarkan konfirmasi dengan pihak pengelola keuangan, diketahui bahwa <i>to do list</i> tersebut muncul dikarenakan terdapat kebijakan pada Universitas Singaperbangsa Karawang melakukan pengakuan sebesar 10% karena 90% anggaran tersebut diterima oleh OBH; b. Utang yang Belum Ditagihkan terdapat pada 4 (empat) satuan kerja yaitu Kanwil Bangka Belitung senilai Rp10.987.700, Kanwil Bengkulu senilai Rp28.568.000, Kanwil Jawa Timur senilai Rp188.800.000 dan BPHN senilai Rp259.472.187, telah dijelaskan di CaLK.	
6. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	
a. Pada Tabel Neraca halaman 7 terdapat perbedaan nilai Aset Tak Berwujud Tahun 2023, pada CaLK senilai Rp4.184.325.500, namun pada MonSAKTI senilai Rp4.234.323.660; b. Pada tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan (CaLK halaman 27), untuk uraian Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin belum disesuaikan	KKR-CaLK

<p>kenaikan persentase pendapatannya;</p> <p>c. Nilai total anggaran pada tabel Rincian Pembelian Buku dan Koleksi Penyusunan Perpustakaan periode 30 Juni 2024 (CaLK halaman 41) belum sesuai dengan total anggaran pada tabel Rincian Realisasi Belanja Modal (CaLK halaman 36) dan data LRA Belanja dari MonSAKTI;</p> <p>d. Terdapat ketidaksesuaian atas tabel Rincian Pembelian Buku dan Koleksi Penyusunan Perpustakaan periode 30 Juni 2024 (CaLK halaman 41) pada Kanwil Banten dan Kanwil Gorontalo dengan uraian nilai realisasi belanja modal masing-masing satuan kerja (CaLK halaman 38);</p> <p>e. Terdapat perbedaan nilai pada tabel Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin (CaLK halaman 48) pada akun akumulasi penyusutan sebesar Rp21.562.905.170,00, namun pada Neraca Percobaan Akruwal MonSAKTI nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin adalah sebesar Rp22.505.090.017,00;</p> <p>f. Terdapat perbedaan nilai pada tabel Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan (CaLK halaman 50) pada akun akumulasi penyusutan sebesar Rp25.623.349.003,00, namun pada Neraca Percobaan Akruwal MonSAKTI nilai akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp27.707.063.234,00;</p> <p>g. Pada uraian saldo aset lain-lain per 30 Juni 2024 (CaLK halaman 55) tercantum sebesar Rp731.141.000 yang belum sesuai dengan Neraca Percobaan Akruwal MonSAKTI, seharusnya sebesar Rp731.141.600,00.</p> <p>h. Pada penjelasan terkait peningkatan realisasi pendapatan TA. 2024 (CaLK halaman 27 CaLK) yang bersumber dari pengembalian belanja karena temuan BPK belum menjelaskan koreksi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp131.307.990,00 yang seharusnya terdiri dari akun Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp84.227.636,71,00 dan akun Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp47.080.353,29.</p> <p>i. Pada uraian penjelasan terkait realisasi belanja (CaLK halaman 32) mengalami kenaikan belum tepat dikarenakan realisasi belanja 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023.</p>	
KOREKSI/PERBAIKAN YANG TELAH DILAKUKAN DAN DISETUJUI	
-	
REKOMENDASI	
<p>Direkomendasikan agar Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional melalui Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (UAPPA-E1) Badan Pembinaan Hukum Nasional agar melakukan perbaikan terhadap Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2024 sesuai Catatan Hasil Reviu Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sebagai berikut:</p> <p>a. Agar terhadap Aset Gedung Bangunan UAKPB BPHN berupa Masjid/Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen (Kode Barang: 4010108001 NUP 1) yang terbangun di atas aset tanah yang kepemilikannya tercatat di UAKPB Sekretariat Jenderal dilakukan transfer keluar ke UAKPB Sekretariat Jenderal;</p>	

- b. Agar UAKPB BPHN membuat kebijakan/surat untuk mencegah transaksi resiprokal pada aplikasi SAKTI yang menginformasikan kepada Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum bahwa dalam proses penyusunan kontrak Bantuan Hukum dengan Pemberi Bantuan Hukum yang berasal dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN), jika menggunakan rekening Pemerintah maka harus mencatat sebagai pendapatan, dikecualikan bagi Pemberi Bantuan Hukum PTN yang menggunakan rekening Pemberi Bantuan Hukum selain rekening Pemerintah;
- c. Agar memperbaiki CaLK atas perbedaan pada nominal:
- 1) Nilai Aset Tak Berwujud Tahun 2023, pada CaLK senilai Rp4.184.325.500, namun pada MonSAKTI senilai Rp4.234.323.660;
 - 2) Tabel Perbandingan Realisasi Pendapatan untuk uraian Pendapatan Dari Penjualan Peralatan dan Mesin belum disesuaikan kenaikan persentasenya;
 - 3) Nilai total anggaran pada tabel Rincian Pembelian Buku dan Koleksi Penyusunan Perpustakaan periode 30 Juni 2024 belum sesuai dengan total anggaran pada tabel Rincian Realisasi Belanja Modal dan data LRA Belanja dari MonSAKTI;
 - 4) Terdapat ketidaksesuaian atas tabel Rincian Pembelian Buku dan Koleksi Penyusunan Perpustakaan periode 30 Juni 2024 pada Kanwil Banten dan Kanwil Gorontalo dengan uraian nilai realisasi belanja modal masing-masing satuan kerja;
 - 5) Terdapat perbedaan nilai pada tabel Mutasi Nilai Peralatan dan Mesin pada akun akumulasi penyusutan sebesar Rp21.562.905.170,00, namun pada Neraca Percobaan Akrual MonSAKTI nilai akumulasi penyusutan peralatan dan mesin adalah sebesar Rp22.505.090.017,00;
 - 6) Terdapat perbedaan nilai pada tabel Mutasi Transaksi Gedung dan Bangunan pada akun akumulasi penyusutan sebesar Rp25.623.349.003,00, namun pada Neraca Percobaan Akrual MonSAKTI nilai akumulasi penyusutan Gedung dan Bangunan adalah sebesar Rp27.707.063.234,00;
 - 7) Pada uraian saldo aset lain-lain per 30 Juni 2024 tercantum sebesar Rp731.141.000 yang belum sesuai dengan Neraca Percobaan Akrual MonSAKTI, seharusnya sebesar Rp731.141.600,00.
- d. Agar memperbaiki CaLK atas kurang rincinya penjelasan terkait:
- 1) peningkatan realisasi pendapatan TA. 2024 yang bersumber dari pengembalian belanja karena temuan BPK yaitu belum menjelaskan koreksi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu senilai Rp131.307.990,00 yang seharusnya terdiri dari akun Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp84.227.636,71,00 dan akun Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu sebesar Rp47.080.353,29.
 - 2) Kesalahan penjelasan realisasi belanja yang tertulis mengalami kenaikan, seharusnya realisasi belanja 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023.

 <p>Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional,</p>  <p>Ditandatangani secara elektronik oleh I Gusti Putu Milawati NIP 197705092001122001</p>	<p>Jakarta, 19 Juli 2024</p> <p>Inspektorat Jenderal Pengendali Teknis I,</p>  <p>Andriyanto Wahyu Prasetio NIP 197012181999031002</p>
---	--

Pengendali Teknis II,



Fandyla Wahyu Sasongko
NIP 198402112006041001



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



LAMPIRAN
BERITA ACARA
BARANG MILIK
NEGARA (BMN)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jalan Mayjen Soetoyo No. 10- Cililitan Jakarta Timur 13640
Telp. (021) 8091908-Faksimili 8002265 - 8011753
Laman: www.bphn.go.id

**BERITA ACARA PELAKSANAAN
HASIL OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN
Nomor : PHN.I-PB.04.03-03**

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua bulan Januari tahun dua ribu duapuluh empat, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami Tim Opname Fisik Barang Persediaan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional :

Nama : Tri Sadewo Y.C
NIP : 198007112003121001
Jabatan : Plt.Kepala Bagian Umum

Nama : Nurmansyah
NIP : 198308242006041001
Jabatan : Petugas Gudang/Petugas Persediaan

Nama : Evi Imalia
NIP : 198402022006042001
Jabatan : Operator Persediaan

Menyatakan telah dilakukan opname fisik atas barang Persediaan dengan cara mencatat kuantitas dan kondisi barang persediaan pada satker Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal 3 Juli 2024 dengan hasil (rincian terlampir).

Demikian berita acara ini dibuat sebagai bahan penyusunan pelaporan barang persediaan dan perekaman kedalam Aplikasi persediaan Semester II tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 3 Juli 2024

Mengetahui,
Petugas Gudang/Petugas Persediaan

Nurmansyah
NIP 198308242006041001

Operator Persediaan

Evi Imalia
NIP 198402022006042001



Plt.Kepala Bagian Umum

Tri Sadewo Y.C
NIP 198007112003121001

**LAMPIRAN BERITA ACARA OPNAME FISIK BARANG PERSEDIAAN
PADA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
PERIODE SEMESTER I TAHUN 2024**

No	Kode Barang	Uraian Barang	Jumlah	Satuan	Nilai	Kondisi
1	1010302004000020	Amplop coklat KOP BPHN (FOLIO)	5	Pak	592.500	Baik
2	1010302004000017	Amplop coklat Cabinet POLOS	17	Pak	550.100	Baik
3	1010301001000051	Ballpoint Standard Boldliner elite 1.0 Blue	1	Lusin	171.500	Baik
4	1010301001000049	Balpoint sarasa Zebra 0,5 Biru	3	Lusin	761.400	Baik
5	1010301003000047	Binder Clip No. 111	3	Dus	18.600	Baik
6	1010301999000039	Box File Karton	3	Pcs	55.500	Baik
7	1010301999000041	Box File Plastik Folio	4	Pcs	160.000	Baik
8	1010301005000006	Buku Agenda	80	Buah	19.840.000	Baik
9	1010301005000017	buku agenda folio	10	Buah	195.000	Baik
10	1010301005000031	Buku Agenda Folio 100 Lbr Kiky	10	Buah	280.000	Baik
11	1010301005000002	Buku Agenda Polio	4	Buah	78.000	Baik
12	1010301005000018	buku ekspedisi	10	Buah	139.000	Baik
13	1010301006000034	bussines file daichi F4	1	Buah	58.000	Baik
14	1010301008000002	Cutter Besar L-500	8	Buah	125.000	Baik
15	1010301010000029	Double tape 1 inch Joyko	3	Roll	24.750	Baik
16	1010304004000072	EPSON T6642 CYAN	2	Pcs	235.600	Baik
17	1010304004000073	EPSON T6643 MAGENTA	4	Pcs	476.000	Baik
18	1010304004000074	EPSON T6643 YELLOW	4	Pcs	476.000	Baik
19	1010304006000018	Flashdisk 128 GB Sandisk	1	Buah	238.000	Baik
20	1010304006000016	Flashdisk 16 GB Sandisk	5	Buah	473.800	Baik
21	1010304006000017	Flashdisk OTG 32 GB Sandisk	4	Buah	576.000	Baik
22	1010301008000013	Gunting kecil	4	Buah	33.000	Baik
23	1010301012000003	Head Machine Max HD 10 D (Stepler Kecil)	4	Buah	224.000	Baik
24	1010301008000008	isi Cutter Besar L- 500	20	Buah	338.000	Baik
25	1010301013000007	Isi staples Kecil No. 10-1M max isi 20	5	Buah	371.250	Baik
26	1010301999000070	Joyco Tape Cutter 119	1	Buah	30.800	Baik
27	1010399999000026	Kalender	76	Buah	5.700.000	Baik
28	1010301999000064	Kalkulator	1	Buah	370.450	Baik
29	1010302001000026	Kertas hvs 80 Gr BD	145	Rim	9.251.000	Baik
30	1010302001000025	Kertas HVS BD F4 80 Gr	45	Rim	3.303.000	Baik
31	1010301010000046	Lakban Cokelat 2 Inch Daimaru	2	Roll	30.200	Baik
32	1010301010000017	LAKBAN Hitam (2)	4	Roll	81.200	Baik
33	1010301010000034	Lem Fox Stick	4	Buah	60.400	Baik
34	1010301010000045	Lem UHU 35 Gram	5	Buah	115.000	Baik
35	1010302002000011	Lembar Disposisi	100	Buah	2.470.000	Baik
36	1010301006000060	Map Folder Ber Kop BPHN	400	Buah	7.840.000	Baik
37	1010304010000005	Mouse Wireless M220 Logitech Silent	2	Buah	452.800	Baik
38	1010301006000026	Ordner Bantex 1452 PVC A5	14	Buku	548.100	Baik
39	1010301004000017	Penghapus Pensil Staedtler 5-26 B-20	5	Buah	126.000	Baik

40	1010301004000011	Penghapus pensil Staedtler 526-B40	3	Buah	12.300	Baik
41	1010301001000010	PENSIL 2 b stadler	9	Buah	426.300	Baik
42	1010399999000008	Plakat	20	Buah	8.985.000	Baik
43	1010304999000016	Pointer R 400 Logitech	1	Buah	567.000	Baik
44	1010302002000064	Port it 3M 680-09 Sign Here	2	Pad	54.800	Baik
45	1010302002000045	Post It 654	2	Pad	33.000	Baik
46	1010301001000039	Pulpen Ball Liner Biru Pilot	6	Lusin	1.226.700	Baik
47	1010301001000027	pulpen Gel K1 Kenko	7	Lusin	365.050	Baik
48	1010301999000037	Punch Pembolong kertas No.40 XL Kenko	2	Buah	56.000	Baik
49	1010301999000067	Rautan Pensil angel A-5 (Kecil)	2	Buah	115.300	Baik
50	1010301999000058	Remover Kertas	2	Buah	80.000	Baik
51	1010301010000031	Solatif Bening Daimaru (12mm x 25yard)	4	Roll	22.000	Baik
52	1010301001000005	Spidol Art 70	1	Lusin	115.000	Baik
53	1010301001000032	spidol Permanent Marker artline 70	5	Lusin	741.000	Baik
54	1010301001000017	spidol whiteboard hitam	2	Dus	206.000	Baik
55	1010301001000012	stabilo bos	12	Buah	181.200	Baik
56	1010301012000002	Stapler HD 10 Max	10	Buah	200.000	Baik
57	1010302002000065	Sticker Label Tom & Jerry No.120	8	Buah	61.600	Baik
58	1010301006000040	STOP MAP PUTIH BERKOP BPHN	4	Pak	831.600	Baik
59	1010301010000021	tape dispencer besar	2	Buah	57.400	Baik
60	1010301010000022	tape dispencer kecil	3	Buah	64.500	Baik
61	1010304004000097	Tinta Epson 001 Black	8	Buah	1.591.600	Baik
62	1010304004000098	Tinta Epson 001 Cyan	7	Buah	960.400	Baik
63	1010304004000099	Tinta Epson 001 Magenta	9	Buah	1.234.800	Baik
64	1010304004000100	Tinta Epson 001 Yellow	8	Buah	1.097.600	Baik
65	1010304004000093	Tinta Epson 003 Black	7	Buah	816.200	Baik
66	1010304004000094	Tinta Epson 003 Cyan	12	Buah	1.406.400	Baik
67	1010304004000095	Tinta Epson 003 Magenta	11	Buah	1.289.800	Baik
68	1010304004000096	Tinta Epson 003 Yellow	10	Buah	1.168.400	Baik
69	1010304004000106	Tinta Epson 008 Black	3	Buah	1.072.000	Baik
70	1010304004000107	Tinta Epson 008 Cyan	3	Buah	906.600	Baik
71	1010304004000108	Tinta Epson 008 Magenta	3	Buah	906.600	Baik
72	1010304004000109	Tinta Epson 008 Yellow	3	Buah	906.600	Baik
73	1010304004000103	Tinta Epson 774 (Epson M100)	3	Buah	923.800	Baik
74	1010304004000007	Tinta Hp Laser Jet 12 A	2	Buah	3.240.000	Baik
75	1010301002000003	Tinta Stempel	8	Buah	76.800	Baik
76	1010304004000037	Toner HP Laser Jet 85A	1	Buah	1.519.000	Baik
77	1010304004000101	Toner HP Laserjet 79 A	1	Buah	1.485.000	Baik
78	1010301003000030	Trgonal Clip no. 1 joikp Trigonal Clip No 1	3	Buah	79.500	Baik
79	1010314002000244	Acetylcysteine 200 Mg (Dus 100 KPS)	200	Box	253.200	Baik
80	1010314005000022	Acyclovir 5% Salep	20	Tube	100.280	Baik
81	1010314002000178	Alleron	1	Box	39.000	Baik
82	1010314002000105	Allohex	2	Box	131.000	Baik

83	1010314002000245	Allohex 10 Mg Tab @50	100	Tablet	131.000	Baik
84	1010314002000246	Allopurinol 100 MG Dus 100 Tab @ 100 GBN	100	Tablet	40.600	Baik
85	1010314002000247	Allopurinol 300 Mg @ 100 Hexa	300	Gbn	198.700	Baik
86	1010314002000283	Alpentin 100 Mg CAP @50	50	Box	226.450	Baik
87	1010314002000179	Ambeven	1	Box	231.000	Baik
88	1010314002000248	Amlodipine 10 Mg (Dus 50 Tab) BJN	450	Box	299.700	Baik
89	1010314002000284	Amlodipine 5 Mg (Dus 50 Tab) BJN	150	Box	60.000	Baik
90	1010314999000115	Any-Etch	5	Buah	263.625	Baik
91	1010314002000250	ARCOXIA 120MG TAB@30	60	Tablet	1.483.980	Baik
92	1010314999000025	Articulating Paper	1	Box	126.540	Baik
93	1010314002000286	Atorvastatin 20 MG Tab @30 GYA	150	Box	799.200	Baik
94	1010314002000253	ATORVASTATIN CALC 10MG TABGHX	300	Box	799.200	Baik
95	1010314005000020	Balsem Telon	1	Pot	13.085	Baik
96	1010314999000157	Benang jahit Tanpa Jarum	1	Box	13.661	Baik
97	1010314001000002	Betadine 15ml	2	Botol	35.432	Baik
98	1010314005000009	Bioplacento Gel	2	Tube	68.684	Baik
99	1010314002000256	BIORON TAB@100	100	Tablet	142.600	Baik
100	1010314002000320	Bisoprolol 5 Mg @100 Tab GHX BPJS	300	Box	519.600	Baik
101	1010314002000050	Blue Hard Stone	1	Box	36.000	Baik
102	1010314002000257	BRAKIDIN TAB	100	Tablet	166.600	Baik
103	1010314005000030	Caladine Lotion 60 MI	3	Botol	56.823	Baik
104	1010314002000258	CANDESARTAN 8MG TAB@30 GDX	150	Box	899.100	Baik
105	1010314002000259	CAVIPLEX KAPLET @ 100 (ERELA)	500	Box	466.000	Baik
106	1010314002000289	Cefadroxil 500 Mg Cap @100 GDX	100	Cap	119.900	Baik
107	1010314002000290	Cefixime 100 Mg Cap @100 GDX	200	Cap	579.800	Baik
108	1010314002000252	CEFIXIME 200MG CAP@100 GDX	200	Cap	976.800	Baik
109	1010314002000291	Cetirizine 10 MG (dua 30 Tab) -BJN	30	Tube	17.310	Baik
110	1010314001000085	Chemi Dental Poland NaOcl 5.25% + Surfactant25	1	Box	198.690	Baik
111	1010314001000058	CHKM Ghimas	1	Kaplet	85.000	Baik
112	1010314999000018	Cotton Roll No.2 3	2	Buah	189.860	Baik
113	1010314002000261	DEXTEEM PLUS TAB@100	200	Buah	106.600	Baik
114	1010314002000295	Eflagen 50 Mg Tab @50	50	Box	149.900	Baik
115	1010314005000051	Elite Sement	1	Box	293.040	Baik
116	1010314005000004	Erlamicetin (salep mata)	6	Tube	75.924	Baik
117	1010314002000297	Exaflam 25 Mg Tab @50 GDN	50	Box	119.900	Baik
118	1010314002000262	FENOFIBRATE 100MG CAP@50 GDX BPJS	50	Buah	133.200	Baik
119	1010314004000001	Fletcher	1	Botol	27.500	Baik
120	1010314002000263	FLOXIFAR 500MG TAB@100	200	Tablet	181.500	Baik
121	1010314005000008	Formyco Salep	10	Tube	265.070	Baik
122	1010314001000072	Forummen Tetes telinga	5	Botol	187.810	Baik
123	1010314999000039	Fuji 9	1	Buah	1.205.127	Baik

124	1010314999000154	Gips Stone Biru Moldano	1	Buah	59.940	Baik
125	1010314002000299	Glucodex 80 Mg Tab @100	300	Box	211.800	Baik
126	1010314002000265	GLUCOSAMIN MPL 500 MG	300	Buah	669.300	Baik
127	1010314005000046	Hot N Cream Tube 60 Grm	5	Tube	119.880	Baik
128	1010314005000049	HYDROCORTISONE 2.5%CR(DUS 24TUBE@ 5 Gr	11	Tube	50.666	Baik
129	1010314001000050	Insto Eye Drops 7.5 ml Hijau	7	Botol	115.619	Baik
130	1010314001000048	insto moist	5	Fls	78.925	Baik
131	1010314002000202	Intunal Forte Tablet	200	Box	215.800	Baik
132	1010314999000136	K- File Niti 45-80/25 mm	1	Box	154.290	Baik
133	1010314002000268	KALMETHASONE 0.5MG TAB@200	400	Tablet	58.400	Baik
134	1010314002000124	kalnex	1	Tablet	5.200	Baik
135	1010314999000159	Kapas Pembalut 500 Grm	1	Box	106.560	Baik
136	1010314002000300	Kettesse 25 Mg Tab @ 50	30	Box	369.660	Baik
137	1010314999000044	K-File 30	1	Kotak	165.000	Baik
138	1010314999000005	K-File No.15	2	Box	325.600	Baik
139	1010314999000006	K-file No.20	1	Box	162.800	Baik
140	1010314999000007	K-File No.25	1	Box	165.000	Baik
141	1010314002000301	Lansoprazole 30 Mg 20 Capsul GNUL	180	Box	294.660	Baik
142	1010314002000269	LEVOFLOXACIN 500 MG GHX CAPL@50 BPJS	100	Box	166.600	Baik
143	1010314001000093	Lidocain Injeksi	6	Box	18.384	Baik
144	1010314002000302	Lopamid Tablet @100	100	Tablet	31.900	Baik
145	1010314002000303	Loratadine 10 Mg Tab @100 GHX	400	Box	186.800	Baik
146	1010314002000168	L-Vit D3 1000 IU @3 X 10 Tab	60	Box	299.760	Baik
147	1010314002000322	Magasida Tablet (Dus 10 Tablet) BJN	200	Dus	186.400	Baik
148	1010314002000304	Mecobalamin 500 Mcg Cap @ 100 GNOV	600	Box	719.400	Baik
149	1010314002000270	METFORMIN TAB 500 MG @200 TAB (HEXA)	200	Box	73.200	Baik
150	1010314002000271	METHYL PREDNISOLON 8MG GDX	700	Box	496.300	Baik
151	1010314001000094	Minosep 2% 60 MI	2	Botol	77.256	Baik
152	1010314001000071	Minyak Tawon DD	2	Botol	73.110	Baik
153	1010314001000095	Minyak Telon Konicare 60 MI	2	Botol	56.290	Baik
154	1010314002000272	MUCOHEXIN 8MG TAB@100	200	Tablet	153.200	Baik
155	1010314001000081	Natrium Klorida 500 MI	1	Botol	9.336	Baik
156	1010314005000019	Nebacetin Salep	7	Tube	203.735	Baik
157	1010314002000274	NEUROPYRON V TAB@100	200	Tablet	253.200	Baik
158	1010314001000108	OBH 100 MI (IKA)	41	Botol	628.038	Baik
159	1010314002000323	Omeprazole 20 Mg Cap @30 GNOV	150	Tablet	74.100	Baik
160	1010314002000078	Omeprazole Tab	11	Box	374.550	Baik
161	1010314999000081	One swabs 2 Ply	2	Box	24.000	Baik
162	1010314002000310	Opistan 500 Mg KPL @ 100	100	Tablet	71.000	Baik
163	1010314001000065	Otilon	5	Box	283.385	Baik
164	1010314005000050	Painkila CR 30 Gr	9	Box	248.760	Baik
165	1010314001000109	Plantacid Susp 100 MI	3	Botol	41.958	Baik
166	1010314002000311	Plasminex Tab @100500 Mg	2	Tablet	7.992	Baik

167	1010314001000061	Plossa Hanger Red Hot	12	Box	148.944	Baik
168	1010314002000185	Propranolol	1	Box	24.000	Baik
169	1010314999000086	Saliva	1	Pak	55.500	Baik
170	1010314999000160	Salonpas koyo @10	1	Box	7.458	Baik
171	1010314001000033	Sanadryl	10	Botol	232.440	Baik
172	1010314999000158	Saniter Wipes	4	Buah	48.536	Baik
173	1010314002000312	Sanmol 500 Mg Tab	400	Box	223.600	Baik
174	1010314002000313	Scopma 10 Mg Kpl @ 100	200	Box	324.200	Baik
175	1010314002000278	SCOPMA PLUS TAB	600	Box	1.062.600	Baik
176	1010314002000314	Teosal Tab @100	100	Tablet	25.300	Baik
177	1010314002000315	Titan 150 Mg Tab @100	300	Tablet	239.700	Baik
178	1010314002000281	TREMENZA TAB@100	100	Tablet	213.100	Baik
179	1010314002000316	Vesperum 10 Mg Tab @100	100	Tablet	39.200	Baik
180	1010314002000282	VOLTADEX 50MG TAB@50	400	Tablet	266.400	Baik
181	1010314002000317	Welmove CPI @60	20	Buah	87.920	Baik
182	1010314999000016	Z350 XT A3,5B	1	Box	576.298	Baik
JUMLAH			12.186		116.129.741	

Jakarta, 3 Juli 2024

Mengetahui,
Petugas Gudang/Petugas Persediaan



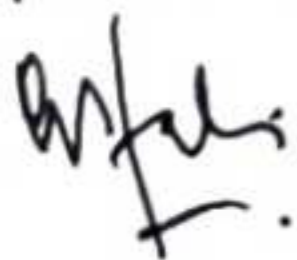
Nurmansyah
NIP 198308242006041001



Plt. Kepala Bagian Umum

Tri Sadevo Y.C
NIP 198007112003121001

Operator Persediaan



Evi Imalia
NIP 198402022006042001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Jalan May Jend Soetoyo No. 10- Cililitan Jakarta Timur 13640
Telp. (021) 8091908-Faksimili 8002265 - 8011753
Website. www.bphn.go.id email bphn@bphn.go.id

BERITA ACARA
PENGHENTIAN BMN DARI PENGGUNAAN
Nomor : PHN.1-PB.05.05-02

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami penanggung jawab Unit Penatausahaan Kuasa Pengguna Barang pada Badan Pembinaan Hukum Nasional :

Nama : Anang Ardian Riza, S.H, M.H.
NIP : 19730409 200212 1 001
Jabatan : Kepala Bagian Umum Badan Pembinaan Hukum Nasional

Menyatakan bahwa telah dilakukan penghentian BMN dari penggunaan dengan cara merekam aset yang sudah dihentikan penggunaannya secara permanen dan tidak ada manfaat ekonomi pada masa yang akan datang. Sehingga aset tetap tersebut harus dieliminasi dari neraca, pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional pada tanggal tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, dengan hasil (Rincian Terlampir)

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan penghentian BMN dari penggunaan pada kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional Semester I (satu) Tahun 2023, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



An.
Unit Akutansi Kuasa Pengguna Barang
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kepala Bagian Umum

Anang Ardian Riza
NIP. 19730409 200212 1 001

Lampiran Penghentian BMN dari Penggunaan

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Keterangan
1	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	21	Rusak Berat
2	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	24	Rusak Berat
3	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	26	Rusak Berat
4	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	28	Rusak Berat
5	3.02.01.04.001	Sepeda Motor	29	Rusak Berat



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : SEK.4-109.PB.05.05 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN
BERMOTOR DINAS OPERASIONAL KARENA PENJUALAN PADA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa permohonan penjualan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mendapatkan persetujuan dari Pengelola Barang berdasarkan surat Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV Nomor S-56/MK.6/KNL.0704/2024 tanggal 27 Maret 2024;
 - b. bahwa persetujuan dari Pengelola Barang sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditindaklanjuti dengan penjualan secara lelang pada KPKNL Jakarta IV yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor 178/07.04/2024-01 tanggal 6 Mei 2024, serta telah dilakukan serah terima kepada pemenang lelang sesuai Berita Acara Serah Terima Nomor PHN.1-PB.05.01-19 tanggal 8 Mei 2024;
 - c. bahwa memperhatikan surat Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor PHN.1-PB.05.05-03 tanggal 20 Mei 2024 hal Permohonan Surat Keputusan Penghapusan BMN selain tanah daan/atau bangunan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia maka perlu dilakukan penghapusan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Penghapusan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional karena Penjualan pada Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4916);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2023 tentang Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 32);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 757);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 165/PMK.06/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1292);
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 900);
9. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor SEK-2.PB.03.01 Tahun 2024 tanggal 26 Februari 2024 tentang Pelimpahan Mandat Sekretaris Jenderal Selaku Pelaksana Kewenangan dan Tanggung Jawab Pengguna Barang kepada Kepala Biro Pengelolaan Barang Milik Negara dan Pengadaan Barang/Jasa dalam Rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Tertentu di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DINAS OPERASIONAL KARENA PENJUALAN PADA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA.

KESATU : Menghapuskan Barang Milik Negara berupa Kendaraan Bermotor Dinas Operasional dengan nilai perolehan sebesar Rp323.602.260,00 (tiga ratus dua puluh tiga juta enam ratus dua ribu dua ratus enam puluh rupiah), nilai limit sebesar Rp 100.424.000,00 (seratus juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah), dan nilai penjualan sebesar Rp115.487.000,00 (seratus lima belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dari Daftar Barang Kuasa Pengguna (DBKP) Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

- KEDUA : Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia wajib melaporkan Perubahan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) Semesteran dan Tahunan Kuasa Pengguna Barang sebagai akibat dari Penghapusan Barang Milik Negara.
- KETIGA : Kebenaran materiil dan formil atas jenis, jumlah, nilai, dan tahun perolehan Barang Milik Negara menjadi tanggung jawab Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2024

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIS JENDERAL,
u.b.

KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
DAN PENGADAAN BARANG/JASA,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

AMAN RIYADI
NIP. 196602231990011001

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan.

LAMPIRAN
Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Nomor : SEK.4-109.PB.05.05 TAHUN 2024
Tanggal : 19 Juni 2024

DAFTAR BARANG MILIK NEGARA BERUPA KENDARAAN BERMOTOR DINAS OPERASIONAL YANG DIHAPUSKAN KARENA PENJUALAN
PADA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NO	KODE BARANG	NUP	NAMA BARANG	MEREK/ TIPE	TAHUN PEROLEHAN	JUMLAH	NILAI (Rp)			KETERANGAN
							PEROLEHAN	LIMIT	PENJUALAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	3020102002	4	Micro Bus	Mitsubhisi FE 349 Nomor Polisi : B 7196 MQ Nomor Mesin : 4D34478314	2004	1	124.922.000	50.555.000	115.487.000	Berita Acara Serah Terima Nomor PHN.1-PB.05.01-19 tanggal 8 Mei 2024
2	3020102003	12	Mini Bus	Toyota kijang Inova Nomor Polisi : B 2640 SQ Nomor Mesin: ITR6242788	2006	1	198.680.260	49.869.000		
TOTAL						2	323.602.260	100.424.000	115.487.000	

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
SEKRETARIS JENDERAL,
u.b.
KEPALA BIRO PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA
DAN PENGADAAN BARANG/JASA



Ditandatangani secara elektronik oleh :

AMAN RIYADI
NIP. 196602231990011001



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



LAMPIRAN
BERITA ACARA
TRANSFER KELUAR



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**
Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640
Telp. 021-8091908 Faxes. 021-8011753, 8002265 laman www.bphn.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERALATAN DAN MESIN (LAPTOP)
Nomor : PHN.1-PB.03.01-10**

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua puluh sembilan* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh empat*, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gusti Putu Milawati
NIP : 197705092001122001
Jabatan : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Monica Dhamayanti
NIP : 196901251997032002
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Yogyakarta
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.151	Acer Travelmate Pengadaan 2023	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Yogyakarta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Yogyakarta
3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2024, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Yogyakarta

Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Monica Dhamayanti
NIP 196901251997032002

Budi Hariono

NIP - 1466101487021001

PIHAK PERTAMA,



I Gusti Putu Milawati
NIP 197705092001122001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**
Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640
Telp. 021-8091908 Faxes. 021-8011753, 8002265 laman www.bphn.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERALATAN DAN MESIN (LAPTOP)
Nomor : PHN.1-PB.03.01-11**

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua puluh sembilan* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh empat*, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gusti Putu Milawati
NIP : 197705092001122001
Jabatan : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Max Wambrau
NIP : 197109151997121001
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Tengah
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.152	Acer Travelmate Pengadaan 2023	1	Baik

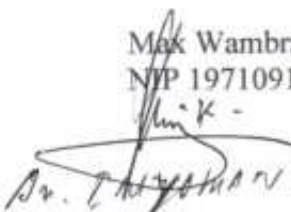
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Sulawesi Tengah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Sulawesi Tengah;
 3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2024, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Sulawesi Tengah
- Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Max Wambrau
NIP 197109151997121001


Dr. I Nyoman Sukamayasa

PIHAK PERTAMA,


I Gusti Putu Milawati
NIP 197705092001122001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**
Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640
Telp. 021-8091908 Faxes. 021-8011753, 8002265 laman www.bphn.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERALATAN DAN MESIN (LAPTOP)
Nomor : PHN.1-PB.03.01-12**

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua puluh sembilan* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh empat*, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gusti Putu Milawati
NIP : 197705092001122001
Jabatan : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Eva Gantini
NIP : 196906221994032001
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Barat
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.153	Acer Travelmate Pengadaan 2023	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Kalimantan Barat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Kalimantan Barat;
 3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2024, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Kalimantan Barat
- Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,

Eva Gantini
NIP 196906221994032001

PIHAK PERTAMA,



I Gusti Putu Milawati
NIP 197705092001122001



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**
Jl. Mayjen Soetoyo No. 10 Cililitan Jakarta Timur 13640
Telp. 021-8091908 Faxes. 021-8011753, 8002265 laman www.bphn.go.id

**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERALATAN DAN MESIN (LAPTOP)
Nomor : PHN.1-PB.03.01-13**

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua puluh sembilan* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh empat*, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gusti Putu Milawati
NIP : 197705092001122001
Jabatan : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Sasmita
NIP : 196505261989031001
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kepulauan Riau
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :


No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.154	Acer Travelmate Pengadaan 2023	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Kepulauan Riau Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Kepulauan Riau;
 3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2024, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Kepulauan Riau
- Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,


Sasmita
NIP 196505261989031001

PIHAK PERTAMA,


I Gusti Putu Milawati
NIP 197705092001122001



BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERALATAN DAN MESIN (LAPTOP)
Nomor : PHN.1-PB.03.01-14

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua puluh sembilan* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh empat*, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gusti Putu Milawati
NIP : 197705092001122001
Jabatan : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Dulyono
NIP : 196808081993031001
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kalimantan Timur
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :


No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.155	Acer Travelmate Pengadaan 2023	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Kalimantan Timur Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Kalimantan Timur;
 3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2024, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Kalimantan Timur
- Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,


Dulyono
NIP 196808081993031001
MIA KUSUMA PITRIANA
NIP. 198302082009012005

PIHAK PERTAMA,


I Gusti Putu Milawati
NIP 197705092001122001



**BERITA ACARA SERAH TERIMA
PERALATAN DAN MESIN (LAPTOP)
Nomor : PHN.1-PB.03.01-15**

Pada hari ini *Kamis* tanggal *Dua puluh sembilan* bulan *Februari* tahun *dua ribu dua puluh empat*, bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : I Gusti Putu Milawati
NIP : 197705092001122001
Jabatan : Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional
Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Hernadi
NIP : 197512252002121001
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Sulawesi Selatan

Yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada **PIHAK KEDUA** berupa :

No	Nama Barang	Nomor Aset	No. Seri/Merk/type/Tahun Perolehan	Jumlah	Kondisi
1.	Lap Top	3.10.01.02.002.156	Acer Travelmate Pengadaan 2023	1	Baik

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut para pihak terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut :

1. PIHAK KEDUA adalah mewakili satuan kerja Kantor Wilayah Sulawesi Selatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 2. PIHAK PERTAMA akan melakukan transfer keluar aset kepada PIHAK KEDUA dan pihak kedua akan mencatat transfer masuk pada aplikasi sakti satker Kantor Wilayah Sulawesi Selatan;
 3. PIHAK PERTAMA memberikan BMN berupa Laptop pada TA 2024, yang akan digunakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi BPHN pada divisi pelayanan hukum Kantor Sulawesi Selatan
- Dalam rangka tertib penatausahaan BMN, dengan ini PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK PERTAMA Aset Tetap berupa Laptop sebanyak 1 (satu) unit yang akan ditatausahakan dalam Aplikasi SAKTI satuan kerja PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dan ditanda tangani oleh para pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



Hernadi
NIP 197512252002121001
An. Ad. Hary

PIHAK PERTAMA,



I Gusti Putu Milawati
NIP 197705092001122001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jl. Brigjen KH. Sam'un No.44 D Serang
Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210
Laman: banten.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.id.

BERITA ACARA TRANSFER KELUAR
NOMOR W.12.PB.02.08 – 825

Pada hari ini Jumat tanggal Dua Puluh Delapan bulan Juni tahun Dua Ribu Dua puluh Empat (28-06-2024), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Erny Widiastuti
NIP : 19741010 200212 2 001
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum Dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : Danu Aji Baskoro
NIP : 198507202009121005
Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa telah melakukan serah terima/transfer Barang Milik Negara dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** berupa 18 (delapan belas) buah Monografi dengan rincian sebagaimana terlampir.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Erny Widiastuti
NIP 19741010 200212 2 001

PIHAK KEDUA

Danu Aji Baskoro
NIP 198507202009121005



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BANTEN
Jl. Brigjen KH. Sam'un No.44 D Serang
Telepon 081-1992-0254 Whatsapp 0819-0222-2210
Laman: banten.kemenkumham.go.id, Surel: kanwil.banten@kemenkumham.go.id.

DAFTAR BMN YANG DITRANSFER KELUAR

NO	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)	KETERANGAN
1	Buku Pengantar Hukum Perkawinan	41.357	
2	Buku Mahkamah Konstitusi dari Negativ Legislature Ke Positive Legislatur	80.915	
3	Buku Kitab Undang Undang Hak Atas Kekayaan Intelektual	71.475	
4	Buku Kompilasi Abstrak Hukum Putusan MK	128.565	
5	Buku Metode Penelitian	51.201	
6	Buku Hukum dan Ham Dasar Teori dan Prakteknya	103.167	
7	Buku Bukti Elektronik Dalam Praktek Keadilan	101.594	
8	Buku Teori dan Praktek Proses Pemeriksaan Terdakwa Tipikor	89.906	
9	Buku Atomic Habits	80.552	
10	Buku Hukum Pidana Asas-Asas Dalam KUHP Dan KUHP Baru	121.375	
11	Buku Bantuan Hukum Untuk Pencari Keadilan	251.737	
12	Buku KUHP-KUHAP-KUHPER	232.856	
13	Buku Undang-Undang Reformasi dan Transaksi Elektronik	71.925	
14	Buku Kitab Undang Undang KUHP	190.286	
15	Buku Undang-Undang Agraria	59.338	
16	Buku Pengantar Hukum Notaris Elektronik	83.163	
17	Buku Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP	166.326	
18	Buku Leaders Eat Last	74.262	
Jumlah		2.000.000	

PIHAK PERTAMA

Erny Widiastuti
NIP 19741010 200212 2 001

PIHAK KEDUA

Danu Aji Baskoro
NIP 198507202009121005



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BENGKULU**

Jalan Pangeran Natadirja Km. 7 Kota Bengkulu 38225
Telepon : (0736) 24743-22234, Faksimile : (0736) 26304
Laman : <http://bengkulu.kemenkumham.go.id>, Surel : w21_kanwil_bkl@yahoo.co.id

**BERITA ACARA TRANSFER KELUAR BARANG MILIK NEGARA
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
Nomor : W.8. PB. 04.01 - 363**

Pada hari ini, Kamis tanggal dua puluh tujuh bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Yatna
NIP : 196909201992032001
Jabatan : Kepala Subbidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan JDIIH
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. Nama : Heryanto Matma
NIP : 196810121989031001
Jabatan : Kepala Subbagian Pengelola Keuangan dan BMN
Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa telah dilakukan transfer keluar Barang Milik Negara (BMN) dari Pihak Pertama Kepada Pihak Kedua berupa :

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Jumlah Barang	Keterangan
1.	6010101001	Monografi	132-339	207	Baik

Dalam Berita Acara Serah Terima ini disebutkan bahwa :

1. Barang Milik Negara Digunakan untuk menunjang tugas dan fungsi Divisi Pelayanan Hukum Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Bengkulu;
2. Barang Milik Negara yang telah ditransfer keluar oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA tersebut agar dicatat kedalam aplikasi SAKTI PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara Transfer Keluar ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

Heryanto Matma
NIP. 196810121989031001

PIHAK PERTAMA

Yatna
NIP. 196909201992032001



BERITA ACARA SERAH TERIMA
NOMOR : W.10.PB.05.02 - 1033

Pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Satu bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama : Beni Jalius
NIP : 198208252009121005
Jabatan : Kustodian Barang Milik Negara DIPA 408727
Selanjutnya disebut sebagai pihak **Pertama** dan

2. Nama : Laeli Zuhriyah
NIP : 199307122019012001
Jabatan : Kustodian Barang Milik Negara DIPA 408720
Selanjutnya disebut sebagai **pihak Kedua**, telah melaksanakan

1. **Pihak Pertama** telah menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) (transfer keluar BMN) kepada **Pihak Kedua**, berupa:

No	Nama Barang	NUP	Jumlah
1.	Buku Lainnya	44 - 84	41 Buah

2. **Pihak Kedua** telah menerima BMN yang dimaksud.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama
Kustodian BMN DIPA 408727

Beni Jalius
NIP 198208252009121005

Pihak Kedua
Kustodian BMN DIPA 408720

Laeli Zuhriyah
NIP 199307122019012001

Mengetahui
Kepala Sub Bagian
Pengelolaan Keuangan, BMN dan Barjas



Evi Purwaningsih
NIP 197206261992032001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH GORONTALO
Jl. Tinaloga No. 1 Gorontalo
Telpon.(0435) 826242 Faksimili. (0435) 831287

Laman : <http://gorontalo.kemenkumham.go.id>. Surel : kanwilgorontalo@kemenkumham.go.id

BERITA ACARA TRANSFER KELUAR
Nomor : W.26.KU.04.01- 2245

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Puluh Lima** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat, (25/06/2024)** kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama Kantor : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo (649017)
Nama : Inrda Lesmana Poetra Salimudin, S.H.
NIP : 198609032009121003
Jabatan : Kepala Subbidang BPHN
- 2 Nama Kantor : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Gorontalo (649018)
Nama : R. Indah Rhahmatia Supriyadi, S.H
NIP : 198308272006042001
Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN

Menyatakan bahwa telah dilakukan transfer Barang Milik Negara (BMN) berupa barang :

No.	Nama Buku	Qty	Harga	NUP	Ket
1	PROBLEMATIKA PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH	1	157.250	1	
2	PENGANTAR ILMU HUKUM TATA NEGARA	1	145.775	2	
3	ETIK HAKIM KONSTITUSI	1	121.550	3	
4	RESTORATIVE JUSTICE	1	104.125	4	
5	PERLINDUNGAN KORBAN EDISI 2: SUATU PERSPEKTIF VIKTIMOLOGI&KR	1	84.000	5	
6	KEMBANG SETAMAN TINDAK PIDANA KORUPSI INDONESIA DALAM TEORI	1	168.000	6	
7	TAFSIR, PENJELASAN, DAN KOMENTAR ATAS UNDANG-UNDANG JABATAN	1	186.000	7	
8	PENGANTAR HUKUM PERJANJIAN DI LUAR KUH PERDATA	1	102.000	8	
9	MEMAHAMI HUKUM	1	138.000	9	
10	HAK ASASI MANUSIA DALAM PERSPEKTIF HUKUM NASIONAL	1	89.000	10	
11	PANCASILA & UNDANG-UNDANG	2	228.000	11	
12	UUD 1945 LENGKAP DENGAN PAHLAWAN NASIONAL & REVOLUSI	4	236.000	12	

13	HUKUM TATA PEMERINTAHAN	1	103.000	13	
14	MANAJEMEN SENGKETA PARTAI POLITIK	1	117.500	14	
15	CONTRACT DRAFTING SUATU BENTUK PERIKATAN DALAM IMPLEMENTASI	1	48.000	15	
16	HUKUM NOTARIAT DAN PERTANAHAN	1	105.500	16	
17	PENGANTAR KODE ETIK NOTARIS : INDONESIA, AMERIKA SERIKAT, IT	1	87.000	17	
18	BUKU AJAR LEGISLATIVE DRAFTING PERANCANGAN PERUNDANG- UNDANGAN	1	96.000	18	
19	JUSTICE COLLABORATOR DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA Indonesia	1	132.000	19	
20	UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA 2023 TERBARU :UU RI NO.6 THN 2023	2	449.000	20	
21	HIMPUNAN LENGKAP UNDANG-UNDANG HAK CIPTA, PATEN, MEREK DAN IG	1	108.000	21	
22	HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA EDISI KEDUA	1	115.000	22	
23	HUKUM PROTOKOL NOTARIS	1	67.000	23	
24	POLITIK HUKUM FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEBIJAKAN	1	108.000	24	
25	HUKUM PERLINDUNGAN ANAK:PERSPEKTIF MAQASHID AL-SYARIAH	1	132.000	25	
26	PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BAIK, PEDOMAN	1	384.000	26	
27	UU KETENAGAKERJAAN TERBARU & TERLENGKAP	1	71.500	27	
28	3 KITAB UNDANG2 HUKUM: KUHPER, KUHP, KUHP SC BESERTA PENJELASAN	2	288.000	28	
29	KITAB UNDANG UNDANG HAKI (HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL) SC	1	95.500	29	
30	POLITIK HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI Indonesia	1	137.000	30	
31	HAK CIPTA DALAM KONTEKS EKONOMI KREATIF DAN TRANSFORMASI DIGITAL	1	71.000	31	

Mohon untuk dicatat sebagai transfer masuk semester I Tahun 2024 pada Aplikasi SAKTI setelah ADK Transfer diterima. Setelah diinput dan di tandatangani, mohon berita acara transfer keluar dikirimkan kembali ke Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penerima Barang

Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN



R. Indah Rhammatia Supriyadi, S.H
NIP 198308272006042001

Pengirim Barang

Kepala Subbidang Pelayanan AHU



Indra Lesmana P.S., S.H., M.H
NIP 198609032009121003



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAMBI

Jalan . Kapten . Sujono Kota Baru Jambi 36126
Telp. (0741) 40085 - 40127 Fax. (0741) 444029
Website: <http://jambi.kemenkumham.go.id> Email: kanwil.jambi@kemenkumham.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG
Nomor : W.5-PB.04.01-7

Pada hari ini, Jumat tanggal dua puluh delapan bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat (28-06-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : ANDIKA JUNIAL PERKASA
NIP : 19860624 201012 1 001
Jabatan : PENYUSUN LAPORAN KEUANGAN
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA/ Pemberi Barang
2. Nama : MELATI YULIANA LATURE
NIP : 19960724 201901 2 001
Satker : (409169) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi
Jabatan : KUSTODIAN BARANG MILIK NEGARA
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA/ Penerima Barang

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam keadaan baik untuk dipergunakan dengan rincian (terlampir).

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA
Pemberi Barang



ANDIKA JUNIAL PERKASA
NIP. 19860624 201012 1 001

PIHAK KEDUA
Penerima Barang



MELATI YULIANA LATURE
NIP. 19960724 201901 2 001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH JAMBI

Jalan . Kaptan . Sujono Kota Baru Jambi 36126
Telp. (0741) 40085 - 40127 Fax. (0741) 444029

Website: <http://jambi.kemenkumham.go.id> Email: kanwil.jambi@kemenkumham.go.id

Lampiran :

TRANSFER ASET & BARANG MILIK NEGARA

Hari/ Tanggal : Jumat, 28 Juni 2024

Tujuan : (409169) Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jambi

No.	Nama Barang	Kode Barang	NUP	Jumlah	Harga Perolehan	Merk/ Tipe	Kondisi
1	Buku	6010101003	1	1 Paket	Rp 9,000,000,-	Sinar Grafika	Baik

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima Barang

MELATI YULIANA LATURE
NIP. 19960724 201901 2 001

Yang Menyerahkan Barang

ANDIKA JUNIAL PERKASA
NIP. 19860624 201012 1 001



BERITA ACARA SERAH TERIMA

Nomor : W.11-PB.04.01-7484

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : Andi T. Salahuddin
NIP : 197606062001121001
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Itun Wardatul Hamro
NIP : 196807081992032001
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA berupa :

No	Nama Barang	Jumlah Barang	Keterangan	Nilai Perolehan
1	Monografi	85 Unit	Transfer Keluar dari BPHN	Rp. 7.500.000

Demikian berita acara ini untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Menerima
PIHAK KEDUA

Itun Wardatul Hamro
NIP 196807081992032001

Yang Menyerahkan
PIHAK KESATU

Andi T. Salahuddin
NIP 197606062001121001

Mengetahui
Kepala Kantor Wilayah

Masjuno
NIP 197208131994031002



BERITA ACARA SERAH TERIMA
Nomor : W15-PB.02.08-1072

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Lusie Irawati
NIP : 197509172009122001
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Sub Bidang Penyuluhan Hukum, Bantuan Hukum dan Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
- II. Nama : Ufi Mayakapti
NIP : 197709132003122002
Pangkat/ Gol. Ruang : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA barang berupa Buku Perpustakaan (Monografi) pengadaan DIPA BPHN Kantor Wilayah Jawa Timur Tahun Anggaran 2024 dengan rincian barang sebagai berikut :

No.	Kode Barang	NUP	Nama Barang	Merk	Nilai Perolehan (Rp)
1	6010101001	11	Monografi	Politik Muka Ganda	239.000
2	6010101001	12	Monografi	Birokrasi Digital	233.000
3	6010101001	13	Monografi	Kepemimpinan Militer, Catatan Dari Pengalaman Jendral Prabowo Subianto (1 & 2)	564.600
4	6010101001	14	Monografi	Sukarno - Sebuah Biografi Politik - (JD Legge)	257.000
5	6010101001	15	Monografi	Dibawah Bendera Revolusi	975.000
6	6010101001	16	Monografi	Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat (Cindy Adams)	244.000
7	6010101001	17	Monografi	Untuk Negeriku - Sebuah Otobiografi Muhammad Hatta	243.800
8	6010101001	18	Monografi	Syahrir - Peran Besar Bung Kecil (Tempo)	155.000
9	6010101001	19	Monografi	Suharto - Sebuah Biografi Politik (RE Elson)	352.000
10	6010101001	20	Monografi	Jokowi's Indonesia and The World (Ahmad Ibrahim)	323.000
11	6010101001	21	Monografi	Rudy, Kisah Masa Muda Yang	162.800

				Visioner	
12	6010101001	22	Monografi	BJ Habibie (The Untold Story)	244.000
13	6010101001	23	Monografi	KUHP Baru	135.000
14	6010101001	24	Monografi	Hukum dan Penegakan Hukum (Prof. Romli Atmasastri)	239.000
15	6010101001	25	Monografi	Hukum Perbankan Syariah (Sinar Grafika)	254.600
16	6010101001	26	Monografi	Kebijakan Anti - Slap & Pengelolaan Lingkungan Hidup (Dr. Nani Indrawati)	302.600
17	6010101001	27	Monografi	Hukum Perlindungan Anak (Dr. H. Buang Yusuf)	197.000
18	6010101001	28	Monografi	Cyber Notary & Tantangan Notaris Di Era Digital (Bamb. Susatyo)	176.600
19	6010101001	29	Monografi	Pemidanaan Berbasis Keadilan restoratif Yang Berdaya Jera & Responsif (Dr. Tj Gunawan)	183.800
20	6010101001	30	Monografi	Indonesia (Hj. Anita Zulfiah)	182.600
21	6010101001	31	Monografi	Hukum Keluarga (H. Zaeni A. SH)	192.600
22	6010101001	32	Monografi	Ekstradisi Dalam Hukum Internasional Modern (I Wayan Parthiana)	330.000
23	6010101001	33	Monografi	Kompilasi Perjanjian inf & KI yang Diratifikasi Indonesia (Prof Dr Ahmad M.Romli)	143.000
24	6010101001	34	Monografi	Diplomasi Mengusut Kejahatan Lintas Negara (Yasona)	167.000
25	6010101001	35	Monografi	Pembahasan UU Perlindungan Data Pribadi (UU No.27/2022) Dr. Sinta Dewi	210.200
26	6010101001	36	Monografi	Delik-Delik Korupsi (Mahrus Ali)	177.800
27	6010101001	37	Monografi	Pidana Mati Berdasarkan Asumsi Kajra Putusan Kasus Sambo	193.800
28	6010101001	38	Monografi	Aspek-Aspek Hukum StaUp (Dr.Rio C)	189.000
29	6010101001	39	Monografi	Hukum Perlindungan Perempuan (Konsep & Teori) Dr. Ahmad Syahrus Sikti	346.000
30	6010101001	40	Monografi	Penegakan Hukum Pencucian Uang Lintas Yurisdiksi	238.200
31	6010101001	41	Monografi	Jus Col Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	291.000
32	6010101001	42	Monografi	Indonesia Pasifik, Sebuah Konstitusi Geopolitik (Abhitah Singhyadav)	180.600
33	6010101001	43	Monografi	Cacat Administrasi (Pembatalan tertentu tanah oleh BPN tagihan PTS PN) (Dr. Ir Drom)	222.600
34	6010101001	44	Monografi	Omnibus Law, Teori & Penerapannya (Dr. Rio Christiawan, SH, M.Hum, M.Kn)	179.400
35	6010101001	45	Monografi	UU Aparatus Sipil Negara No.20 Th 2023 (terbaru)	96.600
36	6010101001	46	Monografi	UU No.22 Th. 2022 tentang	117.000

				Pemasyarakatan	
37	6010101001	47	Monografi	BJ Habibie From Zero to Hero Insprasi & Perjuangan	151.800
38	6010101001	48	Monografi	Biografi Gus Dur by Greg Barton (Hard Cover)	351.000
39	6010101001	49	Monografi	Cyber Bullying: Hak-hak Digital Right on Online Safety karya Dr. Sayid Muhammad Rifqi Noval, S.H., M.H.	137.400
40	6010101001	50	Monografi	Seri Pemikir Hukum: Teori Hans Kelsen Tentang Hukum oleh Prof. Jimly Asshiddiqie	149.000
41	6010101001	51	Monografi	Teknologi Hukum, Paradigma Baru Hukum di Dunia Digital" oleh Dr. Rahmat Dwi Putranto, S.H., M.H	258.000
Total					9.986.400

Barang Milik Negara tersebut diterima oleh PIHAK KEDUA dalam keadaan baik dan lengkap. Pengadaan tersebut untuk melengkapi koleksi buku pada Perpustakaan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur. PIHAK PERTAMA akan menyerahkan pencatatan pengadaan Buku Perpustakaan (Monografi) kepada PIHAK KEDUA melalui mekanisme transfer keluar online pada aplikasi SAKTI.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT

Jalan K.S. Tubun No .26, Telp. (0561)732242-732229 Fax.(0561)762624, Pontianak 78121
email : kemenkumham.kalbar@gmail.com /simak.kanwil.kalbar@gmail.com

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG

Nomor : W.16.PB.04.01- 4847

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (10-06-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Henni Oktora Widiastuti, SH.M.kn
NIP. : 198010222006042001
Jabatan : Kasubid LuhBankum dan JDIH
Yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA/Pemberi Barang
2. Nama : Ika Pusedikawati, S.E
NIP : 198610102009122002
Jabatan : Plh.Kasubag Keuangan dan BMN
Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA/Penerima Barang

Dengan ini menyatakan bahwa Pihak Pertama telah menyerahkan kepada Pihak Kedua, dan Pihak Kedua telah menerima barang tersebut dalam Keadaan baik untuk dipergunakan dengan rincian (terlampir).

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

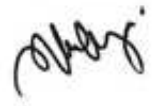
PIHAK PERTAMA
Pemberi Barang



Henni Oktora Widiastuti
NIP.198010222006042001



PIHAK KEDUA,
Penerima Barang



Ika Pusedikawati
NIP.198610102009122002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN BARAT

Jalan K.S. Tubun No .26, Telp. (0561)732242-732229 Fax.(0561)762624, Pontianak 78121
email : kemenkumham.kalbar@gmail.com /simak.kanwil.kalbar@gmail.com

Lampiran: 1 (Satu) Berkas

TRANSFER ASET & BARANG MILIK NEGARA

Hari/Tanggal : Senin, 10 Juni 2024

No.	Kode Barang	Nama Buku	NUP	Total Jumlah	Satuan
1.	6.01.01.01.001	Aspek Hukum Pengawasan Perbankan Syariah revisi	1	1	Buku
2.	6.01.01.01.001	Aspek Hukum Perlindungan Anak Perkembangan Produk Hukum	2	1	Buku
3.	6.01.01.01.001	Bantuan Hukum untuk 3 Pencari Keadilan	3	1	Buku
4.	6.01.01.01.001	Buku Ajar Sistem Hukum Indonesia	4	1	Buku
5.	6.01.01.01.001	Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional	5	1	Buku
6.	6.01.01.01.001	Hak Kekayaan Intelektual dan Investasi	6	1	Buku
7.	6.01.01.01.001	Hukum Benda dan Harta Kekayaan Adat	7	1	Buku
8.	6.01.01.01.001	Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga	8	1	Buku
9.	6.01.01.01.001	Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia	9	1	Buku
10.	6.01.01.01.001	Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	10	1	Buku
11.	6.01.01.01.001	Hukum Perlindungan Anak dan KDRT	11	1	Buku
12.	6.01.01.01.001	Hukum Perlindungan Saksi dan Korban	12	1	Buku

13	6.01.01.01.001	Hukum Perusahaan Bentuk-bentuk Badan Usaha di Indonesia	13	1	Buku
14	6.01.01.01.001	Hukum Pidana Suatu Pengantar	14	1	Buku
15	6.01.01.01.001	Hukum Tata Negara Indonesia	15	1	Buku
16	6.01.01.01.001	Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata	16	1	Buku
17	6.01.01.01.001	Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana	17	1	Buku
18	6.01.01.01.001	Kmus Pintar HukumKamus Lengkap dengan Asas-Asas Hukum	18	1	Buku
19	6.01.01.01.001	Kekuasaan Kehakiman, Komisi Yudisial, Ham dan Etika	19	1	Buku
20	6.01.01.01.001	Kitab Undang Haki (Hak Kekayaan Intelektual)	20	1	Buku
21	6.01.01.01.0012	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Berdasarkan UU	21	1	Buku
23	6.01.01.01.001	Memahami dan Menerapkan: Convernote, Legalisasi Warmerking	23	1	Buku
24	6.01.01.01.001	Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Perpres Terbaru	24	1	Buku
25	6.01.01.01.001	Pengantar Hukum Perkawinan	25	1	Buku
26	6.01.01.01.001	Pengantar Metodologi Penelitian Hukum	26	1	Buku
27	6.01.01.01.001	Kumpulan 3 Kitab Hukum KUH Perdata. KUHP, KUHP	27	1	Buku
28	6.01.01.01.001	UU RI No. Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)	28	1	Buku


29	6.01.01.01.0013	Hukum dan Politik : Pengaruh dan Peranan Politik Hukum Bagi Negara	29	1	Buku
30	6.01.01.01.001	Lelang Eksekusi Hak tanggung, Meniscayakan Perlindungan	30	1	Buku
31	6.01.01.01.001	Hukum Agraria dan Tata Ruang	31	1	Buku
32	6.01.01.01.001	Cyberlaw dalam Persespektif Islam	32	1	Buku
33	6.01.01.01.001	Hukum Acara Perdata Lengkap dan Praktis HIR. RBG dan Yurisprudensi	33	1	Buku
34	6.01.01.01.001	Hukum Fintech Lending Upaya Mitigasi Pinjaman Online Ilegal	34	1	Buku
35	6.01.01.01.001	Hukum Ham dan Hukum Humaniter	35	1	Buku
36	6.01.01.01.001	Hukum Kenotariata, Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Nota	36	1	Buku
37	6.01.01.01.001	Hukum Komunikasi Massa	37	1	Buku
38	6.01.01.01.001	Hukum Pajak	38	1	Buku
39	6.01.01.01.001	Hukum Pemerintahan Daerah	39	1	Buku
40	6.01.01.01.001	Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dann Praktiknya di Indonesia	40	1	Buku
41	6.01.01.01.001	Hukum Perlindungan Konsumen Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi	41	1	Buku
42	6.01.01.01.001	Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	42	1	Buku
43	6.01.01.01.001	Perkembangan dan Praktik Jaminan Fidusia	43	1	Buku
44	6.01.01.01.001	Perlindungan Hukum Justice Collaborator dalam Sistem Peradilan	44	1	Buku

45	6.01.01.01.001	Aspek Pidana dalam UU No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia	45	1	Buku
46	6.01.01.01.001	Aspek Hukum Perjanjian Kerja Peraturan Perusahaan dan Perjanjian	46	1	Buku
47	6.01.01.01.001	AAPUU: Asas-Asas Pengujian Undang-Undang	47	1	Buku
48	6.01.01.01.001	Arah Politik Pemidaan Korporasi Di Era Globalisasi	48	1	Buku
49	6.01.01.01.001	Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis	49	1	Buku
50	6.01.01.01.001	Buku Pintar dan Perseroan Terbatas	50	1	Buku
51	6.01.01.01.001	Cybersecurity Perlindungan Hak Cipta	51	1	Buku
52	6.01.01.01.001	Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	52	1	Buku
53	6.01.01.01.001	Bungan Rampai Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia	53	1	Buku
54	6.01.01.01.001	Himpunan Peraturan PERUU Tentang Agraria dan Pertanahan Edisi Terbaru	54	1	Buku
55	6.01.01.01.001	Dokrin-Dokrin Pidana Korporasi	55	1	Buku
56	6.01.01.01.001	Hukum Administrasi Perbandingan Penyelesaian Maladministrasi	56	1	Buku
57	6.01.01.01.001	Hukum Atas Kekayaan Intelektual	57	1	Buku
58	6.01.01.01.001	Hukum Ekonomi Digital	58	1	Buku
59	6.01.01.01.001	Hukum Internasional Sumber-Sumber Hukum	59	1	Buku
60	6.01.01.01.001	Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia	60	1	Buku
61	6.01.01.01.001	Kompilasi Dan Abstrak Hukum Keputusan Mahkamah Konstitusi:KUH	61	1	Buku

62	6.01.01.01.001	Hukum Perlindungan data Pribadi Di Indonesia Cyberlaw	62	1	Buku
63	6.01.01.01.001	Notaris Dan PPAT Suatu Pengantar	63	1	Buku

PIHAK PERTAMA
Pemberi Barang




Henni Oktora Widiastuti
NIP. 198010222006042001

PIHAK KEDUA,
Penerima Barang



Ika Puskawati
NIP. 198610102009122002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KALIMANTAN SELATAN

Jalan Brigjen. H. Hasan Basri No.30, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Telepon/Fax: (0511) 3302790. Laman: <https://kalsel.kemenkumham.go.id>
Email: kemenkumhamkalsel@gmail.com, kanwilkalsel@kemenkumham.go.id

BERITA ACARA TRANSFER KELUAR

Nomor : W.19.PB.05.01 - 3564

Pada hari ini **Senin** tanggal **Dua Puluh Empat** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Kantor : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan
Nama : Agus Sartono
N I P : 197102231994031001
Jabatan : Kepala Bidang Hukum

Selanjutnya disebut pihak **kesatu**

Nama Kantor : Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Selatan
Nama : Rustam Sakka
N I P : 197206181998031001
Jabatan : Kepala Bagian Umum

Selanjutnya disebut pihak **kedua**

Menyatakan bahwa telah melakukan Transfer Barang Milik Negara (BMN) dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua berupa **Monografi**. Daftar BMN terlampir sebagaimana tidak terpisah dalam Berita Acara ini.

Dengan adanya Transfer barang ini, maka tanggungjawab atas barang tersebut di atas beralih kepada pihak kedua.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan.

Yang menerima
Pihak kesatu,

Agus Sartono
NIP 197102231994031001

Yang menyerahkan
Pihak kedua,

Rustam Sakka
NIP 197206181998031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEPULAUAN RIAU

Jalan Daeng Kamboja, Tanjungpinang, 29125

Telepon (0771) 7333083 / Faksimili (0771) 7333083

Laman : kepri.kemenkumham.go.id, email : kanwil.kepri@gmail.com

**BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM KEPULAUAN RIAU
NOMOR : W.32.PB.05.01-5226 TAHUN 2024**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau, kami yang bertanda tangan dibawah ini masing-masing :

1. Nama : SASMITA
NIP : 196505261989031001
Jabatan : KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM DAN HAM

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. Nama : KASWO
NIP : 197404261999031001
Jabatan : KEPALA DIVISI ADMINISTRASI

Untuk selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah melakukan serah terima Barang Milik Negara kepada PIHAK KEDUA berupa :

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	MERK BARANG	NUP	QTY	KET
1	6010101001	Monografi	Buku Perpustakaan Hukum	215 - 333	119	Baik

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

KASWO
NIP. 197404261999031001

PIHAK PERTAMA

SASMITA
NIP. 196505261989031001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH LAMPUNG
Jl. RW. Monginsidi No.184 Teluk Betung Bandar Lampung
Telepon : (0721) 485427 – 483927 - 474813
Laman: www.lampung.kemenkumham.go.id

BERITA ACARA
SERAH TERIMA BARANG MILIK NEGARA
NOMOR W9.PB.04.01- 3710

Pada hari ini, Senin , tanggal Dua Puluh Tiga bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Jl. RW. Monginsidi no 184 Bandar Lampung, saya yang bertandatangan dibawah ini :


Nama : Arya Dwijayanti
NIP : 198610292006042001
Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung

Menyatakan bahwa Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Divisi Pelayanan Hukum – BPHN (Kode Satuan Kerja : 408829) telah melakukan Transfer Keluar Barang Milik Negara (BMN) kepada Satuan Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Divisi Pelayanan Hukum – BPHN (Kode Satuan Kerja : 408824) dengan rincian sebagai berikut :

No	Uraian Barang	Kode Barang/ NUP	Qty	Total	Keterangan
1	Monografi	6010101001 59-134	76	Rp 9.920.000,-	Transfer Keluar BMN ke Divisi Administrasi

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan penyusunan Laporan BMN Semester I Tahun 2024 dan apabila dikemudian hari ditemukan kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Kepala Subbagian Pengelolaan
Keuangan dan Barang Milik Negara



Arya Dwijayanti
NIP. 198610292006042001





**BERITA ACARA TRANSFER KELUAR
BARANG MILIK NEGARA**
Nomor : W.21-PB.05.05-2051

Pada hari ini, Rabu tanggal dua puluh dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (22-05-2024), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Puri Adriatik Chasanova
NIP : 196811151997032001
Jabatan : Kepala Bidang Hukum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : Asri
NIP : 198008152009011007
Jabatan : Kepala Bagian umum
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM NTB

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Dengan ini PIHAK PERTAMA telah melakukan transfer keluar barang milik negara kepada PIHAK KEDUA, untuk selanjutnya agar dilakukan pencatatan oleh PIHAK KEDUA sebagai barang transfer masuk dengan rincian sebagai berikut :

No	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Tahun Perolehan	Jumlah	Total Nilai	Keterangan
1	6.01.01.01.001	Monografi	83-84	2024	2	172.000	English For Business: Reinventing The Case and Project-Based Learning
2	6.01.01.01.001	Monografi	85-86	2024	2	228.000	Dasar-Dasar Manajemen (Ed.Revisi)
3	6.01.01.01.001	Monografi	87-88	2024	2	244.000	Manajemen Pelayanan Publik
4	6.01.01.01.001	Monografi	89-90	2024	2	108.000	Manajemen Perpustakaan
5	6.01.01.01.001	Monografi	91-92	2024	2	170.000	Manajemen Risiko Edisi 2
6	6.01.01.01.001	Monografi	93-94	2024	2	228.000	Manajemen Sumber Daya Manusia (Edisi Revisi)
7	6.01.01.01.001	Monografi	95-96	2024	2	122.000	Sistem Informasi Manajemen
8	6.01.01.01.001	Monografi	97-98	2024	2	138.000	Pedagogik: Telaah Kritis ilmu Pendidikan dalam multiperspektif
9	6.01.01.01.001	Monografi	99-100	2024	2	174.000	Perilaku Menyimpang: Tinjauan Sosiologis
10	6.01.01.01.001	Monografi	101-102	2024	2	232.000	Hukum Pidana Anak di Indonesia
11	6.01.01.01.001	Monografi	103-104	2024	2	340.000	Hukum Pidana Indonesia

12	6.01.01.01.001	Monografi	105-106	2024	2	172.000	Pembahasan UU Perlindungan data pribadi (UU RI.No 27 tahun 2022)
13	6.01.01.01.001	Monografi	107-108	2024	2	216.000	Sistem Masyarakat Di Indonesia
14	6.01.01.01.001	Monografi	109-110	2024	2	186.000	Hukum perikatan dan perjanjian
15	6.01.01.01.001	Monografi	111-112	2024	2	168.000	Asas Keadilan Kemamfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim
16	6.01.01.01.001	Monografi	113-114	2024	2	248.000	Hukum Acara PTUN (Edisi Ketiga)
17	6.01.01.01.001	Monografi	115-116	2024	2	190.000	Aspek Hukum Startup
18	6.01.01.01.001	Monografi	117-120	2024	4	318.000	KUHP 2023 UU RI No.1 Tahun 2023
19	6.01.01.01.001	Monografi	121	2024	1	35.000	UU Terorisme dan perubahannya (UU RI No.5 Th.2018)
20	6.01.01.01.001	Monografi	122-123	2024	2	110.000	Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja di Bidang Koperasi , UMKM,dan Bumi Desa
21	6.01.01.01.001	Monografi	124-126	2024	3	393.000	Perbandingan Hukum Tata Negara
22	6.01.01.01.001	Monografi	127-128	2024	2	192.000	Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional
23	6.01.01.01.001	Monografi	129-130	2024	2	220.000	Berani Berkarakter Positif
24	6.01.01.01.001	Monografi	131-132	2024	2	408.000	Fiqh Muamalat : Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam
25	6.01.01.01.001	Monografi	133-134	2024	2	112.000	Memahami Ilmu Faraid: Tanya Jawab Hukum Waris Islam
26	6.01.01.01.001	Monografi	135-136	2024	2	122.000	Etika Bermuamalah Berdasarkan Alquran dan Sunnah
27	6.01.01.01.001	Monografi	137-138	2024	2	198.000	Kisah Sejuta Hikmah Kaum Sufi
28	6.01.01.01.001	Monografi	139-140	2024	2	326.000	Sejarah Peradaban Islam
29	6.01.01.01.001	Monografi	141-142	2024	2	188.000	Kesehatan Seksual: Sexual Health (Terjemahan)
30	6.01.01.01.001	Monografi	143-144	2024	2	138.000	Ayah,Bunda,Ayo Naik Haji
31	6.01.01.01.001	Monografi	145-146	2024	2	198.000	Hadis Qudsi Stories
32	6.01.01.01.001	Monografi	147-149	2024	3	195.000	Hidup di Bumi Allah : Mengenalkan Anak kepada Ciptaan Allah
33	6.01.01.01.001	Monografi	150-151	2024	2	170.000	Khulafaur Rasyidin
34	6.01.01.01.001	Monografi	152-153	2024	2	198.000	Putri Muslimah : 7 Mutiara Hikmah untuk membangun Karakter Anak Hebat
35	6.01.01.01.001	Monografi	154-155	2024	2	270.000	Teman Setan atau Musuh Setan
36	6.01.01.01.001	Monografi	156-157	2024	2	156.000	Ucapan Mengandung Doa
37	6.01.01.01.001	Monografi	158-159	2024	2	90.000	Cinta membaca
38	6.01.01.01.001	Monografi	160-161	2024	2	90.000	Cita-cita untuk Bangsa

39	6.01.01.01.001	Monografi	162-163	2024	2	138.000	Cara Sukses Public Speaking
40	6.01.01.01.001	Monografi	164-165	2024	2	180.000	Beri aku kesempatan
41	6.01.01.01.001	Monografi	166-167	2024	2	172.000	ARCHIPELAGOS : Wizarding School di Nusantara
42	6.01.01.01.001	Monografi	168-169	2024	2	130.000	Muda Melek Keuangan
43	6.01.01.01.001	Monografi	170-171	2024	2	172.000	UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU RI No.7 Thn 2021)
44	6.01.01.01.001	Monografi	172-173	2024	2	248.000	Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik
45	6.01.01.01.001	Monografi	174	2024	1	1.495.000	Tafsir Ibnu Katsir
46	6.01.01.01.001	Monografi	175-176	2024	2	194.000	Hukum dan Kebijakan Publik
47	6.01.01.01.001	Monografi	177-178	2024	2	216.000	Hukum Pidana Islam
48	6.01.01.01.001	Monografi	179-180	2024	2	132.000	Amandemen UU Perindungan Anak (UU RI No. 35 Tahun 2014)
49	6.01.01.01.001	Monografi	181-182	2024	2	196.000	Metode Penelitian Hukum
50	6.01.01.01.001	Monografi	183-184	2024	2	262.000	Pengantar Hukum Indonesia
51	6.01.01.01.001	Monografi	185-186	2024	2	284.000	Pengantar hukum Indonesia : Sejarah dan Pokok-pokok Hukum Indonesia
52	6.01.01.01.001	Monografi	187-188	2024	2	218.000	Sejarah dan Tradisi Hukum
Total					105	11.495.000	

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Negara Semester I Tahun 2024 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA,



Asri
NIP 198008152009011007

PIHAK PERTAMA,



Puri Adriatik Chasanova
NIP 196811151997032001



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT

*Jl. Brigjen Marinir Abraham Oktavianus Atururi, Arfai, Manokwari
Telepon (0986) 2210253, Fax (0986) 2210254*

Website: papua-barat.kemenkumham.go.id. email:papuabarabmn@gmail.com

**BERITA ACARA TRANSFER KELUAR
Nomor : W.31-PB.04.01 - 350 Tahun 2024**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Empat bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh empat (**24-06-2024**), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : AGUNG DAMARSASONGKO
NIP : 196912261994031001
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat
2. Nama : EDWARD JAMES SINAGA S.si.,M.H
NIP : 197202242006041000
Jabatan : Kepala Divisi Administrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat

Menyatakan bahwa telah dilakukan transfer Barang Milik Negara (BMN) Aset Tetap Lainnya dengan spesifikasi teknis sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penerima Barang,
Kepala Divisi Administrasi
Kantor Wilayah Papua Barat

Edward James Sinaga
NIP. 197202242006041000

Pemberi Barang,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Papua Barat

Agung Damarsasongko
NIP. 196912261994031001

Mengetahui,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat



Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001

Lampiran Berita Acara Transfer Keluar

Nomor : **W.31- PB.05.05 - 350**

Tanggal : 24 Juni 2024

No	Nama Barang	No aset	Tahun Perolehan	total Harga
1	MONOGRAFI	66 - 137	2024	Rp 10.000.000

Demikian **Berita Serah Terima** penggunaan barang tersebut untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya:

Penerima Barang,
Kepala Divisi Administrasi
Kantor Wilayah Papua Barat



Edward James Sinaga
NIP. 197202242006041000

Pemberi Barang,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM
Kantor Wilayah Papua Barat



Agung Damarsasongko
NIP. 196912261994031001

Mengetahui,
Kepala Kantor Wilayah Papua Barat



Piet Bukorsyom
NIP. 196512271996101001

LAMPIRAN



CV. TINTUR JAYA

Kepada Yth
 Pejabat Pembuat Komitmen
 Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Papua Barat
 Di - Manokwari

Faktur No. 5aU/JAYA/II/2024

No	Nama Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Harga
Pembelian Buku Buku					
1	Epistemologi Dan Filsafat Ilmu Suatu Pengantar	4	Buku	145.000	580.000
2	Ed. Rev Analisis Kebijakan Publik	4	Buku	90.000	360.000
3	Hukum Kepolisian Dan Kriminalistik Edisi Revisi	5	Buku	135.000	675.000
4	Undang-Undang Pemilihan Umum 2024	5	Buku	155.000	780.000
5	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	4	Buku	195.000	600.000
6	Pengantar Metode Penelitian Hukum Edisi Revisi	4	Buku	150.000	600.000
7	Kitab Undang-Undang Perlindungan Anak	4	Buku	90.000	360.000
8	Undang-Undang Ri Nomor Pengantar Ilmu Hukum - Urgensi Dan Penerapannya Di Indonesia	5	Buku	100.000	500.000
9	Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	4	Buku	115.000	460.000
10	Undang-Undang Perpajakan	4	Buku	105.000	420.000
11	Dasar-Dasar & Pengantar Ilmu Hukum	4	Buku	70.000	280.000
12	Pengantar Hukum Indonesia	4	Buku	180.000	720.000
13	Rekonstruksi Hukum Rehabilitasi	4	Buku	130.000	520.000
14	Ombuds Law : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun	4	Buku	525.000	1.300.000
15	Teori Hukum : Dilema Antara Hukum Dan Kekuasaan Ed.2	5	Buku	130.000	650.000
16	KUHPER (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)	4	Buku	130.000	520.000
17	Kitab Undang-Undang Ketenagakerjaan : Berdasarkan Uu Nomor 13 T	4	Buku	150.000	600.000
Jumlah					10.000.000

Terbilang : Sepuluh Juta Rupiah

Manokwari, 26 Februari 2024

CV. TINTUR JAYA

Puspita Irmawanti, SE
 Direktris



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
KANTOR WILAYAH RIAU

Jl. Jend. Sudirman No. 233 Pekanbaru (28111) Telp / Faks (0761) 23846 – 21860

BERITA ACARA TRANSFER KELUAR

Nomor : W4.0927.PB.04.10 Tahun 2024

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh empat bulan Juni tahun dua ribu dua puluh empat, yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : M. Farhan Nizar (DIPA BPHN Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Riau)
N I P : 197307222002121001
Jabatan : Kepala Bidang Hukum

Selanjutnya disebut sebagai PEMBERI BARANG

2. N a m a : Tuti Utami
N I P : 198104202002122001
Jabatan : Operator BMN

selanjutnya disebut sebagai PENERIMA BARANG

Menyatakan telah dilakukan transfer Barang Milik Negara (BMN) berupa 52 (lima puluh dua) buah Monografi dengan rincian sebagai berikut :

No.	Kode Barang/NUP	Spesifikasi Barang	Jumlah	Nilai Perolehan	Kondisi	Keterangan
1	6.01.01.01.001	Monografi	52 Buah	Rp 6.600.000	Baik	Terlampir : Kuitansi pembelian

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penerima Barang

Tuti Utami
NIP. 198104202002122001

Pemberi Barang





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH SULAWESI UTARA

Jalan Diponegoro No. 87, Manado 95112

Telepon : (0431) 870359, Faksimile : (0431) 864288

Laman : www.sulut.kemenkumham.go.id Surel : kanwilsulut@kemenkumham.go.id

BERITA ACARA TRANSFER KELUAR

Nomor : W.25-PB.04.01-4339

Pada hari Jum'at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh Empat, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Frangky Alexander Hendra Zachawerus
NIP : 198101262006041001
Jabatan : Kepala Bidang Hukum

Disebut sebagai PIHAK PERTAMA,

2. Nama : Boney Ngajow
NIP : 198108132007031002
Jabatan : Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN

Disebut sebagai PIHAK KEDUA,

Menyatakan bahwa telah dilakukan penyerahan Barang Milik Negara (BMN) dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Kode Barang	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1	Monografi	6010101001	49 Buah	Baik	Transfer keluar ke Sekjen

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama

Frangky Alexander Hendra Zachawerus
NIP 198101262006041001



Pihak Kedua

Boney Ngajow
NIP 198108132007031002



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SUMATERA BARAT
Jln. S. Parman No. 256 - Padang 25133
Telepon 0751-7055471 Faksimili 0751-7055510
Website : <http://sumbar.kemenkumham.go.id>

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG BMN
Nomor : W3.PB.06.04-26

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Junaidil Fitrianheldy
NIP : 19850618 201212 1 001
Jabatan : Analis Perencanaan, Penggunaan dan Penghapusan BMN
Instansi : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat

Dalam surat serah terima barang ini bertindak selaku PIHAK PERTAMA yang menyerahkan

Nama : Destra Maharnica
NIP : 19900101 201901 2 001
Jabatan : Kustodian Barang Milik Negara
Instansi : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Barat

Yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA/ Penerima barang.

Menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Barang Milik Negara (BMN) kepada PIHAK KEDUA (rincian barang terlampir).
Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan seperlunya.

PIHAK PERTAMA,
Pemberi Barang

Junaidil Fitrianheldy
NIP. 19920510 201901 2001

PIHAK KEDUA,
Penerima Barang

Destra Maharnica
NIP. 19900101 201901 2 001

Mengetahui,
Kepala Subbagian Pengelolaan Keuangan dan BMN

Vina Syarifudin, S.E., M.Ak.
NIP. 19880215 201012 2 001

Lampiran Berita Acara
Nomor : W3.PB.06.04-23
Tanggal : 26 Desember 2022

NO	Nama Barang	Jumlah	NUP	Peruntukkan
1.	Monografi	39	68-106	Divisi Administrasi



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Jalan Gedongkuning Nomor 146 Yogyakarta 55171
Telepon (0274) 378431 Faksimili (0274) 378432, 378433
Laman : jogja.kemenkumham.go.id E-mail : bmn.yogya@gmail.com

BERITA ACARA TRANSFER KELUAR
Nomor: W14.PB.04.01-6847

Pada hari Rabu tanggal Lima bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta (DIPA BPHN)
(Satker pengirim)
Nama : Kus Aprianawati
NIP : 196804101994032001
Jabatan : Pjt. Kepala Bidang hukum
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta
2. Nama Satker : Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Yogyakarta (DIPA SETJEN)
(Satker penerima)
Nama : Yudi Arto
NIP : 197506101997031001
Jabatan : Kepala Bagian Umum
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM D.I.Yogyakarta

Menyatakan bahwa telah dilakukan transfer keluar Barang Milik Negara (BMN) berupa buku sebanyak 168 eksemplar (rincian barang terlampir).

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Penerima Barang
Kepala Bagian Umum

Yudi Arto
NIP 197506101997031001

Pemberi Barang
Pjt. Kepala Bidang Hukum

Kus Aprianawati
NIP 196804101994032001



LAMPIRAN BERITA ACARA TRANSFER KELUAR
Nomor: W14.PB.04.01-6847

No.	Kode Barang	Nama Barang	NUP	Nama Item Barang	Volume	Satuan	Jumlah
1.	6.01.01.01.001	Monografi	1-3	Hukum Adat Di Indonesia	3 Eksemplar	Rp92,000	Rp276,000.00
2.	6.01.01.01.001	Monografi	4-6	Metode Penelitian Hukum	3 Eksemplar	Rp98,000	Rp294,000.00
3.	6.01.01.01.001	Monografi	7-9	Penemuan Hukum oleh Hakim	3 Eksemplar	Rp124,000	Rp372,000.00
4.	6.01.01.01.001	Monografi	10-12	Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia : Perbandingan HIR dan KUHAP (Edisi Revisi)	3 Eksemplar	Rp92,000	Rp276,000.00
5.	6.01.01.01.001	Monografi	13-15	Hukum Penitensier Indonesia (Edisi Kedua)	3 Eksemplar	Rp122,000	Rp366,000.00
6.	6.01.01.01.001	Monografi	16-18	Hukum Pidana Anak di Indonesia	3 Eksemplar	Rp116,000	Rp348,000.00
7.	6.01.01.01.001	Monografi	19-21	Sistem Pemasarakatan Di Indonesia	3 Eksemplar	Rp108,000	Rp324,000.00
8.	6.01.01.01.001	Monografi	22-24	Viktimologi: Perlindungan Korban dan Saksi	3 Eksemplar	Rp64,000	Rp192,000.00
9.	6.01.01.01.001	Monografi	25-27	Hukum Hak Tanggungan : Hak Tanggungan atas Tanah dan Benda-benda di Atasnya	3 Eksemplar	Rp89,000	Rp267,000.00
10.	6.01.01.01.001	Monografi	28-30	Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)	3 Eksemplar	Rp80,000	Rp240,000.00

11.	6.01.01.01.001	Monografi	31-33	Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya	3 Eksemplar	Rp110,000	Rp330,000.00
12.	6.01.01.01.001	Monografi	34-36	Perancangan Kontrak & Memorandum of Understanding (MoU)	3 Eksemplar	Rp97,000	Rp291,000.00
13.	6.01.01.01.001	Monografi	37-39	Asas Keadilan Kemamfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim	3 Eksemplar	Rp84,000	Rp252,000.00
14.	6.01.01.01.001	Monografi	40-42	Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia	3 Eksemplar	Rp88,000	Rp264,000.00
15.	6.01.01.01.001	Monografi	43-45	KUHP 2023 UU RI No.1 Tahun 2023	3 Eksemplar	Rp79,000	Rp237,000.00
16.	6.01.01.01.001	Monografi	46-48	Peraturan lengkap Fidusia (UU RI No.42 Tahun 1999)	3 Eksemplar	Rp31,000	Rp93,000.00
17.	6.01.01.01.001	Monografi	49-51	UU Kementerian Negara	3 Eksemplar	Rp23,000	Rp69,000.00
18.	6.01.01.01.001	Monografi	52-54	UU Sistem Peradilan Pidana Anak 2012 (UU RI No. 11 Tahun 2012)	3 Eksemplar	Rp31,000	Rp93,000.00
19.	6.01.01.01.001	Monografi	55-57	Hukum Perikatan dan Perjanjian	3 Eksemplar	Rp94,000	Rp282,000.00
20.	6.01.01.01.001	Monografi	58-60	Dasar-Dasar Ilmu Hukum Edisi Revisi	3 Eksemplar	Rp130,000	Rp390,000.00
21.	6.01.01.01.001	Monografi	61-63	Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan	3 Eksemplar	Rp79,000	Rp237,000.00
22.	6.01.01.01.001	Monografi	64-66	Kejahatan terhadap negara kesatuan Republik Indonesia	3 Eksemplar	Rp72,000	Rp216,000.00

23.	6.01.01.01.001	Monografi	67-69	Hukum Perdata Islam di Indonesia	3 Eksemplar	Rp70,000	Rp210,000.00
24.	6.01.01.01.001	Monografi	70-72	Hukum Kesehatan	3 Eksemplar	Rp113,000	Rp339,000.00
25.	6.01.01.01.001	Monografi	73-75	Hukum Arbitrasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis (Dilengkapi Arbitrase Online dan Arbitrase Syariah)	3 Eksemplar	Rp129,000	Rp387,000.00
26.	6.01.01.01.001	Monografi	76-78	Hukum Kontrak Bisnis	3 Eksemplar	Rp124,000	Rp372,000.00
27.	6.01.01.01.001	Monografi	79-81	Hukum Tata Negara	3 Eksemplar	Rp85,000	Rp255,000.00
28.	6.01.01.01.001	Monografi	82-84	Perbandingan Hukum Tata Negara	3 Eksemplar	Rp131,000	Rp393,000.00
29.	6.01.01.01.001	Monografi	85-87	Politik Hukum dan Pembangunan Sistem Hukum Nasional	3 Eksemplar	Rp96,000	Rp288,000.00
30.	6.01.01.01.001	Monografi	88-90	UU Kesehatan (UU RI No. 17 Tahun 2023)	3 Eksemplar	Rp67,000	Rp201,000.00
31.	6.01.01.01.001	Monografi	91-93	Sejarah dan Tradisi Hukum	3 Eksemplar	Rp109,000	Rp327,000.00
32.	6.01.01.01.001	Monografi	94-96	Penahanan Prapersediaan di Indonesia : Pre-Trial Detention In Indonesia	3 Eksemplar	Rp108,000	Rp324,000.00
33.	6.01.01.01.001	Monografi	97-99	Pembahasan UU Perlindungan data pribadi (UU RI.No 27 tahun 2022)	3 Eksemplar	Rp86,000	Rp258,000.00
34.	6.01.01.01.001	Monografi	100-102	Tindak Pidana Pelayanan Pertanahan dan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Kepentingan Umum	3 Eksemplar	Rp94,000	Rp282,000.00

35.	6.01.01.01.001	Monografi	103-105	Hukum perikatan dan perjanjian	3 Eksemplar	Rp94,000	Rp282,000.00
36.	6.01.01.01.001	Monografi	106-108	Penyelesaian Sengketa Lingkungan Melalui Gugatan Perdata	3 Eksemplar	Rp127,000	Rp381,000.00
37.	6.01.01.01.001	Monografi	109-111	Aspek Hukum Startup	3 Eksemplar	Rp95,000	Rp285,000.00
38.	6.01.01.01.001	Monografi	112-114	Wakaf dan Pemberdayaan Umat	3 Eksemplar	Rp77,000	Rp231,000.00
39.	6.01.01.01.001	Monografi	115-117	Undang-Undang Paten & Merek dan Indikasi Geografis	3 Eksemplar	Rp39,000	Rp117,000.00
40.	6.01.01.01.001	Monografi	118-120	UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU RI No.7 Thn 2021)	3 Eksemplar	Rp86,000	Rp258,000.00
41.	6.01.01.01.001	Monografi	121-123	Dasar-dasar Pengetahuan Ilmu Hukum	3 Eksemplar	Rp100,000	Rp300,000.00
42.	6.01.01.01.001	Monografi	124-126	Ekstradisi dalam Sistem Peradilan Pidana	3 Eksemplar	Rp79,000	Rp237,000.00
43.	6.01.01.01.001	Monografi	127-129	Hukum Kewarisan Islam di Indonesia Edisi Revisi	3 Eksemplar	Rp82,000	Rp246,000.00
44.	6.01.01.01.001	Monografi	130-132	Hukum Perorangan dan Kebendaan	3 Eksemplar	Rp69,000	Rp207,000.00
45.	6.01.01.01.001	Monografi	133-135	Teori Hukum	3 Eksemplar	Rp74,000	Rp222,000.00
46.	6.01.01.01.001	Monografi	136-138	Penyelesaian Perkara Pidana Penerapan Keadilan Restoratif dan Transformatif	3 Eksemplar	Rp79,000	Rp237,000.00

47.	6.01.01.01.001	Monografi	139-141	Hukum Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	3 Eksemplar	Rp74,000	Rp222,000.00
48.	6.01.01.01.001	Monografi	142-144	Kausa yang Halal dan kedudukan Bahasa Indonesia dalam Hukum Perjanjian	3 Eksemplar	Rp79,000	Rp237,000.00
49.	6.01.01.01.001	Monografi	145-147	Amandemen UU Mahkamah Agung 2009	3 Eksemplar	Rp23,000	Rp69,000.00
50.	6.01.01.01.001	Monografi	148-150	Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia	3 Eksemplar	Rp66,000	Rp198,000.00
51.	6.01.01.01.001	Monografi	151-153	Penelitian Hukum: Legal Research	3 Eksemplar	Rp72,000	Rp216,000.00
52.	6.01.01.01.001	Monografi	154-156	Kriminologi : Perspektif Hukum Pidana	3 Eksemplar	Rp90,000	Rp270,000.00
53.	6.01.01.01.001	Monografi	157-159	Plea Bargaining dan Deferred Prosecution Agreement dalam Tidak Pidana Korupsi	3 Eksemplar	Rp179,000	Rp537,000.00
54.	6.01.01.01.001	Monografi	160-162	Peradilan Islam	3 Eksemplar	Rp89,000	Rp267,000.00
55.	6.01.01.01.001	Monografi	163-165	Hukum Administrasi Negara	3 Eksemplar	Rp125,000	Rp375,000.00
56.	6.01.01.01.001	Monografi	166-168	Uji Tuntas Hukum (Legal Due Diligen)	3 Eksemplar	Rp87,000	Rp261,000.00
JUMLAH					168 Eksemplar		Rp15.000.000,00



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



LAMPIRAN

MEMO

PENYESUAIAN

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 No. Dokumen : 001
 Tanggal : 02 Januari 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal balik Awal Tahun Pendapatan diterima dimuka atas sewa kantin

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1	√	Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	219211	Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	27.547.806	-
2	K	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan	-	27.547.806

Keterangan:
 Jurnal balik Awal Tahun Pendapatan diterima dimuka atas sewa kantin

Dibuat oleh :
 Petugas Verifikasi/Akuntansi



Rizky Awaliyah, A.Md

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 02 Januari 2024



Disetujui oleh :
 Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan



Ira Yustisia Smarayoni, S.Kom., SH., M.Si

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 02 Januari 2024

Direkam oleh :
 Petugas Komputer



Tika Fidya Wati

NIP. 19951005 201901 2 001

Tanggal : 02 Januari 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 No. Dokumen : 002
 Tanggal : 18 Januari 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal balik Pembayaran Utang Listrik bulan Desember T.A. 2023 dengan No ID 547100163555

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		17	
2	Pendapatan Diterima Di Muka	18	Transfer Masuk
3	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	19	Transfer Keluar
4	Belanja Dibayar Di Muka	20	Koreksi Beban Aset
5	√ Belanja Yang Masih Harus Dibayar	21	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
6	Penyisihan Piutang	22	Kas Lainnya di BLU
7	Penghapusan Piutang	23	Uang Muka Belanja
8	Penyusutan Aset	24	Perolehan Aset
9	Kas Di Bendahara Penerimaan	25	Koreksi Piutang/utang
10	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	26	Hibah Langsung
11	Persediaan	27	
12	Koreksi Antar Beban	28	
13	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	29	
14	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	30	Penyesuaian Neraca
15	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	31	Jurnal Koreksi
16	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	32	Jurnal Umum
	Pembentukan Piutang Jangka Pendek		

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212112	Belanja Barang yang masih Harus Dibayar	59.552.282	-
2	K	522111	Beban Langganan Listrik	-	59.552.282

Keterangan:
 Jurnal balik Pembayaran Utang Listrik bulan Desember T.A. 2023 dengan No ID 547100163555

Dibuat oleh :
 Petugas Verifikasi/Akuntansi

Rizky Awaliyah, A.Md.

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 18 Januari 2024

Disetujui oleh :
 Sub Koordinator Akuntansi dan Pelaporan

Ira Yustira Smarayoni, S.Kom., SH., M.Si.

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 18 Januari 2024

Direkam oleh :
 Petugas Komputer

Tika Fidya Wati

NIP. 19951005 201901 2 001

Tanggal : 18 Januari 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 No. Dokumen : 003
 Tanggal : 18 Januari 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Balik Pembayaran Utang Listrik II bulan Desember T.A. 2023 dengan nomor ID 5471100717100 dan 547102931079


Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4	v	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	37.728.322	-
2	K	522111	Beban Langganan Listrik	-	37.728.322

Keterangan:
 Jurnal Balik Pembayaran Utang Listrik II bulan Desember T.A. 2023 dengan nomor ID 5471100717100 dan 547102931079

Dibuat oleh :
 Petugas Verifikasi/Akuntansi

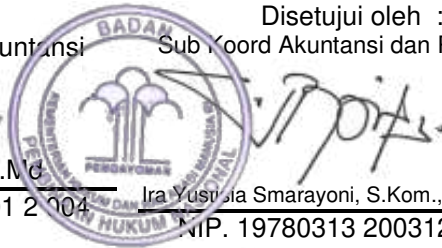


Rizky Awaliyan, A.Md

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 18 Januari 2024

Disetujui oleh :
 Sub Koord Akuntansi dan Pelaporan



Ira Yustitia Smarayoni, S.Kom., SH., M.Si

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 18 Januari 2024

Direkam oleh :
 Petugas Komputer



Tika Fidya Wati

NIP. 19951005 201901 2 001

Tanggal : 18 Januari 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 No. Dokumen : 004
 Tanggal : 02 Februari 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal balik pembayaran Utang Telepon Bulan Desember 2023

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4	√	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32		Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212112	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	972.858	-
2	K	522112	Beban Langganan Telepon	-	972.858

Keterangan:
 Jurnal balik pembayaran Utang Telepon Bulan Desember 2023

Dibuat oleh :
 Petugas Verifikasi/Akuntansi

Rizky Awaliyah, A.Md.
 NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 02 Februari 2024



Disetujui oleh :
 Sub Koord Akuntansi dan Pelaporan

Ira Yustisa Smarayani, S.Kom., SH., M.Si.
 NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 02 Februari 2024

Direkam oleh :
 Petugas Komputer

Tika Fidya Wati
 NIP. 19951005 201901 2 001

Tanggal : 02 Februari 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 No. Dokumen : 005
 Tanggal : 30 Juni 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Balik atas Pengajuan BAST RPATA untuk SPM pembayaran 2023 yang sudah dibayarkan/SP2D di Januari 2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32	v	Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	212191	Utang kepada pihak ketiga lainnya	589.375.493	-
2	K	218111	Utang yang belum diterima tagihannya	-	589.375.493

Keterangan:

Jurnal Balik atas Pengajuan BAST RPATA untuk SPM pembayaran 2023 yang sudah dibayarkan/SP2D di Januari 2024

Dibuat oleh :
Petugas Verifikasi/Akuntansi

Rizky Awaliyah, A.Md.
NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 30 Juni 2024

Disetujui oleh :
Sub Koord Akuntansi dan Pelaporan

Ira Yustisia Smarayoni, S.Kom., SH., M.Si.
NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 30 Juni 2024

Direkam oleh :
Petugas Komputer

Tika Fidya Wati

NIP. 19951005 201901 2 001

Tanggal : 30 Juni 2024



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 No. Dokumen : 006
 Tanggal : 06 Mei 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Balik atas Koreksi Beban atas Kelebihan pembayaran Outsourcing dan telah disetorkan ke kas negara pada 2024

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32	v	Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	12.068.375	-
2	K	115212	Piutang Lainnya	-	12.068.375

Jurnal Balik atas Koreksi Beban atas Kelebihan pembayaran Outsourcing dan telah disetorkan ke kas negara pada 2024

Dibuat oleh : Petugas Verifikasi/Akuntansi
 Disetujui oleh : Sub Koord Akuntansi dan Pelaporan

Direkam oleh : Petugas Komputer

Rizky Awaliyah, A.Md

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 06 Mei 2024



Ira Yustisia Smarayoni, S.Kom., SH., M.Si

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 06 Mei 2024

Tika Fidya Wati

NIP. 19951005 201901 2 001

Tanggal : 06 Mei 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 No. Dokumen : 010
 Tanggal : 06 Mei 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Balik atas penyisihan piutang lainnya atas koreksi beban atas temuan pengembalian belanja barang yang tidak sesuai ketentuan

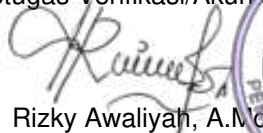
Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32	v	Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang lainnya	60.342	-
2	K	594212	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-piutang lainnya	-	60.342

Jurnal Balik atas penyisihan piutang lainnya atas koreksi beban atas temuan pengembalian belanja barang yang tidak sesuai ketentuan

Dibuat oleh :
Petugas Verifikasi/Akuntansi


Rizky Awaliyah, A.Md

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 06 Mei 2024

Disetujui oleh :
Sub Koord Akuntansi dan Pelaporan


Ira Yustina Smarayoni, S.Kom., SH., M.Si

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 06 Mei 2024

Direkam oleh :
Petugas Komputer


Tika Fidya Wati

NIP. 19951005 201901 2 001

Tanggal : 06 Mei 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 No. Dokumen : 008
 Tanggal : 30 Juni 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Balik atas Koreksi atas kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi renovasi lantai 2 gedung annex, ruang kerja pimpinan dan SDJI

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32	v	Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	115212	Piutang Lainnya	47.080.355	-
2	K	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	-	47.080.355

Jurnal Balik atas Koreksi atas kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi renovasi lantai 2 gedung annex, ruang kerja pimpinan dan SDJI

Dibuat oleh :
Petugas Verifikasi/Akuntansi

Rizky Awaliyah, A.M.

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 30 Juni 2024



Disetujui oleh :
Sub Koord Akuntansi dan Pelaporan

Ira Yustisa Smarayoni, S.Kom., SH., M.Si

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 30 Juni 2024

Direkam oleh :
Petugas Komputer

Tika Fidya Wati

NIP. 19951005 201901 2 001

Tanggal : 30 Juni 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 No. Dokumen : 008
 Tanggal : 06 Mei 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Balik atas Penyisihan Piutang lainnya atas koreksi aset atas kelebihan pembayaran belanja modal yang tidak sesuai ketentuan

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32	V	Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	116212	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	235.402	-
2	K	594212	Belanja Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	-	235.402

Jurnal Balik atas Penyisihan Piutang lainnya atas koreksi aset atas kelebihan pembayaran belanja modal yang tidak sesuai ketentuan

Dibuat oleh : Petugas Verifikasi/Akuntansi
 Disetujui oleh : Sub Koord Akuntansi dan Pelaporan

Direkam oleh : Petugas Komputer

Rizky Awaliyah, A.Md.
NIP. 19830228 200901 2 004



Ira Yustisia Smarayoni, S.Kom., SH., M.Si.
NIP. 19780313 200312 2 001

Tika Fidya Wati
NIP. 19951005 201901 2 001

Tanggal : 06 Mei 2024

Tanggal : 06 Mei 2024

Tanggal : 06 Mei 2024

MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 No. Dokumen : 011
 Tanggal : 30 Juni 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Balik atas Koreksi atas kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi renovasi lantai 2 gedung annex, ruang kerja pimpinan dan SDJI

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		Pendapatan Diterima Di Muka	17		Transfer Masuk
2		Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	18		Transfer Keluar
3		Belanja Dibayar Di Muka	19		Koreksi Beban Aset
4		Belanja Yang Masih Harus Dibayar	20		Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5		Penyisihan Piutang	21		Kas Lainnya di BLU
6		Penghapusan Piutang	22		Uang Muka Belanja
7		Penyusutan Aset	23		Perolehan Aset
8		Kas Di Bendahara Penerimaan	24		Koreksi Piutang/utang
9		Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	25		Hibah Langsung
10		Persediaan	26		
11		Koreksi Antar Beban	27		
12		Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	28		
13		Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	29		
14		Pembentukan Piutang Jangka Panjang	30		Penyesuaian Neraca
15		Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	31		Jurnal Koreksi
16		Pembentukan Piutang Jangka Pendek	32	v	Jurnal Umum

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	47.080.355	-
2	K	115212	Piutang Lainnya	-	47.080.355

Jurnal Balik atas Koreksi atas kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi renovasi lantai 2 gedung annex, ruang kerja pimpinan dan SDJI

Dibuat oleh :
Petugas Verifikasi/Akuntansi



Rizky Awaliyah, A.Md

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 30 Juni 2024

Disetujui oleh :
Sub Koord Akuntansi dan Pelaporan



Ira Yustisa Smarayoni, S.Kom., SH., M.Si

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 30 Juni 2024

Direkam oleh :
Petugas Komputer



Tika Fidya Wati

NIP. 19951005 201901 2 001

Tanggal : 30 Juni 2024



MEMO PENYESUAIAN

Bagian Anggaran : (013) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
 Eselon I : (10) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Satuan Kerja : (409288) Badan Pembinaan Hukum Nasional
 No. Dokumen : 007
 Tanggal : 06 Mei 2024
 Tahun Anggaran : 2024
 Keterangan : Jurnal Balik atas Koreksi atas kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi renovasi lantai 2 gedung annex, ruang kerja pimpinan dan SDJI

Kategori Jurnal Penyesuaian/Jurnal Penyesuaian Neraca/Jurnal Koreksi/Jurnal Umum :

1		17	Transfer Masuk
2	Pendapatan Diterima Di Muka	18	Transfer Keluar
3	Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	19	Koreksi Beban Aset
4	Belanja Dibayar Di Muka	20	Pendapatan dari Alokasi APBN-BLU
5	Belanja Yang Masih Harus Dibayar	21	Kas Lainnya di BLU
6	Penyisihan Piutang	22	Uang Muka Belanja
7	Penghapusan Piutang	23	Perolehan Aset
8	Penyusutan Aset	24	Koreksi Piutang/utang
9	Kas Di Bendahara Penerimaan	25	Hibah Langsung
10	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	26	
11	Persediaan	27	
12	Koreksi Antar Beban	28	
13	Pendapatan Selisih Kurs Belum Terealisasi	29	
14	Beban Selisih Kurs Belum Terealisasi	30	Penyesuaian Neraca
15	Pembentukan Piutang Jangka Panjang	31	Jurnal Koreksi
16	Pelepasan Aset Tetap/Aset Lainnya	32	v Jurnal Umum
	Pembentukan Piutang Jangka Pendek		

No.	D/K	Kode Akun	Uraian Nama Akun	Rupiah Debet	Rupiah Kredit
1	D	425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	47.080.355	-
2	K	115212	Piutang Lainnya	-	47.080.355

Jurnal Balik atas Koreksi atas kelebihan pembayaran pekerjaan konstruksi renovasi lantai 2 gedung annex, ruang kerja pimpinan dan SDJI

Dibuat oleh :
Petugas Verifikasi/Akuntansi

Rizky Awaliyah, A.Md.

NIP. 19830228 200901 2 004

Tanggal : 30 Juni 2024

Disetujui oleh :
Sub Koord Akuntansi dan Pelaporan

Ira Yustisi Smarayoni, S.Kom., SH., M.Si

NIP. 19780313 200312 2 001

Tanggal : 30 Juni 2024

Direkam oleh :
Petugas Komputer

Tika Fidya Wati

NIP. 19951005 201901 2 001

Tanggal : 30 Juni 2024



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



LAMPIRAN

REALISASI

BANTUAN HUKUM

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA BANTUAN HUKUM DI KANTOR WILAYAH
PERIODE 01 JANUARI S.D 30 JUNI 2024**

No	KANWIL	LAYANAN BANTUAN HUKUM PERSEORANGAN (LITIGASI)				LAYANAN BANTUAN HUKUM KEL. MASYARAKAT (NON LITIGASI)				TOTAL LAYANAN BANTUAN HUKUM			
		PAGU	REALISASI	%	SISA	PAGU	REALISASI	%	SISA	PAGU	REALISASI	%	SISA
1	BANGKA BELITUNG	576.000.000	441.000.000	76,56	135.000.000	85.360.000	60.485.000	70,86	24.875.000	661.360.000	501.485.000	75,83	159.875.000
2	GORONTALO	720.000.000	549.000.000	76,25	171.000.000	106.700.000	44.770.000	41,96	61.930.000	826.700.000	593.770.000	71,82	232.930.000
3	SULAWESI BARAT	464.000.000	346.000.000	74,57	118.000.000	74.690.000	38.850.000	52,01	35.840.000	538.690.000	384.850.000	71,44	153.840.000
4	SULAWESI TENGAH	1.216.000.000	803.000.000	66,04	413.000.000	202.730.000	117.567.500	57,99	85.162.500	1.418.730.000	920.567.500	64,89	498.162.500
5	JAMBI	1.320.000.000	903.000.000	68,41	417.000.000	213.400.000	58.970.000	27,63	154.430.000	1.533.400.000	961.970.000	62,73	571.430.000
6	MALUKU UTARA	712.000.000	514.970.000	72,33	197.030.000	138.710.000	11.870.000	8,56	126.840.000	850.710.000	526.840.000	61,93	323.870.000
7	KALIMANTAN SELATAN	536.000.000	344.000.000	64,18	192.000.000	85.360.000	31.423.000	36,81	53.937.000	621.360.000	375.423.000	60,42	245.937.000
8	NUSA TENGGARA BARAT	1.416.000.000	849.000.000	59,96	567.000.000	266.750.000	145.301.000	54,47	121.449.000	1.682.750.000	994.301.000	59,09	688.449.000
9	BANTEN	1.576.000.000	945.400.000	59,99	630.600.000	245.410.000	65.580.000	26,72	179.830.000	1.821.410.000	1.010.980.000	55,51	810.430.000
10	BENGKULU	1.000.000.000	577.000.000	57,70	423.000.000	170.720.000	64.059.000	37,52	106.661.000	1.170.720.000	641.059.000	54,76	529.661.000
11	KALIMANTAN TIMUR	1.400.000.000	809.000.000	57,79	591.000.000	224.070.000	76.715.000	34,24	147.355.000	1.624.070.000	885.715.000	54,54	738.355.000
12	RIAU	1.072.000.000	619.000.000	57,74	453.000.000	181.390.000	33.940.000	18,71	147.450.000	1.253.390.000	652.940.000	52,09	600.450.000
13	SUMATERA UTARA	2.944.000.000	1.646.400.000	55,92	1.297.600.000	533.500.000	161.055.000	30,19	372.445.000	3.477.500.000	1.807.455.000	51,98	1.670.045.000
14	JAWA TIMUR	5.296.000.000	2.808.000.000	53,02	2.488.000.000	1.088.340.000	509.570.000	46,82	578.770.000	6.384.340.000	3.317.570.000	51,96	3.066.770.000
15	SULAWESI SELATAN	2.400.000.000	1.333.000.000	55,54	1.067.000.000	501.490.000	124.400.000	24,81	377.090.000	2.901.490.000	1.457.400.000	50,23	1.444.090.000
16	KALIMANTAN BARAT	360.000.000	186.000.000	51,67	174.000.000	53.350.000	16.070.000	30,12	37.280.000	413.350.000	202.070.000	48,89	211.280.000
17	PAPUA BARAT	360.000.000	184.000.000	51,11	176.000.000	53.350.000	10.290.000	19,29	43.060.000	413.350.000	194.290.000	47,00	219.060.000
18	SULAWESI TENGGARA	1.256.000.000	667.000.000	53,11	589.000.000	192.060.000	12.035.000	6,27	180.025.000	1.448.060.000	679.035.000	46,89	769.025.000
19	SUMATERA SELATAN	1.024.000.000	514.000.000	50,20	510.000.000	192.060.000	53.243.500	27,72	138.816.500	1.216.060.000	567.243.500	46,65	648.816.500
20	DI. YOGYAKARTA	1.680.000.000	823.000.000	48,99	857.000.000	298.760.000	94.680.000	31,69	204.080.000	1.978.760.000	917.680.000	46,38	1.061.080.000
21	KEPULAUAN RIAU	504.000.000	243.000.000	48,21	261.000.000	74.690.000	24.120.000	32,29	50.570.000	578.690.000	267.120.000	46,16	311.570.000
22	JAWA BARAT	3.968.000.000	2.088.000.000	52,62	1.880.000.000	778.910.000	91.320.000	11,72	687.590.000	4.746.910.000	2.179.320.000	45,91	2.567.590.000
23	KALIMANTAN TENGAH	648.000.000	270.000.000	41,67	378.000.000	96.030.000	61.815.000	64,37	34.215.000	744.030.000	331.815.000	44,60	412.215.000
24	NUSA TENGGARA TIMUR	1.080.000.000	521.000.000	48,24	559.000.000	160.050.000	25.750.000	16,09	134.300.000	1.240.050.000	546.750.000	44,09	693.300.000
25	SUMATERA BARAT	896.000.000	406.000.000	45,31	490.000.000	138.710.000	43.374.000	31,27	95.336.000	1.034.710.000	449.374.000	43,43	585.336.000
26	PAPUA	432.000.000	184.000.000	42,59	248.000.000	64.020.000	27.040.000	42,24	36.980.000	496.020.000	211.040.000	42,55	284.980.000
27	BALI	528.000.000	235.000.000	44,51	293.000.000	128.040.000	35.325.000	27,59	92.715.000	656.040.000	270.325.000	41,21	385.715.000
28	SULAWESI UTARA	680.000.000	309.000.000	45,44	371.000.000	106.700.000	8.810.000	8,26	97.890.000	786.700.000	317.810.000	40,40	468.890.000
29	LAMPUNG	1.584.000.000	611.000.000	38,57	973.000.000	234.740.000	81.350.000	34,66	153.390.000	1.818.740.000	692.350.000	38,07	1.126.390.000
30	MALUKU	536.000.000	221.000.000	41,23	315.000.000	85.360.000	10.005.000	11,72	75.355.000	621.360.000	231.005.000	37,18	390.355.000
31	ACEH	1.888.000.000	645.000.000	34,16	1.243.000.000	341.440.000	41.270.000	12,09	300.170.000	2.229.440.000	686.270.000	30,78	1.543.170.000
32	DKI JAKARTA	3.320.000.000	1.082.000.000	32,59	2.238.000.000	608.190.000	117.444.000	19,31	490.746.000	3.928.190.000	1.199.444.000	30,53	2.728.746.000
33	JAWA TENGAH	4.480.000.000	979.800.000	21,87	3.500.200.000	768.240.000	87.210.000	11,35	681.030.000	5.248.240.000	1.067.010.000	20,33	4.181.230.000
GRAND TOTAL		47.872.000.000	23.656.570.000	49,42	24.215.430.000	8.493.320.000	2.385.707.000	28,09	6.107.613.000	56.365.320.000	26.042.277.000	46,20	30.323.043.000

* Data Bag. Keuangan BPHN (Versi Data OM SPAN DJPB)




BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



LAMPIRAN

HASIL & TINDAK LANJUT TEMUAN INSPEKTORAT JENDERAL DAN BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

	BAHAN DISKUSI PEMERIKSAAN TERINCI ATAS LKKL KEMENKUMHAM TA 2023	Halaman	:	1
		Satker	:	BPHN
		Direviu Oleh	:	

Terdapat Kelebihan Pembayaran Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lantai 2 Gedung Annex, Ruang Kerja Pimpinan Gedung SDJI dan Ruang Kerja Pimpinan Gedung Induk Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional.

Kondisi

Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) pada Tahun Anggaran (TA) 2023 telah menganggarkan dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 untuk kegiatan belanja modal penambahan nilai gedung dan bangunan renovasi gedung dan bangunan seluas 1800 m² sebesar Rp3.348.248.000,00 dan telah direalisasikan sebesar Rp2.744.897.000,00 atau 81,98% dari alokasi anggarannya.


Pekerjaan Konstruksi berupa renovasi lantai 2 gedung annex, ruang kerja pimpinan SDJI, dan ruang kerja pimpinan gedung induk di TA 2023 dilaksanakan oleh PT. Aisha Bangun Raya (PT. ABR) berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor PHN.1-PB.02.01-1093 tanggal 18 September 2023 senilai Rp2.744.897.000,00 (termasuk PPN). Pelaksanaan pekerjaan renovasi Rumah Negara di Jalan Swadharma tersebut telah dinyatakan selesai sesuai dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor PHN.1.PB.02.01-1348 1 Desember 2023. Adapun jangka waktu pelaksanaan kontrak pemeliharaan gedung adalah 75 hari kalender dan telah dibayar lunas sesuai SP2D terakhir nomor 231391303054394 tanggal 12 Desember 2024.

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen Surat Perjanjian Kontrak berikut laporan pelaksanaannya, Dokumen pembayaran, Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK), BAST, dan hasil pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama dengan pihak penyedia dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menunjukkan bahwa masih terdapat kelebihan pembayaran sebesar Rp47.080.353,29 (rincian perhitungan pada *Lampiran*).

Kriteria

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan:

- a. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 54 ayat (2) yang menyatakan bahwa “Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya”;
- b. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah :
 - 1) Pasal 4 huruf a. yang menyatakan bahwa ”Pengadaan Barang/Jasa bertujuan untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, jumlah, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.”;
 - 2) Pasal 6 yang menyatakan bahwa ”Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut: a. efisien; b. efektif; c. transparan; d. terbuka; e. bersaing; f. adil; dan g. akuntabel”;

	BAHAN DISKUSI PEMERIKSAAN TERINCI ATAS LKKL KEMENKUMHAM TA 2023	Halaman :	2
		Satker :	BPHN
		Direviu Oleh :	

- 3) Pasal 7 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut:
 - a) huruf a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b) huruf f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara"; dan
- c. Kontrak masing-masing pekerjaan, Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK), Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK), dan dokumen lain yang merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari kontrak.

Akibat

Permasalahan tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas kekurangan volume pekerjaan sebesar Rp47.080.353, 29.

Sebab

Kondisi tersebut disebabkan oleh:

- a. Kuasa Pengguna Anggaran pada BPHN kurang optimal dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan;
- b. PPK BPHN tidak cermat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan pelaksanaan dan pembayaran pekerjaan; dan
- c. PT. ABR tidak melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan yang telah diperjanjikan dan disepakati dalam dokumen kontrak.

Tanggapan Instansi

(Terlampir)

Klarifikasi Hasil Pemeriksaan Fisik

Nama pekerjaan : Pekerjaan Konstruksi Renovasi Lantai 2 Gedung Annex, Ruang Kerja Pimpinan Gedung SDJI dan Ruang Kerja Pimpinan Gedung Induk Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Pelaksana Pekerjaan : PT Aisha Bangun Raya
 Nomor kontrak : PHN.1-PB.02.01-1093
 Nilai Kontrak : Rp2.744.897.000,00
 Jangka Waktu Kontrak : 75 Hari kalender

No	Item Pekerjaan	Sat	Harga Satuan MC-100 (Rp)	Harga Satuan Terkoreksi (Rp)	Volume MC-100	Volume Terpasang	Nilai MC-100 (Rp)	Nilai Terpasang (Rp)	Lebih Bayar (Rp)
a	b	c	d	e	f	g	h = dxf	i = exg	j = h-i
SMKK									
1	Asuransi Kerja	Ls	Rp 7.500,000	Rp 7.500,000	1,00	-	7.500,000,00	-	Rp 7.500,000,00
SDJI									
Pekerjaan Bongkaran Eksisting									
1	Pek. Bongkaran Plafond	m2	Rp 40.480	Rp 40.480	531,94	528,51	21.532.931,20	21.394.084,80	Rp 138.846,40
Plafond									
1	Pek. Rangka Plafond Hollow 4/4	m2	Rp 233,030	Rp 229,070	537,17	485,04	125,176,725,10	111,108,112,80	Rp 14,068,612,30
2	Pek. Plafond Gypsum Board 9mm	m2	Rp 89,755	Rp 89,755	524,99	485,04	47,120,238,05	43,534,544,02	Rp 3,585,694,03
3	Pek. Pengecatan Plafond	m2	Rp 45,762	Rp 45,762	531,70	485,04	24,331,527,79	22,196,284,07	Rp 2,135,243,72
Pekerjaan Penutup Lantai									
1	Pekerjaan Screeding Lantai	m2	Rp 161,976	Rp 161,976	179,68	177,68	29,103,847,68	28,779,895,68	Rp 323,952,00
Pekerjaan Lain-Lain									
1	Pekerjaan Roller Blind	m2	Rp 670,106,25	Rp 670,106,25	38,93	28,61	26,087,236,31	19,171,739,81	Rp 6,915,496,50
Pekerjaan Dinding+Plesteran Ruang Pimpinan									
1	Dinding Gypsum Rangka Hollow	m2	Rp 246,036,78	Rp 246,036,78	15,55	13,48	3,825,871,93	3,316,575,79	Rp 509,296,13
ANNEX									
PEKERJAAN AREA RUANG IPT UTAMA DAN RUANG ARSIP									
Plafond									
1	Pek. Rangka Plafond Hollow 4/4	m2	Rp 233,030	Rp 229,070	107,10	106,31	24,957,513,00	24,352,431,70	Rp 605,081,30
2	Pek. Plafond Gypsum Board 9mm	m2	Rp 89,755	Rp 89,755	103,67	102,81	9,304,853,58	9,227,664,67	Rp 77,188,91
3	Pek. Pengecatan Plafond	m2	Rp 45,762	Rp 45,762	103,67	102,81	4,744,121,66	4,704,766,55	Rp 39,355,11
Pekerjaan Lain-Lain									
1	Pekerjaan Roller Blind	m2	Rp 670,106,25	Rp 670,106,25	20,00	18,50	13,402,125,00	12,396,965,63	Rp 1,005,159,38
PEKERJAAN RUANG IPT UTAMA									
Plafond									
1	Pek. Rangka Plafond Hollow 4/4	m2	Rp 233,030	Rp 229,070	67,84	41,72	15,808,755,20	9,556,800,40	Rp 6,251,954,80
2	Pek. Plafond Gypsum Board 9mm	m2	Rp 89,755	Rp 89,755	67,56	41,72	6,063,816,99	3,744,559,58	Rp 2,319,257,42
3	Pek. Pengecatan Plafond	m2	Rp 45,762	Rp 45,762	67,57	41,72	3,092,122,32	1,909,180,63	Rp 1,182,941,50
4	Pekerjaan Drop Ceiling	m	Rp 270,688	Rp 270,688	43,28	41,72	11,715,390,92	11,293,117,13	Rp 422,273,79
Total									Rp 47,080,353,28

Pembulatan Rp **47,080,355,00**

Pemeriksa,

 NIP.

PP

 NIP.

Jakarta, 22 April 2024

Pelaksana,

 PT. AISHA BANGUN RAYA

PT. AISHA BANGUN RAYA



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240502303698
Tanggal Billing : 02-05-2024 15:41:14
Tanggal Kedaluwarsa : 09-05-2024 15:41:14
Tanggal Bayar : 03-05-2024 11:07:40
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : PT. TOKOPEDIA
Channel Bayar : *Virtual Account*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara BPHN
Kementerian/Lembaga : **013** - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I : **10** - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja : **409288** - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Total Disetor : 47.080.355 (IDR)
Terbilang : *Empat Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Ribu Tiga Ratus Lima Puluh Lima (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **001693503525**
NTPN : **2A2DE6U8EUGJ5AUI**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 47.080.355 (IDR)
Keterangan : Pengembalian kelebihan bayar pekerjaan konstruksi renovasi lt.2 Gd annex, ruang kerja pimpinan Gd.SJDI dan ruang kerja pimpinan Gd. induk kantor BPHN



Selamat, Transaksi Penerimaan Negara Online Anda BERHASIL

1 pesan

Tokopedia <noreply@tokopedia.com>
Kepada: slowlyaditya@gmail.com

Jum, 3 Mei 2024 pukul 11.07






Bukti Penerimaan Negara - Penerimaan Negara Bukan Pajak

Tanggal dan Jam Bayar	03/05/2024 11:07:40
Tanggal Buku	03/05/2024
Kode Cabang bank	020601
NTL	001693503525
NTPN	2A2DE6U8EUGJ5AUI
STAN	009272
Kode Billing	820240502303698
Nama Wajib Bayar	Bendahara BPHN
K/L	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409288
Jumlah	Rp47.080.355
Mata Uang	IDR
Terbilang	EMPAT PULUH TUJUH JUTA DELAPAN PULUH RIBU TIGA RATUS LIMA PULUH LIMA RUPIAH
Nomor Invoice	IVR/20240503/XXIV/V/2054055895

This is a computer generated message and requires no signature. Informasi ini hasil cetakan komputer dan tidak memerlukan tanda tangan

Bayar berbagai macam tagihan jadi mudah.
Manfaatkan fitur Langganan!




TV Kabel
Voucher Game
Air PDAM
Pascabayar

Email ini dibuat secara otomatis. Mohon tidak mengirimkan balasan ke email ini.

Hati-hati terhadap pihak yang mengaku dari Tokopedia, membagikan voucher belanja, atau meminta data pribadi. Tokopedia tidak pernah meminta password dan data pribadi melalui email, pesan pribadi, maupun channel lainnya. Untuk semua email dengan link dari Tokopedia, pastikan alamat URL di browser sudah di alamat tokopedia.com bukan alamat lainnya. Jaga keamanan akun Anda, baca panduannya di [sini](#)

Download Aplikasi Tokopedia




Ikuti Kami



Jika butuh bantuan, gunakan halaman [Kontak Kami](#)

© 2009-2024, PT Tokopedia

Click [here](#) to unsubscribe

	BAHAN DISKUSI PEMERIKSAAN INTERIM ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Halaman	:	1
		Satker	:	BPHN
		Direviu Oleh	:	

Penyediaan Fasilitas Kendaraan Roda Empat dari BMN dan Sewa Tidak Sesuai Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) dan Standar Biaya Masukan (SBM)

Kondisi

Sesuai dengan SBSK, fasilitas kendaraan jabatan diberikan kepada pejabat setingkat menteri, wakil menteri, pejabat struktural eselon I dan eselon II. Untuk tingkat unit kerja setingkat eselon II dan III juga diberikan kendaraan operasional. Struktur organisasi Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) adalah sebagai berikut:

- a. Satu pejabat Eselon Ia;
- b. Lima pejabat Eselon II; dan
- c. Tiga pejabat Eselon III.

Hasil pemeriksaan atas penyediaan fasilitas kendaraan dinas jabatan dan operasional pada BPHN diketahui bahwa jumlah kendaraan BMN sebanyak 24 unit senilai Rp5.301.337.450,00 dan jumlah kendaraan sewa sebanyak 9 unit senilai Rp1.215.798.000,00.

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

a. Kendaraan BMN tidak sesuai peruntukan

Meskipun jumlah BMN telah tersedia sebanyak 24 unit namun yang sesuai diperuntukkan hanya sebanyak 11 unit senilai Rp2.752.618.390,00, yaitu diperuntukkan bagi 2 kendaraan pejabat (Kepala BPHN dan satu Eselon II), serta 9 kendaraan operasional.


Sedangkan sisanya sebanyak 13 unit senilai Rp2.548.719.060,00 tidak sesuai peruntukan karena digunakan sebagai kendaraan operasional yang tidak sesuai SBSK.

b. Sewa Kendaraan Operasional melebihi Standar Biaya Masukan Tahun 2023 sebesar Rp78.228.000,00

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Badan Pembinaan Hukum Nasional TA 2023 menyajikan anggaran belanja barang sebesar Rp27.055.368.000,00 dengan realisasi sebesar Rp26.759.520.758,00 (98,91%). Realisasi tersebut salah satunya adalah untuk kegiatan belanja Pengadaan Sewa Kendaraan Pejabat Eselon I, Eselon II dan Operasional Kantor BPHN TA 2023 sebesar Rp1.059.798.000,00

Hasil pemeriksaan atas penyediaan fasilitas kendaraan dinas jabatan dan operasional diketahui bahwa jumlah kendaraan BMN sebanyak 24 unit senilai Rp5.301.337.450,00 dan jumlah kendaraan sewa sebanyak 9 unit senilai Rp1.215.798.000,00.

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan terdapat penyediaan kendaraan melalui sewa secara kontraktual yang peruntukkan untuk kendaraan operasional yang sesuai dengan SBSK namun tarif sewanya melebihi tarif yang tercantum dalam SBM Tahun 2023 yaitu sebanyak 1 unit dengan sewa selama 12 bulan dengan harga sewa per bulan

	BAHAN DISKUSI PEMERIKSAAN INTERIM ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Halaman	:	2
		Satker	:	BPHN
		Direviu Oleh	:	

sebesar Rp13.209.000,00 (termasuk PPN), sedangkan menurut SBM sewa per bulan untuk kendaraan operasional sebesar Rp6.690.000,00, sehingga tarif sewa yang melebihi SBM sebesar Rp62.520.000,00 dengan rincian sebagai berikut.


Tabel 1. Sewa Kendaraan Operasional Kantor Melebihi SBM

No.	Uraian	Jumlah (Rp)
1.	Harga Sewa Per Bulan (Sebelum PPN)	11.900.000,00
2.	Jumlah Bulan	12 Bulan
3.	Jumlah yang dibayarkan (Sebelum PPN) (1 x 2)	142.800.000,00
4.	Harga Sewa Per Bulan Seharusnya (SBM 2023)	6.690.000,00
5.	Jumlah yang dibayarkan seharusnya (2 x 4)	80.280.000,00
	Total Selisih (3 – 5)	62.520.000,00

Kriteria

Kondisi tersebut di atas tidak sesuai dengan:

- a. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara pada Pasal 54 ayat (2) yang menyatakan bahwa Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab secara formal dan material kepada Pengguna Anggaran atas Pelaksanaan kegiatan yang berada dalam penguasaannya;
- b. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tanggal 16 Maret 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 pada:
 - 1) Pasal 11 ayat (1) huruf i yang menyatakan bahwa PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c memiliki tugas mengendalikan kontrak;
 - 2) Pasal 53 Nomor (4) huruf b yang menyatakan bahwa pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan/termin;
 - 3) Pasal 57 ayat (2) yang menyatakan bahwa PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang/jasa yang diserahkan;
- c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang standar barang dan standar kebutuhan barang milik negara pada lampiran II yang menyatakan bahwa standar kendaraan jabatan maupun operasional pada satuan kerja Eselon I/ Kantor Pusat diberikan sesuai jumlah pejabat Eselon III dan Kendaraan Operasional dapat berasal dari Kendaraan Jabatan yang ditetapkan untuk dialihfungsikan, dengan

	BAHAN DISKUSI PEMERIKSAAN INTERIM ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023 PADA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA	Halaman	:	3
		Satker	:	BPHN
		Direviu Oleh	:	

ketentuan salah satunya Kendaraan Jabatan telah berumur 5 (lima) tahun sejak tanggal perolehan; dan

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2023 pada lampiran angka 37.3 yang menyatakan bahwa Biaya sewa kendaraan operasional kantor dan/atau lapangan berupa minibus untuk wilayah DKI Jakarta sebesar Rp6.690.000,00 per bulan.

Akibat

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pembayaran sewa kendaraan yang melebihi SBM sebesar Rp62.520.000,00.

Sebab

Kondisi tersebut disebabkan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen satker terkait tidak mempedomani peraturan yang berlaku terkait penyediaan fasilitas kendaraan kepada pejabat dan pegawai Kemenkumham melalui sewa kendaraan.

Tanggapan Instansi

(Terlampir)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240515720404
Tanggal Billing : 15-05-2024 12:59:56
Tanggal Kedaluwarsa : 22-05-2024 12:59:56
Tanggal Bayar : 15-05-2024 14:28:40
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : *Mobile Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara BPHN
Kementerian/Lembaga : **013** - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I : **10** - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja : **409288** - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Total Disetor : 62.520.000 (IDR)
Terbilang : *Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Dua Puluh Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **000000727147**
NTPN : **7F3E561QV3UJHP6K**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 62.520.000 (IDR)
Keterangan : Pengembalian kelebihan pembayaran kendaraan operasional sewa TA 2023 pada kantor BPHN



Ditjen Anggaran Transaksi Berhasil

Tanggal Transaksi	15/05/2024
Waktu Transaksi	14:28:40 WIB
Tanggal Buku	15/05/2024
Institusi	Penerimaan Negara
NTB	000000727147
STAN	988268
Kode Billing	820240515720404
Nama Wajib Bayar	BENDAHARA BPHN
Kementerian / Lembaga	013
Unit Eselon I	10
Satuan Kerja	409288
Nominal Tagihan	62.520.000
Mata Uang	IDR
NTPN	7F3E561QV3UJHP6K
<hr/>	
Total Pembayaran	Rp62.520.000
Terbilang	enam puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah
Nomor Rekening	*****727

Selisih Nilai Pembayaran Biaya Tenaga Kerja/Upah dengan Nilai SP

Uraian Pembayaran	Satuan	Nilai	Jumlah	Total
Biaya Tenaga Kerja/Upah dalam SP				619.735.138,00
PPN 11%			9.863.700,00	
Manajemen fee			89.669.998,00	
Gaji/Upah per bulan			480.600.000,00	
Pakaian Kerja:				
- Seragam	2,00		-	
- Sepatu	1,00		-	
BPJS Perusahaan			27.533.065,00	607.666.763,00
Seilsih Lebih				12.068.375,00

	Detail Real Payroll		Bukti Transfer Gaji	Bukti Bayar BPJS	
	Rincian Gaji	Potongan BPJS	Potongan PPH21	BPJS KES	BPJS TK
Nov					
Des					
	-	-	-	-	-

Total Bayar BPJS	41.627.065,00
Dari Personil	14.094.000,00
Dari Perusahaan	27.533.065,00



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240327603945
Tanggal Billing : 27-03-2024 08:15:32
Tanggal Kedaluwarsa : 03-04-2024 08:15:32
Tanggal Bayar : 28-03-2024 14:44:48
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : BANK MANDIRI
Channel Bayar : *Mobile Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara BPHN
Kementerian/Lembaga : **013** - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I : **10** - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja : **409288** - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Total Disetor : 12.068.375 (IDR)
Terbilang : *Dua Belas Juta Enam Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **252600874623**
NTPN : **9D5EA55DF96JNTN9**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 12.068.375 (IDR)
Keterangan : Pengembalian kelebihan/selisih pembayaran iuran BPJS Kesehatan terkait pengadaan outsourcing Tahun 2023



Bayar

Pembayaran Berhasil

28 Mar 2024 - 15:44:48 WIB - No. Ref: 820240327603945

Periode: Jasa

Pajak/PNBP/Cukai

820240327603945

Detail Pembayaran

Nominal Pembayaran	Rp 12.068.375
Biaya Transaksi	Gratis
Total Transaksi	Rp 12.068.375

Rekening Sumber

CAROLINE NURANI CICI

Bank Mandiri -8083

Detail Tagihan

BUKTI PENERIMAAN NEGARA
Penerimaan Negara Bukan Pajak
NEGARA

Tanggal dan Jam Bayar 28/03/2024 14:44:48

Tanggal Buku 28/03/2024

Kode Cabang Bank 008

NTB 252600874623

NTPN  9D5EA55DF96JNTN9

STAN 874623

Kode Billing 820240327603945

Nama Wajib Bayar Bendahara BPHN

Kementerian / Lembaga 013

Unit Eselon I 10

Satuan Kerja 409288

Jumlah Setoran Rp. 12.068.375,00

Mata Uang IDR

dua belas juta enam puluh delapan ribu tiga ratus
tujuh puluh lima rupiah

Informasi ini hasil cetak computer dan tidak
memerlukan tanda tangan



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI
DKI JAKARTA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 JAKARTA V

JL. T. B. SIMATUPANG KAV. 67, RAGUNAN, PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN;
TELEPON (021) 78832427, 78832430-34; FAKSIMILI (021) 78832428-29;
SUREL : kppn.jkt5@kemenkeu.go.id; LAMAN : www.djpb.kemenkeu.go.id/kppn/jakarta5

Nomor : S-1438/KPN.1205/2024 12 Juli 2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Koreksi Transaksi Penerimaan Negara Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288)

Yth. Kuasa Pengguna Anggaran Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288)
Jalan Mayjend Sutoyo No.10, Cililitan Jakarta Timur 13640

Berdasarkan Surat Kuasa Pengguna Anggaran Satker Badan Pembinaan Hukum Nasional (409288) Nomor PHN.1-KU.01.01-612 tanggal 12 Juli 2024 hal Permohonan Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara, diberitahukan bahwa telah dilakukan koreksi penerimaan negara sebagaimana pada surat dimaksud.

Bersama ini kami lampirkan pelaksanaan koreksi yang telah dituangkan dalam Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara.

Selanjutnya dalam rangka menjaga Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM) pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta V, kami senantiasa berkomitmen untuk menjaga tata kelola pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas layanan dengan berprinsip pada nilai-nilai Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan. Kami mohon dukungan dan partisipasi dalam rangka menjaga ZI-WBBM tersebut.

Demikian disampaikan, atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plh. Kepala Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tipe A1
Jakarta V



Ditandatangani secara elektronik
Samsul Arifin





NOTA PERBAIKAN TRANSAKSI PENERIMAAN NEGARA

Nomor : 139/06/2024
Tanggal : 12-JUL-2024
Tahun Anggaran : 2024

KPPN : Jakarta V
Kode Satker : 409288 BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No	NTPN No.Penerimaan	Tanggal Buku	Jenis Dokumen	Mata Uang	COA Awal	Deskripsi (Satker & Akun)	Nilai Sebelum Koreksi	COA Baru	Deskripsi (Satker & Akun)	Nilai Setelah Koreksi
1	2A2DE6U8EUGJ5AUI/1	28-JUN-2024	SSBP	IDR	409288.139.425912.0000000. 0000000.D000000001.M9111 .0.0000.2.000000.000000	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL.Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	47.080.355,00	409288.139.425913.0000000. 0000000.D000000001.M9111 .0.0000.2.000000.000000	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL.Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	47.080.355,00

Jakarta , 12 Juli 2024

Menyetujui
Plh. Kepala Kantor

Plh Kepala Seksi Bank



Ditandatangani secara elektronik
Samsul Arifin_
NIP.197401281995111001



Ditandatangani secara elektronik
Agustina Suswardani Kanti Astuti_
NIP.197108291992012001



**BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN
PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)**

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240422924949
 Tanggal Billing : 22-04-2024 10:55:56
 Tanggal Kedaluwarsa : 29-04-2024 10:55:56
 Tanggal Bayar : -
 Bank/Pos/Fintech Bayar : -
 Channel Bayar : -
 Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Kanwil Bengkulu
 Kementerian/Lomboka : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
 Unit Eselon I : 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
 Satuan Kerja : 409177 - KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM BENGKULU
 Total Disetor : 290.000 (IDR)
 Terbilang : Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu (IDR)
 Status : Belum Dibayar
 NTB : -
 NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
 Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
 Jumlah Setoran : 290.000 (IDR)
 Keterangan : Pengembalian Biaya Transport Luar Kota ke Arga Makmur Tahun 2022 an. CIK YANG (Temuan BPK)

Cet

PT POS INDONESIA (PERSERO)
Kantor Kp. BENGKULU 38000

TANDA TERIMA
SETORAN PAJAK (PNP BILLING)

567521298

Sal, billing
embayaran

Persepsi, ATM,
bank fintech.
Kode

Tanggal : 23-04-2024 16:22:19

No.Resi : 38000-94/2024/812271 Petugas : 550057898

Setor
setika Anda
masukkan

Tanggal Buku : 2024-04-04
Kode Cabang Pos : 000700

NTPN : 928133162219
NTPN : 09ADD7ALLPOJRSKL
STAN : 928133

Sal
Sal channel.
Sal anda.

Tgl & Jam Bayar : 23-04-2024 16:22:19

Kode Billing : 820240422924949

Nama Wajib Bayar: Bendahara Kanwil Bengkulu

K / L : 013

Unit Eselon I : 10

Kode Satker : 409177

Jumlah Setoran : Rp. 290.000 Mata Uang : IDR

Sal
di 14090.
Ditjen

Terbilang : (Dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

KANTOR POS

POS INDONESIA

SIMPONI



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan, Jakarta Timur 13640
Telp. 021-8091908, Faks. 021-8002265/8011753
Website: www.bphn.go.id

Nomor : PHN.5-HN.04.03-67 27 Maret 2024
Lampiran : -
Perihal : Pemeriksaan Terhadap Dokumen Pencairan Anggaran Bantuan Hukum
Tahun Anggaran 2023

**Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Provinsi Jawa Timur
di Tempat**

Berdasarkan hasil pemantauan program prioritas nasional kegiatan layanan bantuan hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional TA. 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sesuai surat Nomor ITJ-PW.03.04-30 tanggal 8 Maret 2024. Hasil pemantauan tersebut dari Aspek Implementasi terdapat catatan adanya dugaan duplikasi pencairan anggaran bantuan hukum atas permohonan pencairan yang disampaikan oleh organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di wilayah Provinsi Jawa Timur. Adapun dokumen pencairan yang diduga terdapat duplikasi yaitu an. BUSEN dan MUKHAMMAD HAMDANI yang dimohonkan oleh 2 (dua) PBH yang berbeda dengan status diterima proses pencairan anggarannya.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil pemantauan Inspektorat Jenderal, kami harapkan dengan hormat Panitia Pengawas Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur melakukan penelusuran terhadap dugaan duplikasi pencairan anggaran bantuan hukum tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional paling lambat tanggal 05 April 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

**Sofyan
NIP. 19641024 198503 1 002**

Tembusan Yth. :

1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional;
4. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Jawa Timur.



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

Jalan Kayoon No. 50-52 Surabaya

Telepon : (031) 5340707, Faksimilie : (031) 5345496

Laman : <http://jatim.kemenkumham.go.id>, surel: kanwiljatim@kemenkumham.go.id.

Nomor : W15-HN.04.03 - 135

03 April 2024

Sifat : Penting

Lampiran : -

Hal : Laporan Tindak Lanjut Hasil Pemantauan Inspektorat Jenderal
Tentang Adanya Duplikasi Pencairan Anggaran Bankum TA. 2023

Yth. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Cq. Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum

Di - Tempat

Menindaklanjuti Surat dari Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Nomor PHN.5-HN.04.03-67 Tanggal 27 Maret 2024 Perihal Pemeriksaan Terhadap Dokumen Pencairan Anggaran Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023, Tim Panwasda Bantuan Hukum telah melakukan penelusuran dan pemeriksaan atas adanya duplikasi pencairan anggaran bantuan hukum terhadap Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang menerima permohonan An. Busen dan Mukhammad Hamdani. Tim Panwasda melakukan penelusuran pada aplikasi Sid Bankum dan dokumen pencairan dan menemukan adanya duplikasi pencairan anggaran bantuan hukum An. Busen dan Mukhammad Hamdani dengan data sebagai berikut :

An. BUSEN

No.	Nama PBH	Nomor/Tanggal Permohonan	Nama Penerima Bankum	Tahap	Nomor/Tanggal BAST
1.	Yayasan IKADIN Jember	00329.35.01.PID.BPHN.2023/ 14 Maret 2023	BUSEN	Penyidikan	00817.35.1188.BAST.2023/ 24 Maret 2023
2.	BPBH Fakultas Hukum UNEJ	00913.35.01.PID.BPHN.2023/ 13 Juli 2023	BUSEN	Penyidikan	03624.35.1182.BAST.2023/ 27 Juli 2023

An. MUKHAMMAD HAMDANI

No.	Nama PBH	Nomor/Tanggal Permohonan	Nama Penerima Bankum	Tahap	Nomor/Tanggal BAST
1.	BBH Juris Law Firm	00407.35.01.PID.BPHN.2023/ 25 Maret 2023	MUKHAMMAD HAMDANI	Penyidikan	01449.35.1710.BAST.2023/ 11 April 2023
2.	LBH Anak Bangsa Mandiri	00564.35.01.PID.BPHN.2023/ 29 April 2023	MUKHAMMAD HAMDANI	Penyidikan	02328.35.2322.BAST.2023/ 30 Mei 2023
3.	LBH Anak Bangsa Mandiri	00829.35.01.PID.BPHN.2023/ 22 Juni 2023	MUKHAMMAD HAMDANI	Persidangan	04021.35.2322.BAST.2023/ 15 Agustus 2023

Berdasarkan hasil penelusuran dan pemeriksaan oleh Tim Panwasda kami lampirkan dokumen pemeriksaan sebagai berikut :

1. Surat Pemanggilan PBH Yayasan IKADIN Jember, BPBH Fakultas Hukum Universitas Jember, BBH Juris Law Firm dan LBH Anak Bangsa Mandiri;
2. Berita Acara Pemeriksaan No. W15-HN.04.03-122 Tanggal 03 April 2024
3. Berita Acara Pemeriksaan No. W15-HN.04.03-123 Tanggal 03 April 2024
4. Bukti Pengembalian Pencairan Anggaran Bantuan Hukum :
 - Bukti Pembuatan Tagihan E-Billing An. BUSEN dengan Kode Billing : 820240402392518
 - Bukti Pembuatan Tagihan E-Billing An. MUKHAMMAD HAMDANI dengan Kode Billing : 820240402393618
 - Bukti Penerimaan Negara An. BUSEN dengan NTB No. 318893377073 dan NTPN No. 7BDC355DF98R29E6
 - Bukti Penerimaan Negara An. MUKHAMMAD HAMDANI dengan NTB No. 000078124416 dan NTPN No. E735C48VVEMELAGI
 - Bukti Pembayaran Mobile Banking

Demikian disampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Heni Yuwono

NIP 196506051988111001

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI;
2. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional.

DOKUMEN PEMERIKSAAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayoon No. 50-52 Surabaya
Telepon : (031) 5340707, Faksimilie : (031) 5345496
Laman: jatim.kemenkumham.go.id, surel: kanwiljatim@kemenkumham.go.id.

Nomor : W.15-HN.04.03-121

01 April 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Panggilan Pemeriksaan Terkait Dokumen Pencairan Anggaran
Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023

Yth. Ketua Yayasan Ikadin Jember
Ketua Biro Pelayanan dan Bantuan Hukum FH UNEJ
di tempat

Menindaklanjuti surat dari Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN.5-HN.04.03-67 tanggal 27 Maret 2024. Kami beritahukan bahwa hasil pemantauan kegiatan layanan bantuan hukum oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM terdapat catatan adanya dugaan duplikasi pencairan anggaran bantuan hukum atas permohonan pencairan yang disampaikan oleh Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di wilayah Provinsi Jawa Timur. Adapun dokumen pencairan yang diduga terdapat duplikasi yaitu a/n **Busen** yang dimohonkan oleh 2 (dua) PBH, **Yayasan Ikadin Jember** dan **BPBH Fakultas Hukum Universitas Jember** dengan status diterima proses pencairan anggarannya.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti hasil pemantauan Inspektorat Jenderal dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan hormat kami harap kehadiran Ketua/Direktur PBH, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 03 April 2024
Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai
Tempat : Ruang Kepala Bidang Hukum
Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Hari Yuwono
NIP 196506051988111001

Tembusan :

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM R.I
(sebagai laporan)

DOKUMEN PEMERIKSAAN



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

Jalan Kayoon No. 50-52 Surabaya

Telepon : (031) 5340707, Faksimilie : (031) 5345496

Laman: jatim.kemenkumham.go.id, surel: kanwiljatim@kemenkumham.go.id.

Nomor : W.15-HN.04.03 -120

01 April 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : Panggilan Pemeriksaan Terkait Dokumen Pencairan Anggaran
Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023

Yth. Ketua Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm
Ketua LBH Anak Bangsa Mandiri
di tempat

Menindaklanjuti surat dari Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Nomor PHN.5-HN.04.03-67 tanggal 27 Maret 2024. Kami beritahukan bahwa hasil pemantauan kegiatan layanan bantuan hukum oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM terdapat catatan adanya dugaan duplikasi pencairan anggaran bantuan hukum atas permohonan pencairan yang disampaikan oleh Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di wilayah Provinsi Jawa Timur. Adapun dokumen pencairan yang diduga terdapat duplikasi yaitu a/n **Mukhammad Hamdani** yang dimohonkan oleh 2 (dua) PBH, **Biro Bantuan Hukum Juris Law Firm** dan **LBH Anak Bangsa Mandiri** dengan status diterima proses pencairan anggarannya.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti hasil pemantauan Inspektorat Jenderal dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) dengan hormat kami harap kehadiran Ketua/Direktur PBH, pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 03 April 2024

Pukul : 09.00 WIB s/d Selesai

Tempat : Ruang Kepala Bidang Hukum

Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dibawakan secara elektronik oleh :

Heni Yuwono

NIP 196506051988111001

Tembusan :

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM R.I
(sebagai laporan)

DOKUMEN PEMERIKSAAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR
Jalan Kayoon No. 50-52 Surabaya
Telepon : (031) 5340707, Faksimile : (031) 5345496
Laman: jatim.kemenkumham.go.id, surel: kanwiljatim@kemenkumham.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

No. W15-HN.04.03 - 122

Pada hari ini Rabu Tanggal 3 (Tiga) Bulan April Tahun 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Empat) bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Jalan Kayoon No. 50-52 Surabaya, berdasarkan hasil pemantauan program prioritas nasional kegiatan layanan bantuan hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional TA. 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sesuai surat Nomor ITJ-PW.03.04-30 tanggal 8 Maret 2024 menerangkan bahwa terdapat catatan duplikasi pencairan anggaran bantuan hukum atas permohonan pencairan sebagaimana data pada aplikasi Sid Bankum dan Dokumen Pencairan Anggaran Bantuan Hukum yang disampaikan oleh organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di wilayah Provinsi Jawa Timur yaitu atas nama BUSEN.

Menindaklanjuti Hasil Pemantauan tersebut Tim Panwasda melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang mengajukan permohonan an. BUSEN. Hasil penelusuran Tim Panwasda berdasarkan data dari Aplikasi Sid Bankum sebagai berikut :

No.	Nama PBH	Nomor/Tanggal Permohonan	Nama Penerima Bankum	Tahap	Nomor/Tanggal BAST
1.	Yayasan IKADIN Jember	00329.35.01.PID.BPHN.2023/ 14 Maret 2023	BUSEN	Penyidikan	00817.35.1188.BAST.2023/ 24 Maret 2023
2.	BPBH Fakultas Hukum UNEJ	00913.35.01.PID.BPHN.2023/ 13 Juli 2023	BUSEN	Penyidikan	03624.35.1182.BAST.2023/ 27 Juli 2023

Berdasarkan Data tersebut diatas Tim Panwasda telah meminta keterangan dan penjelasan kepada Pemberi Bantuan Hukum (PBH) Yayasan IKADIN Jember dan BPBH Fakultas Hukum Universitas Jember dan dari pihak BPBH Fakultas Hukum Universitas Jember telah mengakui adanya Duplikasi Pencairan Anggaran Bantuan Hukum sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan telah bersepakat untuk mengembalikan dan menyetorkan duplikasi pembayaran tersebut ke Kas Negara melalui Mobile Banking pada hari ini Rabu Tanggal 03 April 2024. (Bukti Terlampir)

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat sebagai tanggungjawab terhadap catatan adanya Duplikasi Pencairan Anggaran Bantuan Hukum.

Yang Diperiksa,

YAYASAN IKADIN JEMBER

Direktur/Ketua



JANI TAKARIANTO

BPBH FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS JEMBER

Direktur/Ketua


FISKA MAULIDIANA NUGROHO

Mengetahui/Menyetujui
Kepala Bidang Hukum selaku Wakil Ketua Panwasda


HARIS NASROEDIN
NIP. 197101101972031002

DOKUMEN PEMERIKSAAN



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR

Jalan Kayoon No. 50-52 Surabaya
Telepon : (031) 5340707, Faksimile : (031) 5345495
Laman: jatim.kemenkumham.go.id, surel: kanwiljatim@kemenkumham.go.id

BERITA ACARA PEMERIKSAAN No. W15-HN.04.03 - 123

Pada hari ini Rabu Tanggal 3 (Tiga) Bulan April Tahun 2024 (Dua Ribu Dua Puluh Empat) bertempat di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur Jalan Kayoon No. 50-52 Surabaya, berdasarkan hasil pemantauan program prioritas nasional kegiatan layanan bantuan hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional TA. 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sesuai surat Nomor ITJ-PW.03.04-30 tanggal 8 Maret 2024 menerangkan bahwa terdapat catatan duplikasi pencairan anggaran bantuan hukum atas permohonan pencairan sebagaimana data pada aplikasi Sid Bankum dan Dokumen Pencairan Anggaran Bantuan Hukum yang disampaikan oleh organisasi Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di wilayah Provinsi Jawa Timur yaitu atas nama MUKHAMMAD HAMDANI.

Menindaklanjuti Hasil Pemantauan tersebut Tim Panwasda melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap Pemberi Bantuan Hukum (PBH) yang mengajukan permohonan an. MUKHAMMAD HAMDANI. Hasil penelusuran Tim Panwasda berdasarkan data dari Aplikasi Sid Bankum sebagai berikut :

No.	Nama PBH	Nomor/Tanggal Permohonan	Nama Penerima Bankum	Tahap	Nomor/Tanggal BAST
1.	BBH Juris Law Firm	00407.35.01.PID.BPHN.2023/25 Maret 2023	MUKHAMMAD HAMDANI	Penyidikan	01449.35.1710.BAST.2023/11 April 2023
2.	LBH Anak Bangsa Mandiri	00564.35.01.PID.BPHN.2023/29 April 2023	MUKHAMMAD HAMDANI	Penyidikan	02328.35.2322.BAST.2023/30 Mei 2023
3.	LBH Anak Bangsa Mandiri	00829.35.01.PID.BPHN.2023/22 Juni 2023	MUKHAMMAD HAMDANI	Persidangan	04021.35.2322.BAST.2023/15 Agustus 2023

Berdasarkan Data tersebut diatas Tim Panwasda telah meminta keterangan dan penjelasan kepada Pemberi Bantuan Hukum (PBH) BBH Juris Law Firm dan LBH Anak Bangsa Mandiri dan dari pihak LBH Anak Bangsa Mandiri telah mengakui adanya Duplikasi Pencairan Anggaran Bantuan Hukum sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan telah bersepakat untuk mengembalikan dan menyetorkan duplikasi pembayaran tersebut ke Kas Negara melalui Mobile Banking pada hari ini Rabu Tanggal 03 April 2024. (Bukti Terlampir)

Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat sebagai tanggungjawab terhadap catatan adanya Duplikasi Pencairan Anggaran Bantuan Hukum.

Yang Diperiksa,

BBH JURIS LAW FIRM
Direktur/Ketua

FARIDATUL BAHYAH

LBH ANAK BANGSA MANDIRI
Direktur/Ketua

AGUS HAPPY FAJARIYANTO

Mengelola dan Menandatangani
Kepala Bidang Hukum selaku Wakil Ketua Panwasda

HARDI NUSIKALDIN
NIP. 197103141991031002

DOKUMEN PEMERIKSAAN



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)



BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240402392518
Tanggal Billing : 02-04-2024 17:09:00
Tanggal Kedaluwarsa : 09-04-2024 17:09:00
Tanggal Bayar : -
Bank/Pos/Fintech Bayar : -
Channel Bayar : -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Ratri Poernomosari
Kementerian/Lembaga : 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I : 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja : 408759 - KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
Total Disetor : 2.000.000 (IDR)
Terbilang : Dua Juta (IDR)
Status : Belum Dibayar
NTB : -
NTPN : -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penertimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penertimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 2.000.000 (IDR)
Keterangan : Pengembalian Duplikasi Pembayaran Perkara Litigasi an.BUSEN

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan *Dompet Elektronik fintech*.
3. Bawah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPb di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke sapa.anggaran@kemenkeu.go.id (Billing DJA).

—000—

Tanda Bukti Setor/Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang di dalamnya tercantum Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah yang merupakan bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara

DOKUMEN PEMERIKSAAN



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)



BUKTI PEMBUATAN TAGIHAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240402393618
Tanggal Billing	: 02-04-2024 17:12:59
Tanggal Kedaluwarsa	: 09-04-2024 17:12:59
Tanggal Bayar	: -
Bank/Pos/Fintech Bayar	: -
Channel Bayar	: -
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Ratri Poernomosari
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 408759 - KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
Total Disetor	: 2.000.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Juta (IDR)
Status	: Belum Dibayar
NTB	: -
NTPN	: -

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 2.000.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Belanja Duplikasi Pembayaran Perkara Litigasi an.MUKHAMMAD HAMDANI

Ketentuan pembayaran tagihan :

1. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum tanggal kedaluwarsa. Jika tanggal kedaluwarsa telah tercapai, *billing receipt* ini tidak berlaku lagi, dan Anda diminta mengakses SIMPONI untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
2. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam *payment channel* seperti *Over The Counter* bank/pos persepsi, ATM, *Internet Banking*, EDC (sesuai dengan fasilitas yang dimiliki oleh bank/pos persepsi), dan *Dompot Elektronik fintech*.
3. Bawalah Bukti Pembuatan Tagihan (*Billing Receipt*) ini ke tempat-tempat yang telah disebutkan di atas. Kode referensi untuk pembayaran adalah kode billing sesuai yang tertera di dokumen ini.
4. Pastikan dokumen ini atau hasil cetakannya dibawa apabila Anda akan melakukan pembayaran.
5. Pastikan bahwa data detail pembayaran dalam dokumen ini sama dengan data yang tertera/tercantum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, teliti apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
6. Apabila pembayaran berhasil, Anda akan menerima Tanda Bukti Setor atau struk dari Bank atau *payment channel*. Anda juga akan menerima Bukti Penerimaan Negara (BPN) yang akan dikirim ke akun SIMPONI dan email anda.
7. Simpanlah Tanda Bukti Setor/struk/BPN untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
8. Tata cara pembayaran dapat diakses pada website <https://mpn.kemenkeu.go.id/>.
9. Untuk pertanyaan yang berkaitan dengan pembayaran dan status billing dapat menghubungi HAI DJPB di 14090.
10. Apabila mengalami gangguan pada Aplikasi SIMPONI atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Ditjen Anggaran di nomor 14090 Ext. 2 atau melalui email ke sapa.anggaran@kemenkeu.go.id (Billing DJA).

—000—

DOKUMEN PEMERIKSAAN



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240402392518
Tanggal Billing	: 02-04-2024 17:09:00
Tanggal Kedaluwarsa	: 09-04-2024 17:09:00
Tanggal Bayar	: 03-04-2024 10:25:56
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK MANDIRI
Channel Bayar	: Mobile Banking
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Ratri Poernomosari
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 408759 - KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
Total Disetor	: 2.000.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Juta (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 318893377073
NTPN	: 7BDC355DF98R29E6

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 2.000.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Duplikasi Pembayaran Perkara Litigasi an.BUSEN

DOKUMEN PEMERIKSAAN



Kementerian Keuangan RI
Direktorat Jenderal Anggaran
SISTEM INFORMASI PNBPN ONLINE (SIMPONI)



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing	: 820240402393618
Tanggal Billing	: 02-04-2024 17:12:59
Tanggal Kedaluwarsa	: 09-04-2024 17:12:59
Tanggal Bayar	: 03-04-2024 11:14:49
Bank/Pos/Fintech Bayar	: BANK CENTRAL ASIA
Channel Bayar	: ATM
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar	: Ratri Poernomosari
Kementerian/Lembaga	: 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I	: 10 - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja	: 408759 - KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM JAWA TIMUR
Total Disetor	: 2.000.000 (IDR)
Terbilang	: Dua Juta (IDR)
Status	: Sudah Dibayar
NTB	: 000078124416
NTPN	: E735C48VVEMELAGI

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran	: Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun	: 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran	: 2.000.000 (IDR)
Keterangan	: Pengembalian Belanja Duplikasi Pembayaran Perkara Litigasi an.MUKHAMMAD HAMDANI

DOKUMEN PEMERIKSAAN



Pemiyedia Jassa

Pajak/PNBP/Cukai

820240402392518

Detail Pembayaran

Nominal Pembayaran	Rp 2.000.000
Biaya Transaksi	Gratis
Total Transaksi	Rp 2.000.000

Rekening Sumber

FISKA MAULIDIAN NUGR

Bank Mandiri -2658

Detail Tagihan

BUKTI Penerimaan Negara Bukan Pajak
PENERIMAAN NEGARA

Tanggal dan Jam Bayar 03/04/2024 10:25:56

Tanggal Buku 03/04/2024

Kode Cabang Bank 008

NTB 318893377073

NTPN  78DC355DF98R29E6

STAN 377073

Kode Billing 820240402392518

Nama Wajib Bayar Ratri Poernomosari

Kementerian / Lembaga 013

Unit Eselon 1 10

Satuan Kerja 408759

Jumlah Setoran Rp. 2.000.000.00


Mata Uang IDR

Terbilang dua juta rupiah

Informasi ini hasil cetak computer dan tidak memerlukan tanda tangan

DOKUMEN PEMERIKSAAN

094-KN0001
151010EEXP0327


 **BCA**
** ATM BCA **

03/04/24 11:14:48
ZL3N-CK KAYUN SURABAYA

NO URUT : 4763
BUKTI PENERIMAAN NEGARA
KODE BILLING : 820240402393618
NAMA : RATRI POERNOMOSARI
KL/ES.1/KTR : 013-10-408759
NTB : 000078124416
NTPN : E735C48VEMELAGI
STAN : 124492
JUMLAH : RP 2,000,000
TGL-JAM BAYAR : 03/04/2024-11:14:49
TGL BUKU : 03/04/2024
KODE CABANG : 0206

MOHON DISIMPAN. STRUK INI ADALAH
BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH

094-KN0001
151010EEXP0327

 **BCA**

DOKUMENTASI PEMERIKSAAN



DOKUMENTASI PEMERIKSAAN



DOKUMENTASI PEMERIKSAAN







KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
INSPEKTORAT JENDERAL

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Kuningan,
Jakarta Selatan 12940, P.O. Box 3489, Telepon/Faksimili 021-5252975
Laman: <http://www.itjen.kemenkumham.go.id>, Email: itjen@kemenkumham.go.id

Nomor	: ITJ-PW.03.01-171	5 Juni 2023
Lampiran	: 1 (satu) berkas laporan	
Sifat	: Penting	
Hal	: Petunjuk Penanganan dan Penertiban Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Februari 2023	

Yth. Kepala Kantor Wilayah
Kementerian Hukum dan HAM Lampung
Di –
Lampung

Merujuk Surat Perintah Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor: ITJ.KP.04.01-459 tanggal 3 Maret 2023, Tim Inspektorat Jenderal telah melakukan Audit Kinerja atas Pengelolaan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun Anggaran 2022 sampai dengan Februari 2023 yang dilaksanakan selama 12 (dua belas) hari, mulai tanggal 10 Maret 2023 sampai dengan 21 Maret 2023 dengan uraian hasil audit sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Audit Nomor: ITJ.7-PW.03.01-76/V/2023 tanggal 30 Mei 2023. Berdasarkan hasil audit, ditemukan permasalahan yang memerlukan penanganan dan penertiban sebagai berikut:

1. Terdapat pembayaran Belanja Barang Perjalanan Dinas Biasa (524111) yang tidak didukung dengan Bukti Pertanggungjawaban yang memadai sebesar Rp.229.439.950.

Audit Kinerja Atas Pengelolaan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2022 sd Februari 2023 dilaksanakan untuk menilai apakah pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, aspek efektif, aspek efisien dan aspek ekonomis (3E). Audit dilaksanakan pada 9 (Sembilan) DIPA yang dikelola oleh Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Berdasarkan hasil pengecekan dokumen pertanggungjawaban Belanja Barang atas Perjalanan Dinas (Akun 524111) yang disajikan oleh Bendahara Pengeluaran pada 9 DIPA yang dikelola pada Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, terdapat pembayaran atas perjalanan dinas pejabat dan pegawai yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai sebagaimana ditetapkan dalam Dalam Kepmenkumham M.HH-12.KU.04.01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kemenkumham dan Kepmenkumham Nomor: M.HH-03.KU.02.01 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya

Transportasi Darat, Laut, atau Udara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Penggunaan Komponen Biaya Transport Darat antar kota/kabupaten pada perjalanan dinas lebih dari 8 jam tidak dilaksanakan dengan *at cost* karena tidak menggunakan bukti pertanggungjawaban, sebagai berikut :
 - 1) Terdapat Pejabat Pimpti Pratama (Kepala Divisi dan Kepala Kanwil (TA 2022 dan 2023) yang memiliki Kendaraan Dinas Jabatan namun mengajukan Transport Darat Antar Kabupaten/Kota;
 - 2) Terdapat Pejabat Struktural Eselon III yang memiliki Kendaraan Dinas Jabatan namun mengajukan Transport Darat Antar Kabupaten/Kota;
 - 3) Terdapat Pegawai yang mengajukan Transpor Darat Antar Kabupaten/Kota namun tidak melampirkan Bukti At Cost sebagai bukti pertanggungjawaban. Transport Darat Antar Kabupaten/Kota dipertanggungjawabkan sebagai BUKTI PENGELUARAN RIIL berupa Biaya transpor pegawai dan/atau biaya penginapan di bawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluarannya.
- b. Penggunaan Komponen Biaya Transport Darat antar Provinsi pada perjalanan dinas lebih dari 8 jam tidak dilaksanakan dengan *at cost* karena tidak menggunakan bukti pertanggungjawaban, penjelasan sebagai berikut :
 - 1) Terdapat pejabat dan pegawai yang mengajukan Sewa Kendaraan namun Tidak Melampirkan Bukti STNK atas nama dari Vendor yang menerbitkan Jasa Sewa Kendaraan tersebut dan Bukti Foto Kendaraan dengan menunjukkan Plat Mobil.
 - 2) Pengajuan Transpor Darat dengan sewa kendaraan masih dilakukan selama masa Perjalanan Dinas bukan pada saat Keberangkatan dan Saat Kepulangan.
 - 3) Terdapat pegawai yang mengajukan biaya transpot di lokasi tujuan selama masa perjalanan dinas yang tidak sah karena kebutuhan Transpor Lokal di lokasi tujuan selama perjalanan dinas merupakan bagian dari Komponen Uang Harian.
- c. Penggunaan Komponen Biaya Penginapan tidak didukung dengan Bukti Kuitansi Hotel yang sesuai dengan Rate Biaya Kamar Tertinggi yang diterbitkan oleh Hotel tersebut, sebagai berikut:
 - Berdasarkan bukti rekaman percakapan dengan pihak Hotel Srikandi diketahui bahwa nilai Kamar VIP di hotel tersebut paling mahal adalah sebesar Rp.300.000, namun terdapat pengajuan Komponen Penginapan dengan biaya Rp.1.140.000 dan Rp.580.000 per malam.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas maka terdapat pembayaran atas perjalanan dinas biasa pejabat dan pegawai (akun 524111) yang tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban yang memadai atas pada pada 9 DIPA yang dikelola pada Divisi Administrasi, Divisi Pemasarakatan, Divisi Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM sebesar **Rp.229.439.950.**, dengan rincian sebagai berikut: *(rincian rekap terlampir)*

NO	URAIAN DIPA	JUMLAH PENGEMBALIAN KE KAS NEGARA	KETERANGAN
1	DIPA SEKJEN	68.360.000	Divisi Administrasi
2	DIPA DITJEN PAS	69.850.000	Divisi Pemasarakatan
3	DIPA DITJEN IMIGRASI	4.685.000	Divisi Imigrasi
4	DIPA DITJEN AHU	37.100.808	Divisi Pemasarakatan Rp.86.544.950
5	DIPA DITJEN KI	14.895.860	
6	DIPA DITJEN PP	13.275.022	
7	DIPA DITJEN HAM	4.220.000	

NO	URAIAN DIPA	JUMLAH PENGEMBALIAN KE KAS NEGARA	KETERANGAN
8	DIPA BPHN	16.453.260	
9	DIPA BALITBANG HUKUM DAN HAM	600.000	
JUMLAH		229.439.950	

Terhadap kondisi tersebut diatas, Tim telah melakukan wawancara dengan Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPK dan Pelaksana Kegiatan pada Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM dengan hasil sebagai berikut:

- a. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu telah menyampaikan kepada pelaksana kegiatan pada masing-masing Divisi bahwa penggunaan Transport Darat harus mengajukan berdasarkan bukti At Cost namun pelaksanaan teknis pada masing-masing Divisi menyatakan bahwa dalam Lampiran PMK Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap disebutkan Transpor Lokal dan Penginapan merupakan bagian yang dapat dimasukkan ke dalam Bukti Pengeluaran Riil Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut disepakati bersama bahwa Transport Darat antar kota/kabupaten tidak perlu dipertanggungjawabkan dengan At Cost.
- b. Bahwa pejabat atau pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung ketika melakukan perjalanan dinas luar kota atas undangan Unit Eselon I Pembina melakukan pertanggungjawaban Transpor Darat dengan At Cost, namun ketika melakukan perjalanan dinas di dalam Provinsi Lampung tidak menerapkan pertanggungjawaban Transport Darat secara At Cost.
- c. Dalam dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas, setiap pegawai dan pejabat telah menandatangani Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) sehingga dapat diyakini bahwa setiap pegawai dan pejabat sudah memahami bahwa masing-masing pegawai/pejabat bertanggungjawab secara pribadi terhadap akuntabilitas perjalanan dinas yang dilakukan apabila terdapat temuan dari hasil Pemeriksaan Internal maupun Eksternal.

Terjadinya permasalahan tersebut antara lain disebabkan:

- a. Pelaksana Teknis pada Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM menafsirkan pertanggungjawaban Transport Darat berdasarkan Lampiran PMK Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap disebutkan Transpor Lokal dan Penginapan merupakan bagian yang dapat dimasukkan ke dalam Bukti Pengeluaran Riil Yang Tidak Dapat Dipertanggungjawabkan.
- b. Pejabat atau Pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung ketika melakukan perjalanan dinas luar kota atas undangan Unit Eselon I Pembina melakukan pertanggungjawaban Transpor Darat dengan At Cost, namun ketika melakukan perjalanan dinas di dalam Provinsi Lampung tidak menerapkan pertanggungjawaban Transport Darat secara At Cost.
- c. Pejabat atau Pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung sudah mengetahui adanya Kepmenkumham M.HH-12.KU.04.01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan

Kemenkumham dan Kepmenkumham Nomor: M.HH-03.KU.02.01 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Transportasi Darat, Laut, atau Udara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM namun tidak ditetapkan dalam rangka pelaksanaan anggaran.

Direkomendasikan kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung selaku KPA agar segera memerintahkan segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Segera menerbitkan kebijakan internal di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung perihal penerapan Kepmenkumham M.HH-12.KU.04.01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kemenkumham dan Kepmenkumham Nomor: M.HH-03.KU.02.01 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Transportasi Darat, Laut, atau Udara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung serta melakukan sosialisasi terkait kebijakan tersebut pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan melaporkan hasilnya kepada Inspektorat Jenderal.
- b. Menerbitkan surat penagihan kepada pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang tercatat sebagai pelaksana perjalanan dinas yang tidak dapat menunjukkan bukti At Cost atas Komponen Transpor Darat dan Komponen Penginapan sebesar **Rp.229.439.950,-** untuk disetorkan ke Kas Negara dengan Akun Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Lalu serta melaporkan hasilnya kepada Inspektorat Jenderal, dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Pegawai	Divisi	Jumlah Pengembalian
1	Alpius Sarumaha	Divisi Yankum dan HAM	6.300.120
2	Adi Ismanto	Divisi Yankum dan HAM	1.122.000
3	Adil Jaya	Divisi Yankum dan HAM	3.659.000
4	Ahmad Kadafi	Divisi Yankum dan HAM	1.200.000
5	Agus Kamin	Divisi Yankum dan HAM	200.000
6	Ali Badary	Divisi Yankum dan HAM	1.850.000
7	Arlisa Noviriantono	Divisi Yankum dan HAM	674.000
8	Beniyati	Divisi Yankum dan HAM	486.000
9	Brassica Oryza	Divisi Yankum dan HAM	270.000
10	Cucuk Wasisatu	Divisi Yankum dan HAM	3.169.000
11	Cory Maryati	Divisi Yankum dan HAM	1.010.000
12	Damba Wiratama	Divisi Yankum dan HAM	200.000
13	Deni Saputra	Divisi Yankum dan HAM	1.446.000
14	Deddy Nopriadi	Divisi Yankum dan HAM	694.000
15	Desi Rulianti	Divisi Yankum dan HAM	660.000
16	Dewi Kartika S	Divisi Yankum dan HAM	700.000
17	Dina Ismela	Divisi Yankum dan HAM	740.000
18	Dina Mariana	Divisi Yankum dan HAM	1.966.000
19	Elisabeth	Divisi Yankum dan HAM	1.223.000
20	Eliyani	Divisi Yankum dan HAM	695.000
21	Elidawaty	Divisi Yankum dan HAM	440.000
22	Elmi Asritiningati	Divisi Yankum dan HAM	792.000
23	Erbit Septriawan	Divisi Yankum dan HAM	549.808
24	Erwin Sewtiawan	Divisi Yankum dan HAM	267.000

25	Euis Meivia Rahma	Divisi Yankum dan HAM	210.000
26	Farid Anfasa	Divisi Yankum dan HAM	200.000
27	Farid Junaidi	Divisi Yankum dan HAM	220.000
28	Febrina Anitasari	Divisi Yankum dan HAM	1.926.000
29	Ferli Syahdi	Divisi Yankum dan HAM	3.123.000
30	Gumelar	Divisi Yankum dan HAM	2.352.000
31	Gumirica	Divisi Yankum dan HAM	528.000
32	Gunawan	Divisi Yankum dan HAM	2.928.000
33	Gunawan Ali	Divisi Yankum dan HAM	936.000
34	Hapsoro Adinungroho	Divisi Yankum dan HAM	1.595.000
35	Herliana Husein	Divisi Yankum dan HAM	660.000
36	Hidayatullah	Divisi Yankum dan HAM	3.275.000
37	Hugo Maorit	Divisi Yankum dan HAM	3.178.000
38	Kamal Putra Tamrin	Divisi Yankum dan HAM	2.850.000
39	Levi Septiyanti	Divisi Yankum dan HAM	1.208.000
40	M Dwi Rianto	Divisi Yankum dan HAM	1.329.000
41	M Ridho Pratama	Divisi Yankum dan HAM	997.000
42	M Yudho Syafei	Divisi Yankum dan HAM	702.000
43	Marisa Agistia	Divisi Yankum dan HAM	270.000
44	Masriakromi	Divisi Yankum dan HAM	5.992.022
45	Meliana	Divisi Yankum dan HAM	430.000
46	Muhammad Yusuf	Divisi Yankum dan HAM	240.000
47	Muhammad Ali B	Divisi Yankum dan HAM	510.000
48	Muhammad Yudoharajo	Divisi Yankum dan HAM	895.000
49	Nabil an nafis	Divisi Yankum dan HAM	270.000
50	Nanta Fenomena	Divisi Yankum dan HAM	2.667.000
51	Nurul Amalia	Divisi Yankum dan HAM	690.000
52	Oktariawati Emran	Divisi Yankum dan HAM	240.000
53	Pijar Putra	Divisi Yankum dan HAM	2.905.000
54	Priska Pestaria	Divisi Yankum dan HAM	1.884.000
55	Resa Ariyanti	Divisi Yankum dan HAM	811.000
56	Reza Khairul	Divisi Yankum dan HAM	200.000
57	Rido Yunando	Divisi Yankum dan HAM	420.000
58	Risma Eka Wati	Divisi Yankum dan HAM	750.000
59	Rizky Yovanda	Divisi Yankum dan HAM	2.608.000
60	Rugun Tresia OP	Divisi Yankum dan HAM	410.000
61	Santosa	Divisi Yankum dan HAM	2.226.000
62	Sorta Delima	Divisi Yankum dan HAM	250.000
63	Sherly Marthalia	Divisi Yankum dan HAM	1.200.000
64	Tommy Ferza Husin	Divisi Yankum dan HAM	200.000
65	Vega Surya Melinda	Divisi Yankum dan HAM	276.000
66	Wahyu Sutanto	Divisi Yankum dan HAM	1.404.000
67	Yulinar Trisia	Divisi Yankum dan HAM	267.000
Jumlah Pengembalian Divisi Yankum dan HAM			86.544.950
1	M. Afif	Divisi Administrasi	1.200.000
2	Aldila Rosa Tama	Divisi Administrasi	3.960.000
3	Arlisa Noviriantono	Divisi Administrasi	5.480.000
4	Basnamara	Divisi Administrasi	7.240.000

5	Christian	Divisi Administrasi	200.000
6	Damba Wiratama	Divisi Administrasi	2.380.000
7	Dedi Irawan	Divisi Administrasi	1.880.000
8	Denial	Divisi Administrasi	400.000
9	Edi Aprianto	Divisi Administrasi	3.760.000
10	Elvira	Divisi Administrasi	2.080.000
11	Erbit Septiawan	Divisi Administrasi	2.480.000
12	Felina	Divisi Administrasi	200.000
13	Gumelar Adi	Divisi Administrasi	2.080.000
14	Gunawan Ali	Divisi Administrasi	6.440.000
15	Ikmal Idrus	Divisi Administrasi	600.000
16	Muhammad Yusuf	Divisi Administrasi	2.200.000
17	Nabil	Divisi Administrasi	3.780.000
18	Odi	Divisi Administrasi	3.280.000
19	Pijar Putra Arinda	Divisi Administrasi	2.200.000
20	Ramayani Putri	Divisi Administrasi	1.200.000
21	Reza Khairul Fitra	Divisi Administrasi	4.080.000
22	Rizqi Dhita	Divisi Administrasi	2.200.000
23	Rizky Yovanda Saputra	Divisi Administrasi	1.400.000
24	Roby Pajrin	Divisi Administrasi	3.480.000
25	Shifa	Divisi Administrasi	200.000
26	Sri Mulyani	Divisi Administrasi	2.080.000
27	Vike Youdit	Divisi Administrasi	200.000
28	Yanti	Divisi Administrasi	1.680.000
Jumlah Pengembalian Divisi Administrasi			68.360.000
1	Farid Junaedi	Divisi Pemasarakatan	10.200.000
2	Bambang Ludiro	Divisi Pemasarakatan	300.000
3	Yuniarto	Divisi Pemasarakatan	4.250.000
4	Firman Hidayat	Divisi Pemasarakatan	3.800.000
5	Rudi Suwartono	Divisi Pemasarakatan	2.100.000
6	Albran	Divisi Pemasarakatan	2.100.000
7	Agung Chandra	Divisi Pemasarakatan	2.100.000
8	Alvin	Divisi Pemasarakatan	300.000
9	Artika Kumala Dewi	Divisi Pemasarakatan	450.000
10	Basnamara	Divisi Pemasarakatan	200.000
11	Berta Ekasaari	Divisi Pemasarakatan	1.800.000
12	Dory	Divisi Pemasarakatan	150.000
13	Dhian Pratiwi DH	Divisi Pemasarakatan	300.000
14	Elvi Surya Ningsih	Divisi Pemasarakatan	450.000
15	Erna Ria Situmorang	Divisi Pemasarakatan	1.950.000
16	Fitria Oktaviani	Divisi Pemasarakatan	1.500.000
17	Lanjar Juliantoro	Divisi Pemasarakatan	9.900.000
18	Winda Martina	Divisi Pemasarakatan	8.850.000
19	M Nurhidayat	Divisi Pemasarakatan	4.350.000
20	Marisca	Divisi Pemasarakatan	2.250.000
21	Gilang	Divisi Pemasarakatan	200.000
22	Henny	Divisi Pemasarakatan	450.000
23	Indah	Divisi Pemasarakatan	450.000

24	Ismail	Divisi Pemasyarakatan	750.000
25	Reddy Putranto	Divisi Pemasyarakatan	3.150.000
26	Qisty	Divisi Pemasyarakatan	300.000
27	Fikri	Divisi Pemasyarakatan	300.000
28	Leni	Divisi Pemasyarakatan	150.000
29	Mad Adi	Divisi Pemasyarakatan	200.000
30	Natalia	Divisi Pemasyarakatan	1.950.000
31	Nita Aulia	Divisi Pemasyarakatan	1.050.000
32	Resty	Divisi Pemasyarakatan	450.000
33	Sri Rahayu	Divisi Pemasyarakatan	300.000
34	Eka Safitri	Divisi Pemasyarakatan	600.000
35	Yunita	Divisi Pemasyarakatan	600.000
36	Putra	Divisi Pemasyarakatan	150.000
37	Dedi Kasim	Divisi Pemasyarakatan	150.000
38	Renaldi	Divisi Pemasyarakatan	150.000
39	Heru Suprijo	Divisi Pemasyarakatan	600.000
40	Alkausar	Divisi Pemasyarakatan	150.000
41	Marlinawati	Divisi Pemasyarakatan	150.000
42	Okta Fitriansyah	Divisi Pemasyarakatan	150.000
43	Amalia Hayatunisa	Divisi Pemasyarakatan	150.000
Jumlah Pengembalian Divisi Pemasyarakatan			69.850.000
1	Anita	Divisi Imigrasi	300.000
2	Bactiar	Divisi Imigrasi	150.000
3	Badi	Divisi Imigrasi	785.000
4	Joeliansyah	Divisi Imigrasi	150.000
5	Kobiyah	Divisi Imigrasi	300.000
6	Miza Akbar	Divisi Imigrasi	150.000
7	Nadriana Qisty	Divisi Imigrasi	150.000
8	Newin	Divisi Imigrasi	450.000
9	Ra Fatima	Divisi Imigrasi	450.000
10	Rosidin	Divisi Imigrasi	300.000
11	Samsul	Divisi Imigrasi	150.000
12	Senja	Divisi Imigrasi	300.000
13	Siska	Divisi Imigrasi	450.000
14	Teodorus Simarmata	Divisi Imigrasi	300.000
15	Lisa Masyarti	Divisi Imigrasi	150.000
16	Jojo Suparjo	Divisi Imigrasi	150.000
Jumlah Pengembalian Divisi Imigrasi			4.685.000
Total Jumlah Pengembalian Kanwil Kemenkumham Lampung			229.439.950

2. Terdapat pembayaran Honor Tim Pelaksana Kegiatan (521213) yang tidak sesuai Ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp.14.432.000.

Audit Kinerja Atas Pengelolaan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2022 sd Februari 2023 dilaksanakan untuk menilai apakah pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, aspek efektif, aspek efisien dan aspek

ekonomis (3E). Audit dilaksanakan pada 9 (Sembilan) DIPA yang dikelola oleh Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Berdasarkan hasil pengecekan dokumen pertanggungjawaban Belanja Barang atas Pemberian Honor Tim Pelaksana Kegiatan (521213) yang disajikan oleh Bendahara Pengeluaran pada 9 DIPA yang dikelola pada Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terdapat pembayaran **Honor Tim Pelaksana Kegiatan (Akun 521213) Yang Tidak Sesuai Ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 dan 2023 sebesar Rp.14.432.000, dengan rincian sebagai berikut:**

No	Nama Pegawai	Divisi	Jumlah	Keterangan
1	Bactiar	Divisi Imigrasi	2.295.000	Kelebihan bayar Honor Tim Penilai Angka Kredit
2	Badi Uzaman	Divisi Imigrasi	2.565.000	
3	Deni Usmansyah	Divisi Imigrasi	47.000	
4	Jojo Suparjo	Divisi Imigrasi	765.000	
5	Mamun	Divisi Imigrasi	855.000	
6	Raden Ayu Fatima	Divisi Imigrasi	2.295.000	
7	Samsul Komar	Divisi Imigrasi	1.710.000	
8	Sugiaro	Divisi Imigrasi	1.710.000	
9	Yulinar Trisia	Divisi Imigrasi	510.000	
10	Newin	Divisi Imigrasi	285.000	
11	Joeliansyah	Divisi Imigrasi	285.000	
12	Ikhsan Yusuf	Divisi Imigrasi	285.000	
13	Arlisa	Divisi Imigrasi	255.000	
14	Pijar	Divisi Imigrasi	285.000	
15	Erbit	Divisi Imigrasi	285.000	
JUMLAH			14.432.000	

Terjadinya permasalahan tersebut antara lain disebabkan:

- a. Kurangnya pemahaman pegawai Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung terkait Kepmenkumham M.HH-12.KU.04.01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kemenkumham, Kemenkumham, PMK Nomor 60/PMK.02/Tahun 2021 tentang SBM Tahun 2022 dan PMK Nomor 80/PMK.02/Tahun 2022 tentang SBM Tahun 2023 khususnya terkait dengan penerapat Honor Tim Pelaksana Kegiatan.
- b. Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PPK tidak memahami standar biaya Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan atas SK yang diterbitkan oleh KPA berdasarkan Kemenkumham, PMK Nomor 60/PMK.02/Tahun 2021 tentang SBM Tahun 2022 dan PMK Nomor 80/PMK.02/Tahun 2022 tentang SBM Tahun 2023.

Direkomendasikan kepada Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung selaku KPA agar segera memerintahkan PPK DIPA Ditjen Imigrasi dan DIPA Sekretariat Jenderal untuk menerbitkan surat penagihan kepada pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang tercatat menerima pembayaran atas Honor Tim Pelaksana Kegiatan (Akun 521213) Yang Tidak Sesuai Ketentuan Standar Biaya Masukan (SBM) Tahun 2022 dan 2023 sebesar **Rp.14.432.000,-** serta menyetorkan ke Kas Negara sebagai Pendapatan Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu dan melaporkan hasilnya kepada Inspektorat Jenderal, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pegawai	Divisi	Jumlah	Keterangan
1	Bactiar	Divisi Imigrasi	2.295.000	Kelebihan bayar Honor Tim Penilai Angka Kredit
2	Badi Uzaman	Divisi Imigrasi	2.565.000	
3	Deni Usmansyah	Divisi Imigrasi	47.000	
4	Jojo Suparjo	Divisi Imigrasi	765.000	
5	Mamun	Divisi Imigrasi	855.000	
6	Raden Ayu Fatima	Divisi Imigrasi	2.295.000	
7	Samsul Komar	Divisi Imigrasi	1.710.000	
8	Sugiarto	Divisi Imigrasi	1.710.000	
9	Yulinar Trisia	Divisi Imigrasi	510.000	
10	Newin	Divisi Imigrasi	285.000	
11	Joeliansyah	Divisi Imigrasi	285.000	
12	Ikhsan Yusuf	Divisi Imigrasi	285.000	
13	Arlisa	Divisi Imigrasi	255.000	
14	Pijar	Divisi Imigrasi	285.000	
15	Erbit	Divisi Imigrasi	285.000	
JUMLAH			14.432.000	

3. Terdapat kurang pungut PNBPN atas Pendapatan Sewa atas Tanah, Gedung, dan Bangunan berupa Rumah Negara senilai Rp.2.068.704.

Laporan Realisasi Anggaran Kanwil Kemenkumham Lampung (408824) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 (unaudited) menyajikan realisasi pendapatan PNBPN sebesar Rp108.387.037. Dalam pendapatan tersebut salah satunya bersumber dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) sebesar Rp8.655.258,-.

Berdasarkan hasil penelusuran dan pengujian terhadap dokumen pengelolaan PNBPN Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang disajikan oleh Operator Pengelola Barang diperoleh data nilai Pendapatan Sewa Gedung dan Bangunan sebesar Rp.8.655.258 seluruhnya bersumber dari Pendapatan Sewa Rumah Negara Golongan I tipe B dan C. Pengelolaan PNBPN atas Sewa Rumah Negara pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung memiliki Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan Rumah Negara sebanyak 10 unit.
- b. Dari 10 unit rumah negara tersebut hanya 5 unit yang masih di aktif di huni oleh Pejabat atau Pegawai Kanwil Kementerian Hukum dan HAM, yaitu rumah negara yang berada di Jalan P. Emir Noor, KS Tubun dan M Roem. Sedangkan 5 Unit rumah lainnya tidak dihuni oleh Pejabat atau Pegawai karena kondisinya bangunan yang tidak layak.
- c. Terdapat Rumah Negara yang dihuni oleh Pejabat atau Pegawai ternyata tidak seluruhnya dipungut sewa rumah dinas. Pada tahun 2023 terdapat pejabat yang menempati rumah negara golongan I yang telah menempati rumah dinas yang belum dipotong gajinya untuk pembayaran sewa rumah negara oleh bendahara melalui SPM gaji.
- d. Belum terdapat mekanisme penghentian/pencabutan Surat izin penghuni sehingga menimbulkan pemotongan gaji pegawai yang sudah tidak menempati rumah dinas.
- e. Terdapat kelebihan luasan bangunan rumah dinas golongan I tipe B yang berlokasi di jalan KS. Tubun kota Bandar Lampung dengan luas pada KIB 629 m2 sementara berdasarkan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) luas maksimal adalah 120 m2.
- f. Penetapan nilai sewa atas rumah negara masih belum sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor:

373/KPTS/2001 Tentang Sewa Rumah Negara. Terdapat ketidaktepatan penghitungan tarif sewa rumah dinas yang disebabkan tidak terdapatnya informasi terkait Harga Satuan Bangunan Gedung Negara (HSBGN) Kota Bandar Lampung dan faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (FKB) sehingga operator BMN menggunakan asumsi HSBGN kota terdekat dalam penghitungan tarif sewa. Bahwa tim audit telah mendapatkan informasi terkait HSBGN Kota Bandar Lampung yaitu Rp5.140.000 dan dengan menggunakan asumsi FKB terendah yaitu 40% (karena belum ditemukan data FKB) serta rekap pemotongan gaji yang dilakukan oleh Petugas Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai (PPABP), terdapat kekurangan pembayaran sewa pada tahun 2022 dan Januari s.d April 2023 senilai Rp5.191.485. (rekapitulasi terlampir)

- g. Penghitungan tarif sewa rumah negara pada Kanwil Kemenkumham Lampung dilaksanakan oleh operator BMN dimana seharusnya dilaksanakan oleh PPABP/Bendaharawan.
- h. Terdapat pemanfaatan gedung bangunan pada Kanwil Kemenkumham Lampung untuk Kantin yang belum didasarkan pada persetujuan/penghitungan KPKNL ataupun perjanjian dengan KPB sehingga belum terdapat penyeteroran PNBPN atas sewa ke kas negara.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas maka terdapat kurang Pungut PNBPN atas Pendapatan Sewa atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Berupa Rumah Negara pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebesar **Rp.2.068.704**, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kurang pungut Pungut PNBPN atas Pendapatan Sewa atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Berupa Rumah Negara pada tahun 2023 sebesar Rp.342.936.

No	Uraian Rumah Negara	Luas	Alamat	Penghuni	Kurang Pungut Sewa
1	RN Gol I Tipe C Permanen	70	M ROEM	Alpius Sarumaha	342.936
JUMLAH KURANG PUNGUT SEWA TAHUN 2022					342.936

- b. Kurang pungut Pungut PNBPN atas Pendapatan Sewa atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Berupa Rumah Negara pada tahun 2022 sebesar Rp.1.725.768.

No	Uraian Rumah Negara	Luas	Alamat	Penghuni	Kurang Pungut Sewa
1	RN Gol I Tipe B Permanen	120	P. Emir M.Noor	Masriakromi	1.039.896
2	RN Gol I Tipe C Permanen	70	M ROEM	Alpius Sarumaha	685.872
JUMLAH KURANG PUNGUT SEWA TAHUN 2023					1.725.768

- c. Kurang Pungut PNBPN atas Pendapata Sewa atas Tanah, Gedung dan Bangunan berupa pemanfaatan gedung bangunan pada Kanwil Kemenkumham Lampung untuk Kantin yang belum dilakukan pemungutan sewa.

Terjadinya permasalahan tersebut antara lain disebabkan:

- a. Kurangnya pemahaman Operator BMN terhadap ketentuan perhitungan penetapan besaran sewa rumah negara sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Nomor: 373/KPTS/2001 Tentang Sewa Rumah Negara.
- b. PPABP/Bendaharawan lalai dalam melakukan pemotongan dan pemungutan Sewa Rumah Negara terhadap Pejabat atau Pegawai yang ditetapkan sebagai penghuni Rumah Negara pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung.
- c. Kurangnya pengendalian dari Kuasa Pengguna Barang pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung terhadap pengelolaan PNPB yang bersumber dari Pendapatan Sewa Rumah Negara.

Direkomendasikan kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung selaku Kuasa Pengguna Barang agar melakukan langkah-langkah penertiban sebagai berikut:

- a. Memerintahkan PPABP/Bendaharawan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM agar segera melakukan pemungutan terhadap Pejabat/Pegawai terkait kurang pungut PNPB tahun 2022 dan 2023 atas Sewa atas Tanah, Gedung, dan Bangunan Berupa Rumah Negara pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung sebesar **Rp.2.068.704**, serta segera menyetorkan ke Kas Negara sebagai Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (425131) serta melaporkan hasilnya kepada Inspektorat Jenderal, dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama Pegawai	Divisi	Jumlah
1	Alpius Sarumaha	Divisi Yankum dan HAM	1.028.808
2	Masriakromi	Divisi Yankum dan HAM	1.039.896
Jumlah			2.068.704

- b. Memerintahkan Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN untuk berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah setempat yang membidangi pajak daerah untuk mendapatkan informasi terkait faktor klasifikasi tanah/kelas bumi (FKB) pada masing-masing rumah negara sebagai dasar melakukan penghitungan ulang sesuai dengan data terbaru dan ketentuan yang berlaku, merevisi SIP dengan tarif yang terbaru sebagai dasar pemotongan gaji atas sewa rumah negara.
- c. Selaku pembina Unit Pelaksana teknis di Lingkungan Kanwil kemenkumham Lampung melakukan asistensi dan monitoring kepada seluruh UPT dalam penertiban sewa rumah negara.
- d. Memerintahkan PPABP/Bendaharawan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM agar melakukan pemotongan gaji secara rutin terhadap Pejabat atau Pegawai yang ditetapkan sebagai penghuni dari Rumah Negara Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan menyetorkan ke Kas Negara sebagai PNPB.
- e. Memerintahkan Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN untuk melakukan koordinasi dengan KPKNL Kota Bandar Lampung terkait dengan penetapan Sewa Rumah Negara pada Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen seluas 629 M2 yang berlokasi di K.S yang melebihi Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK) untuk Pejabat Eselon II.
- f. Segera membuat Perjanjian Kerjasama atas Pemanfaatan Gedung Bangunan pada Kanwil Kemenkumham Lampung sebagai Kantin Pegawai serta mengajukan permohonan

persetujuan/penghitungan KPKNL terkait dengan penetapan PNBP atas sewa Kantin Pegawai.

4. **Pengelola Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung Belum Optimal dan Akuntabel.**

Audit Kinerja Atas Pengelolaan Keuangan pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung Tahun 2022 sd Februari 2023 dilaksanakan untuk menilai apakah pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Lampung telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, aspek efektif, aspek efisien dan aspek ekonomis (3E). Audit dilaksanakan pada 9 (Sembilan) DIPA yang dikelola oleh Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan PPK, diketahui bahwa pengelolaan anggaran pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung adalah sebagai berikut:

- a. Pengelolaan 9 DIPA pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung dilakukan oleh 1 orang Bendahara Pengeluaran, 6 orang Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 2 orang PPK.
- b. Masing-masing Bendahara Pengeluaran Pembantu bertanggungjawab terhadap DIPA yang dikelolanya serta menjadi penghubung dengan Pelaksana Teknis pada masing-masing Divisi.
- c. PPK dalam melaksanakan realisasi anggaran pada 9 DIPA secara LS melalui kegiatan Kontraktual maupun Non Kontraktual. Sedangkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melaksanakan realisasi anggaran secara swakelola melalui Uang Persediaan.
- d. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu melakukan Pembayaran atas pengajuan pertanggungjawaban kegiatan dari Pelaksana Teknis di masing-masing Divisi.

Berdasarkan hasil pengecekan dokumen pertanggungjawaban Belanja Barang (AKUN 52) yang disajikan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada 9 DIPA yang dikelola pada Divisi Administrasi, Divisi Pemasyarakatan, Divisi Imigrasi dan Divisi Pelayanan Hukum dan HAM terdapat **Pengelola Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang belum sesuai dengan** Kepmenkumham M.HH-12.KU.04.01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kemenkumham, dengan penjelasan sebagai berikut :

- a. Dalam kegiatan Perjalanan Dinas Biasa (524111) banyak pejabat dan pegawai yang mengajukan Komponen Penginapan dengan tanpa bukti pertanggungjawaban sehingga mengajukan biaya 30% dari biaya penginapan di kota tujuan. Namun isi Surat Pernyataan yang dibuat oleh pejabat/pegawai tidak sesuai dengan Kepmenkumham M.HH-12.KU.04.01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kemenkumham yang menyebutkan bahwa Surat Pernyataan yang disetujui oleh PPK terkait dengan pengajuan biaya Penginapan 30% harus memperhatikan hal-hal, yaitu sebagai berikut:
 - 1) Menjelaskan bahwa di kota tujuan perjalanan dinas tidak terdapat hotel/tempat menginap lainnya, sehingga menginap ditempat yang tidak menyediakan kuitansi/bukti biaya

- penginapan; atau
- 2) Menjelaskan bahwa di kota tujuan perjalanan dinas terdapat hotel/tempat menginap lainnya, namun tidak menginap di hotel/tempat menginap lainnya tersebut dan menjelaskan alasan tidak menginap di hotel tersebut.
 - 3) Biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) tidak diberikan untuk: Perjalanan Dinas Jabatan dalam Kota lebih dari 8 (delapan) jam yang dilaksanakan pergi dan pulang dalam hari yang sama.
- b. Terdapat pejabat yang terindikasi melakukan Perjalanan Dinas ke Jakarta yang tidak sesuai dengan tujuan penugasan sehingga tidak sesuai dengan Kepmenkumham M.HH-12.KU.04.01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kemenkumham yang menyebutkan bahwa Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan dengan Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dengan penjelasan sebagai berikut
- 1) Perjalanan keberangkatan dilakukan pada hari Jumat dan kembali pada hari Senin.
 - 2) Uang harian pada hari Sabtu tetap diajukan namun tidak melakukan kepulangan perjalanan dinas.
 - 3) Dalam Surat Penugasan disebutkan melakukan kegiatan Koordinasi namun didalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan tidak ada penjelasan Kegiatan Koordinasi yang dilakukan dan hasil dari kegiatan koordinasi tersebut. Laporan hanya menjelaskan bahwa kegiatan koordinasi telah dilaksanakan dengan baik.
 - 4) Foto lampiran bukti Koordinasi tidak menunjukkan suasana pelaksanaan tugas dan fungsi koordinasi di ruang kantor atau ruang rapat.
- c. Perhitungan uang makan pegawai pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung tidak memperhatikan data perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai tersebut sehingga mengakibatkan adanya pegawai yang sudah melakukan perjalanan dinas dengan menerima Uang Harian namun masih tetap diajukan untuk mendapatkan Uang Makan. Sebagai contoh sampling adalah sebagai berikut:

No	Nama Pegawai	Perdin Uang Harian di Januari	Masuk Kerja Berdasarkan Uang Makan	Uang Harian	Lebih Bayar Uang Makan
1	Arlisa	4 hari	21 hari	41.000	164.000
2	Roby Pajrin	4 Hari	21 hari	37.000	148.000
3	Damba Wiarata	5 hari	21 hari	37.000	185.000
4	Rizqi Dhita	6 Hari	21 hari	37.000	222.000
5	Nabil An Nafis	3 Hari	22 hari	37.000	111.000

- d. Kuitansi Resmi pada Bengkel Resmi Auto Persada namun terdapat beberapa kegiatan pemeliharaan Kendaraan Dinas Roda 4 yang dilakukan pada Bengkel yang hanya menerbitkan kuitansi manual dengan tulis tangan.
- e. Masih terdapat Pejabat yang memiliki kendaraan dinas melakukan pembelian bensin dengan menggunakan Bukti Kuitansi Tulis Tangan, bukan bon Faktur resmi dari Pertamina.
- f. Terdapat pengajuan Belanja Penerbitan Buletin Kanwil Lampung setiap bulan sebanyak 128 Eksemplar namun dalam bukti pertanggungjawaban tidak pernah melampirkan bukti foto penyerahan Buletin dari Pihak Percetakan kepada PPK sebanyak 128 Eksemplar.
- g. Pengelolaan Belanja berupa Pengadaan Keperluan Pokok Perkantoran, Pengadaan Persediaan ATK, Pengadaan Belanja Konsumsi Makan Rapat, Belanja Jamuan Tamu,

Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, tidak dilakukan secara akuntabel, yaitu:

- 1) PPK melakukan transaksi pengadaan Belanja Barang secara Kontraktual maupun non kontraktual namun tidak didukung dengan dokumen HPS yg akuntabel.
- 2) PPK menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanpa didukung dengan bukti foto berupa foto penyerahan barang dari penyedia kepada pegawai dan foto barang yang dibeli.
- 3) Pembelian jamuan tamu dilakukan melalui Aplikasi Grabfood namun tidak ada dukungan foto atas jamuan tamu tersebut ataupun surat tugas dari jamuan makan tersebut.
- 4) Pembelian Konsumsi Rapat tidak didukung dengan foto kegiatan rapat dan surat undangan untuk rapat tersebut.

Terjadinya permasalahan tersebut antara lain disebabkan:

- a. Belanja yang dilakukan oleh pelaksana tidak disertai bukti valid sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. Bendahara pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu belum optimal melaksanakan fungsinya selaku penguji tingkat pertama atas pembayaran yang ditagihkan oleh pelaksana;
- c. PPK kurang cermat dalam melakukan pengujian atas kebenaran tagihan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
- d. PPSPM belum melaksanakan fungsinya dalam menguji kebenaran SPP beserta dokumen pendukung.

Direkomendasikan kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung selaku KPA agar segera melakukan langkah-langkah strategis dalam meningkatkan kualitas kinerja Pengelola Penatausahaan Pertanggungjawaban Anggaran Pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung yang Optimal dan Akuntabel, sebagai berikut:

- a. Segera menerbitkan kebijakan internal di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung perihal penerapan Kepmenkumham M.HH-12.KU.04.01 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembayaran Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Kemenkumham dan Kepmenkumham Nomor: M.HH-03.KU.02.01 Tahun 2022 tentang Standarisasi Biaya Transportasi Darat, Laut, atau Udara di Lingkungan Kementerian Hukum dan HAM sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung serta melakukan sosialisasi terkait kebijakan tersebut pada seluruh satuan kerja di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung dan melaporkan hasilnya kepada Inspektorat Jenderal.
- b. Memerintahkan seluruh Pejabat dan Pegawai di lingkungan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung agar melakukan perjalanan dinas untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi jabatan.
- c. Memerintahkan agar PPAPB/Bendahara Gaji agar dalam melakukan perhitungan Uang Makan pegawai memperhatikan perjalanan dinas yang dilakukan oleh pegawai.
- d. Memerintahkan PPK dan Bendahara Pengeluaran agar meningkatkan kualitas pertanggungjawaban anggaran pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung, yaitu:
 - 1) Dalam melakukan pembayaran atas anggaran pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 dan 4 agar mewajibkan pelaksana kegiatan untuk melampirkan Kuitansi Resmi dari Bengkel Resmi yang ditetapkan oleh PPK.
 - 2) Selektif dalam memberikan persetujuan terkait dengan pengajuan biaya Penginapan 30% oleh pegawai yang melakukan perjalanan dinas luar kota.

- 3) Dalam melakukan pembayaran atas pengajuan pembelian bensin agar mewajibkan pelaksana kegiatan melampirkan bukti Struk Bensin resmi dari Pertamina.
- 4) Dalam melakukan pembayaran terkait Belanja Buletin Kanwil Lampung agar mewajibkan pelaksana kegiatan melampirkan bukti foto penyerahan Buletin dari Pihak Percetakan kepada PPK/Pelaksana kegiatan sebesar jumlah buletin yang dibayarkan.
- 5) Melampirkan dokumen HPS pada setiap transaksi pengadaan Belanja Barang secara Kontraktual maupun non kontraktual.
- 6) Dalam menerbitkan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan agar mewajibkan pelaksana kegiatan melampirkan bukti foto berupa foto penyerahan barang dari penyedia kepada pegawai dan foto barang yang dibeli.
- 7) Dalam melakukan pembayaran atas pembelian jamuan tamu agar mewajibkan pelaksana kegiatan melampirkan dukungan foto atas jamuan tamu tersebut ataupun surat tugas dari jamuan makan tersebut.
- 8) Dalam melakukan pembayaran atas Pembelian Konsumsi Rapat agar mewajibkan pelaksana kegiatan melampirkan foto kegiatan rapat dan surat undangan untuk rapat tersebut.

5. Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan Gedung pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung Belum Tertib.

Berdasarkan informasi pada laporan keuangan Kanwil Kemenkumham Lampung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022 (unaudited) menyajikan aset tetap berupa tanah senilai Rp53.244.053.437. Nilai aset tanah tersebut, berdasarkan tarikan data pada master aset Sistem Informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN), terdiri dari 27 bidang tanah dengan luas total 232.514 m² yang tersebar di beberapa kabupaten/kota di Provinsi Lampung.

No	Uraian	Sat	Kuantitas	Nilai
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	M2	3,600	9,595,299,000
2	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	M2	158,978	30,610,158,437
3	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	M2	68,946	13,038,596,000
JUMLAH			231,524	53,244,053,437

Hasil penelusuran terhadap dokumen administrasi serta dokumentasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan BMN Aset Tetap Tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Kanwil Kemenkumham Lampung menunjukkan kondisi sebagai berikut:

- a. Terdapat potensi salah saji aset tetap berupa tanah karena perbedaan/selisih pencatatan luasan antara laporan BMN dan bukti kepemilikan tanah/sertifikat. Berdasarkan pengujian pada dokumen kepemilikan tanah berupa sertifikat/bukti kepemilikan lainnya ditemukan adanya kurang saji kuantitas tanah seluas 6.089 m² pada 4 bidang tanah, yaitu:

NO	Nama Satker	Nama Barang	NUP	Jenis Dokumen	Kepemilikan	Luas SAKTI (M ²)	Luas sertifikat (M ²)	selisih	Status penggunaan
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN	Tanah Bangunan Rumah	3	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q	350	378	-28	Rumah dinas

NO	Nama Satker	Nama Barang	NUP	Jenis Dokumen	Kepemilikan	Luas SAKTI (M ²)	Luas sertifikat (M ²)	selisih	Status penggunaan
	HAM LAMPUNG	Negara Golongan I			Kementerian/ Lembaga				
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	4	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	394	542	-148	Rumah dinas Kadiv Imigrasi
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan I	5	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	200	213	-13	Rumah dinas digunakan oleh Kasubbid KI
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Kementerian/ Lembaga	50.000	55.900	-5.900	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung
JUMLAH						50.944	57.033	-6.089	

Bahwa selain 4 bidang tanah tersebut, terdapat 1 bidang tanah dalam proses sertifikasi yang berpotensi kurang saji kuantitas yaitu pada desa/kelurahan Way Huwi, Kecamatan Jati Sari, Kab. Lampung Selatan karena adanya perbedaan luasan antara hasil ukur Badan Pertanahan Nasional dan berita acara hibah tanah oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Kanwil Kemenkumham Lampung sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Lampung untuk melakukan koreksi hibah tanah tersebut.

- b. Berdasarkan pengujian pada dokumen kepemilikan tanah berupa sertifikat/bukti kepemilikan lainnya ditemukan adanya lebih saji saji kuantitas tanah seluas 8.027 m² pada 4 bidang tanah, yaitu:

NO	Nama Satker	Nama Barang	NUP	Jenis Dokumen	Kepemilikan	Luas SAKTI (M ²)	Luas sertifikat (M ²)	selisih	Status penggunaan
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	3	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	6.670	5.817	853	ex. Balai sidang
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	4	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/ Lembaga	2.620	2.600	20	ex. Balai sidang

NO	Nama Satker	Nama Barang	NUP	Jenis Dokumen	Kepemilikan	Luas SAKTI (M ²)	Luas sertifikat (M ²)	selisih	Status penggunaan
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	5	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/Lembaga	5.100	3.946	1.154	ex. Balai sidang
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	9	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q Kementerian/Lembaga	10.000	4.000	6.000	ex. Balai sidang
JUMLAH						24.390	16.363	8.027	

Bahwa masih terdapat 1 bidang tanah dalam proses sertifikasi yang berpotensi lebih saji yaitu tanah yang digunakan untuk gedung bangunan Kanwil Kemenkumham Lampung berdasarkan hasil ukur Badan Pertanahan Nasional karena sebagian tanah telah digunakan untuk fasilitas umum berupa jalan.

Berdasarkan konfirmasi kepada operator BMN pada Sub Bagian Keuangan dan BMN, perbedaan pencatatan luas tanah pada laporan aset BMN dan dokumen sertifikat dapat ditimbulkan karena pencatatan awal belum berdasarkan dokumen sertifikat/hasil ukur yang dikeluarkan oleh BPN. Serta terdapat potensi adanya penggunaan lahan oleh pihak lain sehingga saat dilakukan proses sertifikasi terdapat luas yang berkurang akibat tidak tercapainya persetujuan pengukuran batas tanah.

- c. Proses pengamanan aset tetap berupa tanah belum dilakukan secara optimal.

Kuasa Pengguna Barang memiliki kewajiban untuk melakukan pengamanan BMN secara aspek administratif yaitu penatausahaan dokumen kepemilikan yang andal, pembukuan, inventarisasi dan pelaporan, aspek hukum yaitu BMN terjaga/terlindungi dari potensi masalah hukum seperti sengketa, gugatan, atau beralih kepemilikan kepada pihak lain secara tidak sah, serta aspek fisik yaitu untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi barang, penurunan jumlah barang, dan hilangnya barang.

Berdasarkan pemeriksaan terhadap dokumen bukti kepemilikan tanah terdapat 1 bidang tanah yang tidak terdapat bukti kepemilikan, 2 bidang tanah yang belum bersertifikat dan 11 bidang tanah Bersertifikat Belum Sesuai Ketentuan (BBSK), yaitu:

NO	Nama Satker	Nama Barang	NUP	Jenis Dokumen	Kepemilikan	Luas SAKTI (M ²)	Luas sertifikat (M ²)	Status penggunaan
1	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7	Tidak Bersertifikat	Bukti Kepemilikan Lainnya (Naskah pemberian Hibah pemprov lampung)	75.000	-proses koreksi hibah karena hasil pengukuran lebih besar dari yang BA hibah	4 satker ; Lapas Kelas IIA Narkotika, Rutan Kelas I Bandar Lampung, Lapas Perempuan

NO	Nama Satker	Nama Barang	NUP	Jenis Dokumen	Kepemilikan	Luas SAKTI (M ²)	Luas sertifikat (M ²)	Status penggunaan
							-potensi kurang saji	Kelas IIA Bandar Lampung, Rupbasan Kelas II Bandar Lampung (sedang dalam proses sertipikasi)
2	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	8	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Kementerian/ Lembaga	50.000	55.900	Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung
3	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Kementerian/ Lembaga	21.800	21.800	Lapas Kelas IIB Kota Agung
4	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	12	Hibah	Bukti kepemilikan lainnya (Naskah pemberian Hibah pemkab pesisir barat)	3.189	hibah 2022 belum proses sertifikat	akan digunakan untuk unit kerja keimigrasian (UKK)
5	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	1	Tidak Bersertifikat	Bukti Kepemilikan Lainnya	2.450	tidak terdapat bukti kepemilikan dan telah dilakukan penelusuran	
6	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	2	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Kementerian/ Lembaga	1.200	1.200	ex. Balai sidang
7	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	6	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Kementerian/ Lembaga	4.345	4.345	ex. Balai sidang (tanah kosong)
8	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	8	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Kementerian/ Lembaga	7.300	7.300	ex. Balai sidang
9	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	10	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Kementerian/ Lembaga	6.950	6.950	ex. Balai sidang

NO	Nama Satker	Nama Barang	NUP	Jenis Dokumen	Kepemilikan	Luas SAKTI (M ²)	Luas sertifikat (M ²)	Status penggunaan
10	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	11	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Pihak Ketiga	1.375	1.375	ex. Balai sidang (Proses BBSK)
11	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	12	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Kementerian/ Lembaga	3.490	3.490	ex. Balai sidang
12	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	13	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Kementerian/ Lembaga	4.150	4.150	ex. Balai sidang
13	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	16	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Kementerian/ Lembaga	6.280	6.280	ex. Balai sidang (tanah kosong)
14	KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	17	Sertifikat	Bersertifikat atas nama Kementerian/ Lembaga	4.965	4.965	ex. Balai sidang (tanah kosong)

Kanwil Kemenkumham Lampung belum secara optimal melakukan pengamanan secara fisik atas aset tanah. Terdapat beberapa aset tanah yang belum dilakukan pengamanan permanen berupa pemagaran sesuai batas-batas tanah. Terdapat aset tanah digunakan oleh pihak lain tidak sebagaimana mestinya seperti tempat pembuangan sampah sehingga berpotensi menurunkan fungsi tanah. Belum terdapat monitoring fisik secara berkala atas aset tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Kanwil Kemenkumham Lampung. Hal tersebut dapat menimbulkan risiko-risiko berkurangnya aset tanah secara kuantitas dan fungsi. Sebagai contoh telah terdapat berkurangnya aset tanah yang dihibahkan oleh Mahkamah Agung seluas tercatat 10.000 m² pada berita acara hibah yang berlokasi di Desa Kuripan Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, saat dilakukan sertifikasi di tahun 2014 hanya tercatat 4.000 m² pada SHP. diindikasikan terdapat okupansi pihak lain sehingga pada saat pengukuran luasan tanah untuk proses sertifikasi berkurang secara signifikan. Selain itu, sebagian tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Kanwil Kemenkumham Lampung belum dilakukan optimalisasi pemanfaatan selama beberapa tahun terakhir (*idle*) dan belum terdapat rencana pemanfaatan yang jelas.

Berdasarkan konfirmasi kepada operator BMN pada Sub Bagian Keuangan dan BMN, menyampaikan bahwa 1 bidang tanah yang tidak ditemukan bukti kepemilikannya telah dilakukan penelusuran dan pengusulan proses penghapusan. Terhadap 2 bidang tanah yang belum bersertifikat sedang dalam proses pengajuan/penerbitan sertifikat oleh BPN. Terhadap tanah dengan status BBSK dan pengamanan fisik terhadap BMN tanah terkendala jarak yang jauh, utamanya tanah eks. Balai Sidang, serta keterbatasan ketersediaan anggaran monitoring aset tanah tersebut.

Terjadinya permasalahan tersebut antara lain disebabkan:

- a. Kuasa Pengguna Barang Kanwil Kemenkumham Lampung belum secara optimal melakukan penatausahaan, pengamanan, pengawasan dan pengendalian atas BMN berupa tanah secara optimal.
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN telah melakukan koordinasi BPN, KPKNL dan pihak-pihak terkait percepatan penertiban sertifikat tanah milik Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung, namun proses pelaksanaan di lapangan membutuhkan waktu yang lama.
- c. Operator BMN baru mengetahui adanya selisih Lebih Catat dan Kurang Catat Aset Tanah pada Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung sehingga baru dilakukan rekapitulasi atas permasalahan tersebut.

Direkomendasikan kepada Kepala Kanwil Kemenkumham Lampung selaku Kuasa Pengguna Barang agar segera melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Memerintahkan Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN segera menyusun rencana aksi terkait percepatan penertiban sertifikat tanah milik Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung khusus pada 1 (satu) bidang tanah yang tidak terdapat bukti kepemilikan, 2 (dua) bidang tanah yang belum bersertifikat dan 11 (sebelas) bidang tanah Bersertifikat Belum Sesuai Ketentuan (BBSK).
- b. Memerintahkan Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN segera melakukan monitoring atas kondisi dan fungsi tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Lampung serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini Pemerintah Daerah setempat, Badan Pertanahan Nasional setempat dan Biro Pengelolaan BMN Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM terkait upaya pengawasan, pengendalian dan pengamanan BMN.
- c. Memerintahkan Kepala Sub Bagian Keuangan dan BMN segera melakukan koordinasi dengan KPKNL Kota Bandar Lampung terkait koreksi catat atas potensi lebih saji dan kurang saji Aset Tetap berupa Tanah pada neraca laporan keuangan Kanwil Kemenkumham Lampung untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2022.

Ketidaktertiban tersebut, setelah dilakukan perbaikan disampaikan kepada kami selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat ini.

Demikian untuk menjadi periksa.



Inspektur Jenderal,



Dianututangi secara elektronik oleh :

RAZILU

NIP. 196511281991031002

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
2. Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Sekretaris Jenderal.



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240419715964
Tanggal Billing : 19-04-2024 13:49:06
Tanggal Kedaluwarsa : 26-04-2024 13:49:06
Tanggal Bayar : 19-04-2024 14:24:55
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar : *Mobile Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Fajar Romidon
Kementerian/Lembaga : **013** - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I : **10** - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja : **408829** - KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG
Total Disetor : 1.209.140 (IDR)
Terbilang : *Satu Juta Dua Ratus Sembilan Ribu Seratus Empat Puluh (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **240419648203**
NTPN : **74ADE0NA04DDHURS**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 1.209.140 (IDR)
Keterangan : Temuan Itjen an Alpius TA 2022



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240503443197
Tanggal Billing : 03-05-2024 14:03:50
Tanggal Kedaluwarsa : 10-05-2024 14:03:50
Tanggal Bayar : 03-05-2024 14:09:08
Bank/Pos/*Fintech* Bayar : BANK RAKYAT INDONESIA
Channel Bayar : *Mobile Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Fajar Romidon
Kementerian/Lembaga : **013** - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I : **10** - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja : **408829** - KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG
Total Disetor : 2.180.120 (IDR)
Terbilang : *Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Seratus Dua Puluh (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **240503180724**
NTPN : **2B26A55DF9BRE3NT**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Kode Akun : 425912 - Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu
Jumlah Setoran : 2.180.120 (IDR)
Keterangan : Pengembalian kelebihan transport perjadi



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**
Jl. Mayjen Sutoyo No. 10 Cililitan, Jakarta Timur 13640
Telp. 021-8091908, Faks. 021-8002265/8011753
Website: www.bphn.go.id

Nomor : PHN.5-HN.04.03-68 27 Maret 2024
Lampiran : -
Perihal : Pemeriksaan Terhadap Dokumen Pencairan Anggaran Bantuan Hukum
Tahun Anggaran 2023

**Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM
Provinsi Papua Barat
di Tempat**

Berdasarkan hasil pemantauan program prioritas nasional kegiatan layanan bantuan hukum pada Badan Pembinaan Hukum Nasional TA. 2023 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM sesuai surat Nomor ITJ-PW.03.04-30 tanggal 8 Maret 2024. Hasil pemantauan tersebut dari Aspek Implementasi terdapat catatan adanya dugaan duplikasi pencairan anggaran bantuan hukum atas permohonan pencairan yang disampaikan oleh organisasi Pemberi Bantuan Hukum di wilayah Provinsi Papua Barat. Adapun dokumen pencairan yang diduga terdapat duplikasi yaitu an. GILBER LORENZA PUTRA JEWAHAN yang dimohonkan oleh 2 (dua) PBH yang berbeda dengan status diterima proses pencairan anggarannya.

Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi hasil pemantauan Inspektorat Jenderal, kami harapkan dengan hormat Panitia Pengawas Daerah Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat melakukan penelusuran terhadap dugaan duplikasi pencairan anggaran bantuan hukum tersebut dan menyampaikan hasilnya kepada Badan Pembinaan Hukum Nasional paling lambat tanggal 05 April 2024.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Sofyan
NIP. 19641024 198503 1 002

Tembusan Yth. :

1. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional;
4. Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua Barat.



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH PAPUA BARAT

Jl. Brigjen Marinir (Purn) Abraham O. Atururi Arfai Manokwari – Papua Barat
Website: papua-barat.kemenkumham.go.id e-mail: bankumpabar@gmail.com

04 April 2024

Nomor : W.31 – HN.04.03-45
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Perihal : Hasil Penelusuran Dugaan Duplikasi Anggaran
Pencairan Bantuan Hukum

Yth. Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN.5-HN.04.03- 68 tanggal 27 Maret 2024 Perihal Pemeriksaan Terhadap Dokumen Pencairan Anggaran Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2023, bersama ini dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil penelusuran dugaan duplikasi pencairan anggaran bantuan hukum atas nama GILBER LORENZA PUTRA JEWAHAN yang dilakukan oleh Panitia Pengawas Daerah Pelaksanaan Bantuan Hukum Provinsi Papua Barat pada aplikasi SID Bankum ditemukan duplikasi pengajuan permohonan bantuan hukum tahap penyidikan yang dilakukan oleh OBH Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum Adin) Sorong dengan data sebagai berikut :
 - a. Pengajuan Bantuan Hukum Tahap Penyidikan pada tanggal 12 Mei 2023 dengan nomor permohonan 00039.92.01.PID.BPHN.2023 atas nama GILBER LORENZA PUTRA JEWAHAN
 - b. Pengajuan Bantuan Hukum Tahap Penyidikan pada tanggal 1 Agustus 2023 00118.92.01.PID.BPHN.2023 atas nama GILBER LORENZA PUTRA JEWAHAN
2. Bahwa atas permohonan bantuan hukum tersebut telah dilakukan verifikasi berkas hingga pencairan bantuan hukum oleh Tim Panwasda dan Tim Panwasda menemukan kesalahan verifikasi karena tidak memeriksa duplikasi nama penerima bantuan hukum.
3. Bahwa setelah dilakukan penelusuran dan ditemukan duplikasi pencairan bantuan hukum dengan nama yang sama dan tahapan yang sama, Tim Panwasda akan menindaklanjuti dengan Posbakum Adin Sorong untuk dilakukan mekanisme pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp. 2.000.000,- (belum dipotong pajak).

Demikian atas perhatiannya disampaikan terimakasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Piet Bukorsyom
NIP. 19651227 199610 1 001

Tembusan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
3. OBH Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (Posbakum Adin) Sorong.



BUKTI PEMBUATAN KODE BILLING

Data Pembayaran Tagihan

Kode Billing 702405210828623	Pembuat Billing Daud Imanuel Naa	NTPN N/A
Tanggal Billing 21-05-2024 09:19:30	Kementerian/ Lembaga 013 - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	NTB N/A
Tanggal Kadaluwarsa 28-05-2024 09:19:30	Unit Eselon I 10 - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	Tanggal Bayar N/A
Status Belum Dibayar	Satuan Kerja 667775 - KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM PAPUA BARAT	Bank/ Pos Bayar N/A

Keterangan

setoran pengembalian belanja berupa kelebihan bayar bankum advokasi Indonesia

Kanal Bayar

-

Data Pembayaran Tagihan

Wajib Bayar	Daerah	Akun	Jumlah Setoran
Daud Imanuel Naa NPWP 000265934955000	Kab/ Kota KOTA SORONG Periode MEI 2024	522131 01310BF.4841Q8C	1.960.000,00

Total Disetar

IDR 1.960.000,00

(Satu Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Keterangan Pembayaran Tagihan

1. Nama Treasuri Penerimaan Negara (NTPN) adalah dokumen sah bukti bahwa Anda telah melakukan pembayaran ke Kas Negara.
2. Pembayaran hanya dapat dilakukan sebelum kadaluwarsa. Jika masa kadaluwarsa telah tercapai, billing ini tidak berlaku, dan Anda diminta untuk melakukan pengisian data pembayaran kembali.
3. Pembayaran lunas jenjang kasentah dilakukan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
4. Pembayaran atau lunas dana pencairan dan bebungaran hari tua dilakukan paling lambat tanggal 3 (tiga) bulan berikutnya.
5. Pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran berjalan dilakukan menggunakan Billing Perbandaharan sedangkan pembayaran pengembalian belanja tahun anggaran yang lalu menggunakan Simpan.
6. Cara pembayaran dapat melalui berbagai macam kanal pembayaran seperti: kasateller bank, mesin ATM, internet banking, phone banking dan sms banking sesuai dengan fasilitas pembayaran yang disediakan oleh collecting agent.
7. Pastikan bahwa data dasar pembayaran dalam dokumen ini sesuai dengan data yang tertera terasurum ketika Anda akan melakukan pembayaran. Apabila terjadi ketidakcocokan data, bisa apakah kode billing yang Anda masukkan sudah sesuai.
8. Apabila Anda mengalami gangguan dalam melakukan transaksi pembayaran atau membutuhkan bantuan, hubungi call center Helpline di 14000 dan juga dapat melalui <https://tka.kemendku.go.id>.

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PNBP/CIUKAI

NOMOR TRANSAKSI : 6726092405220927051856
TANGGAL, WAKTU TRANSAKSI : 22/05/2024 9:33:33 AM
SUMBER DANA : CASH
PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CIUKAI
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
TANGGAL DAN JAM BAYAR : 22/05/2024 09:33:34
TANGGAL BUKU : 22/05/2024
KODE CABANG BANK : 008
NTE : 040524383131
NTRN : 8D28F7NAPADKJTFF
STAN : 383131
KODE BILLING : 702405210928623
NAMA WAJIB BAYAR : DAUD IMANJEL NAA
KEMENTERIAN / LEMBAGA : 013
UNIT ESELON 1 : 10
SATUAN KERJA : 667779
JUMLAH SETORAN : RP. 1,960,000.00
MATA UANG : IDR
TERBILANG : SATU JUTA SEMBILAN RATUS ENAM PULUH RIBU RUPIAH
KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDA

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	1960000.00	IDR

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
KCP Sorong Klasaman

JUMLAH TAGIHAN : 1,960,000.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 1,960,000.00

Venesia L. Marandof
Teller

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
16079 1607903 46 18 22/05/2024 9:33:33 AM 7114
CASH 50012 PAJAK/PNBP/CIUKAI IDR 1,960,000.00 DR
50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CIUKAI IDR 1,960,000.00 CR
BILL REF 6726092405220927051856
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFFF 702405210928623 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK



BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL



LAMPIRAN LAINNYA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA DKI
JAKARTA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV
JALAN PRAJURIT KKO USMAN DAN HARUN NOMOR 10, SENEN, JAKARTA PUSAT 10410; TELEPON : (021) 3448363;
3440910 FAKSMILE (021) 3448363, SUREL : kpknljakarta4@kemenkeu.go.id, LAMAN: http://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-
jakarta4

NOTA DINAS
NOMOR ND-561/KNL.0704/2024

Yth. : Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara DKI Jakarta
Dari : Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Jakarta IV
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Salinan Risalah Lelang nomor 178/07.04/2024-01 tanggal 6 Mei 2024
Tanggal : 8 Mei 2024

Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 516/KN/2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara nomor 145/KN/2013 tentang Standar Prosedur Operasi (Standar Operating Procedures) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, bersama ini kami sampaikan Salinan Risalah Lelang sebagai berikut:

No	Uraian	Banyaknya	Keterangan
1	Salinan Risalah Lelang nomor 178/07.04/2024-01 tanggal 6 Mei 2024	1 (satu) set	Dikirim dengan hormat sebagai bahan laporan.

KPKNL Jakarta IV peraih predikat ZI WBK 2019, siap menuju WBBM untuk mewujudkan birokrasi yang bersih, kapabel, akuntabel dan meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik
Rofiq Manshur

Tembusan:

1. Kepala Subbagian Umum
2. Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI



Lembar Pertama
Pejabat Lelang

Ttd.

Aska Winarta Putra., S.H
NIP 19950203 201801 1 004

SALINAN
RISALAH LELANG
Nomor 178/07.04/2024-01

-----Pada hari ini Senin tanggal enam bulan Mei tahun dua ribu dua puluh empat (06-05-2024), dimulai pukul sebelas (11:00) Waktu Server aplikasi lelang melalui internet sesuai Waktu Indonesia Barat oleh saya: -----

----- Aska Winarta Putra., Sarjana Hukum, NIP 19950203 201801 1 004 -----
Pejabat Lelang Kelas I yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 77/KM.6/2020 tanggal 29 April 2020, berkedudukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta IV berdasarkan Surat Tugas Nomor ST-580/KNL.0704/2024 tanggal 26 April 2024 dilaksanakan Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara bertempat di Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Jalan Mayjen Sutoyo No 10 Cililitan-Jakarta Timur 13640. -----

-----Pelaksanaan lelang ini dilakukan atas permintaan I Gusti Putu Milawati, NIP 197705092001122001, Sekretaris Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo No 10 Cililitan-Jakarta Timur 13640, sesuai Surat Permohonan Lelang Nomor PHN.1-PB.05.01-05 tanggal 06 Maret 2024, yang telah ditetapkan jadwal lelangnya sesuai Surat Penetapan Lelang Nomor S-785/KNL.0704/2024 tanggal 26 April 2024 guna melaksanakan Surat Keputusan Nomor S-56/MK.6/KNL.0704/2024 tanggal 27 Maret 2024 hal Persetujuan Permohonan Penjualan Barang Milik Negara Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----

-----Dalam pelaksanaan lelang ini Saudara: -----
Anang Ardian Reza berdasarkan Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penjualan Lelang/Surat Penunjukkan Pejabat Penjual Nomor PHN-01.PB.05.05 Tahun 2023 tanggal 2 Januari 2023 // PHN.1-PB.05.01-06 tanggal 6 Maret 2024 melaksanakan penjualan lelang dengan perantara KPKNL Jakarta IV. -----

-----Barang bergerak yang dilelang berupa: -----
1 (satu) paket Eks Kendaraan Dinas Kondisi Rusak Berat Yaitu : -----
1. Mobil Mitsubishi FE 349 Tahun 2004 Nomor Polisi B 7196 MQ, Nomor Rangka MHMFE349E4R068291 Nomor Mesin 4D34478314 -----
2. Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2006 Nomor Polisi B 2640 SQ, Nomor Rangka MHFXW42GX62065549 dan nomor Mesin ITR6242788 -----
Nilai Limit : Rp100.424.000,00 (seratus juta empat ratus dua puluh empat ribu rupiah)
Barang bergerak tersebut saat ini berada di Kantor Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jalan Mayjen Sutoyo No 10 Cililitan Jakarta Timur. -----
dilelang apa adanya. -----

-----Pelelangan ini telah diumumkan oleh Penjual melalui Selebaran/Tempelan tanggal 30 April 2024, -----

-----Hasil bersih lelang ini disetorkan kepada Kas Negara. -----

-----Penjualan lelang ini dilakukan menurut Undang-Undang Lelang (Vendu Reglement, Ordonantie 28 Februari 1908 Staatsblad 1908:189 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Staatsblad 1941:3) jls. Peraturan Menteri Keuangan dan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara terkait Lelang. -----

-----Barang tersebut.../Lembar Kedua

Ttd.

Aska Winarta Putra., S.H
NIP 19950203 201801 1 004

-----Barang tersebut akan ditawarkan dan disahkan penjualannya oleh saya Pejabat Lelang, berdasarkan Nilai Limit dari Penjual. -----

-----Peserta lelang dapat mengajukan penawaran dalam lelang ini setelah menunjukkan identitas diri dan menyetorkan uang jaminan penawaran lelang/menyerahkan garansi bank jaminan penawaran lelang, sesuai Pengumuman Lelang, dengan ketentuan: -----

1. Dalam hal Jaminan Penawaran Lelang berupa uang, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. uang jaminan dari peserta lelang yang disahkan sebagai Pembeli akan diperhitungkan dengan pelunasan kewajiban pembayaran lelang; -----

---b. uang jaminan dari peserta lelang yang tidak disahkan sebagai Pembeli akan dikembalikan seluruhnya tanpa potongan apapun, di luar mekanisme perbankan; -----

---c. uang jaminan akan disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

2. Dalam hal Jaminan penawaran lelang berupa garansi bank, berlaku ketentuan sebagai berikut: -----

---a. garansi bank dikembalikan kepada peserta lelang yang tidak disahkan sebagai pembeli; -----

---b. garansi bank dikembalikan kepada Pembeli setelah yang bersangkutan melunasi kewajiban pembayaran lelang; -----

---c. hasil klaim garansi bank disetorkan ke Kas Negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Keuangan, jika Pembeli tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan. -----

-----Penawaran lelang dilakukan secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet cara terbuka (open bidding) pada aplikasi lelang melalui internet. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan kehadiran peserta secara lisan, maka: -----

1. Penawaran harga dilakukan secara naik-naik/turun untuk mencapai harga tertinggi. -----

2. Besaran kelipatan ditentukan oleh Pejabat Lelang. -----

-----Dalam Hal penawaran lelang dilakukan dengan dan/atau tanpa kehadiran peserta secara tertulis dengan menggunakan formulir surat penawaran, maka: -----

1. Surat Penawaran harus ditulis dalam bahasa Indonesia dengan angka Arab dan huruf latin dan bermeterai cukup serta ditandatangani oleh penawar. -----

2. Surat penawaran diserahkan kepada Pejabat Lelang dalam amplop tertutup, dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia, atau dikirim melalui pos tercatat kepada alamat tromol pos yang telah ditentukan. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam surat penawaran mengikat bagi peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----

- Dalam Hal penawaran lelang dilakukan tanpa kehadiran melalui internet, maka: --

1. penawaran lelang dilakukan secara tertutup atau terbuka dengan menggunakan aplikasi lelang melalui internet. -----

2. Peserta lelang yang mengajukan penawaran, telah menyetujui Syarat dan Ketentuan Pelaksanaan Lelang Dengan Penawaran Melalui internet yang tercantum dalam aplikasi lelang melalui internet. -----

3. Ketentuan dan syarat yang ditetapkan dalam penawaran lelang mengikat bagi

Ttd.

Aska Winarta Putra., S.H
NIP 19950203 201801 1 004

peserta lelang yang mengajukan penawaran. -----
-----Dalam hal lelang secara inklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang sudah termasuk Bea Lelang. Dalam hal lelang secara eksklusif, harga penawaran yang diajukan oleh peserta lelang belum termasuk Bea Lelang. -----
-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi secara lisan semakin meningkat, menurun, atau tertulis dengan nilai yang sama dan mencapai atau melampaui Nilai Limit, Pejabat Lelang berhak menentukan Pemenang Lelang dengan cara: -----
1. melakukan penawaran lanjutan hanya terhadap peserta lelang yang mengajukan penawaran sama, yang dilakukan secara lisan (naik-naik) atau tertulis berdasarkan persetujuan peserta lelang bersangkutan; atau. -----
2. apabila ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak dapat dilaksanakan, melakukan penetapan salah satu di antara peserta lelang yang mengajukan penawaran sama dengan melakukan pengundian. -----
-----Dalam hal terdapat beberapa peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dengan nilai yang sama melalui internet, melalui email, dan/atau melalui tromol pos, Pejabat Lelang mengesahkan Peserta Lelang yang penawarannya diterima lebih dulu sebagai Pembeli -----
-----Dalam hal dilakukan penawaran secara bersamaan, dan terdapat penawaran tertinggi dengan nilai yang sama antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran melalui internet cara tertutup (closed bidding), melalui email, dan/atau melalui tromol pos dengan Peserta Lelang yang mengajukan penawaran secara tertulis dengan kehadiran, Pejabat Lelang berhak mengesahkan Pembeli dengan cara melakukan pengundian di antara Peserta Lelang yang mengajukan penawaran tertinggi yang sama tersebut. -----
-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara tertutup (closed bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi setelah lelang dimulai dan aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka penawaran tertinggi yang masuk ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang. -----
-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang tanpa kehadiran melalui internet cara terbuka (open bidding) berlaku ketentuan sebagai berikut: -----
1. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai yang mengakibatkan aplikasi lelang melalui internet tidak dapat beroperasi hingga berakhir jam kerja pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dibatalkan oleh Pejabat Lelang. -----
2. Apabila gangguan teknis terjadi sebelum lelang dimulai namun aplikasi lelang melalui internet beroperasi kembali sebelum jam kerja berakhir pada hari pelaksanaan lelang, maka lelang dimulai oleh Pejabat Lelang dengan jangka waktu penawaran paling kurang 2 (dua) jam. -----
-----Dalam hal terjadi gangguan teknis dalam pelaksanaan lelang yang dilakukan secara bersamaan antara lelang dengan kehadiran peserta dan lelang tanpa kehadiran peserta yang menyebabkan lelang tanpa kehadiran peserta tidak dapat dilakukan, lelang dengan kehadiran peserta tetap sah dan mengikat. -----
-----Peserta lelang yang mengajukan penawaran tertinggi dan telah mencapai atau

Ttd.

Aska Winarta Putra., S.H
NIP 19950203 201801 1 004

melampaui Nilai Limit yang ditetapkan oleh Penjual, disahkan sebagai Pembeli oleh saya Pejabat Lelang pada saat pelaksanaan lelang hari ini juga. -----
-----Bea Lelang dalam pelaksanaan lelang ini dipungut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Keuangan. -----
-----Dalam hal pelaksanaan lelang dengan kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
-----Dalam hal pelaksanaan lelang tanpa kehadiran peserta lelang, peserta lelang atau kuasanya yang sah "tidak perlu hadir" pada waktu pelaksanaan lelang. -----
-----Pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli dilakukan secara tunai paling lama 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang. -----
-----Pembayaran dengan cek/giro hanya dapat diterima dan dianggap sah sebagai pelunasan kewajiban pembayaran lelang oleh Pembeli, jika cek/giro tersebut dikeluarkan oleh bank anggota kliring, dananya mencukupi dan dapat diuangkan. ----
-----Peserta lelang yang telah disahkan sebagai Pembeli bertanggung jawab sepenuhnya dalam pelunasan kewajiban pembayaran lelang dan biaya-biaya resmi lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada lelang ini walaupun dalam penawarannya itu ia bertindak selaku kuasa dari seseorang, perusahaan atau badan hukum. -----
-----Dengan mengajukan penawaran pada lelang ini, peserta lelang wajib mematuhi dan menundukkan diri pada syarat dan ketentuan lelang sebagaimana tertuang dalam risalah lelang ini, syarat dan ketentuan lelang yang ditempel pada papan pengumuman, syarat dan ketentuan pada pengumuman lelang, syarat dan ketentuan lelang yang ditayangkan pada aplikasi lelang melalui internet, dan syarat dan ketentuan yang tercantum pada formulir penawaran. -----
-----Pembeli yang tidak melunasi kewajiban pembayaran lelang sesuai ketentuan (Pembeli Wanprestasi), maka pada hari kerja berikutnya pengesahannya sebagai Pembeli dibatalkan secara tertulis oleh Pejabat Lelang, tanpa mengindahkan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan dapat dituntut ganti rugi oleh Penjual. -----
-----Pembeli tidak diperkenankan mengambil/menguasai Barang yang dibelinya sebelum memenuhi kewajiban pembayaran lelang. Apabila Pembeli melanggar ketentuan ini maka dianggap telah melakukan suatu tindak kejahatan yang dapat dituntut oleh penegak hukum. -----
-----Barang yang telah terjual pada lelang ini menjadi hak dan tanggungan Pembeli dan harus dengan segera mengurus Barang tersebut. -----
-----Biaya balik nama barang, tunggakan pajak berikut denda-dendanya serta biaya lainnya sesuai ketentuan, menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pembeli. -----
-----Pembeli akan diberikan kutipan risalah lelang untuk kepentingan balik nama setelah menunjukkan kuitansi pelunasan pembayaran lelang. Apabila yang dilelang berupa tanah dan/atau bangunan harus disertai dengan menunjukkan asli Surat Setoran BPHTB. -----
-----Jika Pembeli tidak mendapatkan izin dari instansi pemberi izin untuk membeli barang yang dilelang sehingga jual beli ini menjadi batal, maka ia dengan ini oleh Penjual diberi kuasa penuh yang tidak dapat ditarik kembali dengan hak untuk memindahkan kuasa itu untuk mengalihkan barang itu kepada pihak lain atas nama Penjual dengan dibebaskan dari pertanggungjawaban sebagai kuasa dan jika ada menerima uang ganti kerugian yang menjadi hak sepenuhnya dari Pembeli. Adapun

Ttd.

Aska Winarta Putra., S.H
NIP 19950203 201801 1 004

uang pembelian yang sudah diberikan kepada Penjual tersebut diatas tidak dapat ditarik kembali oleh Pembeli. -----

-----Pejabat Lelang Kelas I/KPKNL tidak menanggung kebenaran keterangan-keterangan yang diberikan secara lisan pada waktu penjualan tentang keadaan sesungguhnya dan keadaan hukum atas barang yang dilelang tersebut, seperti luasnya, batas-batasnya, perjanjian sewa-menyewa sepenuhnya menjadi risiko Pembeli. -----

-----Penawar/Pembeli dianggap sungguh-sungguh telah mengetahui apa yang telah ditawarkan olehnya. Apabila terdapat kekurangan/kerusakan baik yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, maka Penawar/Pembeli tidak berhak untuk menolak atau menarik diri kembali setelah pembelian disahkan dan melepaskan segala hak untuk meminta kerugian atas sesuatu apapun juga. -----

-----Untuk segala hal yang berhubungan dengan atau diakibatkan oleh pembelian dalam lelang ini, para Pembeli dianggap telah memilih tempat kedudukan umum yang tetap dan tidak dapat diubah pada KPKNL Jakarta IV. -----

-----Khusus untuk pembelian dalam lelang ini sepanjang tidak ditentukan dalam Risalah Lelang ini, maka Penawar/Pembeli tunduk pada hukum perdata dan hukum dagang yang berlaku di Indonesia. -----

-----Segala perselisihan yang timbul pada saat pelaksanaan lelang ini diselesaikan dan diputuskan pada hari ini juga oleh saya Pejabat Lelang. -----

-----Semua dokumen yang disebutkan dalam Risalah Lelang ini dilampirkan dan dijilid/dijahit dalam minuta risalah lelang ini. -----

-----Setelah apa yang diuraikan di atas ini ditayangkan, maka penjualan lelang ini dimulai. -----

- Banyaknya penawaran lelang yang masuk dan sah dalam pelaksanaan lelang ini berjumlah tiga penawaran, dan tercapai penawaran tertinggi. Oleh karena penawaran tertinggi untuk barang tersebut telah mencapai/melampaui Nilai Limit dan disetujui Penjual, maka penawar tertinggi disahkan sebagai Pembeli pada pelaksanaan lelang ini. -----

- Uraian barang, harga penawaran, dan nama serta alamat penawar tertinggi yang ditunjuk sebagai pembeli diuraikan berikut ini: -----

Barang yang laku/terjual: -----

1 (satu) paket Eks Kendaraan Dinas Kondisi Rusak Berat Yaitu : -----

1.Mobil Mitsubishi FE 349 Tahun 2004 Nomor Polisi B 7196 MQ, Nomor Rangka MHMFE349E4R068291 Nomor Mesin 4D34478314 -----

2.Mobil Toyota Kijang Inova Tahun 2006 Nomor Polisi B 2640 SQ, Nomor Rangka MHFXW42GX62065549 dan nomor Mesin ITR6242788 -----

Harga Lelang ----- : Rp115.487.000,00 (seratus lima belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) -----

Pembeli ----- : Zaenal Arifin, NIK 3175052506850009, Karyawan Swasta,
----- beralamat di Jalan Gandaria RT/RW 001/002
----- Kelurahan/Desa Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Jakarta
----- Timur Provinsi DKI Jakarta -----

Lembar terakhir dari Risalah Lelang Nomor : 178/07.04/2024-01 tanggal 6 Mei 2024

Banyaknya barang yang dilelang: 1 (satu) -----
Banyaknya barang yang laku/terjual: 1 (satu) -----
Jumlah harga barang yang laku/terjual: Rp115.487.000,00 (seratus lima belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah) -----
Jumlah harga barang yang tidak laku: Rp0,00 (nol rupiah) -----
Jumlah harga barang yang ditahan: -----
Banyaknya lampiran sebelum Risalah Lelang ditutup: 17 (tujuh belas) -----
Dibuat dengan tidak ada coretan, tidak ada tambahan, tidak ada perubahan. -----

Penjual

Pejabat Lelang

Ttd

Ttd.

Anang Ardian Riza

Aska Winarta Putra., S.H
NIP 19950203 201801 1 004

Diberikan: SALINAN sesuai dengan aslinya
Tanggal: 8 Mei 2024
Kepala KPKNL Jakarta IV


Rofiq Manshur
NIP 19750725 199903 1 001





BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240508931583
Tanggal Billing : 08-05-2024 07:35:58
Tanggal Kedaluwarsa : 15-05-2024 07:35:58
Tanggal Bayar : 08-05-2024 19:05:15
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : *Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta IV
Kementerian/Lembaga : **013** - KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
Unit Eselon I : **10** - Badan Pembinaan Hukum Nasional
Satuan Kerja : **409288** - BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
Total Disetor : 115.487.000 (IDR)
Terbilang : *Seratus Lima Belas Juta Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **000000486776**
NTPN : **BC71D2G4VPKREJFV**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Kode Akun : 425122 - Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin
Jumlah Setoran : 115.487.000 (IDR)
Keterangan : RL-178/07.04/2024-01 Tgl 06 Mei 2024 BPHN



BUKTI PENERIMAAN NEGARA

Data Pembayaran Tagihan :

Kode Billing : 820240508932380
Tanggal Billing : 08-05-2024 07:34:24
Tanggal Kedaluwarsa : 15-05-2024 07:34:24
Tanggal Bayar : 08-05-2024 19:05:15
Bank/Pos/Fintech Bayar : BANK NEGARA INDONESIA
Channel Bayar : *Internet Banking*
Nama Wajib Setor/Wajib Bayar : Bendahara Penerimaan KPKNL Jakarta IV
Kementerian/Lembaga : **015** - KEMENTERIAN KEUANGAN
Unit Eselon I : **09** - Ditjen Kekayaan Negara
Satuan Kerja : **537937** - KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA IV
Total Disetor : 2.309.740 (IDR)
Terbilang : *Dua Juta Tiga Ratus Sembilan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh (IDR)*
Status : Sudah Dibayar
NTB : **000000486833**
NTPN : **D88ED48VVEPK8K8S**

Detail Pembayaran Tagihan :

Jenis Setoran : IV. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA - B.Bea Lelang Pembeli - 3.Lelang Noneksekusi Wajib Barang Milik Negara/Daerah - b.Barang Bergerak
Kode Akun : 425782 - Pendapatan Bea Lelang Pejabat Lelang Kelas I
Jumlah Setoran : 2.309.740 (IDR)
Keterangan : RL-178/07.04/2024-01 Tgl 06 Mei 2024 BPHN

Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan Tingkat Eselon 1

**KERTAS KERJA TELAHA LAPORAN KEUANGAN
TINGKAT UNIT AKUNTANSI PEMBANTU PENGGUNA ANGGARAN ESELON I (UAPPA-E1)
SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2024**

Kode dan Nama Eselon 1 : (10) BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

Kode dan Nama K/L : (013) KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

Objek Penelaahan		Kondisi LK		Seharusnya
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan. Jika tidak ada data, isi dengan N/A</i>				
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>				
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN				
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Pernyataan Tanggung Jawab	✓		Ada
2	Face LRA, Neraca, LO dan LPE	✓		Ada
3	Catatan atas Laporan Keuangan	✓		Ada
Laporan Keuangan Tambahan		Ada	Tidak	Seharusnya
1	Neraca Percobaan Akrua Saldo Awal	✓		Ada
2	Neraca Percobaan Akrua	✓		Ada
3	Neraca Percobaan Kas	✓		Ada
4	Laporan Realisasi Pendapatan dan Belanja per Akun	✓		Ada
KESESUAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN SAKTI/MONSAKTI				
Kesesuaian Saldo		Sama	Tidak	Seharusnya
1.	Semua face laporan (LRA, LO, LPE dan Neraca) sama dengan cetakan laporan pada SAKTI/MONSAKTI	✓		Sama
<i>Laporan Keuangan disusun menggunakan SAKTI/MONSAKTI sehingga harus sama, apabila ada yang tidak sama, uraikan dalam Lampiran Telaah dan penyebabnya.</i>				
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI				
Persamaan Dasar Akuntansi		Sama	Tidak	Seharusnya
1	Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" di LO = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	✓		Sama
2	Apakah Saldo "Ekuitas Akhir" di LPE = "Saldo Ekuitas" di Neraca	✓		Sama
3	Neraca : Aset = Kewajiban + Ekuitas	✓		Sama
PENGECEKAN PADA MONSAKTI				
To Do List		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Pagu Minus per tgl pelaporan		✓	Tidak
2	Satker sudah melakukan Normalisasi dan Tindak Lanjut Normalisasi (dalam hal masih terdapat anomali)	N/A		Ya
3	Terdapat Persediaan Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
4	Terdapat TK Internal Belum TM Internal Persediaan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
5	Terdapat Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Persediaan per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
6	Terdapat Aset Belum Diditilkan per tanggal pelaporan		✓	Tidak
7	Transaksi Reklas Keluar Aset tapi Belum Reklas Masuk per tanggal pelaporan		✓	Tidak
8	Terdapat transaksi Transfer Keluar Internal Belum Transfer Masuk (TM) Internal Aset per tanggal pelaporan		✓	Tidak
9	Ketidaksesuaian Akun Vs Kode Barang Aset Tetap/ATB per tanggal pelaporan (Jika ada, sebutkan akun dan alasan ketidaksesuaian di catatan telaah)		✓	Tidak
10	Terdapat Pendapatan Belum di Settle Piutang per tanggal pelaporan dan Belum dilakukan Penyisihan Piutang		✓	Tidak
11	Terdapat Aset Belum Validasi Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
12	Terdapat Persediaan Belum Approve per tanggal pelaporan		✓	Tidak
<i>Dalam hal satker telah menindaklanjuti To do List, agar menjelaskan di catatan telaah</i>				

		Ada	Tidak	Seharusnya
	Rekon SAKTI-SPAN (Mengikuti ketentuan kebijakan Rekonsiliasi)			
1	Adakah "TDK RUPIAH" yang BEDA?		√	Tidak
2	Adakah "TDK COA" yang BEDA?		√	Tidak
3	Adakah "TDK DETAIL" yang BEDA?		√	Tidak
	a. Pagu/DIPA		√	Tidak
	b. Estimasi PNBPN		√	Tidak
	c. Belanja		√	Tidak
	d. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	e. Pendapatan		√	Tidak
	f. Pengembangan Belanja		√	Tidak
	g. Kas BLU		√	Tidak
	h. Kas di Bendahara Pengeluaran		√	Tidak
	i. Kas Hibah		√	Tidak
	j. Pengesahan Hibah Langsung		√	Tidak
	Rekon Internal	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Selisih Rekon Internal		√	Tidak
	Daftar MONSAKTI	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah "Saldo Tidak Normal"? (Jika ada, sebutkan akun dan alasan penyebab saldo tidak normal di catatan telaah)		√	Ada/Tidak
2	Adakah akun "Belum Diregister"? (Untuk LK Tahunan tidak boleh ada akun 'belum diregister)		√	Ada/Tidak
3	Adakah Neraca Tidak Balance?		√	Tidak
4	Adakah Pagu Minus (Basis SP2D)		√	Tidak
5	Adakah Pengembalian Belanja Melebihi Realisasi?		√	Tidak
6	Adakah Setoran Pajak Non DJP dan DJBC? (selain DJP dan DJBC seharusnya tidak ada)		√	Tidak
PENGECEKAN NERACA PERCOBAAN KAS DAN AKRUAL				
	Pengecekan Saldo Neraca Percobaan	Ada	Tidak	Seharusnya
1.	Terdapat akun dengan uraian "null" pada Neraca Percobaan Akruwal		√	Tidak
2	Terdapat akun dengan uraian "uraian tidak ada" pada Neraca Percobaan Kas		√	Tidak
3	Terdapat Saldo bernilai desimal		√	Tidak
	Pengecekan Posisi Saldo (Debet atau Kredit)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Seluruh Akun 1XXXXX bersaldo (D) (kec. Penyisihan dan Akumulasi)	√		Ya
2	Akun Penyisihan Piutang (116xxx) dan Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)	√		Ya
3	Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
4	Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
5	Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)	√		Ya
6	Akun Belanja/Beban (5xxxx) bersaldo (D) (kecuali Beban Penyisihan Piutang yang bisa bersaldo (K) pada kasus tertentu)	√		Ya
7	Seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)	√		Ya
	Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat Akun "Yang Belum Register" (untuk LK tahunan tidak boleh ada)		√	Ada/Tidak
2	Terdapat Akun 1111xx hingga 1115xx. (Kas Setara Kas yang boleh ada di KL hanya Akun dari 1116xx hingga 1119xx, selainnya akun BUN)		√	Tidak
3	Terdapat Akun 114113/4/6/7 Belanja Pembayaran Bunga/Lain-lain/Hibah/Subsidi dibayar dimuka (prepaid)		√	Tidak
4	Terdapat Akun 114214/5/6/8 Uang Muka Belanja Bunga/Subsidi/ Hibah/Lain-lain		√	Tidak
5	Terdapat Akun "Persediaan untuk Tujuan strategis/berjaga-jaga"		√	Tidak
6	Terdapat Akun 212114/6/9 Belanja Hibah/Utang/Lain-lain Yang Masih Harus Dibayar		√	Tidak
7	Terdapat Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)		√	Tidak
8	Terdapat akun 41XXXX / 43XXXX (Pendapatan Perpajakan/ Hibah)		√	Tidak
9	Terdapat akun 421xxx/422xxx/423xxx dan 425xxx KHUSUS BUN		√	Tidak

10	Terdapat akun 425xxx Khusus BUN (425143/144/161/162/719/745/772/773/774/815/816/998)		√	Tidak
11	Terdapat akun 425914/5/6/8/9 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran Kewajiban Utang/Subsidi/Hibah/ Lain-Lain/Transfer TAYL)		√	Tidak
12	Terdapat akun Belanja 54/55/56/58 (Beban Bunga/Subsidi/Hibah/Lain-Lain)		√	Tidak
13	Terdapat akun-akun yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs. (misalnya persediaan Amunisi yang ada di satker yang tidak terkait tusi pengamanan, Pita Cukai, Materai dan Leges yang ada di K/L selain Kementerian Keuangan (DJP dan/atau DJBC)		√	Tidak
	Jika Bukan Satker BLU	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat akun Neraca (1xxxxx dan 2xxxxx) dengan uraian frasa "BLU"		√	Tidak
2	Terdapat akun 424XXX (Pendapatan BLU)		√	Tidak
3	Terdapat akun 525xxx (Belanja Barang BLU)		√	Tidak
4	Terdapat akun 537xxx (Belanja Modal BLU)		√	Tidak
	Terkait Satker BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Adakah akun "Kas dan Bank BLU Belum Disahkan" (untuk LK tahunan tidak boleh ada) Dalam hal masih terdapat akun tersebut, agar menjelaskan di catatan telaah		N/A	Ada/Tidak
2	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)		N/A	Tidak
	Pengecekan akun yang tidak sesuai karakteristik tupoksi entitas	Ada	Tidak	Seharusnya
1	Adakah terdapat akun yang tidak sesuai Tusi? misalnya ada persediaan/realisasi belanja dalam rangka bantuan pemerintah/Bantuan Sosial pada KL yang tidak memiliki Tusi Penyaluran Bantuan Pemerintah/Bantuan Sosial		√	Tidak
2	Terdapat akun 391121-Ekuitas Transaksi Lainnya Kecuali Di RRI dan POLRI		N/A	Tidak
	Hibah Langsung	Ada	Tidak	Seharusnya
	Adakah transaksi Penerimaan Hibah Langsung uang/ barang/jasa? Jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya		N/A	Ada/Tidak
1	Adakah akun 218211 (hibah Langsung Yang Belum Disahkan), akun 218211 hanya boleh muncul di laporan interim (karena masih dalam proses pengesahan). Akun tersebut tidak boleh muncul pada laporan keuangan tahunan.		N/A	Ada/Tidak
2	Adakah saldo 218211-Hibah langsung yang belum disahkan pada awal tahun? (Cek di Neraca Percobaan saldo awal)		N/A	Ada/Tidak
3	Apabila terdapat Saldo Awal Akun 218211, Apakah Nilainya sama dengan Akun 391133-Pengesahan Hibah Langsung TAYL pada tahun sebelumnya? (untuk mengecek akun 391133, Cetak di Neraca Percobaan Tahunan TAYL)	N/A		Ya
4	Jika saldo awal akun 218211 tidak sama saldo akun 391133 di akhir tahun, apakah terdapat Hibah TAYL yang belum disahkan?	N/A		Ya
5	Jika ada akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan), apakah nilainya lebih kecil atau maksimal sama dengan akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan) ?	N/A		Ya
	Ada Hibah Langsung pada BLU, jika ada agar dilanjutkan ke pertanyaan berikutnya	N/A		Ada/Tidak
1	Pengesahan Pendapatan Hibah (424xxx) jika Hibah Uang		N/A	Ya
	Transfer Masuk/Transfer Keluar dan Resiprokal			
1	Nilai absolut selisih Transfer Keluar dan Transfer Masuk pada Monitoring TK/TM pada MONSAKTI	0		Tidak Terdapat Selisih
2	Nilai selisih TK/TM (Akun TK dikurang TM di Neraca Percobaan)	Rp. 218.070.600		
3	Apakah terdapat selisih transaksi resiprokal pada MONSAKTI? (cek pada MONSAKTI pada menu Monitoring Lainnya, Rekap Resiprokal)	√		Tidak
	Akun 425913 (Pengembalian Belanja Modal TAYL)	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat Akun 425913 pada Neraca Percobaan Kas?		√	Ya/Tidak
2	Jika Ada, apakah telah dilakukan Koreksi pencatatan nilai Aset sebesar Pengembalian Belanja Modal TAYL di modul Aset Tetap?		N/A	Ya/Tidak
3	Jika nilai aset telah dikoreksi pada Modul Aset Tetap periode berjalan, adakah jurnal manual pada GLP untuk menghapus 425913 di NP Akrual?		N/A	Ya

Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)		N/A	Ya/Tidak
2	Jika ada, apakah benar? (Bukan karena salah pilih menu dalam aplikasi atau salah kode akun saat menjurnal?)		N/A	Ya/Tidak
	Jika ada, konfirmasi kebenarannya, Jelaskan dalam Calk			
Akun 491511-Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan dan 593311 Beban Penyesuaian Nilai Persediaan		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat saldo akun 491511/593311? Jika ada, maka agar dijelaskan di CaLK terkait koreksi persediaan, serta dicantumkan dalam catatan telaah		N/A	Ya/Tidak
PENGECEKAN NERACA				
Pengecekan Pos-pos Neraca		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Saldo Awal 1 Jan 20XX di MonSAKTI telah sesuai dengan saldo Audited tahun sebelumnya	√		Ya
2	Saldo pada neraca bernilai wajar	√		Ya
3	Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN	√		Ya
4	Kas Di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara) *Cek LPJ, Rekening	√		Ya
5	Kas dan Bank BLU = BAR Rekon = LPJ (Modul Bendahara). Apabila berbeda, maka pastikan perbedaannya sebesar saldo kas dan Bank BLU belum disahkan atau Deposito	√		Ya
6	Dari kolom perbandingan, adakah Kenaikan/ Penurunan nilai per pos Neraca yang tidak wajar?		√	Tidak
7	Bandingkan dengan saldo audited tahun sebelumnya, apakah asetnya mengalami peningkatan?	√		Ya
8	Terdapat saldo bernilai desimal		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN OPERASIONAL				
Pengecekan Pos-pos LO		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat pendapatan perpajakan (kecuali K/L 015)		√	Tidak
2	Terdapat pendapatan hibah (43xxxx), beban pembayaran kewajiban utang (54xxxx), beban subsidi (55xxxx), beban hibah (56xxxx), dan beban transfer ke daerah dan dana desa (6xxxxx) , atau akun-akun lainnya yang merupakan akun BUN		√	Tidak
3	Terdapat kodefikasi atau uraian akun null		√	Tidak
4	Seluruh akun bernilai positif kecuali beban penyisihan piutang	√		Ya
5	Bandingkan dengan Laporan operasional periode sebelumnya, apakah terdapat peningkatan/penurunan saldo yang signifikan?		√	Ya/Tidak
6	Surplus/defisit LO menampilkan saldo yang wajar	√		Ya/Tidak
7	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
PENGECEKAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS				
Pengecekan Pos-pos LPE		Ya	Tidak	Seharusnya
1	"Ekuitas Awal" + "Kenaikan/Penurunan Ekuitas" = "Ekuitas Akhir"	√		Ya
2	Terdapat kenaikan/penurunan saldo yang signifikan dibandingkan dengan periode sebelumnya		√	Ya/Tidak
3	Terdapat akun "Selisih Revaluasi Aset", Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP		√	Tidak
4	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
Cek seluruh akun koreksi dan Transaksi Antar Entitas		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun koreksi dimaksud?	N/A		Ya
	Contoh : Pengungkapan 391116 senilai Rp151.500.000 disebabkan oleh transaksi saldo awal senilai Rp100.000.000, transaksi Koreksi Nilai/Kuantitas senilai Rp51.500.000 dengan dokumen sumber BAST			
2	Apakah terdapat pengungkapan yang memadai atas akun-akun pembentuk transaksi antar entitas dimaksud? (313111, 313121, 313211, 313221, 391131, 391132, 391133, 391141)	N/A		Ya
PENGECEKAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA dan PENDAPATAN (LRA/B/P)				
Pengecekan Pos-pos LRA/B/P		Ya	Tidak	Seharusnya
1	Terdapat saldo negatif di LRAB		√	Tidak
2	Terdapat pagu minus (Realisasi melebihi pagu)		√	Tidak
3	Terdapat Pengembalian Belanja melebihi Pagu dan Realisasi Belanjanya		√	Tidak

4	Terdapat uraian Jenis Belanja "Tidak Ada"		√	Tidak
5	Apakah terdapat saldo bernilai desimal?		√	Tidak
6	Apakah terdapat pengeluaran belanja untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)		√	Ya/Tidak
7	Apabila terdapat pengeluaran belanja dalam rangka Penanganan Pandemi Covid-19, apakah belanja tersebut sudah menggunakan kode akun khusus untuk Penanganan Pandemi Covid-19? (Mengikuti ketentuan mengenai penanganan pandemi)	N/A		Ya
TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN				
	Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya jika jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "TIDAK"	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/ Penyisihan TP/TGR (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyisihan Piutang (di LO)	√		Ya/Tidak
	- Dokumen Lengkap penetapan dan penatausahaan piutang	√		Ya/Tidak
2	Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada akun :		N/A	Ya/Tidak
	- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang		N/A	Ya/Tidak
3	Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Beban Persediaan (di LO)	√		Ya/Tidak
4	Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun :	√		Ya/Tidak
	- Akumulasi AT/AL (Neraca)	√		Ya/Tidak
	- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)	√		Ya/Tidak
5	Apakah terdapat Akun 42512X pada Neraca Percobaan Kas dan Akrua?	√		Ya/Tidak
	Jika Ada, apakah nilai totalnya sama dengan "Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar" di LO?	√		Ya
	Pengecekan Beban Diserahkan Ke Masyarakat & Beban Bansos	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah ada Beban Barang Diserahkan ke Masyarakat ?	N/A		Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 526XXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
2	Apakah ada Beban Bansos ?	N/A		Ya/Tidak
	Jika Ya, ada realisasi akun 57XXXX pada Neraca Percobaan Kas			Ya
	Pengecekan Jurnal Manual Akrua pada Modul GLP (Jika Ada, Karwas dan/atau Memo Harus	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Ada akun Pendapatan Diterima Dimuka (219212) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
2	Ada Realisasi Pendapatan Sewa di Neraca Percobaan Kas (425131/2/3 atau 42492X)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Pendapatan Sewa Diterima Dimuka (219211) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
3	Ada Akun Belanja Dibayar Dimuka (11411X) pada Neraca Percobaan Akrua		√	Ya/Tidak
4	Ada realisasi Belanja jasa listrik/air/telepon di Neraca Percobaan Kas (522111/2/3/9)	√		Ya/Tidak
	- Maka Ada akun Belanja Barang Yang Masih Harus Dibayar pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
5	Ada akun Belanja Yang Masih Harus Dibayar (2121XX) pada Neraca Percobaan Akrua	√		Ya/Tidak
TELAAH LK BLU				
	LPSAL BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah nilai LPSAL sudah sesuai?	N/A		Ya
2	Apakah nilai pendapatan alokasi APBN bernilai minus?	N/A		Tidak
3	Apakah formula perhitungan SAL pada LPSAL telah sesuai?	N/A		Ya
4	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?	N/A		Ya
5	Apakah Nilai SiLPA/SiKPA pada LPSAL = Nilai Surplus/(defisit) pada LRA	N/A		Ya
6	Apakah Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir = Jumlah saldo akun 1119XX selain 111914, 1133XX, dan akun 166213 pada Neraca Percobaan Kas BLU ?	N/A		Ya
	LAK BLU	Ya	Tidak	Seharusnya
1	Apakah Saldo Awal Kas LAK = Jumlah saldo akun 1119xx, 111826, 1133xx, 165111, dan 166213 pada Saldo Awal Neraca Percobaan Akrua BLU?	N/A		Ya
2	Apakah Saldo Akhir Kas LAK = Jumlah Rincian Saldo Akhir Kas LAK?	N/A		Ya
3	Apakah Saldo Akhir Kas pada BLU = Kas pada BLU di Neraca	N/A		Ya
4	Saldo Akhir Kas Lainnya dan Setara Kas = Saldo Kas Lainnya di BLU (111826) pada Neraca Percobaan BLU	N/A		Ya
5	Investasi Jangka Pendek BLU = Investasi Jangka Pendek BLU pada Neraca	N/A		Ya
6	Saldo Akhir Dana Kelolaan BLU = Dana Kelolaan BLU pada Neraca	N/A		Ya
7	Saldo Akhir Kas pada BLU (yang belum disahkan) = Saldo akun 111914 pada Neraca Percobaan BLU	N/A		Ya

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang **TIDAK SEHARUSNYA**, serta hal-hal lainnya yang diperlukan, termasuk perbedaan dengan MONSAKT!"

wilengetahui

Pejabat Penyusun LKKL,



(Ira Yustisia Smarayoni)

NIP 19780313 200312 2 001

Jakarta, 15 Juli 2024

Penelaah,



(Rizky Awaliyah)

NIP 19830228 200901 2 004